

ISSN 2338 - 5162 (Cetak)  
ISSN 2527 - 8444 (Online)

# ARIST

VOLUME 06 / Halaman 01- 201 / No 01 Januari 2018



Peran Manajerial dan Teknisi Humas Lembaga Pemerintah dan Swasta (1-17)

Rachmat Kriyantono

Model Manajemen kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Tepung Tapioka (18-44)

Salahudin, Wahyudi,  
Ilhayul Ulum,  
Yudi Kurniawan

Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas (45-67)

Yusuf Adam Hilman,  
Elok Putri Nimasari

Personal Branding D\_Kadoor untuk Menaikkan Popularitas melalui Instagram (68-80)

Amanah Rakhim Syahida,  
Fathul Qorib

Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015 (81-98)

Jusuf Harsono

Praktik "PR Excellmt" Humas Pemerintah Daerah (99-124)

Imon Dwi Budi Ajianto,  
Rachmat Kriyantono,  
Maulana Pia Wulandari

Analisis Efektifitas Pola Rekrutmen Kader Ranting Muhammadiyah Di Ponorogo (125-144)

Robby Darwis Nasution

Perlindungan Sosiasl Bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku) (145-163)

Nancy Rahakbauw,  
David Marthen Salakory

Keunggulan Kompetitif Kelompok Pedagang Sektor Informal Pendatang (164-175)

Slamet Santoso

Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu Pemerintahan Di Indonesia (176-201)

T. Fahrul Gafar,  
Zamhasari Jamil

Plagiarism



Preference Tools



Citation by



Diterbitkan Oleh :  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Sosial Politik Humaniora  
ISSN (Cetak) : 2338 - 5162 / ISSN (Online) : 2527 - 8444  
<http://www.journal.umpo.ac.id/index.php/aristo> / [aristo@umpo.ac.id](mailto:aristo@umpo.ac.id)

### **Editor In Chief**

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

### **Editorial Board**

Rebbeka Risma, S.IKOM,  
Audra Jovani, S.Sos, MPS  
Hayat Abdullah, S.AP, M.Si  
Robby Darwis Nasution, S.IP, MA  
Ayub Dwi Anggoro, S.IKOM, M.Si  
Winda Hardiyanti, S.Sos, M.Si  
Ahmad Harakan, S.IP, M.A

### **Section Editor**

Rohfin Indriya Gestanti, S.Pd, M.Pd

### **Peer – Reviewer’s**

Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si  
Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si  
DR. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol Admin  
Dr.Habib Ahmad, S.Sos, M.A  
Drs. Jusuf Harsono, M.Si  
Andri Putra Kesmawan, S.IP, MIP  
Dr. Adde Oriza Rio, M.IKom  
Ari Ganjar Hardiansah, S.IP, M.Pol  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H, M.H  
Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si  
Cahyo Seftyono, S.Sos, M.A  
Nurudin AB, S.Sos, M.Si  
Rachmat Kriyantono, Ph.D  
Alamsyah, S.AP, M.AP  
Decky Kuncoro, M.IP

### **Published By**

Social and Politic Department  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

### **Editorial Address**

Jl. Budi Utomo No.10 Siman Ponorogo Indonesia  
Email: [aristo@umpo.ac.id](mailto:aristo@umpo.ac.id)  
Website: <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/index>



## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

#### Kata Pengantar

<b>Peran Manajerial dan Teknisi Humas Lembaga Pemerintah dan Swasta</b> Rahmat Kriyantono	-1
<b>Model Manajemen kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Tepung Tapioka</b> Salahudin, Wahyudi, Ihyaul Ulum, Yudi Kurniawan	-18
<b>Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas</b> Yusuf Adam Hilman, Elok Putri Nimasari	-45
<b>Personal Branding D_Kadoor untuk Menaikkan Pupolaritas melalui Instagram</b> Amanah Rakhim Syahida, Fathul Qorib	-68
<b>Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015</b> Jusuf Harsono	-81
<b>Praktik “PR Excelent” Humas Pemerintah Daerah</b> Imon Dwi Budi Ajiyanto, Rachmat Kriyantono, Maulina Pia Wulandari	-99
<b>Analisis Efektifitas Pola Rekrutmen Kader Ranting Muhammadiyah Di Ponorogo</b> Robby Darwis Nasution	-124
<b>Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas (Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku)</b> Nancy Rahakbauw & David Marthen Salakory	-145
<b>Keunggulan Kompetitif Kelompok Pedagang Sektor Informal Pendetang</b> Slamet Santoso	-164
<b><i>Inquisitorial</i>: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu Pemerintahan Di Indonesia</b> Teuku Fahrul Gafar, Zamhasari	-176



## **Kata Pengantar**

### **Assalamualaikum Warohmatullohiwabarokatuh**

Puji Syukur Kehadirat ALLAH Subhanawata'ala, yang telah memberikan hidayah serta kelapangan hati, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan berbagai produk ilmu pengetahuan, yang dapat mencerahkan serta mampu berkontribusi pada perbaikan kondisi masyarakat. Karya ilmiah berupa Jurnal merupakan salah satu bagian penting dari praktik Tridharma perguruan tinggi yang memberikan kesempatan bagi para akademisi, pemerhati, dan juga praktisi untuk mengaplikasikan keilmuannya, sehingga bisa disebarluaskan melalui sarana tersebut. Perkembangan jurnal ilmiah saat ini telah sampai kepada titik dimana pengelolaannya dilakukan secara, open journal system (ojs), yakni memadukan praktik penulisan ilmiah dengan sentuhan teknologi, sehingga karya – karya ilmiah bisa di akses dalam satu waktu dari berbagai belahan penjuru negeri.

Jurnal ARISTO (Sosial, Politik, Humaniora), merupakan salah satu terbitan jurnal, yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, untuk memfasilitasi karya – karya terbaik di bidang keilmuan Sosial, Politik, dan Humaniora, aktifitas tersebut dilakukan secara *Full Open Journal System* (OJS) dengan proses yang panjang dan melibatkan reviewer dari berbagai institusi dan juga disiplin keilmuan dengan format dan ketentuan baku.

Besar harapan kami supaya Jurnal ARISTO kedepannya mampu mewadahi karya - karya terbaik, dari berbagai institusi yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini diharapkan supaya ada tukar menukar informasi dan juga ilmu pengetahuan supaya kegiatan ilmiah bisa terus membawa kemaslahatan bersama.

**Editor In Chief**

**Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si**

## Peran Manajerial dan Teknisi Humas Lembaga Pemerintah dan Swasta

Rachmat Kriyantono

Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya Malang

Rachmat\_kr@ub.ac.id

### Abstract

The research aims to describe the implementation level of managerial and technician roles of public relations practitioners from government and private institutions in Indonesia. The hypothesis is public relations from private institutions often more apply the managerial roles while the practitioners from government public relations tend to apply technical communication than managerial roles of communication. The researcher uses positivistic paradigm by applying survey method with questionnaires which are filled by 105 respondents. The instrument are from Five-Factor Dimension Model that specifically measures the level of managerial and technician roles of communication. The research finds that there is no significant differentiation between public relations practitioners from government and private institutions regarding the dimensions of managerial and technician roles. Both practitioners frequently apply technician roles rather than managerial roles, however, the government public relations more frequently conduct managerial roles than practitioners from private institutions. The research contributes to the development of public relations study and practice in Indonesia by testing the managerial and technical roles conducting by public relations practitioners through using Five-factor Model.

**Keyword: Communication, Five-factor Model, Managerial, Public Relations, Technician Role**

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan level penerapan peran manajerial dan teknisi komunikasi pada praktisi Hubungan Masyarakat (Humas) lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia. Hipotesis penelitian yang diuji adalah Humas swasta lebih sering menjalankan peran manajerial daripada peran teknis komunikasi sedangkan Humas pemerintah lebih sering menjalankan peran teknis komunikasi daripada peran manajerial komunikasi. Peneliti menggunakan paradigma positivistic dengan metode survey dengan kuesioner yang diisi 105 responden. Instrumen yang digunakan berasal dari *Five-Factor Dimension Model* yang khusus mengukur level peran manajerial dan teknisi komunikasi dalam organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara praktik Humas pemerintah dan swasta terkait dengan dimensi peran manajerial dan teknisi komunikasi. Kedua jenis Humas sama-sama lebih sering menerapkan peran teknis komunikasi daripada peran manajerial komunikasi, namun Humas pemerintah lebih sering melakukan peran manajerial daripada Humas swasta. Penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan kajian dan praktik kehumasan di Indonesia, yakni pengujian peran manajerial dan teknisi yang dilakukan praktisi kehumas dengan menggunakan *Five-Factor Dimension Model*.

**Keyword: Five-factor Dimension Model, Hubungan Masyarakat, Komunikasi, Manajerial, Technician Role**

<i>Submit</i>	: 10 Agustus 2017
<i>Review</i>	: 25 Oktober 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Januari 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: <a href="mailto:winda86@gmail.com">winda86@gmail.com</a>

## Pendahuluan

Hubungan Masyarakat (Humas/Public Relations) merupakan aktivitas komunikasi, karena menurut Grunig dan Hunt (1984, h. 6). “Humas adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya”. Menurut Culbertson, dkk (1993), “Humas adalah management by communication”. Komunikasi menjadi bagian dari Humas karena menurut Wilcox, Ault, dan Agee (2006) komunikasi adalah proses dan sarana yang digunakan untuk mencapai sasaran Humas misalnya melalui sambutan-sambutan, brosur, gambar tempel dan sejenisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa “komunikasi sebagai alat utama Humas memainkan peran sentral dalam proses saling keberhubungan antara organisasi, Humas, dan publiknya” (Kriyantono, 2014a, h.83).

“Peran diartikan sebagai aktifitas sehari-hari yang dilakukan praktisi Humas sesuai dengan kedudukannya” (Kriyantono, 2014a, h. 83). Beberapa literatur, seperti Cutlip, Center & Broom (2011); Kriyantono (2014a); Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S., & Toth, E(2010) mendeskripsikan peran Humas terbagi menjadi dua yaitu peran manajerial dan teknisi (craft). Peran manajerial, yakni 1) *Expert Prescriber* merupakan seorang ahli yang mampu mendefinisikan masalah, mengusulkan berbagai alternatif pemecah masalah, dan melaksanakan upaya pemecah masalahnya, 2) *Communication facilitator* merupakan seseorang yang menjadi mediator dan fasilitator yang menyediakan saluran untuk berkomunikasi secara dua arah yang timbal balik antara organisasi dan publiknya dan praktisi Humas bertindak sebagai penghubung antara organisasi dengan publiknya, 3) *Problem Solving Facilitator* merupakan seseorang yang mampu bertindak sebagai partner, mitra atau teman bagi manajemen senior dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang menimpa organisasi, 4) *Communication technician* merupakan hal-hal yang menyangkut pekerjaan teknis seperti menulis press release, membuat news letter, fotografi, membuat produksi audiovisual, menggelar event, dan mengembangkan isi website.

Ketiga peran (*Expert Prescriber*, *Communication facilitator*, *Problem Solving Facilitator*) merupakan peran manajerial karena pelakunya harus memiliki kemampuan berpikir strategis (*strategic thinking*) dalam melakukannya dan bukan semata berdasarkan keterampilan teknis komunikasi saja. Selanjutnya, *communication technician* masuk ke dalam kategori teknisi karena berbagai aktivitasnya hanya berdasarkan kemampuan teknis komunikasi, seperti membuat brosur, membuat press release, membuat kalender, membuat majalah, dan protokoler. Praktisi

yang melakukan kegiatan teknis komunikasi ini juga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di organisasinya (Cutlip, dkk, 2011; Kriyantono, 2014a; Lattimore, dkk, 2010).

Beberapa penelitian peran Humas juga berfokus pada keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh praktisi untuk berpindah dari jajaran Humas teknis untuk posisi manajemen. Setelah melakukan penelitian di AS, Inggris, dan Kanada, J. E. Grunig, L. Grunig, dan Dozier (2002) menemukan bahwa Humas yang ekselen adalah yang banyak melakukan peran manajerial daripada peran teknis. Peran-peran Humas di atas, menurut hasil riset Jayanti (2011) dimungkinkan dapat dilakukan oleh semua praktisi Humas. Kriyantono (2017) meneliti keekselenan aktivitas praktisi Humas lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia dengan menggunakan ukuran normatif kehumasan yang ekselen dari J. E. Grunig, dkk (2002). Penelitian ini menemukan bahwa Humas lembaga swasta lebih ekselen daripada lembaga pemerintah. Faktor yang membuat Humas swasta lebih ekselen, menurut Kriyantono (2017), antara lain karena komunikasi dua arah yang simetris dari Humas lembaga swasta lebih tinggi dan Humas swasta lebih dilibatkan dalam fungsi-fungsi manajerial daripada Humas lembaga pemerintah.

Selain ukuran normatif yang dikenalkan J.E. Grunig, dkk (2002), terdapat ukuran lain yang dapat digunakan mengevaluasi level penerapan peran manajerial dan teknis yang dilakukan praktisi Humas. Ukuran ini adalah Five-Factor Dimension Model yang dikembangkan oleh Moss, Newman & De Santo (baca Moss, Newman & De Santo, 2005; De Santo, Moss, & Newman, 2007). Jika model J.E. Grunig, dkk (2002) bertujuan mengukur level keekselenan aktivitas kehumasan secara keseluruhan, yakni meliputi struktur organisasi kehumasan, peran, arah komunikasi, etika kehumasan, penggunaan basis teoritis dalam aktivitas kehumasan, dan relasi dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, maka Five-Factor Dimension Model ini lebih spesifik mengevaluasi level peran manajerial dan teknis sebagai indikator sejauh mana praktisi Humas berperan sebagai bagian manajemen organisasi (DeSanto, dkk, 2007). Fokus pada peran manajerial sebagai bagian manajemen ini juga diperkuat pendapat Harold Burson (dalam Wilcox & Cameron, 2009) bahwa Humas berperan sebagai bagian manajemen yang terintegrasi secara tidak terpisah dalam struktur organisasi dan peran ini sangat penting karena berkontribusi menentukan keberhasilan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuan bersama.

Five-Factor Dimension Model ini pernah digunakan oleh Perthawa, Kriyantono, dan Wisadirana (2015) untuk mengevaluasi level peran manajerial praktisi kehumasan anggota

pengurus pusat perhimpunan Humas (perhumas) di Jakarta. Hasil penelitian ini adalah para praktisi mengakui telah melakukan peran manajerial dalam aktivitas kehumasan mereka. Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji apakah hasil penelitian terdahulu, yakni Grunig, dkk (2002) masih terbukti hasilnya jika dilakukan dalam konteks aktivitas kehumasan di Indonesia dengan menggunakan Five-Factor Dimension Model? Apakah hasil penelitian Kriyantono (2017) juga masih terbukti hasilnya dengan menggunakan model pengukuran berbeda? Apakah hasil penelitian Perthawa, dkk (2015) terhadap praktisi di Jakarta dengan menggunakan Five-Factor Dimension Model akan menghasilkan hasil yang sama jika objek penelitiannya diperluas wilayah lain?

Deskripsi tentang peran Humas ini makin penting karena Indonesia telah memasuki era reformasi politik sejak 1998 yang membuka demokratisasi dan kebebasan berbicara (Kriyantono, Ramadlan, & Setiawan, 2015; Siriyuvasak, 2005). Demokrasi, pada akhirnya, menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik yang memerlukan praktisi Hubungan Masyarakat (Humas/Public relations) untuk *handle*-nya (Kriyantono, 2014a; Kriyantono, dkk, 2015; Sriramesh & Vercic, 2009). Menarik diteliti apakah praktisi Humas lebih berperan manajerial atau teknis dalam mengelola strategi komunikasi di era demokrasi ini. Penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan kajian dan praktik kehumasan di Indonesia, yakni pengujian peran manajerial dan teknis yang dilakukan praktisi kehumasan dengan menggunakan Five-Factor Dimension Model. Penelitian ini juga penting dilakukan karena penelitian kehumasan dalam perspektif kelokalan Indonesia masih perlu ditingkatkan (Kriyantono & McKenna, 2017).

## Metode dan Kajian Pustaka

### *Five-factor Dimension Model*

Five-factor Dimension Model merupakan penggabungan antara dimensi teknis dan empat dimensi managerial yang berfokus pada aktivitas *key policy dan strategy advisor; monitor dan evaluator; troubleshooter/problemsolver; dan issues management expert* serta dimesiteknis. Model ini bertujuan mengetahui level pentingnya kedudukan dan peran praktisi Humas dalam organisasi dalam hubungan antara praktisi Humas dengan manajemen puncak dan manajemen lain sehingga mereka dapat berkolaborasi secara baik. (De Santo, dkk, 2007; Moss, dkk, 2005).

Model ini menyiapkan konsep peran dan mengklarifikasi dimensi spesifik dari aktivitas kerja Humas pada ranah bisnis (De Santo, dkk, 2007; Moss dkk, 2005). Menurut Moss, dkk

(2011, h. 107), model ini dapat membantu meningkatkan kualitas praktisi Humas, seperti kemampuan bekerja sama dengan manajemen senior untuk menyusun nilai-nilai organisasi, prinsip-prinsip operasional, kebijakan, dan strategi-strategi organisasi, membantu meningkatkan kemampuan manajemen isu, masalah, dan identifikasi peluang-peluang, meningkatkan kemampuan membantu organisasi mengejar tujuan mencapai keuntungan bisnis, dan kemampuan memahami kompleksitas komunikasi dengan departemen lain dalam organisasi. Untuk itu, kelima dimensi dalam five-factor dimension model, yakni (i) *key policy dan strategy advisor*; (ii) *monitor dan evaluator*; (iii) *trouble shooter* atau *problem solver*; (iv) *issues management expert*, dan (v) *communication technician*, digunakan oleh peneliti sebagai indikator untuk melihat sejauh mana level manajerial para praktisi Humas di Indonesia. Lima dimensi five-factor dimension model adalah sebagai berikut (De Santo, dkk, 2007; Moss & De Santo, 2011; Whitaker, 2014):

1. *Key policy and strategy advisor*. Praktisi Humas mempunyai hubungan yang baik dengan manajemen senior dan secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Monitor and evaluator*. Elemen ini menjelaskan bahwa tingkat tanggungjawab manajerial praktisi Humas adalah untuk melakukan organizing, controlling serta monitoring kerja di internal bagian Humas maupun eksternal di bagian-bagian lain dalam organisasi. Di internal humas, praktisi Humas bertanggungjawab untuk menetapkan target, anggaran dan pemantauan kinerja terhadap target tersebut. Mereka harus melakukan negosiasi dengan bagian lain, termasuk manajemen senior, untuk menetapkan target serta bernegosiasi tentang sumber daya dan agen komisi eksternal.
3. *Issues management expert*. Kemampuan praktisi Humas untuk mendiagnosis masalah dan mengantisipasi ancaman eksternal, baik isu besar ataupun kecil, dan harus memiliki kepekaan sebagai mata dan telinga eksternal organisasi.
4. *Trouble shooter/problem solver*. Peran praktisi dalam merespon ancaman dari internal maupun tantangan dari eksternal, ancaman dan krisis yang melanda organisasi, dan menciptakan pemahaman kepada anggota organisasi bahwa organisasinya tangguh.
5. *Communication technician*. Lebih berperan dalam aspek teknis komunikasi, seperti menulis untuk media dan newsletter, meng-handle event serta bekerjasama dengan media.

## Hubungan Masyarakat Lembaga Pemerintah dan Swasta di Era Demokrasi

Demokrasi dan teknologi komunikasi membuat publik mendapatkan akses informasi lebih mudah, lebih kritis, dan bebas menulis pendapat atau membuat berita di media sosial (Kriyantono, dkk, 2015), media bebas menulis informasi tanpa takut kepada pemerintah (Siryuvasak, 2005), dan informasi ini dikonsumsi para akademisi dan pelajar yang juga menjadi elemen penting mempromosikan demokratisasi di Indonesia (Kriyantono, dkk, 2015).

Demokrasi, pada akhirnya, menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik yang memerlukan praktisi Hubungan Masyarakat (Humas/Public relations) untuk *handle*-nya (Kriyantono, 2014a; Sriramesh & Vercic, 2009). Aktivitas komunikasi ini merupakan implikasi dari sifat demokrasi, yang menurut Taylor (2000), sebagai proses *nation-building* yang mensyaratkan jalinan relasi antara individu dan pemerintah, melalui kampanye komunikasi. Karena itu, bukan situasi yang mengherankan jika pertumbuhan praktik Humas di dunia semakin meningkat seiring berkembangnya demokratisasi dan teknologi (Sriramesh & Vercic, 2009).

Beberapa kajian ilmiah, seperti Hardjana (2000); Kriyantono (2015); Kriyantono dan McKenna (2017); Grunig, dkk (2002), semakin membuktikan pentingnya pengelolaan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan di organisasi. Organisasi yang berhasil selalu didukung oleh sistem komunikasi yang efektif dan Humas yang ekselen (Grunig, dkk, 2002). Karena itu, komunikasi adalah “*lifeblood of an organization*” (Bailey, 1974; Rogers, 1976, dikutip di Hardjana, 2000, h. x). Mengacu pada Broom & Sha, 2013, organisasi pemerintah sebagai lembaga publik memiliki tantangan yang sama dengan perusahaan swasta dan organisasi non-profit, seperti tantangan menjaga reputasi.

Karena itu, organisasi perlu melakukan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan fungsi kehumasan ini, yang menurut MacNamara (dikutip di Tymson, Lazar, & Lazar, 2004, h. 100), karena “akuntabilitas dan pengukuran merupakan prinsip-prinsip penting proses manajemen organisasi.” Evaluasi menjadi sarana menunjukkan bagaimana efektivitas Humas terhadap tujuan lembaga, bagaimana program Humas sesuai target, dan menjamin aktivitas Humas dapat lebih baik di masa berikutnya (Harrison, 2009). Karenanya, evaluasi selalu menjadi elemen dalam model proses Humas dari beberapa literatur, seperti Marston (1979) dengan model RACE (*Research, Action, Communication, Evaluation*); Hendrix (2000) dengan model ROPE (*Research, Objectives, Program, Evaluation*); Smith (2002) mengenalkan model FoSTE (*Formative Research, Strategy, Tactics, Evaluation Research*).

Namun demikian, dari penelitian Grunig (1989, h. 32-33; 38-39); Grunig dan White (1992, h.43-44), diketahui bahwa praktik Humas juga dipengaruhi budaya organisasi. Secara umum, Grunig (1989, h. 32-33; 38-39); Grunig dan White (1992, h.43-44) merumuskan budaya organisasi tertutup dan terbuka. Budaya tertutup lebih berorientasi internal, yaitu hanya memandang realitas dari kaca mata organisasi dan tidak memandang realitas dari kaca mata publik; Sistem tertutup, yaitu informasi tersebar dari organisasi dan tidak membuka diri pada informasi dari luar organisasi; Menganggap efisiensi dan kontrol atas segala biaya lebih penting daripada inovasi; Bersifat elitisme, yaitu pengambilan keputusan ditentukan hanya oleh pimpinan organisasi; Mempertahankan tradisi karena tradisi dianggap membantu organisasi mempertahankan stabilitas dan budaya yang sudah ada; Bersifat kewenangan terpusat, yakni hanya dimiliki manajer puncak dan tidak memberi otonomi kepada karyawan. Pada sisi lain, budaya terbuka bercirikan interdependensi, artinya organisasi merasa menjadi bagian tidak terpisah dengan lingkungannya; Sistem terbuka, yaitu organisasi bersedia bertukar informasi dan menjalin relasi dengan lingkungannya; Bergerak menuju ekuilibrium, yakni secara konstan bergerak menyesuaikan perubahan lingkungan; menghargai kesederajatan atau kesetaraan yang tinggi, yaitu anggota organisasi (pimpinan dan karyawan) berkesempatan yang sama dalam berkarya dan mendapat jenjang promosi yang jelas; Memberikan kebebasan untuk kepada anggota organisasi untuk kreatif dan inovatif dalam bekerja; Lebih mengedepankan inovasi daripada fokus pada tradisi dan kebiasaan; Desentralisasi manajemen, yaitu cenderung berbagi kewenangan. Cenderung pada koordinasi daripada mendikte.

Terkait hal itu, organisasi dinilai pemerintah memiliki perbedaan budaya dengan swasta, yakni organisasi pemerintah lebih bersifat tertutup (Ikhsan, 2015). Karenanya, Humas pemerintah masih kurang dalam penerapan komunikasi dua arah yang simetris dibanding Humas swasta (Kriyantono, 2017).

Berdasarkan literatur review di atas, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Humas swasta lebih sering menjalankan peran manajerial daripada peran teknis komunikasi sedangkan Humas pemerintah lebih sering menjalankan peran teknis komunikasi daripada peran manajerial komunikasi”.

Peneliti menggunakan paradigma positivistik untuk mendeskripsikan praktik Humas di Indonesia, yakni meyakini bahwa realitas hakikatnya konkrit, dapat dikategorikan, tidak berubah, dapat diukur, dan diverifikasi sehingga tipe deskriptif kuantitatif yang dipilih pun berusaha

menggambarkan suatu realitas sosial yang hasilnya dapat digeneralisasikan dan menuntut penelitian bersifat objektif dan memisahkan diri dari data (Kriyantono, 2014b; Neuman, 2006; Wimmer & Dominick, 2011). Karena bersifat deskriptif, maka penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yang tidak menjelaskan sebab-akibat dan alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi (Kriyantono, 2014b).

Populasi penelitian ini adalah para praktisi kehumasan di Indonesia, tetapi, karena keterbatasan akses mendapatkan responden yang memang berjumlah sangat banyak, maka penelitian ini menggunakan teknik sampling *convenience*, yaitu sampel yang didapatkan menurut kemudahan data yang dimiliki oleh populasi (Kriyantono, 2014b; Neuman, 2006; Wimmer & Dominick, 2011). Responden penelitian ini adalah anggota Perhumas Indonesia, yang memiliki bagian Humas, artinya Humas dilakukan secara metode bukan hanya secara teknik komunikasi, yakni ada bagian Humas terstruktur (Kriyantono, 2014c). Peneliti telah menghubungi sekretariat Perhumas Indonesia untuk membantu penyebaran kuisisioner. Dilakukan juga penyebaran kuisisioner melalui *email* praktisi dan mendatangi langsung praktisi di tempat kerja. Dari hasil pengumpulan responden dalam waktu sekitar 4 bulan, terdapat 105 responden yang bersedia menjadi responden dengan mengisi dan mengembalikan kuesioner. Dari jumlah itu, 48 praktisi Humas organisasi swasta dan 57 Humas pemerintah.

Instrumen penelitian dalam kuesioner disusun berdasarkan Five-Factor Dimension Model yang telah diadopsi oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti De Santo, dkk (2007); Moss & De Santo (2011); Perthawa, dkk (2015), dan Whitaker (2014), yakni:

Tabel 1. Instrumen Kuesioner

Variabel	Indikator	Deskripsi	Pernyataan dalam kuesioner
<i>Five-factor dimension model</i>	<i>Key Policy and strategy advisor</i>	Praktisi Humas memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen senior dalam organisasi mereka dan memiliki peran aktif dalam proses pembuatan kebijakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya memberikan masukan kepada pimpinan secara rutin tentang isu komunikasi/bisnis dan segala bentuk tantangannya.</li> <li>2. Saya berkontribusi secara rutin pada pembuatan kebijakan perusahaan/instansi.</li> <li>3. Saya memberikan masukan kepada pimpinan tentang cara menyampaikan sebuah kebijakan dengan baik.</li> <li>4. Saya memberikan saran kepada pimpinan tentang strategi pengambilan keputusan yang nantinya akan dilihat oleh media.</li> <li>5. Saya memberikan masukan kepada pimpinan untuk tiap isu penting yang berkaitan dengan stakeholder.</li> <li>6. Saya bekerjasama dengan manajemen dalam</li> </ol>

			<p>merumuskan strategi Humas.</p> <p>7. Saya terlibat langsung dalam keputusan perusahaan ditingkat manajemen</p> <p>8. Saya bertanggungjawab dalam penerapan strategi komunikasi perusahaan/instansi.</p> <p>9. Saya bekerjasama dengan pimpinan untuk memastikan pelaksanaan dari keputusan strategi Humas saya telah dipahami.</p> <p>10. Sebuah elemen penting dalam pekerjaan saya adalah melakukan perencanaan strategi Humas untuk stakeholder internal maupun eksternal.</p>
	<i>Monitor and evaluator</i>	Praktisi Humas memiliki tanggungjawab manajerial untuk melakukan <i>organizing, controlling, and monitoring.</i>	<p>11. Saya bekerjasama dengan pimpinan dalam menentukan target yang sesuai dengan fungsi Humas.</p> <p>12. Saya bertanggungjawab untuk menetapkan target fungsi Humas.</p> <p>13. Saya harus memastikan bahwa fungsi komunikasi Humas terlaksana sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan.</p> <p>14. Saya memiliki tanggungjawab atas pihak eksternal yang mengevaluasi strategi Humas/.</p> <p>15. Saya bertanggungjawab dalam memantau kinerja fungsi Humas sesuai dengan target yang diharapkan.</p> <p>16. Melakukan negosiasi dengan divisi lain dalam hal sumber daya dan beban kerja adalah salah satu pekerjaan saya.</p> <p>17. Saya bernegosiasi dengan manajemen senior untuk menetapkan target fungsi Humas.</p>
	<i>Issues management expert</i>	Berkaitan dengan peran Humas dalam mendiagnosa dan menanggapi ancaman eksternal dari masalah besar atau kecil.	<p>18. Saya dianggap sebagai pakar ketika perusahaan/instansi saya sedang menghadapi krisis.</p> <p>19. Bagian terpenting dalam pekerjaan saya adalah berhubungan dan bernegosiasi dengan pihak eksternal stakeholder.</p> <p>20. Saya bertanggungjawab dalam menghadapi kejadian tidak terduga di dalam maupun di luar yang dapat mengancam perusahaan / instansi.</p> <p>21. Saya bertanggungjawab mengelola program-program untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.</p> <p>22. Saya membantu perusahaan / instansi dalam mengelola masalah-masalah yang timbul karena stakeholder eksternal.</p> <p>23. Saya terus memantau perkembangan yang ada di luar yang mungkin akan memengaruhi perusahaan / instansi.</p> <p>24. Saya mengumpulkan dan menganalisis intelegen eksternal yang relevan dengan perusahaan/instansi.</p> <p>25. Saya memberikan saran kepada perusahaan/instansi dalam menanggapi setiap ancaman atau masalah utama.</p>
	<i>Troubleshooting/Problem-</i>	Berkaitan dengan reaksi praktisi Humas	<p>26. Saya sering menjadi “pemadam kebakaran” dalam menghadapi tantangan internal dan</p>

	<i>solver</i>	dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal seperti ancaman atau krisis yang dihadapi organisasi.	eksternal perusahaan / instansi. 27. Membantu untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh orang lain dalam perusahaan / instansi adalah salah satu tanggungjawab utama saya. 28. Bertukar informasi dengan orang lain dan mengontrol informasi tertentu, merupakan salah satu pekerjaan saya. 29. Pada saat rapat, saya akan menjelaskan kembali fungsi Humas, kebijakan tersebut mungkin akan memengaruhi fungsi Humas.
	<i>Communication Technician</i>	Berkaitan dengan kegiatan mengawasi, dan dalam banyak kasus implementasi, tugas teknis komunikasi termasuk relasi dengan media.	30. Pekerjaan saya selalu melibatkan diri dalam pengelolaan staf yang bekerja pada bagian saya, untuk memastikan agar para staf bekerja secara efektif. 31. Saya menyiapkan laporan rutin tentang operasional fungsi komunikasi untuk manajemen senior. 32. Pekerjaan saya yaitu berurusan dengan email dan surat menyurat. 33. Saya sering menangani aspek teknis dalam memproduksi materi komunikasi dan humas. 34. Saya mengawasi materi visual/desain untuk perusahaan/instansi.

### HasildanPembahasan

Dari penyebaran kuesioner, temuan penelitian ini tentang gambaran penerapan peran manajerial dan teknisi komunikasi pada praktisi Humas dan swasta disajikan di Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Peran manajerial dan teknis Humas di Indonesia

Dimensi	Mean Score	
	Humas Swasta	Humas Pemerintah
Key Policy dan Strategy Advisory	3.27	3.81
Monitor dan Evaluator	3.53	3.58
Issue Management Expert	3.41	3.47
Troubleshooting/Problem Solving	3.26	3.59
Communication Technician	3.93	3.71

Sumber: Kuesioner no 1-34

Tampak dari Tabel 2, berdasarkan pengakuan responden dapat ditemukan bahwa praktisi Humas pemerintah memiliki nilai mean yang lebih besar dari semua aspek dimensi peran manajerial daripada Humas swasta. Hanya pada aspek kelima, yakni peran teknis, Humas swasta memiliki nilai mean lebih tinggi dari Humas pemerintah. Artinya, berdasarkan deskripsi setiap aspek, Humas pemerintah memiliki kecenderungan melakukan peran manajerial lebih sering

daripada Humas swasta sedangkan Humas swasta cenderung lebih sering melakukan peran teknis komunikasi daripada Humas pemerintah. Untuk membuktikan pernyataan hipotesis penelitian maka penelitian ini mendeskripsikan temuan tentang perbandingan keseluruhan nilai mean peran manajerial dan teknis pada kedua pihak praktisi Humas ini (Tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan peran manajerial dan teknis praktisi Humas

Dimensi	Mean Score	
	Humas Swasta	Humas Pemerintah
Peran Manajerial	3.37	3.62
Peran Teknis	3.93	3.71

Sumber: Kuesioner no 1-34.

Berdasarkan deskripsi di Tabel 3, penelitian ini menemukan fakta bahwa kedua praktisi, yakni Humas pemerintah dan swasta ternyata sama-sama cenderung lebih sering menerapkan peran teknis komunikasi dalam aktivitas mereka menjalankan fungsi kehumasan. Tetapi, selisih nilai mean antara peran manajerial dan teknis pada Humas pemerintah lebih sedikit, yakni 0.09 sedangkan Humas swasta memiliki selisih nilai mean lebih besar, yakni 0.56. Hal ini memperkuat temuan di Tabel 2 bahwa meski melakukan peran teknis, tetapi, Humas pemerintah memiliki peluang kecenderungan melakukan peran manajerial lebih besar daripada Humas swasta. Jika Tabel 3 ini dikaitkan dengan Tabel 2, ditemukan fakta bahwa Humas pemerintah lebih sering melakukan peran manajerial daripada Humas swasta dan Humas swasta lebih sering melakukan peran teknis dibanding Humas pemerintah.

Pada akhirnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini tidak diterima atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Humas pemerintah dan swasta sama-sama lebih sering menjalankan peran teknis komunikasi daripada peran manajerial komunikasi, meskipun kecenderungan melakukan peran manajerial lebih ditemukan pada Humas pemerintah.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang menarik. Pertama, penelitian ini memperkuat hasil penelitian Perthawa dkk (2015) yang menemukan bahwa Humas pemerintah dan swasta sama-sama cenderung lebih sering melakukan peran teknis komunikasi daripada peran manajerial. Meskipun demikian, pada kedua penelitian ini pun ditemukan bahwa Humas pemerintah cenderung melakukan peran manajerial lebih sering daripada Humas swasta, yakni

selisih nilai tengah peran manajerial dan teknis pada Humas pemerintah hanya 0.9 sedangkan pada Humas swasta 1.52.

Kedua, jika dibandingkan penelitian Grunig dkk (2002) dan Kriyantono (2017), penelitian ini menghasilkan temuan berbeda. Penelitian Grunig dkk (2002) dan Kriyantono (2017) menghasilkan temuan bahwa Humas swasta secara umum lebih ekselen dengan menggunakan instrument pengukuran dalam kuesioner yang lebih luas, yakni bukan hanya dimensi peran manajerial dan teknis saja. Kedua penelitian pendahuluan ini juga mengevaluasi dimensi etika, pengetahuan, arah komunikasi satu arah atau dua arah, struktur lembaga kehumasan, dan pemberdayaan praktisi Humas. Jadi, hasil penelitian yang sedang berlangsung ini hanya terbatas berlaku hanya dari satu aspek dimensi, yakni dimensi peran.

Namun demikian, lebih seringnya Humas pemerintah dalam melakukan peran manajerial merupakan temuan yang menarik jika dikaitkan dalam konteks perkembangan demokrasi dan perubahan paradigam pemerintahan kita. Peneliti berpendapat bahwa hasil temuan ini disebabkan proses demokrasi di Indonesia saat ini yang menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik yang makin memerlukan praktisi Hubungan Masyarakat (Humas/Public relations) untuk mengelola dengan lebih baik (Kriyantono, 2014a; Kriyantono, dkk, 2015; Sriramesh & Vercic, 2009).

Aktivitas komunikasi ini merupakan implikasi dari sifat demokrasi, yang menurut Taylor (2000), sebagai proses *nation-building* yang mensyaratkan jalinan relasi antara individu dan pemerintah, melalui kampanye komunikasi. Karena itu, bukan situasi yang mengherankan jika pertumbuhan praktik Humas di dunia semakin meningkat seiring berkembangnya demokratisasi dan teknologi (Sriramesh & Vercic, 2009). Hal ini diperkuat Hopkins (2015, h. 3), mengutip Gelders & Ihlen (2010, h. 61): “*Government public relations can also be considered a part of the democratic process.*”

Sebagai proses *nation-building*, dapat dikatakan bahwa demokratisasi berdampak luas bagi aktivitas lembaga, khususnya lembaga pemerintah yakni lembaga yang menurut UU no 25/2009 menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik (Kriyantono, 2015). Demokrasi mendorong munculnya *active public*, yaitu publik yang secara aktif mencari informasi, bukan pasif hanya menerima informasi (Grunig & Hunt, 1984; Lee & Rodriguez, 2008; Magdalena, Kriyantono & Pratama, 2015). Sebagai akibatnya, prinsip keterbukaan informasi merupakan keniscayaan yang mesti dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya *good-governance* dalam pelayanan informasi publik, seperti diatur dalam UU no 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (KIP). UU ini merupakan implementasi dari pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak publik memperoleh informasi.

Informasi publik, menurut UU KIP, adalah muatan informasi yang dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan badan publik. UU KIP menyatakan bahwa informasi publik harus bersifat terbuka, dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, tidak berbeli-belit, terjaga keakuratannya dan kebenarannya, serta tidak menyesatkan. Informasi tersebut dapat digunakan publik untuk menginterpretasi peristiwa-peristiwa kehidupan yang berkaitan dengan kepentingan umum (pasal 6 bagian d UU 40/1999), termasuk informasi-informasi publik tentang pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik.

Pelayanan publik, menurut UU no 25/2009, merupakan tugas pokok lembaga penyelenggara negara. Berdasarkan UU KIP, lembaga pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik harus dapat menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mengacu pada UU no 25/2009, tampak bahwa asas-asas pedoman pelayanan, seperti profesionalitas penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan, sangat bergantung pada fungsi pengelolaan komunikasi yang diterapkan. Jadi, dari analisis literatur dan temuan data, dapat disimpulkan bahwa perkembangan demokrasi dan perubahan paradigm pemerintahan di Indonesia saat ini secara langsung membuat perubahan paradigm kehumasan pemerintah. Besarnya peran teknis yang masih dilakukan Humas pemerintah tampaknya terkait dengan bidang pekerjaan peran ini. Peran ini lebih banyak mengurus hal-hal komunikasi yang bersifat teknis, seperti menulis press-release, membuat majalah atau protokoler, juga termasuk pengelolaan staf yang bekerja pada bagian saya, untuk memastikan agar para staf bekerja secara efektif, menyiapkan laporan rutin tentang operasional fungsi komunikasi untuk manajemen senior, berurusan dengan email dan surat menyurat, menangani aspek teknis dalam memproduksi materi komunikasi dan Humas, dan mengawasi materi visual atau desain untuk organisasi (De Santo, dkk, 2007; Kriyantono, 2014a; Moss & De Santo, 2011; Perthawa, dkk, 2015, dan Whitaker, 2014. Peneliti berpendapat bahwa jenis pekerjaan tersebut tidak terlalu menuntut kemampuan manajerial dan analisis lebih mendalam.

## Kesimpulan

Dari temuan data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara praktik humas pemerintah dan swasta terkait dengan dimensi peran manajerial dan teknisi komunikasi. Kedua jenis Humas sama-sama lebih sering menerapkan peran teknisi komunikasi daripada peran manajerial komunikasi, namun Humas pemerintah lebih sering melakukan peran manajerial daripada Humas swasta. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa praktik Humas pemerintah sudah berkembang sesuai tuntutan demokratisasi dan paradigm pemerintahan yang *good governance* dalam pelayanan publik.

Untuk penelitian di masa datang, peneliti merekomendasikan untuk memperdalam penelitian ini dengan melakukan penelitian konstruktivis dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada praktisi. Wawancara mendalam ini bertujuan menggali data tentang motif, sikap-sikap atau nilai-nilai yang lebih mendalam sehingga benar-benar dapat memverifikasi temuan data penelitian ini. Penelitian ini memang mengandung limitasi karena hanya menggali data di permukaan karena keterbatasan paradigm positivistik. Selain itu, penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara lebih luas untuk dapat disebut mewakili gambaran praktik Humas di seluruh Indonesia karena keterbatasan responden. Di masa datang, direkomendasikan melakukan survey nasional dengan responden yang mewakili praktisi Humas seluruh Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Broom, G., & Sha, B. (2013). *Cutlip and center's effective public relations* (11th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Culbertson, H. M., Jeffers, D. W., Stone, D. B., & Terrell, M. (1993). *Social, political, and economic contexts in public relations: Theory and cases*. New York: Lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2011). *Effective public relations* (B. S. Tri Wibowo, Trans.). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- De Santo, B., Moss, D., & Newman, A. (2007). Building an understanding of the main elements of management in the communication/public relations context: A study of U.S. practitioner practices. *Association for Education in Journalism and Mass Communications*, 84(3), 439-454. doi: 10.1177/107769900708400303.
- Grunig, L.A., Grunig, J.E., & Dozier, D.M. (2002). Excellence in public relations and communication management: A review of the theory and results. Dalam Grunig, L.A., Grunig, J.E., & Dozier, D.M. (Eds.). *Excellent public relations and effective organization*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Grunig, J.E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc.
- Hardjana, A. (2000). *Audit komunikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Harrison, K. (2009). *Strategic public relations: A practical guide to success* (5 ed.). Perth: Century Consulting Group.
- Hendrix, J. A. (2000). *Public relations cases*. California: Wadsworth.
- Hopkins, A. E. (2015). Government public relations: Public diplomacy or propaganda? *Student Pulse* [Online], 7 (3). Available on <http://www.studentpulse.com/a?id=1012>
- Ikhsan, M. (2015). Pemerintahan di Sumatera Selatan masihtertutupdengandinformasipengelolaankehutanan: Adakah yang dirahasiakan? <http://www.mongabay.co.id>. Retrieved February 27, 2015.
- Kriyantono, R. (2017). Do the different terms affect the roles? A measurement of excellentand managerial role of business and government public relations practices in Indonesia. *International Journal of Applied Business & Economic Research*, 15(6), 193-209.
- Kriyantono, R., & McKenna, B. (2017). Developing a culturally-relevant public relations theory for Indonesia. *Malaysian Journal of Communication*, 33(1), 1-16.

- Kriyantono, R., Ramadlan, M. F., Setiawan, A. (2015). Hidden advertising in local election era: Reducing the public's right of information and critical power of media in Indonesia, *International Journal of Development Research*, 5(10), 5875-5880.
- Kriyantono, R. (2015). Konstruksi public relations dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi dalam era keterbukaan informasi publik. *Jurnal Pekommas, Kominfo Makassar*, 18(2), 117-126.
- Kriyantono, R. (2014a). *Teori public relations perspektif barat dan lokal: Aplikasi penelitian dan praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Kriyantono, R. (2014b). *Teknik praktis riset komunikasi (Cet ke-7)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kriyantono, R. (2014c). *Public relations writing (Cet ke-4)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S., & Toth, E. (2010). *Public relations: The profession and the practice*. New York: McGraw-Hill.
- Lee, S., & Rodriguez, L. (2008). Four publics of anti-bioterrorism information campaigns: A test of the situational theory. *Public relations Review*, 34, 60-62.
- Magdalena A., Kriyantono, R., & Pratama, B.I. (2015). Identifikasi publik berdasarkan persepsi situasional pada isu seputar pemilihan umum presiden tahun 2014 pada publik kota Malang, *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika, dan Media Massa*, 18(1), 37-44.
- Marston, J. E. (1979). *Modern public relations*. New York: McGraw-Hill.
- Moss, D., & De Santo, B. (2011). *Public relations: A managerial perspective*. California: Sage.
- Moss, D., Newman, A. & De Santo, B. (2005). What do communication managers do? defining and refining the core elements of management in a public relations/corporate communication context. *Journalism & Mass Communication Quarterly* 84 (winter 2005): 873-90.
- Neuman, W. L. (2006). *Social research methods: qualitative and quantitative approaches – 6th Edition*. Boston: Pearson Education.
- Parthawa, P.B., Kriyantono, R., & Wisadirana, D. (2015). A test of five-factor model on different roles of government and private public relations practitioners in Indonesia. *Global Journal of Human Social Science Volume XV Issue IV Version I*, 17-22.
- Siriyuvasak, U. (2005). People's media and communication rights in Indonesia and the Philippines, *Inter-Asia Cultural Studies*, 6(2), 245-265.

- Smith, R. D. (2002). *Strategic planning for public relations*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Sriramesh, K., & Vercic, D. (2009). A theoretical framework for global *Public relations* research and practice. In K. Sriramesh & D. Vercic (Eds.), *The global Public relations handbook: theory research, and practice* (pp. 3-24). New York, NY: Taylor and Francis Group.
- Taylor, M. (2000). Toward a public relations approach to nation-building. *Journal of Public Relations*, 12(2), pp. 179-210.
- Tymson, C., Lazar, P., & Lazar, R. (2004). *The new Australian and New Zealand Public relations manual*. NSW: Tymson Communication.
- Whitaker-Heck, R. E. A. (2014). *An examination of the roles and work activities of the public relations officer in higher education using the five-factor dimension model*. *Public Relation Society of America*, 8(1), 9-14.
- Wilcox, D.L. & Cameron, G.T. (2009). *Public relations: strategies & tactics ed. 9<sup>th</sup>*. Boston: United States of America.
- Wilcox, Ault, & Agee. (2006). *Public relations strategidantaktik*. Batam: Interaksara.
- Wimmer, R.D., & Dominick, J.R. (2011). *Mass media research: an introduction, ninth edition*. Boston: Wadsworth.

## **Model Manajemenkelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **Usaha Tepung Tapioka**

**Salahudin, Wahyudi, Ihyaul Ulum, Yudi Kurniawan**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

Program Studi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

Peneliti Laboratorium Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang

salahudinmsi@umm.ac.id

#### **Abstract**

Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) is a buffer of the national economy that it proved able to survive during the monetary crisis in Indonesia in 1997-1998. On the one hand, MSMEs have a strong resilience to the economic crisis. On the other hand, the development of MSMEs is faced with complex problems. This research departs from the complexity of the problems faced in developing Tapioca Starch business. This study aims to understand the problems faced by SMEs in developing Tapioca Flour Business in Kediri and prepare concrete steps to solve the problem. This research used descriptive qualitative method with data collection technique of interview, observation, and documentation. The results of this study indicated that the problems faced by the Tapioca flour business in Kediri are that they have no the formation of the business in a business group, the lack of human resources skills in developing the business, the limited business capital, and the dependence of the entrepreneurs on the middlemen directly and not to the detriment of entrepreneurs. The steps proposed for such issues include the formation of business groups, strengthening cooperative networks with business groups, markets, and cassava growers, and strengthening venture capital through saving and loan systems.

Keyword : *Business Group, Policy, Empowerment, Society*

#### **Abstrak**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penyangga perekonomian nasional yang terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter di Indonesia pada 1997-1998. Di satu sisi, UMKM memiliki ketahanan yang tangguh terhadap krisis perekonomian. Namun di sisi lainnya, pengembangan UMKM dihadapkan dengan berbagai persoalan yang cukup kompleks. Penelitian ini berangkat dari kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha Tepung Tapioka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persoalan yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan Usaha Tepung Tapioka di Kediri serta menyiapkan langkah- langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha Tepung Tapioka di Kediri di antara nya adalah belum terbentuknya usaha tersebut dalam suatu kelompok usaha, minimnya keterampilan SDM dalam mengembangkan usaha, keterbatasan modal usaha, dan ketergantungan para pengusaha terhadap tengkulak yang secara langsung maupun tidak justru

merugikan para pengusaha. Langkah-langkah konkret yang diusulkan atas masalah-masalah tersebut di antara nya yaitu pembentukan kelompok usaha, penguatan jaringan kerja sama dengan kelompok usaha, pasar, dan petani ketela pohon, dan memperkuat modal usaha melalui sistem simpan pinjam.

**Keyword:** *UK4KM, Kelompok Usaha, Kebijakan, Pemberdayaan, Masyarakat.*

<i>Submite</i>	: 5 September 2017
<i>Review</i>	: 20 November 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Januari 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: hayat@unisma.ac.id

## Pendahuluan

Indonesia merupakan produsen tapioka terbesar kedua setelah Thailand dengan total produksi mencapai 3.877.100,4 ton pada tahun 2004 (BPS, 2004), salah satu olahan industri yang banyak diproduksi adalah untuk tepung tapioka (Somaatmaja, 2004). Salah satu wilayah yang telah berhasil mengembangkan agroindustri tapioka skala kecil dan menengah adalah Kabupaten Kediri, yang mencapai 207 unit industri kecil dengan nilai investasi sebesar 4.216 juta rupiah, nilai bahan baku produksi 10.107 juta rupiah dan nilai produksi 7.372 juta rupiah (Wijana, Nurika, dan Habibah, 2009, hal. 97).

Sebagian besar produk tapioka olahan UMKM di Kabupaten Kediri digunakan sebagai bahan baku industri krupuk yang mencapai 267 unit di Kediri, dan sisanya dijual dipasar regional yaitu di sentra industri kerupuk Tulungagung, Surabaya, dan Sidoarjo (Nurika, Deoranto, dan Indriasari, 2017 Wijana dkk, 2009, hal. 97).

Bahan dasar tepung tapioka adalah ketela pohon yang banyak ditanam dikebun - kebun warga, di Kabupaten Kediri. Sekitar 12 Kecamatan merupakan sentra tanaman ketela pohon yaitu Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwih, Kecamatan Ringinrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Plosoklaten, Kecamatan Kras, Kecamatan Mojo, Kecamatan Kandat, Kecamatan Semen dan Kecamatan Banyakan (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKP3) Kabupaten Kediri, 2017). Ketersediaan ubi kayu di Kabupaten Kediri tiap tahun 30.491,50 ton (Nurika dkk, 2007).

Desa Bulusari Kecamatan Tarokan adalah saiah satu desa di Kabupaten Kediri yang memiliki segudang potensi yang harus terus digali dan dikembangkan. Desa ini dijuluki sebagai Kampung Krupuk karena sebagaian besar warganya memproduksi krupuk dan menjadikannya mata pencaharian utama. Sentra tepung tapioka selain di Desa Bulusari dan Desa Purworejo,

Desa Bulu adalah salah satu desa di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri juga memproduksi tepung tapioka dari bahan baku ketela pohon. Produksi tepung tapioka di Desa ini sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 1980 hingga saat ini. Sebagian besar masyarakat di desa ini terlibat dalam usaha produksi tepung tapioka dengan berbagai bidang pekerjaan seperti pengupasan ketela pohon, penggilingan ketela pohon, dan pengeringan sari ketela pohon. Pada awalnya produksi tepung di desa ini berlangsung secara tradisional yakni dilakukan dengan tanpa menggunakan mesin. Pada saat itu produksi tepung tapioka dilakukan dengan alat tradisional seperti pengupasan kulit singkong dilakukan dengan pisau dapur, dan penggilingan ketela pohon dilakukan dengan pamt manual.

Seiring kemajuan jaman, produksi tepung tapioka di Desa Bulu mengalami kemajuan yakni proses produksi tepung tapioka dilakukan dengan mesin. Mesin yang digunakan adalah mesin disel. Sejatinya mesin disel bukan diperuntukkan untuk produksi tepung namun dipemntukkan sebagai mesin pengangkat air dari kali untuk menyirami tanaman pertanian. Namun masyarakat khususnya pengusaha tepung di desa bulu mendesain (merakit) mesin tersebut hingga dapat digunakan sebagai mesin penggilingan ketela pohon (produksi tepung).

Kendati saat ini pengusaha tepung tapioka di desa bulu sudah menggunakan mesin dalam proses produksinya, dan mampu memproduksi tepung tapioka dalam jumlah yang cukup banyak, namun pengusaha tepung tapioka di desa ini masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pada bagian analisis situasi ini, kami mengelompokkan persoalan tersebut dalam dua aspek yaitu aspek manajemen dan aspek produksi. Kedua aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**Pertama**, masalah pada bagian manajemen yaitu belum terlembaganya usaha dalam bentuk organisasi, dan minimnya pemahaman para pengusaha tentang perluasan dan keberlanjutan usaha tepung tapioka. **Pertama**, meskipun usaha pengelolaan tepung tapioka di desa ini sudah berlangsung lama sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan ini, namun produksi tepung tapioka di desa ini masih dilakukan secara tradisional. Mereka belum terlembaga dalam bentuk organisasi usaha. Karena itu, para pengusaha mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha ini menjadi lebih maju. Sebaiknya dalam pengelolaan usaha harus dinaungi oleh lembaga atau organisasi usaha. Melalui lembaga atau organisasi usaha, para pengusaha terlindungi dari segi administrasi, pengusaha dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha, dan pengusaha dapat menjadikan organisasi usaha sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan pengusaha tepung, petani ketela pohon,

pemerintah, dan pasar (Indrika, 2013; Hermanto dan Swastika, 2011).

*Kedua*, masalah lain yang dihadapi pengusaha tepung tapioka di desa bulu adalah minimnya pemahaman mereka tentang pengembangan usaha. Berdasarkan hasil observasi, para pengusaha dinilai tidak memiliki wawasan dalam mengembangkan usaha menjadi lebih maju. Selama ini mereka tidak pernah berfikir untuk mengembangkan usaha menjadi lebih berkembang. Mereka hanya memproduksi tepung tapioka dalam bentuk kasar, dan kemudian dijual ke pengusaha lain atau tepatnya disebut para tengkulak. Para pengusaha juga belum memahami kebermanfaatan air limbah dari penyaringan ketela yang digiling. Bagi para pengusaha air limba tersebut tidak memiliki fungsi karena itu mereka menjualnya dengan harga murah kepada pengusaha tengkulak.

Hasil pengamatan dan kajian yang dilakukan oleh kami menunjukkan bahwa para pengusaha mikro tepung tapioka di Desa Bulu bekerja dengan model manajemen yang dijelaskan di atas sehingga membuat mereka mengalami kerugian materi dan tenaga. Justru para tengkulak yang membeli tepung tapioka kasar dan air limbah penggilingan ketela dari pengusaha-pengusaha mikro tepung tersebut lebih diuntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa tengkulak berada pada posisi yang menguntungkan dan mampu menciptakan ketergantungan para petani terhadap kehadirannya (Fuad, Ainurofik, dan Rosyid, 2015).

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kami menunjukkan bahwa pengusaha tepung tapioka di desa bulu juga menghadapi masalah pada aspek produksi yakni pada bagian sarana produksi, dan terbatasnya penyediaan pasokan ketela pohon. *Pertama*, minimnya sarana produksi. Masalah yang dihadapi para pengusaha dalam proses produksi tepung tapioka adalah minimnya sarana pendukung produksi yaitu sarana pengeringan. Selama ini pengusaha tepung di desa ini mengandalkan sinar matahari sebagai sarana pengeringan. Karena itu, pengusaha pengelolaan tepung tidak dapat memproduksi tepung secara maksimal jika musim hujan tiba. *Kedua*, terbatasnya penyediaan pasokan ketela pohon. Tersendatnya pasokan bahan baku ketela serta sulitnya proses pengeringan tepung tapioka di saat musim hujan tiba, membuat sejumlah pengusaha bahan baku krupuk di Desa Semen Kabupaten Kediri terpaksa 'gulung tikar'. Penyebabnya, pasokan bahan baku ketela tersendat, dan sulitnya proses pengeringan tepung tapioka.

Permasalahan pengusaha mikro tepung tapioka pada kedua aspek di atas (aspek manajemen dan aspek produksi) adalah dinilai sebagai masalah-masalah krusial yang

menghambat berkembangnya usaha tepung tapioka di Kabupaten Kediri menjadi lebih maju. Sesungguhnya, permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tepung tapioka di Desa Bulu Kediri seperti yang dijelaskan di atas juga terjadi pada usaha kecil lainnya di berbagai daerah. Syariifah (2015) mengungkapkan bahwa masalah yang paling dominan ditemukan adalah masalah modal usaha. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemui jika sebagian pelaku UMKM cenderung tidak menambah modal usahanya untuk mengembangkan bisnis mereka. Pemilik usaha cenderung enggan untuk menambah modal karena mereka sudah merasa puas, dan hal inilah yang membuat kondisi usaha mereka menjadi stagnan (Trenggana, Masodah, dan Pribadi, tt).

Selain modal usaha dan keengganan pelaku usaha mengembangkan bisnisnya, ada beberapa hal lainnya yang menghambat kemajuan UMKM. Nugraheni (t.t) menemukan bahwa pelaku UMKM sendiri masih banyak menghadapi berbagai macam kendala seperti pengolahan, pengemasan, pemasaran, kualitas produk, sumber daya manusia dan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa UMKM belum didukung dengan kemampuan manajemen yang efektif dan efisien.

Temuan lain oleh Rapini, Farida, dan Adji (2016) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat perkembangan UMKM diantaranya yaitu tidak adanya kemauan dari pelaku usaha untuk berkembang, usaha tersebut hanya sebagai usaha sampingan, adanya ketergantungan pada jaringan pemasaran yang sudah ada, serta keterbatasan SDM yang tertarik untuk bekerja di usaha tersebut. Hambatan-hambatan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat terkesan kurang tertarik dengan pekerjaan pada sektor informal melalui pengembangan UMKM. Dengan demikian, persoalan-persoalan UMKM secara umum berdasarkan temuan-temuan di atas yaitu persoalan manajemen, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap UMKM, dan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan SDM dalam mengembangkan UMKM.

Selain itu, Hadi (2015) mengungkapkan bahwa pemberdayaan UKM kota Kendal dalam rangka MDGs 2015 menghadapi permasalahan meliputi keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM ditandai dengan minimnya pelaku UKM yang berpendidikan tinggi, akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi, masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya, dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

Karena itu, dalam kajian ini, kami mengkaji lebih jauh masalah-masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tepung tapioka di desa Bulu Kabupaten Kediri. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi pengusaha tepung tapioka dalam menjalankan usahanya dan untuk mendesain model pengembangan usaha tepung tapioka di Desa Bulu Kabupaten Kediri.

### **Metode dan Kajian Pustaka**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni menggambarkan kondisi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) tepung tapioka di Desa Bulu Kabupaten Semen. Teknik pengumpulan data adalah wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara langsung kepada pengusaha tepung tapioka, pengepul ketela pohon, dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Bulu Kabupaten Kediri. Kami melakukan wawancara langsung dengan pengusaha tepung tapioka yakni Suwandi, Sumarno, Rudi, Bustomi, Imam, dan Yayin. Kami mendapatkan informasi yang lengkap tentang kapasitas mereka dalam menjalankan usaha tepung tapioka. Selain teknik wawancara, kami juga melakukan pengumpulan data melalui kegiatan observasi dan dokumentasi aktifitas pengusaha tepung tapioka di Desa Bulu.

Selanjutnya, kami juga telah melakukan diskusi dan pertemuan dengan para pengusaha tepung tapioka guna menggali informasi tentang aktifitas usaha mereka. Pertemuan dan diskusi berlangsung secara intensif di sekretariat kelompok usaha. Melalui pertemuan dan diskusi tersebut, kami mendapatkan informasi yang mendukung data-data hasil wawancara sebelumnya. Penelitian ini dilakukan selama delapan bulan yakni mulai bulan Januari hingga Agustus 2017. Dalam waktu delapan bulan, kami mendapatkan data-data penelitian, baik data primer maupun data sekunder.

Data-data tersebut dianalisis melalui pendekatan pendekatan Creswell (2013) yakni, manajemen data (mengorganisasikan memoing data (refleksi dan menulis catatan), deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data (kategori dan perbandingan data), penyajian dan visualisasi data. Berangkat dari masalah tersebut, kami mendesain model manajemen usaha tepung tapioka, yaitu manajemen yang berbasiskan penguatan lembaga usaha, penguatan jejaring usaha, dan penguatan modal usaha. Sinergisitas tigak aspek tersebut dipercayai mampu mewujudkan usaha tepung tapioka yang berdaya saing.

## UMKM dalam Perspektif Ekonomi Keynesian

Pemikiran ekonomi Keynes lahir sebagai kritik atas pandangan ekonomi klasik yang memandang peran pemerintah perlu dibatasi karena pasar dianggap memiliki fungsi *self regulating*. Menanggapi krisis ekonomi *Great depression* 1930-an, Keynes menyatakan *self regulating* ekonomi klasik gagal berfungsi sehingga diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan tersebut dengan kebijakan stabilisasi (Ediarno, 2015:11). Selain itu, teori ekonomi Keynes sekaligus mengkritik pandangan Karl Marx yang menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi dan sistem perekonomian yang hanya berorientasi profit.

Baik ajaran Adam Smiths tentang kapitalisme bebas dengan seminimal mungkin intervensi negara maupun penolakan Karl Marx terhadap persaingan dan kepemilikan pribadi atas alat produksi, ternyata bermasalah (Vaut dkk, 2014:25). Keynes menganggap peran pemerintah perlu dalam pembangunan. Pendekatan Keynesian mengasumsikan adanya *price rigidity* dan *excess capacity* sehingga *output* ditentukan oleh permintaan agregat (*demand driven*). Keynes juga menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari Pemerintah (Surjaningsih, Utari, dan Trisnanto, 2012:393).

Dalam masa kesulitan ekonomi, negara harus mengintervensi pasar dan menaikkan permintaan lewat pengambilan utang dan peningkatan belanja (Vaut dkk, 2014:25). Tetapi Keynes melihat bahwa pengaruh ini tidaklah dijalankan melalui pelaksanaan langsung kekuasaan politik, melainkan melalui pengaturan variabel-variabel ekonomi kunci dan membuka konsekuensi-konsekuensi ekonomi dan pengaturan melalui regulasi pemerintahan (Handoko, 2013:70).

Berdasarkan pendekatan keynesian tersebut, peran pemerintah mendukung UMKM merupakan representasi intervensi pemerintah untuk melindungi golongan usaha mikro, kecil, dan menengah. Demi mendukung dan meningkatkan produktivitas UMKM, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang berisi kerangka berpikir pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kerangka berpikir ini menunjukkan pemberdayaan UMKM diperlukan sejumlah prasyarat terencana, sistematis, dan menyeluruh yang meliputi: (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya dan menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses sumber daya

produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal (Fitriati, 2015:4).

Selain itu, UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberi mandat kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menumbuhkan iklim usaha khususnya melalui fasilitasi pendanaan bagi pelaku UMKM. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk mendukung pasar agar terhindar dari krisis jangka pendek maupun panjang. Keynes melakukan reposisi hubungan ekonomi dengan politik, dengan memasukkan kebijakan pemerintah (*stabilization policy*) sebagai salah satu variabel ekonomi yang penting dan bahkan lebih *powerful* (Ediarno, 2015:11).

Daya tahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada 1997-1998 berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian nasional. Hadiwijoyo (2014) menyebutkan tiga faktor yang mendukung UMKM mampu menghadapi krisis ekonomi tersebut. *Pertama*, UMKM umumnya menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, pelaku UMKM umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. *Ketiga*, bisnis UMKM umumnya tidak ditopang dari pinjaman bank, melainkan dari dana sendiri.

Namun demikian, di sisi lainnya, UMKM memiliki persoalan yang kompleks sehingga sering mengalami stagnasi dalam pengembangan bisnis yang dijalankan. Bahkan, sumber modal yang berasal dari pelaku UMKM secara mandiri tanpa suntikan dana dari bank sebagai salah satu faktor yang dianggap memperkuat UMKM saat krisis ekonomi 1997-1998 ibarat dua sisi mata pisau. Meskipun UMKM mampu dijalankan dengan dana mandiri, namun pelaku UMKM seringkali dihadapkan dengan modal bisnis yang terbatas.

Adler Heymans Manurung, Direktur Fund Management PT. Nikko Securities, mengatakan bahwa meskipun mengalami pertumbuhan yang bagus, UMKM di Indonesia belum bisa beranjak dari masalah klasik, yaitu modal atau kredit (Disampaikan pada Seminar Pembiayaan UMKM dan Koperasi, 2008). Syariifah (2015) juga mengungkapkan bahwa masalah yang paling dominan ditemukan adalah masalah modal usaha. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemui jika sebagian pelaku UMKM cenderung tidak menambah modal usahanya untuk mengembangkan bisnis mereka. Pemilik usaha cenderung enggan untuk menambah modal karena mereka sudah merasa puas, dan hal inilah yang membuat kondisi usaha

mereka menjadi stagnan (Trenggana, Masodah, dan Pribadi, tt).

Modal usaha merupakan salah satu instrumen penting, baik bagi usaha atau bisnis yang sedang dirintis maupun yang telah berjalan. Afifah dan Setiawan (2012) menemukan bahwa kredit yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat membantu meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan laba para pelaku usaha mikro di Kelurahan Pekunden yang dilihat dari perbedaan variabel modal usaha, omzet penjualan, dan laba antara sebelum dan setelah mendapat kredit yaitu modal usaha terdapat kenaikan sebesar 55,87%, omzet penjualan terdapat kenaikan sebesar 22,22%, dan kenaikan laba sebesar 44,12%. Dengan demikian, berdasarkan temuan tersebut, tambahan modal usaha memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan laba dan omzet penjualan.

Selain modal usaha dan keengganan pelaku usaha mengembangkan bisnisnya, ada beberapa hal lainnya yang menghambat kemajuan UMKM. Nugraheni (t.t) menemukan bahwa pelaku UMKM sendiri masih banyak menghadapi berbagai macam kendala seperti pengolahan, pengemasan, pemasaran, kualitas produk, sumber daya manusia dan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa UMKM belum didukung dengan kemampuan manajemen yang efektif dan efisien. Temuan lain oleh Rapini, Farida, dan Adji (2016) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat perkembangan UMKM diantaranya yaitu tidak adanya kemauan dari pelaku usaha untuk berkembang, usaha tersebut hanya sebagai usaha sampingan, adanya ketergantungan pada jaringan pemasaran yang sudah ada, serta keterbatasan SDM yang tertarik untuk bekerja di usaha tersebut. Hambatan-hambatan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat terkesan kurang tertarik dengan pekerjaan pada sektor informal melalui pengembangan UMKM.

Selain itu, Hadi (2015) menemukan bahwa pemberdayaan UKM kota Kendal dalam rangka MDGs 2015 menghadapi permasalahan meliputi keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM ditandai dengan minimnya pelaku UKM yang berpendidikan tinggi, akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi, masalah infrastruktur, seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya, dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

Dengan demikian, persoalan-persoalan UMKM secara umum berdasarkan temuan-temuan di atas yaitu persoalan manajemen, rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap UMKM, dan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan SDM dalam mengembangkan UMKM. Adapun

temuan yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM, baik dalam penyediaan infrastruktur jalan atau pasar maupun pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Pada praktiknya, peran pemerintah khususnya dalam pembinaan dan pemberdayaan tidak serta merta berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM tanpa penyediaan infrastruktur maupun ruang untuk melakukan pemasaran. Kumiawan dan Fauziah (2014) dalam menemukan bahwa penghambat dalam pemberdayaan UMKM adalah infrastruktur yang kurang memadai atau rusak, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah dan tidak adanya sentra pemasaran hasil produksi. Oleh sebab itu, masalah-masalah dalam pengembangan UMKM menjadi semakin kompleks, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini sekaligus merupakan tantangan bagi para *stakeholders* untuk meminimalisasi hambatan- hambatan tersebut demi pengembangan UMKM.

## Model Pengelolaan UMKM

### 1. Model pengelolaan UMKM di beberapa negara

Model pengelolaan UMKM di setiap daerah atau negara sangat beragam tergantung pada masalah dan potensi yang dimiliki. Hendrawan (2011) memaparkan bahwasecara umum, Singapura memilih untuk menerapkan model intervensionis dalam pengembangan UMKM-nya. Strategi Singapura telah memusatkan perhatian pada meningkatkan teknologi sebagai prioritas tinggi dalam pengembangan UMKM. Dari sisi pembiayaan, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta digalakkan. Untuk pendirian UMKM, maka penyediaan oleh pemerintah tersedia memadai baik melalui *Microloan*, *SPRING SEEDS*, maupun *Enterprise Investment Incentive*. Untuk pengembangan UMKM tersedia *Local Enterprise Finance Scheme* maupun *Growth Financing Scheme*. Untuk UMKM yang menuju kancan global disediakan banyak dana diantaranya *Internationalization Finance Scheme*. Tentu saja dukungan lain seperti edukasi, pameran, dan lain-lain.

Negara lain di Kawasan Asia Tenggara yang sejak lama mengembangkan UMKM adalah Thailand. Sari dkk (2015) memaparkan bahwa Thailand mulai mendorong agar UMKM mempunyai *linkage* yang kuat pada sektor otomotif mulai tahun 2000 melalui program *SME Promotion Plan*. Fokus kebijakan tersebut adalah bagaimana meningkatkan jumlah tenaga kerja, memperkuat modal UMKM, mendorong ekspor, dan meningkatkan keterkaitan dengan

perusahaan besar. Terkait dengan permodalan pada tahun 2002 pemerintah Thailand mendirikan Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand untuk meningkatkan dan mempermudah akses finansial UMKM (Caiyuth dalam Sari dkk, 2015).

Bank Indonesia dalam “*Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*” tahun 2011 juga memaparkan bahwa di beberapa negara tidak memiliki kementerian khusus menangani masalah koperasi dan UMKM seperti di Indonesia. Namun, pemerintah melalui departemen yang berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan memiliki peranan aktif dalam mengembangkan UMKM di negaranya. Perlu bahkan memiliki tiga komisi berkaitandengan pengembangan UMKM, yaitu komisi promosi UMKM (PROMPYME), program pengembangan berbasis voucher bagi UMKM (BONOPYME), dan program inovasi teknologi manufaktur sepatu (CITE-Calzado).

## 2. Model Pengelolaan UMKM di Indonesia

Adapun pengelolaan UMKM di Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam rangka mewujudkan pengembangan UMKM di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki beberapa strategi. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019, arah kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan UMKM diantaranya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, dan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Selain Kementerian Koperasi dan UKM, beberapa lembaga lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Sebagai contoh, Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan yang salah satunya bertujuan untuk membantu akses pendanaan bagi UMKM. Kebijakan ini tertuang baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Di sisi permintaan, program Bank Indonesia difokuskan pada penguatan lembaga pendamping UMKM dalam bentuk kegiatan pelatihan dan penelitian. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 mengeluarkan program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya mengembangkan UMKM dan koperasi secara berkesinambungan. Peraturan ini kemudian mengalami revisi dalam hal jangka waktu kredit, restrukturisasi, dan plafon pinjaman dengan dikeluarkannya PMK No.10/PMK.05/2009 (Bank Indonesia, 2011).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas mengindikasikan bahwa pemerintah menyediakan akses pendanaan sehingga UMKM harus terbuka dan tidak tabu terhadap dunia perbankan dalam rangka memperkuat modal usahanya melalui lembaga-lembaga pembiayaan, baik bank maupun non bank. Sudaryanto, Ragimun, dan Wijayanti (t.t) menyebutkan bahwa strategi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, tanpa agunan.

Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (2013), akses pembiayaan UMKM lebih banyak diperoleh dari bank umum dibandingkan dengan lembaga pembiayaan seperti koperasi dan lembaga pembiayaan non bank. Namun demikian, dalam skala lokal, eksistensi lembaga pembiayaan non bank seperti koperasi masih menjadi mitra strategis bagi UMKM. Sarwoko (2009) menemukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam memiliki peran yang cukup besar dalam pemenuhan permodalan UMKM di Kabupaten Malang, ditunjukkan dari kemampuan KSP/USP dalam menyalurkan kredit mengalami peningkatan. KSP/USP mampu menyalurkan kredit modal kerja ke UMKM sebesar 79,81% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya kemampuan KSP/USP dalam penyaluran kredit menunjukkan semakin meningkatnya peran KSP/USP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, berdasarkan data dan temuan di atas, penyediaan pinjaman modal bagi UMKM merupakan langkah strategis untuk mendukung pengelolaan UMKM agar lebih berkembang.

Namun demikian, UMKM yang telah menerima pinjaman atau kredit dalam rangka pengembangan usaha harus tetap dibina dan dipantau. Dengan kata lain, lembaga pembiayaan harus ikut mengawasi dan membina UMKM sehingga dana pinjaman digunakan sesuai peruntukannya. Dalam suatu kasus, Rafki dan Akhirman (tt) menemukan bahwa ketika menerima bantuan dana bergulir hampir semua UKM menjawab bahwa mereka sangat membutuhkan tenaga ahli pendamping sebagai konsultan bagaimana memanfaatkan dana bergulir tersebut untuk bisa mengembangkan usaha. Pihak Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini terkesan hanya memberikan dana secara utuh tanpa mengawasi dan memberikan bimbingan kepada pihak UKM dan Koperasi penerima bantuan tersebut. Hal ini jelas sangat beresiko karena bisa saja dana yang diterima oleh pihak UMKM bisa saja dipakai untuk

keperluan lain yang tidak bersifat pengembangan usaha.

Selain itu, kualitas SDM dalam pengelolaan UMKM memiliki peran sentral untuk terus meningkatkan daya saing dalam skala lokal, nasional, hingga bahkan internasional. Dengan kata lain, pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku atau bahkan calon pelaku UMKM perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan berwirausaha. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pelatihan dengan *system customized training*, yaitu sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan si pemberi kerja, pembuatan bank keahlian (*skilf banks*), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur, penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah, dan pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat (Pujiono, 2010). Dengan demikian, kebutuhan UMKM terhadap kualitas SDM yang terampil dapat terakomodasi melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia tersebut.

Pengelolaan UMKM di era digital seperti saat ini, penguasaan teknologi informasi khususnya strategi optimalisasi media sosial merupakan suatu kebutuhan untuk mengembangkan atau melakukan ekspansi pasar atas produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Hal ini perlu dilakukan karena sasaran komunikasi pemasaran produk dan jasa dari UKM sektor informal sudah menggunakan media sosial. Berkaitan dengan hal ini para pelaku UKM dituntut untuk dapat menggunakan aplikasi media sosial seperti website, facebook, twitter, hingga instagram (Kencana, Lestari, dan Nuricahyanti, 2016). Melalui media sosial, kegiatan promosi atau marketing menjadi lebih efektif dan efisien karena dapat menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa dibatasi letak geografis. Dengan demikian, hal ini sekaligus dapat memicu UMKM untuk terus berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.

Model kemitraan dalam pengelolaan UMKM merupakan alternatif untuk mendorong UMKM semakin produktif. Kemitraan yang dimaksud dapat dilakukan dengan pihak pemerintah maupun dengan swasta. Model kemitraan dengan swasta dapat dilakukan melalui bantuan atau intervensi pasar oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan agar peritel besar seperti hipermarket, supermarket, dan minimarket menyediakan ruang untuk pemasaran produk UMKM. Liana dan Indrianinwum (2008) mengusulkan agar

hipermarket, departement store, supermarket dan minimarket yang berdiri sendiri wajib menyediakan tempat usaha untuk UMKM yang mampu dibeli atau disewa atau dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Dengan demikian, perkembangan ritel besar yang pesat tidak akan menggerus UMKM melainkan justru memberi ruang bagi pengembangan UMKM. Selain itu, model kemitraan dapat dilakukan dengan pihak pemerintah khususnya dengan BUMN. Sulistyono dan Adiatma (2011) mengungkapkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan modal dan pembinaan BUMN melalui PKBL (Program Kemitraan dan Bantuan Lingkungan) saat ini ada dua, yaitu BUMN mitra UKM bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyeleksi UKM yang layak diberikan bantuan permodalan (rekomendasi) termasuk persyaratan administrasi dan agunan. Mekanisme kedua dilakukan oleh BUMN mitra UKM secara langsung dan ditangani sendiri, baik kriteria UKM yang dibiayai, persyaratan administrasi serta agunan pinjaman tanpa melibatkan pihak Dinas Koperasi dan UKM.

Besarnya dana kemitraan yang diterima UKM binaan berkisar antara 5- 30 juta. Bantuan modal ini sangat membantu pengembangan usaha UKM, karena selama ini salah satu kelemahan UKM adalah sulitnya akses permodalan karena tidak memiliki jaminan dan tidak bankable. Tingkat pengembalian pinjaman UKM cukup baik yang tercermin dari 89,8% tidak macet, sementara hanya 10,2% saja yang macet. Kaitannya dengan peningkatan kualitas manajemen usaha kecil menengah, maka telah dilakukan berbagai pelatihan-pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan usaha kecil dan menengah. Adapun pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan antara lain yaitu kewirausahaan, pemasaran, operasional dan keuangan. Dengan demikian, model kemitraan merupakan alternatif lain dalam rangka pengembangan UMKM agar lebih produktif.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pengusaha tepung tapioka di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, yaitu belum terbentuknya lembaga usaha, minimnya keterampilan SDM dalam mengembangkan usaha, keterbatasan modal usaha permainan tengkulak ketela pohon, dan permainan pengusaha penampung tepung. Masalah-masalah tersebut dipandang sebagai bagian dari persoalan krusial yang menghambat majunya usaha tepung tapioka di Desa Bulu Kediri. Berikut ini dijelaskan

masalah-masalah tersebut.

## Masalah-Masalah Pengusaha Tepung Tapioka di Kediri

### 1. *Belum terbentuknya lembaga usaha*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha Tepung Tapioka di Kediri dijalankan secara pribadi dan belum terlembaga dalam suatu kelompok usaha sehingga manajemen usaha belum dijalankan secara profesional. Berdasarkan data wawancara yang dihimpun menunjukkan bahwa usaha tepung tapioka di Desa Bulu Kediri berjalan tanpa organisasi usaha. Hal ini berlangsung sejak usaha tersebut dijalankan pada tahun 1950 hingga saat ini. Misalnya, Suwandi, pengusaha tapioka di Desa Bulu, mengatakan “usaha ini dirintis oleh nenek kakek kami. Dari dulu hingga saat ini, model usaha tetap seperti ini. Kami jalankan usaha ini sendiri-sendiri (wawancara, 12 Juli 2017).

Tentu saja, usaha tanpa organisasi usaha berdampak langsung pada lambatnya perkembangan usaha yang ditekuni. Berdasarkan data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa perkembangan usaha tepung tapioka di Desa Bulu tergolong sangat lambat. Hal ini ditunjukkan peralatan yang mendukung usaha mereka masih sangat tradisional seperti peralatan pengeringan sari ketela pohon masih menggunakan anyaman bambu dan mengandalkan sinar matahari. Peralatan konvensional seperti ini berdampak langsung pada lambatnya proses produksi tepung tapioka di desa ini.

Sejalan dengan temuan di atas, Fitrotin (2006) mengatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan wirausaha terutama apabila dijalankan secara pribadi, di antaranya adalah kedisiplinan, keterbatasan modal, penyediaan bahan baku, kerumitan proses produksi, dan pemasaran. Selain itu, pembentukan kelompok usaha memiliki pengaruh terhadap peningkatan etos kerja para anggota kelompok.

Karena itu, harusnya para pengusaha tepung pati di desa ini mulai berfikir untuk membentuk kelompok usaha sebagai sarana bersama dalam mengembangkan usaha ke arah yang lebih maju. Pranata dan Sudarjo (1999) dalam hasil penelitian mereka menemukan bahwa pembentukan kelompok (teambuilding) ternyata menimbulkan etos kerja serta mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi produktivitas insani.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan etos kerja melalui pembentukan kelompok usaha akan berkontribusi terhadap pengembangan usaha masyarakat. Peningkatan etos kerja melalui pembentukan kelompok usaha secara tidak langsung juga merupakan upaya bagi masyarakat untuk memberdayakan dirinya sendiri. Andayani (t.t) dalam jurnal berjudul Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan berkelompok

masyarakat akan memiliki wadah dalam melakukan kegiatannya. Dengan demikian, kondisi demikian akan berimplikasi terhadap upaya-upaya para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

## 2. *Minimnya keterampilan SDM dalam mengembangkan*

Usaha Keterampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha memiliki peranan yang sangat penting. Namun, dalam temuan ini, usaha Tepung Tapioka di Kediri dihadapkan dengan rendahnya keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi mendalam melalui pertemuan informal antara peneliti dan para pengusaha tapioka menunjukkan bahwa para pengusaha tapioka belum memiliki wawasan yang cukup tentang manajemen usaha (produksi dan pemasaran) tepung tapioka. Mereka selama ini hanya memasarkan bahan setengah jadi yaitu endapan ketela pohon yang sudah mengering langsung dijual atau dipasarkan ke para tengkulak. Rudi mengatakan “selama ini yang kami jual adalah endapan ketela pohon yang sebelumnya sudah dikeringkan melalui sinar matahari (Wawancara, 22 Juli 2017).”

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2011) juga menyatakan bahwa sumber daya manusia masih menjadi masalah pokok dalam upaya pengembangan UMKM. Tentu, minimnya keterampilan SDM seperti tersebut juga berdampak langsung pada stagnasi usaha.

Karena itu, kemampuan SDM dalam mengembangkan usaha tepung tapioka di Desa Bulu wajib diperkuat sehingga usaha tersebut menjadi lebih maju dan berdaya saing. Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pengembangan UMKM. Hal ini konsisten dengan pernyataan teoretik Ardiana, Brahmayanti, dan Subaedi (2010) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM UKM memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja UKM. Dengan kata lain, baik atau buruknya kinerja suatu UMKM tergantung pada pelaku atau sumber daya manusia UMKM tersebut. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan UMKM merupakan sebuah keharusan. Hal ini mengingat bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kinerja berujung pada produktivitas perusahaan (Dhania dan Hervi, t.t). Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal (Hafsah dalam Raselawati, 2011).

Masalah ini mendorong pemerintah melalui Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum

kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs*), dan peningkatan akses ke pelatihan dan layanan pendampingan usaha. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia tersebut mencerminkan bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam pengembangan UMKM.

### 3. *Keterbatasan modal usaha*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha Pati Tepung Tapioka di Kediri memiliki keterbatasan modal usaha sehingga berimplikasi terhadap lambatnya pengembangan usaha tersebut. Berdasarkan hasil diskusi mendalam kami di lokasi penelitian menyimpulkan bahwa selama ini para pengusaha tepung tapioka tidak memiliki modal (uang) untuk mendukung produksi dan pemasaran hasil usaha. Modal yang mereka gunakan untuk usaha adalah modal pinjaman dari para tengkulak tepung di desa tersebut.

Temuan tersebut selaras dengan hasil kajian dilakukan oleh Syariifah (2015) yang mengungkapkan bahwa masalah yang paling dominan yang dihadapi pelaku UMKM adalah masalah modal usaha. Kemudian, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (2013) pun mengakui bahwa masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki karena terbatasnya akses sumber permodalan dari UMKM dan sulitnya UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Keterbatasan modal dalam pengembangan usaha hakikatnya merupakan persoalan klasik yang selalu melekat pada suatu usaha atau bisnis. Harahap (2015) dalam jurnal berjudul Analisis Hukum Pemberian Kredit kepada Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara juga menyebutkan bahwa keterbatasan sumberdaya yang dimiliki UMKM khususnya modal dan teknologi merupakan kendala klasik yang selama ini dihadapi UMKM dalam memperluas kegiatan bisnisnya.

### 4. *Permainan tengkulak ketela pohon*

Masalah lain yang ditemukan penelitian ini adalah adanya permainan tengkulak ketelapohon (bahan baku tepung pati) yang merugikan pengusaha tepung tapioka di Desa Bulu Kediri. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterbatasan dan sulitnya pengusaha Pati Tepung Tapioka di Kediri dalam mengakses sumber permodalan mendesak para pengusaha tersebut untuk mencari jalan pintas menggunakan jasa pinjaman kepada tengkulak. Upaya tengkulak dalam menyediakan modal bagi para pengusaha kecil hakikatnya sudah umum terjadi.

Tengkulak memiliki posisi yang strategis dalam menghubungkan antara pengusaha kecil dengan pembeli. Bahkan, tengkulak dalam beberapa kasus mampu memberi dampak positif terhadap pengusaha kecil tersebut. Azizah (2016) menemukan bahwa tengkulak yang memiliki sisi positif yaitu tengkulak yang memiliki peran sebagai pengumpul, pembeli,

penghubung, dan pemasar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tengkulak mampu membantu para pengusaha kecil untuk mendistribusikan barang yang hendak diperdagangkan.

Namun di sisi lain, keberadaan tengkulak justru merugikan para pengusaha kecil tersebut. Pada suatu kasus, Amy dan Adiba (2010) mengungkap kerugian seorang nelayan yang disebabkan oleh tengkulak:

*"Pada awalnya tengkulak memberi modal Rp 15.000.000,00 yang berupa perahu beserta alat-alat dan perlengkapan untuk menangkap ikan pada nelayan. Tengkulak menganggap Rp 15.000.000,00 tersebut sebagai hutang. Nelayan dalam pelunasan hutang yang Rp 15.000.000,00 tidak diizinkan untuk membayar dengan sistem cicilan. Jadi nelayan harus membayar kontan Rp 15.000.000,00 jika ingin terbebas dari hutang tersebut. Permasalahan pun muncul ketika nelayan harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada tengkulak tersebut dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar. Kasus yang pernah terjadi yaitu harga ikan layur dipasar Rp 23.000,00/kg, tengkulak membeli dari nelayan Grajagan seharga Rp 15.000,00/kg. Bahkan pernah terjadi ketika harga ikan lemuru dipasaran 10.000/kg, tengkulak membeli dengan harga Rp 1.500,00/kg saja."*

Berdasarkan temuan di atas menunjukkan bahwa tengkulak bersikap sewenang-wenang sehingga mengakibatkan kerugian terhadap nelayan. Tim Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2016) dalam naskah Jumpa Pers berjudul Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat: Tingkatkan Tawar Petani-Nelayan juga menyebutkan bahwa kondisi demikian mengakibatkan keuntungan terbesar justru dinikmati pedagang perantara atau tengkulak.

Hasil penelitian ini pun memiliki kedekatan kasus dengan kasus yang diangkat di atas. Para tengkulak ketela pohon membeli ketela dengan harga yang sangat murah kepada petani tetapi menjualnya kembali kepada pembeli atau penampung tepung dengan harga yang lebih mahal. Oleh sebab itu, sebagaimana hasil penelitian ini, meskipun di satu sisi tengkulak mampu menjadi alternatif atas keterbatasan pengusaha dalam mengakses modal usaha namun di sisi lainnya justru menjadi bumerang yang berakibat pada tersandernya pengembangan usaha Pati Tepung Tapioka di Kediri.

##### **5. Permainan pengusaha penampung tepung**

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penjualan tepung melalui proses rantai distribusi yang cukup panjang. Ketela pohon yang dibeli langsung dari petani oleh tengkulak akan dijual kepada pengusaha penampung atau pengepul tepung. Pengusaha pengepul tepung dalam rantai distribusi ini memiliki peran penting untuk mengatur harga karena selain memiliki modal yang besar juga memiliki jaringan pasar yang luas.

Sejalan dengan temuan kami tersebut, Rahmawati (1999) juga mengungkap bahwa posisi pengepul dalam pemasaran kuat karena memiliki sumber informasi yang lebih banyak yaitu

dari pengecer dan grosir untuk pasar dalam negeri serta eksportir untuk pasar luar negeri. Selanjutnya, Saptana dan Sartika (2014) menemukan bahwa dari berbagai jalur rantai pasok posisi pedagang pengumpul dan pengepul adalah yang paling strategis, karena pelaku inilah yang memiliki akses ke peternak dan akses ke berbagai tujuan pasar dengan baik. Panjangnya rantai distribusi ini secara tidak langsung merugikan para petani. Walaupun harga akan bergerak sesuai tarik ulur permintaan dan penawaran barang, selisih keuntungan akan lebih banyak dinikmati tengkulak/pengepul (Fuad, Aenuroik, dan Rosyid, 2015).

Kuatnya posisi daya tawar tersebut berpotensi membuka celah bagi pengepul untuk memperlakukan harga seenaknya.

Ralunan dan Widodo (2015) menemukan bahwa tidak jarang pihak pengepul atau juragan memainkan harga tembakau guna memaksimalkan keuntungan sendiri tanpa memperhitungkan kerugian yang harus ditanggung oleh petani. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa permainan pengusaha penampung atau pengepul secara tidak langsung berkontribusi terhadap kerugian yang dialami petani. Dengan demikian, petani sebagai produsen justru terkesan sangat lemah. Prihatini (2014) juga menemukan bahwa kebutuhan modal yang masih menggantungkan kepada pedagang pengepul sebagai pemilik modal sangat merugikan petani karena tidak bisa menentukan harga yang diinginkan petani bahkan yang terjadi harga biji kopi ditingkat petani jauh di bawah harga pasar. Rendahnya harga jual di tingkat petani berimbas pada rendahnya keuntungan yang diperoleh sehingga potensi penguatan modal usaha juga lemah.

Temuan-temuan penelitian lain yang dijelaskan di atas juga berlangsung secara masif di usaha tepung tapioka di desa bulu kediri. Relasi antara pengusaha tepung tapioka dan para pengepul dinilai tidak mencerminkan relasi berkeadilan. Pasalnya, para pengepul tepung memberi modal usaha kepada para pengusaha tepung untuk menjalankan usahanya. Kemudian hasil usaha para pengusaha tepung tapioka harus dijual ke pengepul penyedia modal tersebut dengan harga murah. Pada kasus ini, posisi pengusaha tepung tapioka adalah seperti buruh pada usahanya sendiri, sedangkan yang menjadi bos dalam usaha mereka adalah para pengepul tepung.

## Model Manajemen UMKM: Usaha Pati Tepung Tapioka

### 1. *Pembentukan lembaga usaha (Kelompok Usaha)*

Pembentukan kelompok usaha oleh pengusaha Pati Tepung Tapioka di Kediri merupakan langkah awal untuk mengembangkan UMKM tersebut. Keterlibatan jaringan kelompok sebagai basis dalam jaringan usaha diharapkan dapat mengatasi permasalahan permodalan dan kedisiplinan pelaku usaha. Demikian pula hambatan penyediaan bahan baku dan proses produksi serta pemasaran dapat diatasi dengan pengelompokan tugas (difersifikasi) dari bagian bahan baku dan proses produksi sampai pemasarannya (Daulay, 2014).

Pelembagaan usaha menjadi sebuah kelompok usaha tidak hanya dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi UMKM saja, melainkan juga berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha. Indrika (2013) dalam skripsi berjudul *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung dalam Meningkatkan Kualitas Hidup (Studi di Desa Wonokerso Tembak Temanggung)* menemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran program KUBE Tanjung menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu strategi yang mengikutkan anggota dalam manajemen kegiatan mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi untuk mencapai tujuan bersama yakni meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota KUBE Tanjung di Desa Wonokerso. Berdasarkan temuan tersebut, usaha yang dijalankan secara berkelompok tidak hanya berkaitan dengan pengembangan usaha namun juga berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggotanya.

Namun demikian, pembentukan kelompok usaha harus didasarkan pada kesamaan visi dalam mengembangkan usaha. Pada suatu kasus, kelompok usaha justru tidak berjalan secara efektif karena tidak adanya satu kesatuan visi maupun hal-hal yang bersifat teknis. Hermanto dan Swastika (2011) dalam jurnal berjudul *Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani* menemukan bahwa secara umum kelompok tani di Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan belum dapat berperan dan berfungsi sebagai organisasi usaha tani yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan inovasi, dan perluasan pemasaran. Longgarnya eksistensi kelompok tani ini karena beberapa alasan, diantaranya yaitu belum ada visi kepentingan yang sama diantara anggota, belum ada kader tani yang berdedikasi dalam menggerakkan petani lainnya, dan aspek *leadership* yang masih kurang.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, pembentukan kelompok usaha melekat erat dengan dampak positif maupun negatif. Namun demikian, kelompok usaha yang dikelola secara profesional memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan pelaku usaha maupun terhadap pengembangan usaha itu sendiri. Oleh sebab itu, pendampingan pembentukan kelompok usaha Pati Tepung Tapioka di Kediri merupakan podium untuk menyamakan visi dan persepsi tentang pengembangan usaha agar menjadi lebih produktif sehingga terhindar dari hal-hal buruk yang dikhawatirkan menghambat pengembangan usaha. Melalui kelompok usaha, para pengusaha terlindungi dari segi administrasi, pengusaha dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha, dan pengusaha dapat menjadikan organisasi usaha sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara pengusaha, pemerintah, dan pasar.

## 2. *Memperkuat jaringan kerjasama antara Kelompok Usaha, Pasar, dan Petani Ketela Pohon*

Pembentukan kelompok usaha membuka peluang terhadap penguatan jaringan atau kemitraan dengan berbagai pihak. Zakaria (t.t) dalam jurnal berjudul *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani* menyatakan bahwa upaya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani ditempuh melalui pemberdayaan organisasi ekonomi rakyat (petani) yang dilakukan sungguh-sungguh, konsisten, dan berkesinambungan dalam tiga fase mulai dari pemberdayaan kelembagaan, pengembangan jaring kemitraan bisnis hingga ke fase peningkatan daya saing. Pernyataan tersebut secara eksplisit mengungkapkan bahwa pengembangan jaringan kerjasama atau kemitraan merupakan tahapan penting untuk mengembangkan usaha khususnya meningkatkan daya saing.

Memperkuat jaringan kemitraan antara kelompok usaha dengan berbagai pihak memiliki dampak positif yang cukup signifikan terhadap pengembangan dan kemandirian usaha. Nawawi (2016) dalam jurnal berjudul *Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan* menemukan bahwa pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin keberlangsungan usaha dan pekerjaan di sektor perikanan serta mendukung peningkatan ekonomi dan sosial penduduk yang lebih luas hingga bahkan melepas ketergantungan nelayan terhadap lembaga permodalan tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa kuatnya jaringan kerjasama berkontribusi terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu,

kemampuan melepaskan diri dari lembaga permodalan tradisional seperti tengkulak merupakan langkah penting khususnya bagi pelaku usaha Pati Tepung Tapioka. Hal ini mengingat bahwa melalui jaringan kemitraan, kelompok usaha memiliki daya tawar yang tinggi untuk memutus rantai bisnis yang tidak sehat tersebut.

### 3. *Memperkuat modal usaha melalui sistem simpan pinjam*

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam rangka kepentingan produktif. Koperasi atau Unit Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan (Budiman, t.t). Hal ini merupakan kekuatan atau modal penting untuk mengurangi atau bahkan meniadakan ketergantungan para pengusaha dari jeratan tengkulak khususnya bagi para pengusaha Pati Tepung Tapioka di Kediri.

Farhana (2010) dalam skripsi berjudul *Pemberdayaan Masyarakat melalui Simpan Pinjam (Studi Kasus: Program Simpan Pinjam di BlvIT Khairul Ummah Leuwi, Liang-Bogor)* menemukan bahwa ternyata dengan adanya BMT Khairul Ummah melalui program simpan pinjam menjadi salah satu alternatif bagi para usaha kecil maupun menengah dalam segi perbaikan ekonomi dan peningkatan usaha mereka. Pengembangan usaha yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat melalui sistem simpan pinjam juga diungkap oleh Iyan dan Yuliani (t.t) dalam jurnal berjudul *Peran Kredit Koperasi Simpan Pinjam terhadap Peningkatan Pendapatan dan Usaha Anggotanya di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir* menuliskan bahwa pemberian kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir kepada anggotanya cukup berarti dalam meningkatkan pendapatan dan omset usaha anggotanya.

Berdasarkan dua temuan penting di atas, sistem simpan pinjam memiliki manfaat yang substantif terhadap kebutuhan pengusaha kecil maupun menengah. Hal ini sekaligus merupakan jawaban atas persoalan permodalan pengusaha Pati Tepung Tapioka di Kediri yang bergantung kepada tengkulak yang hakikatnya menghambat kemajuan usaha para pengusaha. Dengan demikian, sistem simpan pinjam sebagai sumber penguatan modal bagi pengusaha Pati Tepung Tapioka adalah alternatif yang solutif dalam mengembangkan usaha tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa model manajemen pengembangan usaha Pati Tepung Tapioka mengacu pada tiga unsur penting yaitu pembentukan lembaga usaha, penguatan kemitraan, dan penguatan modal usaha. Sinergitas ketiga unsur tersebut merupakan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi para pengusaha Pati Tepung Tapioka di Kediri. *Pertama*, berdasarkan deskripsi di atas, pembentukan kelompok usaha akan mendorong para pengusaha untuk mengelola bisnisnya secara profesional sehingga berdampak terhadap pengembangan usaha. *Kedua*, melalui kelompok usaha, para pengusaha memiliki potensi besar untuk memperkuat jaringan kemitraan dengan petani, pasar, dan pemerintah. Bahkan, hal ini dapat memperpendek rantai distribusi yang selama ini merugikan para petani maupun pengusaha kecil. *Ketiga*, pembentukan kelompok usaha di sisi lainnya juga akan berimplikasi terhadap penguatan modal usaha melalui sistem simpan pinjam. Selain itu, kuatnya jaringan kemitraan selanjutnya akan mempermudah dan memperluas akses bagi para pengusaha untuk memperkuat modal usaha melalui lembaga perbankan maupun non-perbankan.

## **Kesimpulan**

Pengembangan Usaha Pati Tepung Tapioka di Kediri merupakan agenda jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya para pengusaha kecil tepung tapioka tersebut. Selain itu, dalam skala yang lebih luas, upaya pengembangan usaha pati tepung tapioka merupakan upaya untuk menyediakan tepung bagi kebutuhan nasional. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengembangan usaha pati tepung tapioka dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah belum terbentuknya lembaga usaha, minimnya keterampilan SDM dalam mengembangkan usaha, terbatasnya modal usaha, dan permainan tengkulak dan pengusaha penampung tepung yang memberi dampak negatif terhadap petani maupun pelaku UMKM. Namun demikian, Tim merumuskan langkah solutif untuk meminimalisasi kompleksitas permasalahan di atas. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya adalah pembentukan lembaga usaha, penguatan jaringan kemitraan antara kelompok usaha, pasar, petani, dan pemerintah, serta penguatan modal usaha melalui sistem simpan pinjam.

## Daftar Pustaka

- Afifah, R. Z., & Setiawan, A. H. (2012). *Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Amy dan Adiba (2010) dalam karya tulis ilmiah berjudul *Membebaskan Nelayan dari Jeratan Tengkulak dari Segi Permodalan Melalui Program Pemberdayaan Kemandirian Nelayan dengan KUD Syariah (Studi Kasus: Nelayan Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)*
- Ardiana, I. D. K. R., Brahmayanti, I. A., & Subaedi, S. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *Jurnal manajemen dan Kewirausahaan*, 12(1), pp-42.
- Asiati, D., & Nawawi, N. F. N. (2017). KEMITRAAN DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP: STRA UNTUK KELANGSUNGAN USAHA DAN PEKERJAAN. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 1(2), 103-118.
- Azizah, E. N. (2016). Peran Positif Tengkulak dalam Pemasaran Buah Manggis Petani: Studi Jaringan Sosial Tengkulak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 1(1), 80-102.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Daulay, R. (2014). STRATEGI JARINGAN USAHA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT. *JURNAL EKONOMIKAWAY*, 11(12). Farhana, L. F. Peberdayaan masyarakat melalui simpan pinjam: studi kasus program simpan pinjam di BMT Khairul Ummah Lew Liang - Bogor.
- Ediarno. (2015). Posisi Teori Ekonomi Bagi Hasil Didalam Perkembangan Kajian Ekonomi Politik. <http://ekonomi-bagi-hasil.com/wp-content/uploads/2015/05/POSISI-TEORI-EKONOMI-BAGI-HASIL-.pdf>
- Fitriati Rachma. (2015). *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*. Jakarta: Buku Obor.

- Fitrotin, U., Hastuti, S., & Arif, S. (2006). Teknologi Pengolahan Singkong Terpadu Skala Rumah Tangga di Pedesaan. In *Prosiding Seminar Nasional Ketahanan Pangan di Mataram Nusa Tenggara Barat*.
- Fuad, I. Z., Aenurofik, A., & Rosyid, A. (2015). BELENGGU TENGGULAK ATAS PETANI PEMBUDIDAYA LELE: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal Jawa Tengah. *JURNAL HUKU ISLAM*, 13(2), 88-98.
- Hadi, D. P. (2015). STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DALAM RANGKA MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS 2015 (STUDI KASUS DI PNPM-MP KABUPATEN KENDAL). *C/V/S*, 5(1/Januari).
- Hadipranata, A. F. (1999). PENGARUH PEMBENTUKAN KELOMPOK (TEAM BUILDING) IERHADAP ETOS KERJA DAN KONTRIBUSINYA BAGI PRODUKTIVITAS KERJA INSANI. *Jurnal Psikologi*, 26(1), 18-28.
- Hadiwijoyo, R. (2014). *Model Pengembangan Kawasan Industri Benvawasan Lingkungan dengan Tinjauan Penggunaan Energi di Kawasan Industri Krakatau Cilegon* (Doctoral dissertation, Program Doktor Ilmu Lingkungan).
- Handoko Yunus. (2013). *Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx dan Keynes*. *Jurnal JIBEKA Volume 7 No 2*, 64 – 70.
- Harahap, A. J. (2015). Analisis Hukum Pemberian Kredit kepada Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(2), 125-131.
- Indrika (2013) dalam skripsi berjudul *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung dalam Meningkatkan Kualitas Hidup (Studi di Desa Wonokerso Tembarak Temanggung)*
- Iyan, R. Y. (2013). Peran Kredit Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Usaha Anggotanya Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ekonomi*, 19(04).
- Kurniawan, F. D., & Fauziah, L. (2014). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penanggulangan Kemiskinan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 165-176.

- Lie, L., & Kis, I. (2008). MENDORONG PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN PROGRAM—PROGRAM BERBASIS KNOWLEDGE MANAGEMENT. *Dinamika Ekonomi*, 1(1).
- Mongid Abdul dan Notodihardjo Soegeng FX. (2011). *Pengembangan Daya Saing UMKM di Malaysia dan Singapura: Sebuah Komparasi*. Jurnal Keuangan dan perbankan Volume 15 No. 2, 243-253.
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2011). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 13(1).
- Prihatini, D. VALUE CHAIN ANALYSIS (ANALISIS RANTAI PASOK) UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KOPI PADA INDUSTRI KOPI BIJI RAKYAT DI KABUPATEN JEMBER.
- Pujiono, A. (2010). Dampak Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Program Zakat Produktif dan berbasis pada Pemberdayaan Keluarga Swadaya Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekbisi*, 5(1), 1-20.
- Rahman, M., & Widodo, S. (2015). DAMPAK KEBIJAKAN ANTI TEMBAKAU I LRHADAP STRATEGI NAFKAH PETANI TEMBAKAU MADURA (Studi Kasus Desa Panugan Kecamatan Proppo Pamekasan). *Media Trend*, 10(2), 114-124.
- Rahmawati, E. (1999). Analisis Saluran Pemasaran Manggis (Studi Kasus Desa Puspahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat).
- Rapini, T., Farida, U., & Adji, S. (2016). MENUJU KEBERHASILAN PEMBINAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PONOROGO. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL-HASIL PENELITIAN 2016: BIDANG AGALVIA ISLAM BUDAYA, EKON014 SOSIAL HUMANIORA, TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN* (pp. 103-112). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO.
- Resalawati, A. (2011). Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia.
- Saptana, S., & Sartika, T. (2014). Manajemen rantai pasok komoditas telur ayam kampung. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 11(1), 1-11.

- Sari Resmi Yunita dkk. (2015). *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi MEA 2015 dan Pasca MEA 2025*. Working Paper Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents>
- Sarwoko, E. (2009). ANALISIS PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM DALAM UPAYA PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN MALANG. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(3), 172-188.
- Simon Vaut dkk. (2014). *Ekonomi dan Sosial Demokrasi*. Diterjemahkan oleh: Dr. Ivan. A. Hadar. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia.
- Sulistyo, H., & Adiatma, A. (2011). Model optimalisasi kemitraan usaha kecil menengah dan badan usaha milik negara melalui program kemitraan dan bina lingkungan untuk meningkatkan kinerja. *Journal IPTEK*, 5(2), 25-40.
- Surjaningsih Ndari, Utari Diah, dan Trisnanto Budi. (2012). *Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output Dan Inflasi*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/documents/259779accf9e4b709a9b933ceffbc3e3ndarisurjaningsihgadiahutaribu.ditrisnanto.pdf>.
- Swastika, D. K. (2016). Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 371-390.
- SYARIIFAH, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Studi Pustaka*.
- SYARIIFAH, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Studi Pustaka*.
- Wijana, S., Nurika, I., & Habibah, E. (2012). Quality feasibility analysis on the tapioca flour processed from dried cassava (The effect of dried cassava origin and calcium hypochlorite concentration used). *Jurnal Teknologi Pertanian*, 10(2).
- Zakaria, W. A. (2009, October). Penguatan kelembagaan kelompok tani kunci kesejahteraan petani. In *Di dalam Makalah Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani*. Bogor (Vol. 14).

## Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas

Yusuf Adam Hilman  
Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
545471adamongis@gmail.com / adamhilman@umpo.ac.id

Elok Putri Nimasari  
Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
elokputrinimasari@gmail.com

### Abstract

*This study examines the issue of community empowerment, which is considered to be a solution problem of poverty, which is more interesting when the community of "Janda" becomes an important object. This research focuses on the study of community-based community empowerment model in Janda village. Purpose is able to measure the effectiveness and also the ideal form of community empowerment program model in the village of Janda, Dadapan Village, Balong District, Ponorogo Regency. The research are method qualitative descriptive approach, with object in research is the people members, especially mothers who berrstatus "widow" in the Dadapan Village, Balong District, Ponorogo Regency.. Activities include 1). Training of processed food from the existing agricultural potential, 2). Make a kitchen granary from the land around the community. 3). Train the art activities of mothers who are "Janda". From concluded this research is community empowerment activities in Dadapan Village, Balong District, Ponorogo Regency, which have been done are very focused on "Janda", so that the activity is expected to contribute, to the life of those who is distressed or increase the independence of the family, with this activity, economical but psychologically they will be motivated to become a powerful individual.*

**Keyword:** *Community, Janda, Community Empowerment.*

### Abstrak

*Penelitian ini mengkaji persoalan pemberdayaan masyarakat yang dianggap menjadi penyelesaian bagi persoalan kemiskinan, yang lebih menarik adalah ketika komunitas "janda" menjadi obyek yang penting. Penelitian ini di fokuskan kajian terhadap model pemberdayaan masyarakat berbasis Komunitas di desa Janda. Tujuannya supaya bisa mengukur efektifitas dan juga bentuk ideal dari model program pemberdayaan masyarakat di desa Janda Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan obyek penelitian adalah anggota masyarkaak khususnya ibu – ibu yang berrstatus "janda" di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Kegiatannya meliputi 1). Pelatihan pembuatan olahan hasil pangan dari potensi pertanian yang ada, 2). Membuat lumbung dapur dari lahan di sekitar masyarakat. 3). Melatih kegiatan berkesenian ibu – ibu yang berstatus "Janda". Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Dadapan, yang telah dilakukan sangat fokus terhadap "janda", sehingga kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi, terhadap kehidupan mereka yang kesusahan dan meningkatkan kemandirian keluarga, dengan adanya kegiatan ini, tidak hanya secara ekonomis namun secara psikologis mereka akan termotivasi untuk menjadi individu yang berdaya.*

**Kata Kunci:** *Komunitas, Janda, Pemberdayaan Masyarakat*

Submite	: 10 September 2017
Review	: 15 November 2017
Accepted	: 01 Januari 2018
Surel Corespondensi	: darwisnasution@gmail.com

## Pendahuluan

Persoalan Janda, bukan hanya permasalahan stigma yang berkembang di Masyarakat, terkait status janda dianggap oleh sebagian masyarakat bercitra negatif, tabu, dan juga diremehkan oleh masyarakat, karena dianggap hina, namun status janda bukanlah menjadi halangan bagi seseorang untuk memilih menjadi Janda dengan cara bercerai karena berbagai pilihan.

*The stigmatisation of widows and divorcees that is elaborated in articles in this issue can be contextualised in a variety of ways. Here I use mainly anthropological literature on societies in Indonesia to sketch two different sorts of context that help us to make sense of the stigma: firstly, stigma attached to women in Indonesia for a variety of conditions to do with marriage and sex, and secondly, attitudes towards divorce in diverse cultural contexts in Indonesia and shifts in these since the 1950s. The role of the New Order state in transforming attitudes towards divorce is singular. Through its mass schooling programmes, family and gender ideology and general development policies, it was influential in constructing new understandings of marriage and divorce, and through legislation and regulation directly instrumental in making divorce much more difficult for women. These two contexts show that the stigmatisation of janda resonates with other stigmas applied to women who do not or cannot measure up to the ideal of womanhood in Indonesia: the properly married, fertile ibu (mother/wife). It gets traction from changing social morés which now denigrate divorce and make women who seek divorce feel ashamed. In other words, the stigma works because it uses the cultural resources at hand: janda are easily constructed as women of ill repute who contrast with the virtuous ibu who have husbands. Of course I could have contextualised the stigma using other approaches – for instance, socio-economic, legal or historical approaches.<sup>1</sup>*

Pilihan menjadi janda merupakan konsekuensi logis, dari berbagai fenomena yang berawal atau berangkat dari, proses pernikahan yang dianggap tidak dipersiapkan secara optimal, misalnya kesiapan dari beberapa aspek, seperti: kematangan psikologis, kemampuan finansial, kematangan usia pernikahan, dan juga kesiapan pasangan dalam mengatasi persoalan kehidupan. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan persebaran angka perceraian paling tinggi di Indonesia<sup>2</sup>.

Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan kawasan penghasil janda atau lumbung penyumbang angka perceraian yang tinggi, misalnya Kabupaten Ponorogo, dalam pemberitaan

---

<sup>1</sup>Parker, Lyn, The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia. *Indones Malay World*. 2015;44(128):7-26. doi:10.1080/13639811.2015.1100863.

<sup>2</sup>Diakses dari [http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines](http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines) diakses 08 Desember 2018.

beberapa minggu terakhir pada harian radar Ponorogo, ada satu wilayah tepatnya di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, tercatat hampir 90 Persen masyarakatnya berstatus janda, baik cerai mati ataupun cerai hidup. Hal ini sangat merisaukan hati, bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi, sebenarnya di desa janda tersebut ada mitologi terkait “*mbok rondho*”, yang dianggap oleh masyarakat sekitar tersebut sebagai cikal bakal, kenapa wilayah tersebut memiliki jumlah Janda yang sangat banyak, namun kepala desa Dadapan, menegaskan bahwa penyebab perceraian atau beralihnya status dari nikah ke cerai, adalah karena banyaknya TKW yang sepulangnya dari merantau kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, hal inilah yang menurut Rusmiatin kepala desa Dadapan menjadi sebab utama.<sup>3</sup>

Berkaca terhadap persoalan yang ada di Desa Dadapan Kecamatan Balong tentang fenomena kampung janda, membuat kami berfikir ulang, terkait upaya apa yang sudah dilakukan atau tengah dilakukan oleh stakeholder maupun penggiat program – program pemberdayaan di wilayah tersebut, selain itu bagaimanakah ketahanan ekonomi serta kemandirian personal para janda, dalam upaya untuk mempertahankan kehidupan tanpa sosok kepala keluarga, sehingga kami ingin mengetahui bagaimanakah model pemberdayaan yang telah dilakukan, dan sejauhmana efektifitas program – program tersebut.

Muktasam mengutarakan bahwa bahwa proses pembangunan di wilayah pedesaan khususnya terkait dengan program pengentasan kemiskinan yang ada di Asia dan Afrika, bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya program pengentasan kemiskinan diantaranya: a). lebih menggunakan pendekatan '*target*' dan '*top-down*'; b).. Tidak memanfaatkan nilai – nilai lokal dan lebih bersifat formalitas atau bias '*outsiders*'; c). rendahnya partisipasi; d). memanfaatkan pendekatan yang tidak holistik; dan e). Ilusi investasi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini ada beberapa persoalan yang ingin di bahas yaitu: 1). Apa saja Program – program pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Janda, 2). Sejauhmana Efektifitas Program pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Janda, 3). Bagaimanakah Model yang tepat terkait dengan program pemberdayaan berbasis komunitas pada masyarakat yang berstatus Janda,

---

<sup>3</sup> Diakses dari Harian Ponorogopos edisi. No. 725 Tahun XV, 21 – 27 April 2016 pada 27 April 2016.

<sup>4</sup> Hadi AP, Negeri DD. Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. 2001.

## Metode Penelitian / Kajian Pustaka

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan kritis, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, hal ini bertujuan untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, sehingga peneliti bisa membuat sebuah evaluasi dari model Penelitian ini. Riset kualitatif berusaha untuk mengungkap berbagai fenomena serta realitas sosial, yang ada di masyarakat. Teori-teori sosial seperti sosiologi secara empiris biasanya dikembangkan melalui pendekatan kasus dan fenomena. Dengan demikian teori yang dihasilkan mendapatkan pijakan yang kuat pada realitas, bersifat kontekstual dan historis. Kualitatif riset dalam beberapa praktiknya memberikan banyak bagi dialog-dialog ilmiah, tentunya dengan pendalaman fenomena dan kasus. Berbagai ranah pendekatan kualitatif juga memberikan kesempatan bagi ilmuan dibidang sosial untuk mengembangkan keilmuan sosiologi lebih otonom.<sup>5</sup>

Penelitian kualitatif menurut J Meleong, memberikan kesempatan untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual, sehingga peneliti dapat berkomunikasi secara intensif dengan fenomena yang diteliti<sup>6</sup>. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, seperti: wawancara, interview, dokumentasi dan juga grup discussion. Pemilihan daerah penelitian dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa daerah tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat penelitian, Hal ini sangat penting supaya penelitian ini bisa maksimal, selain karena pertimbangan kedekatan wilayah peneliti yang berdomisili di Ponorogo. penelitian ini dilaksanakan di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

Peneliti menggunakan metode *snow ball sampling* dimana peneliti melakukan tes, terhadap 3 (tiga) orang responden, kemudian dari data tersebut digali kembali, informasi hingga kebutuhan data yang diperlukan berhasil dikumpulkan. Hal ini digunakan untuk mengetahui susunan dan pembatasan informan yang mungkin dipilih agar memenuhi kriteria dari data yang dibutuhkan. Menurut Usman dan Akbar mengatakan bahwa *snowball sampling* akan akan terus berkembang sampai dianggap data yang yang dikumpulkan representative<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Somantri GR. Memahami metode kualitatif. *Makara, Sos Hum.* 2005;9(2):57-65. <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118>.

<sup>6</sup> Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. [www.ejournal.-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal.-s1.undip.ac.id)

<sup>7</sup> Fallis A. No Title No Title. *J Chem Inf Model.* 2013;53(9):1689-1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004, [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Menurut Lofland dalam Moleong menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama, dokumen, laporan dan lain – lain merupakan data pendukung. Kita ketahui bahwa dalam penelitian kuantitatif terdapat subyek penelitian yang di jadikan sebagai sampling atau sampel, sednagkan dalam penelitian kualitatif lebih dikenal dnegan istilah informan atau pelaku, pendapat atau kata-kata, serta tindakan dari informan itulah yang kemudian menjadi sumber yang diamati atau di observasi dengan cara diskusi, wawancara dan dokumentasi. Pelaku tersebut atau orang yang digali informasinya disebut *keyinformans* atau yang dijadikan narasumber kunci terhadap persoalan yang akan diteliti. Data – data tersebut dikumpulkan melalui proses pengumpulan data dari seumber datu ke sumber yang lain dnegan cara menggelinging, hingga terpenuhi informasi atau data yang di butuhkan, inilah teknik yang dinamai sebagai *snowball smapling*<sup>8</sup>.

Miles dan Huberman menjelaskan tentang alur analisis data pada penelitian kualitatif dengan tiga tahapan besar, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data sendiri adalah proses pemilihan data kemudian dilanjutkan dengan penyederhanaan serta pemilahan data hasil penelitian di lapangan dari catatan–catatan yang telah dibuat oleh peneliti. Prosesnya dilakukan secara detail dan di salin terus - menerus selama proses penelitian. Kemudian proses selanjutnya adalah Reduksi data, dengan cara: meresume, di kodifikasi, sehingga terlihat jelas data sesuai dengan kebutuhan data. Reduksi data nantinya akan menampilkan data yang diperlukan, sehingga data – data yang dianggap tidak perlu bisa dihilangkan<sup>9</sup>.

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, dimana peneliti merupakan pengumpul data atau bagian dari instrument penelitian, melalui observasi langsung dan wawancara sehingga tidak terkontrol keberadaannya, sehingga subyektivitas data perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Moleong berpendapat bahwa ada beberapa criteria dalam pengujian

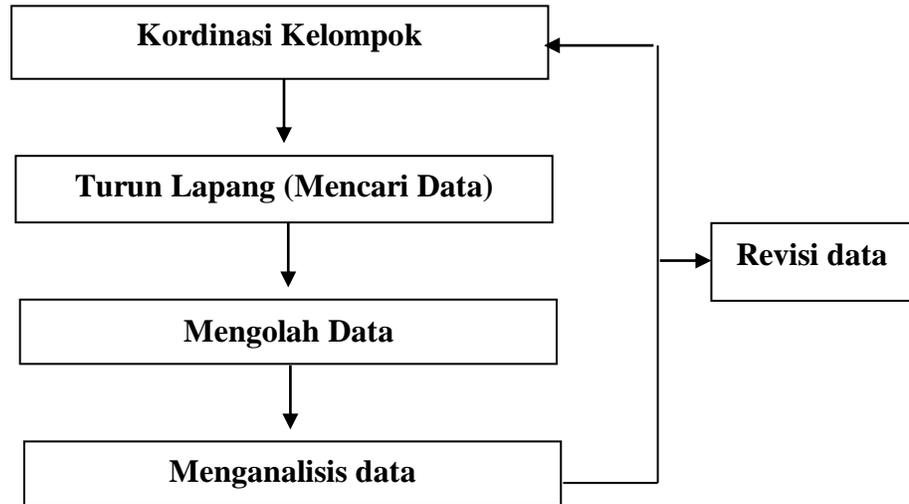
---

<sup>8</sup> Djaelani AR. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *FPTK IKIP Veteran Semarang*. 2013:82-92.

<sup>9</sup> Miles, MB dan AM Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE.

kebasahan data, diantaranya: (1) Credibility / derajat kepercayaan; (2) Transferability / keteralihan; (3) Dependability / kebergantungan dan; (4) Confirmability / kepastian.<sup>10</sup>

**Gambar 4.1 Skema Pengolahan dan analisis data**



Beberapa kajian yang telah ada, tidak banyak kajian yang mengulas tentang model pemberdayaan berbasis komunitas, yang ada yakni model – model meanfaatan program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, sehingga kajian yang membahas permasalahan program pemberdayaan berbasis komunitas masih sedikit, dan fokusnya hanya pada peranan organisasi, bukan konsep pemberdayaan yang berangkat dari komunitas yang ada pada wilayah tersebut. Untuk memperjelas kajian ini, maka kami akan melakukan Literatur Review untuk menegaskan bahwa kajian ini memang belum ada, sehingga menarik dan orisinalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

*Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kelompok: Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Memiliki 5 faktor utama eksistensi KUBE, yaitu: aset (asset), kemampuan (ability), kemasyarakatan (community), komitmen (commitment), pasar (market) selanjutnya diberi nama “KONSEP PEMBERDAYAAN ABCCM”. Tiga faktor kedinamisan KUBE, yaitu: pendampingan (guide), jaringan kerjasama (networking), dan inovasi (innovation). Ada beberapa variabel yang saling mempengaruhi dalam model, yaitu variabel dinamika kehidupan KUBE dipengaruhi pola pemberdayaan, karakteristik individu KUBE, dan*

<sup>10</sup> Ibid, S RWV.

lingkungan sosial KUBE. Sedangkan variabel tingkat keberhasilan KUBE dipengaruhi oleh dinamika kehidupan KUBE.<sup>11</sup>

*The complexity of the problem drive the worldwide commitment in reducing poverty all over the world by the draft of development goals, called Millennium Development Goals (MDGs) To promote the development, the effort to reduce poverty that mainly started by the unemployment must involve the society in participative platform. The participation pattern possibly reducing poverty to be more grounded, strengthen commitment between society in responsibility to reduce unwellfare. The local genius, for instance Lembaga Perkreditan Desa (LPD) that is own by the village association has the strategic role in reducing poverty trough the improvement of its social function beside the main function which is to improve the members welfare. The social function means the commitment and togetherness between member to institution and between members.*<sup>12</sup>

*Kedi Suradisastra, STRATEGI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI Farmer's Institutional Empowerment Strategy, Pusat Proses pengambilan keputusan dalam masyarakat petani merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas (community-based action) yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk (entry-point) upaya diseminasi teknologi. Dengan demikian setiap upaya pemberdayaan kelembagaan petani memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi tekno-sosial komunitas petani. Keberhasilan suatu program pemberdayaan merupakan resultan interaksi elemen-elemen pemberdayaan dengan strategi pemberdayaan yang diterapkan. Upaya dan strategi pemberdayaan merupakan suatu pendulum antara paradigma evolusi dan paradigma revolusi yang saling mengisi (overlap) dalam proporsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelembagaan petani*<sup>13</sup>.

*Para janda didapatkan bertahan hidup untuk memperjuangkan keterbatasan ekonomi rumah tangga mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran janda dengan tingkat pendapatan rendah yang bertanggung jawab untuk membiayai rumah tangga mereka. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemberdayaan dalam akses ekonomi, politik, dan sosial bagi para janda masih jauh dari kondisi sempurna. Penelitian ini menguraikan strategi untuk memberdayakan para janda melalui peningkatan produktivitas para responden, perluasan akses pendidikan, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen advokasi keluarga*<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Tampubolon J. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok. *skripsi*. 2006.

<sup>12</sup> I G. W. Murjana Yasa. 2005:86-91

<sup>13</sup> Suradisastra K. Farmer ' s Institutional Empowerment Strategy. 2008;26(70):82-91.

<sup>14</sup>S RWV, Ekonomika F, Bisnis dan, Diponegoro U. Analisis peran ganda dan strategi pemberdayaan janda yang bekerja di kota semarang. 2013.

Menurut Santrock Kehilangan pasangan hidup akibat kematian pasangan membuat individu memiliki status sebagai janda ataupun duda. Pada seorang perempuan, menyangkut status sebagai janda tidaklah mudah, karena semua pasangan hidup khususnya perempuan berharap pernikahan yang dibangun, bisa bertahan hingga ajal menjemput, sehingga usia pasangan bisa mencapai kakek dan nenek, dengan menjalankan tugas serta tanggungjawabnya.<sup>15</sup>

*The stigma attached to these women implies that they are unmarriageable, whether because of their looks, their behaviour or the status of their family. Parents and extended family exert remorseless pressure on women who are still unmarried in their mid-twenties to find a man; they often threaten to, and not uncommonly do, arrange their daughter's marriage, with or without the consent of their daughter. Unmarried women in their thirties often suffer social exclusion and relegation to child status, e.g. in life-cycle ceremonies and representation in local government. Single women who have become pregnant are also stigmatised, to the extent that it is extremely rare to find an unmarried mother in Indonesia, If still at school, they are usually forced to leave school. As Situmorang said, 'childbearing out of wedlock is unacceptable.'*<sup>16</sup>

Kegagalan pembangunan yang di gagas selama ini, disebabkan karena terlalu terfokus pada konsep ekonomis, selain itu pembangunan yang dilakukan tidak bersifat partisipatif, sehingga ada kesan jika masyarakat hanya dijadikan obyek, sehingga dikemudian hari kemudian menimbulkan problem baru berupa kesenjangan, dan berbagai macam bentuk ketergantungan yang berbahaya.

Paradigma yang berkembang di dunia mengenai program pemberdayaan memiliki dua kubu besar, yaitu: Pertama, asumsi yang berkembang di antara para aktivis sosial pada tahun 1970an yang di ilhami oleh semangat *developmentalisme*. Pondasi dari kubu ini, menitikberatkan pada kesadaran naif atau refomatif, yang hanya melihat faktor manusia sebagai akar masalah ketidakberdayaan dalam kehidupan. Kubu ini, secara umum hanya menolak konsep pendekatan pembangunan, yang selama ini dianggap sebagai biang keladi, yaitu pendekatan '*bottom up*' melawan pendekatan '*top down*'. sehingga disimpulkan bahwa diperlukan sebuah metode yang sesuai agar program - program pemerintah, bisa berjalan dan mencapai tujuan. kemudian *bottom up* serta partisipasi masyarakat menjadi isu – isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka mengutarakan bahwa kegagalan yang selama ini dialami lebih pada

---

<sup>15</sup>Setyowati L, Psikologi F, Surakarta UM. Kebermaknaan hidup pada janda. 2014.

<sup>16</sup>Parker, Lyn. Ibid

model pendekatan konvensional yang diantaranya adalah *transplantative planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer*, dan sejenisnya. Sehingga dianggap kurang tepat, alhasil pembangunan yang ada di Negara – Negara tersebut, hanya menghasilkan, beberapa hal, diantaranya: 1). Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*), 2).Melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara sedang berkembang terhadap negara maju. 3). Melahirkan ketergantungan (*dependency*) *pheriphery* terhadap *center*. 4). Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat terhadap Negara / pemerintah. 5). Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan, dll.) terhadap pemilik modal.<sup>17</sup>

Kondisi tersebut jika diteruskan maka akan membahayakan, karena sekali lagi korbanya adalah masyarakat lemah yang tidak berdaya, salah satu penyelesaian yang logis dan mungkin dilakukan yakni merubah konsep atau paradigma dengan lebih menekankan pada kegiatan yang bersifat partisipatif, dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek dengan cara memberikan kesempatan untuk merubah nasib dan keadaan agar lebih sejahtera lagi.

Pemberdayaan masyarakat sejatinya adalah proses dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga masyarakat menjadi komunitas yang memiliki ketahanan dalam berbagai sektor dalam lini kehidupan. Ada dua sudut pandang yang berkembang terkait aktifitas pemberdayaan masyarakat, yakni: Pertama, menempatkan masyarakat untuk memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan sehari - hari. Posisi tersebut bukan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*) yang dapat menjadikan masyarakat menjadi ketergantungan, posisi yang seharusnya adalah subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang bergerak secara kolektif untuk mencapai kemandirian. Namun demikian, menjadi mandiri tidak lantas Negara lepas tangan, tetapi masih diperlukan terutama dalam beberapa bidang, yang menjadi tanggungjawab Negara, seperti pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses

---

<sup>17</sup> Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. *Welfare Ilmu Kesejahteraan Sosial* , 87-102

politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan<sup>18</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses *depowerment* penyebarluasan dari sistem kekuasaan Negara yang bersifat mutlak-absolut (intelektual, religious, politik, ekonomi, dan militer). Dalam penjelasan Talcot Parson, kekuasaan dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Jumlah disini adalah *power* atau kekuasaan dari masyarakat yang berupa kekuatan anggota masyarakat secara menyeluruh yang kemudian disebut sebagai tujuan kolektif (misalnya, dalam pembangunan ekonomi). Konsep pemberdayaan dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal (El-Mandary, n.d.)<sup>19</sup>

Menurut Jim Ife pemberdayaan adalah: *"empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community"*. Sedangkan Suhendra berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah penyebarluasan kekuasaan kepada masyarakat agar mereka mampu menjadi komunitas atau individu yang mandiri.<sup>20</sup>

Perspektif yang berkembang selama ini adalah masyarakat yang dijadikan sebagai subyek bukan sebagai obyek, sehingga masyarakat mengalami ketergantungan, sehingga program-program pemberdayaan sulit mencapai tujuan, jika kemudian masyarakat diletakkan sebagai obyek, akan lebih mudah dalam mencapai tujuannya, disinilah perlu diciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa dikembangkan. Kearifan lokal merupakan salah satu kunci tentang bagaimana masyarakat dapat memahami dirinya sendiri, termasuk

---

<sup>18</sup> Cholisin. (2011, Desember). Pemberdayaan Masyarakat. *Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011*, Pp. 19-20.

<sup>19</sup> Diah, A. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa*, 175-188

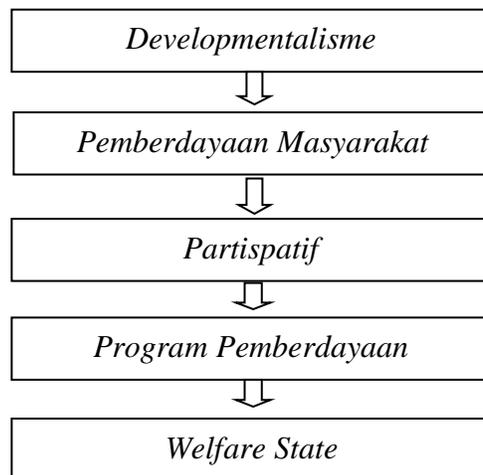
<sup>20</sup> Hidayat, T. (2010, September). Isu-Isu Aktual Penelitian Pemberdayaan Masyarakat. Pp. 1 – 11

ekmampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. tindakan konkrit yang bisa dilakukan yakni, penyediaan berbagai input serta memberikan akses pendukung potensi yang bisa membuat masyarakat menjadi makin berdaya, yakni dengan memberikan kepercayaan (trust) kepada mereka dalam mengelola input dan peluang tersebut.<sup>21</sup>

Ledwith berpendapat bahwa, ada 4 (empat) dimensi dasar dalam sebuah aktifitas pemberdayaan suatu komunitas, yakni: (i) pemberdayaan personal melalui pembelajaran, pengetahuan, kepercayaan diri, dan skill; (ii) aksi positif yang terkait dengan kemiskinan, kesehatan, ras, gender, ketidakmampuan/cacat, serta aspek- aspek diskriminasi yang menentang struktur kekuasaan; (iii) organisasi komunitas yang menyangkut kualitas dan keefektifan kelompok komunitas serta hubungan masing-masing kelompok dan dengan pihak luar; (iv) partisipasi dan keterlibatan untuk menuju perubahan komunitas ke arah yang lebih baik.<sup>22</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah kritik terhadap konsep pembangunan yang dikatan sebagai *developmentalisme* yang tidak kunjung menciptakan kesejahteraan, karena malah menjadi sebab tumbuhnya ketergantungan dan kesenjangan sosial, kemudian mulai tereduksi terhadap program – program di kehidupan masyarakat yang menekankan pada partisipasi yang benar – benar menjadikan manusia sebagai subyek bukan lagi obyek, sehingga setiap pribadi memiliki kesempatan untuk menentukan nasib dan juga kesejahteraannya masing – masing tentunya secara kolektif. Model dan juga skema konsep pemberdayaan, bisa di ilustrasikan sebagai berikut.

**Gambar 2.1 Kerangka teoritis Pemberdayaan Masyarakat**



<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Opcit

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari paradigma pembangunan yang lebih menitikberatkan pada seluruh aspek utama dari manusia dan lingkungannya, mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa dapat dikembangkan menjadi aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.<sup>23</sup>

Secara harfiah pemberdayaan menurut Sharp diartikan memberikan daya atau kekuatan kepada seorang individu dalam hal ini komunitas masyarakat, selain itu juga pemberdayaan bisa dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yakni: secara konseptual dan empirik. Secara konseptual lebih menekankan pada aspek 'pendidikan kesadaran' (consciousness education) sebagaimana yang diterapkan, dikembangkan dan disebarluaskan oleh Freire pada tahun 1970-an (seorang pendidik dari Brasil). pemberdayaan dijadikan sebagai sebuah sarana positif, yang lebih memungkinkan masyarakat dapat melakukan hal-hal tersebut, tanpa menunggu aksi dari faktor diluar mereka. Sedangkan empirik, yaitu berbagai bentuk program latihan yang bersifat partisipatif, sehingga dapat membuka pikiran masyarakat desa tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang praktis (*by doing*), dan menolong orang yang kurang berdaya dalam lingkungannya. Cara ini lebih menyadarkan mereka terhadap permasalahan kemiskinan yang ada dalam komunitasnya dan membantu mereka memahami sistem yang telah ada yang telah membatasi dan menghimpit mereka. Kesadaran ini akan mendorong mereka melakukan berbagai aksi untuk ke luar dari sistem kemiskinan.<sup>24</sup>

Ada 3 (tiga) pendekatan yang bisa digunakan dalam menjalankan program pemberdayaan, yaitu; 1). Pendekatan mikro, secara praktis caranya bisa melalui bimbingan, konseling, stress managemet, intervensi krisis. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas dalam kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). 2). Pendekatan mezzo yaitu memanfaatkan keberadaan kelompok sebagai media intervensi atau *treatment*. Caranya yakni melalui, Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 3). Pendekatan makro atau yang

<sup>23</sup>Desa PM. wong cilik". 2006;(2000):1-21.

<sup>24</sup>Ibid Tampubolon J.

biasanya disebut strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobi, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini.

## Hasil dan Pembahasan

Desa Dadapan Kecamatan Balong, merupakan salah satu daerah yang Kabupaten Ponorogo daerah ini beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan media karena di gegerkan dengan penamaan “*Kampung Janda*”, namun beberapa pihak menjelaskan bahwa stigma tersebut tidak benar, sehingga menimbulkan kontroversi. Ada beberapa asumsi terkait keberadaan “*janda*” di desa itu. Mengisahkan bahwa di desa ini dahulu terkenal dengan mitologi “*mbok rondo*” yang kemudian oleh masyarakat dipercaya kebenarannya, sehingga apabila ada perkawinan disitu, mitos nya tidak akan berlangsung lama atau awet, sehingga akan menyebabkan perceraian, hingga saat ini penduduk di daerah sekitar masih percaya.<sup>25</sup>

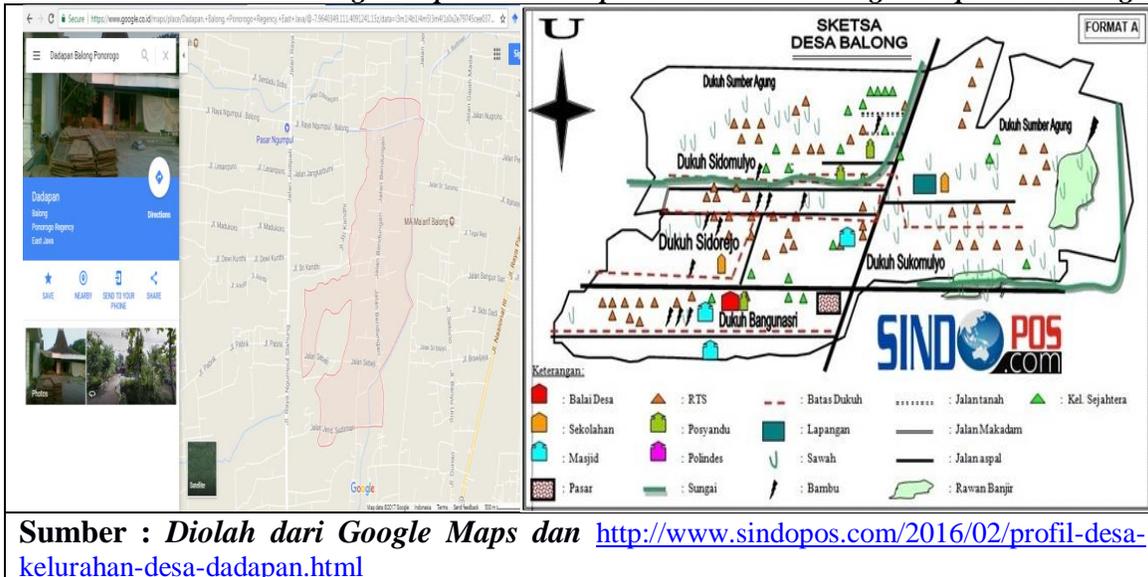
Desa Dadapan merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatannya Balong, mayoritas mata pencahariannya adalah petani, selain itu di daerah ini angka perceraianya tinggi, banyak faktor yang menyebabkan hal mudal dari : 1). Pernikahan usia muda, 2). Faktor ekonomi, 3). Perselingkuhan, hingga 4). Faktor mitologi “*Mbok Rondo*”. Terkait mitologi tersebut memang sejak saya kecil dulu sudah beredar cerita rakyat yang menjelaskan bahwa di desa kami memang ada kepercayaan jika usia pernikahan warga di daerah kami jarang sekali bisa langgeng atau awet tahan lama. Saya sendiri sebenarnya lebih cenderung pada alasan nomer satu dan dua, karena disini pernikahan dini dan faktor ekonomi sangat dominan menurut catatan yang ada di kantor desa kami. Jadi secara umum begitu kondisi desa kami. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiatin Lurah Dadapan)

Luas wilayah Desa Ddapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sekitar  $\pm$  192,46 Ha, Dengan bata wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Sedrajat
Sebelah Timur	: Desa Jalen dan Desa Singkil
Sebelah Selatan	: Desa Gombang
Sebelah Selatan	: Desa Ngumpul dan Desa Bulu Kidul.

<sup>25</sup> Diakses dari <http://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-dadapan.html> pada Juli 2017

**Gambar 5.1 Pencitraan Google Maps Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**



Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di “Kampung Janda”, Desa Dadapan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, secara umum programnya diperuntukan untuk ibu – ibu yang berstatus “janda”, diantaranya: 1) Pembuatan Lumbung Dapur, 2). Pembuatan berbagai makanan olahan dari berbagai hasil pertanian, 3). Pelatihan kesenian. Hal ini di jelaskan dalam beberapa hasil wawancara.

Program – program yang ada di di desa diantaranya: pemberdayaan kelompok tani, paguyuban kesenian, dan juga kegiatan ibu – ibu. Kegiatannya sendiri bervariasi, mulai dari: pelatihan pertanian, kegiatan arisan, kegiatan berkesenian, dan berbagai aktifitas sosial lainnya. Sebenarnya program pemberdayaan nya sendiri secara umum sama dengan desa – desa lain yang ada di kabupaten Ponorogo, namun yang membedakan, kami coba melakukan kegiatan pemberdayaan secara kelompok, baik dilakukan oleh bapak – bapak maupun ibu – ibu. Bapak – bapak sendiri melakukan kegiatannya berkuat pada pengolahan hasil pertanian, dengan melakukan pelatihan dan juga musyawarah terkait bagaimana teknis bertani yang baik, penyusulahan tentang bibit pertanian, dan obat – obatan pertanian. Sedangkan ibu – ibu nya yang sebagian berstatus “janda” melakukan kegiatan pembuatan lumbung pangan melalui pemanfaatan wilayah sekitar pekarangan utuk ditanami sayur – sayuran yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk menjadi lauk dan juga selebihnya bisa di jual kepasar sehingga bisa memberikan nilai ekonomis, selain itu ibu – ibu juga melakukan kegiatan diservifikasi pangan dnegan cara mengolah hasil pertanian untuk dikembangkan menjadi panganan atau jajanan yang bisa dikonsumsi sendiri untuk pemenuhan gizi dan juga dapat dijual untuk menmbah nilai ekonomis, selagi menunggu hasil panen. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiatin Lurah Dadapan)

Sebenarnya banyak kegiatan pemberdayaan yang berbasis atau berangkat dari komunitas atau kelompok disini, diantaranya Melalui Kelompok Tani, Melalui Karang Taruna, Kelompok Kesenian Reog, Karawitan, kelompok yasinan Ibu/ Bapak, namun khusus untuk ibu, ibu kami ada tiga program yang dilakukan, yaitu: 1). Program pemanfaatan lahan sekitar untuk digunakan sebagai lumbung dapur, dimana ibu – ibu menanam sayur mayor di pekarangan yang di manajemen bersama dan kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan anggota dan juga untuk di jual ke pasar. 2). Program kegiatan pengolahan makanan dari hasil pertanian, yang menghasilkan berbagai jajanan yang bisa bernilai ekonomis. 3). Kegiatan kesenian, yang melibatkan ibu – ibu, disini ibu diberikan kesempatan untuk berkreasi dalam bidang kesenian, sehingga kebutuhan ibu – ibu secara psikologis bisa terpenuhi. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yati Ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan)

Kegiatannya secara umum yakni pelatihan menanam sayuran di pekarangan, kemudian melakukan kegiatan pelatihan pembuatan jajanan dari olahan hasil pertanian, hingga berlatih kesenian, programnya dilakukan secara priodik dan terus – menerus. Pokoknya kalo bagi saya sangat membantu, karena selama ini kami tidak bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki, dengan adanya pelatihan ini kami menjadi memiliki pengetahuan dan juga ketrampilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. (Hasil Wawancara dengan Ibu Sumi Anggota Kelompok Pemberdayaan Perempuan)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ibu – ibu meliputi: 1). Pembuatan lumbung dapur dengan menanam sayuran sehari – hari bagi masyarakat yang ditanam di pekarangan rumah, 2). Pembuatan beberapa olahan makanan dari hasil pertanian, singkong, talas, dan dilakukan pengemasan, 3). Melakukan pelatihan kesenian melalui kelompok kesenian reog dan karawitan. (Hasil Wawancara dengan Ibu Harmi Anggota Kelompok Pemberdayaan Perempuan)

3 (tiga) Jenis kegiatan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh ibu – ibu yang notabenne – nya berstatus “*Janda*”, dipilih karena sesuai dengan kondisi mereka, yang secara umum memiliki sumber penghidupan di bidang pertanian (*agraris*), selain itu di Desa Dadapan juga memiliki kesenian yang perlu di hidupkan karena sudah lama fakum, hal ini sangat tepat.

**Gambar 5.2** Proses awal hingga akhir program pembuatan jajanan atau makanan kecil dari hasil pertanian masyarakat



*Sumber: Dokumentasi peneliti*

Para warga masyarakat sedang melakukan kegiatan pengolahan jajanan dan makanan ringan berbahan dasar hasil pertanian penduduk setempat, disinilah masyarakat dilatih ketrampilan membuat jajanan dan makanan kecil. Proses nya sangat sederhana, bahannya juga bisa diperoleh dari kebun sendiri dan hasilnya bisa di jual untuk menambah pemasukan dan lain sebagainya, tentunya sangat bermanfaat sekali.

**Gambar 5.3** Proses awal hingga akhir program pelatihan kesenian



**Sumber:** Dokumentasi peneliti

Ibu – ibu sedang melakukan kegiatan berlatih ketrampilan karawitan, untuk menghidupkan kembali kesenian Desa Dadapan, selain itu dengan berlatih seni, ibu – ibu dituntut untuk tampil percaya diri dan juga bangga akan kehidupannya.

**Gambar 5.4 Proses Kegiatan Pemberdayaan lumbung Dapur**



**Sumber: Dokumentasi peneliti**

Ibu – ibu ini sedang melaksanakan program lumbung dapur guna memenuhi kebutuhan dapur sehari – hari selain itu dengan adanya program ini, masyarakat juga bisa menjual hasil panenanya untuk menambah penghasilan keluarga.

Program – program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ibu – ibu yang menyandang status “*Janda*”, dengan berbagai bentuk, telah banyak membawa perubahan bagi masyarakat, hal tersebut tidak terlepas dari apa yang selama ini anggota masyarakat rasakan, yakni: persoalan ekonomi, persoalan kelektifitas, dan juga persoalan budaya.

Masyarakat bisa memiliki kegiatan tambahan untuk mengisi waktu luang, dalam kegiatan tersebut masyarakat merasakan dampak ekonomis, sosial dan juga kepercayaan diri, yang tumbuh karena adanya kemandirian dan juga semangat untuk berhasil, sehingga masyarakat menjadi berdaya. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiatin Lurah Dadapan)

Kegiatan ini menggerakkan masyarakat untuk bermasyarakat dengan cara kerja berkelompok sehingga kesatuan desa semakin baik, selain itu dengan adanya kegiatan itu memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat karena adanya pendapatan tambahan. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yati ketua kelompok Perempuan)

Saya secara pribadi dengan adanya program ini kembali bersemangat karena dahulunya karena status “*janda*” yang saya sandang, akhirnya ketika berpisah dengan mantan suami, saya mulai kehilangan mata pencaharian dan juga kesulitan dalam memperoleh pekerjaan karena keterbatasan ketrampilan, dengan kegiatan ini saya mendapatkan banyak manfaat, seperti pemahaman, ketrampilan juga kepercayaan diri, tidak hanya itu saya juga mulai mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan tersebut. (Hasil Wawancara dengan Ibu Sumi Anggota kelompok Perempuan)

Dampak positifnya sangat banyak, saya bisa “*guyub rukun*”, bersama – sama teman saya, yang notebenanya memiliki status yang sama “*janda*”, dan melakukan aktifitas kerajinan dan kesenian yang bisa menguatkan kehidupan kami, yang sudah tidak punya kepala keluarga lagi, sehingga beban kami menjadi semakin ringan. (Hasil Wawancara dengan Ibu Harmi Anggota kelompok Perempuan)

Melihat dampak yang di muncul sebagai efek domino dari kegiatan masyarakat, menjelaskan bahwa, program pemberdayaan ini sangat efektif, sehingga berhasil untuk mencapai targetan yang diinginkan, sasarannya sendiri adalah ibu – ibu masyarakat Desa Dadapan yang bersatus “*janda*”, hal ini disebabkan karena mereka memiliki banyak keterbatasan dalam menjalankan kehidupan. Keberhasilan ini menandakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat sangat efektif dalam menyelesaikan persoalan – persoalan tentang kemiskinan dan juga kesenjangan.

Pelaksanaan program tersebut, dilakukan melalui beberapa tahapan dan juga proses, mulai dari proses awal yakni: 1). Pemetaan wilayah melalui observasi, setelah itu 2). pendekatan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait program – program yang akan dilakukan, disinilah tahapan terpenting, karena seberapa meyakinkan kita di sinilah akan di uji, setelah kepercayaan di peroleh, maka kemudian dilanjutkan dengan proses, 3). Pelaksanaan program melalui berbagai kegiatan bisa di lakukan, setelah itu baru dilakukan 4). pameran produk hasil yang kemudian bisa memberikan efek domino yaitu, penambahan pendapatan, kekuatan sosial berupa solidaritas dan kesetiakawanan, hingga kemandirian.

Secara umum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa dadapan melalui kelompok – kelompok dan komunitas, sehingga model komunikasi diatur melalui struktur organisasi. Biasanya kelompok – kelompok tersebut memiliki struktur yang terdiri dari: Ketua, sekretaris, Bendahara, serta Anggota. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiatin Lurah Dadapan)

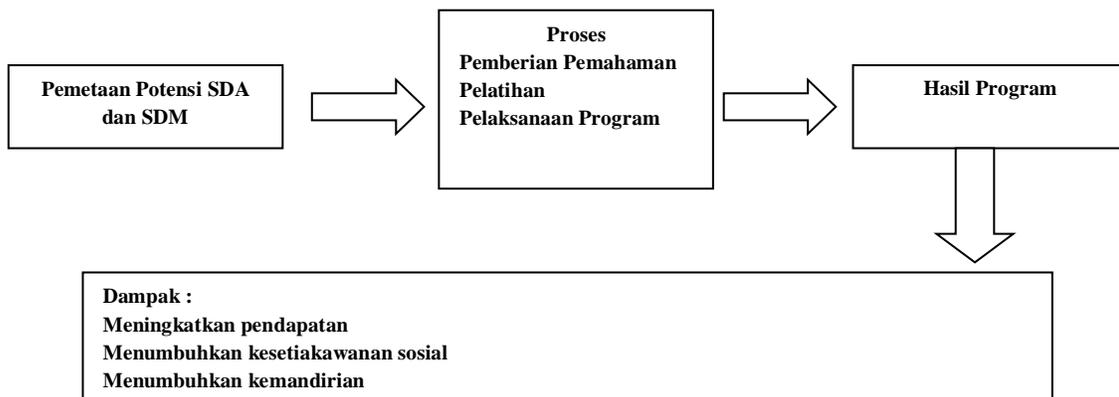
Kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, diawali dengan proses sosialisasi dan pembentukan kelompok kecil, kemudian dalam agenda berikutnya mulai dilakukan pelatihan – pelatihan hingga memiliki ketrampilan yang memadai, setelah itu dilakukan pemasaran produk dan juga mengajari mereka manajemen yang baik, setelah itu proses pendampingan dilakukan terus menerus sampai pada kondisi ibu – ibu tersebut sudah mandiri dan mampu menjalankan kegiatannya. (Hasil Wawancara dengan Ibu Yati ketua kelompok Perempuan)

Prosesnya secara umum, kumpul – kumpul, membentuk kelompok, mulai dari ketua bendahara, sekertaris hingga bendarahara, kemudian dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan agenda pelatihan – pelatihan ketrampilan, kemudian dilakukan proses menampilkan produk dari program pemberdayaan masyarakat. (Hasil Wawancara dengan Ibu Sumi Anggota kelompok Perempuan)

Prosesnya kumpul – kumpul pelatihan kemudian manajemen hasil program pemberdayaan masyarakat, jadi kegiatannya rutin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ibu – ibu dilakukan sekitar pukul 14.00 setelah pulang dari lading, dan hari minggu sekitar pukul 10.00 untuk latihan kesenian. (Hasil Wawancara dengan Ibu Harmi Anggota kelompok Perempuan)

Secara umum proses pelaksanaan program pemberdayaan di Desa Dadapan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponroogo, dapat di jelaskan melalui 3 (tiga) proses, yakni: 1). Awalan, 2). Proses, 3). Luaran. Untuk mempermudah memahami alur proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bisa dilihat dari skema yang kami buat yakni sebagai berikut.

**Gambar 5.6 Skema Program Pemberdayaan Masyarakat**



*Sumber diolah dari: Data Hasil Penelitian*

## **Kesimpulan**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Dadapan, meliputi 1). Pelatihan pembuatan olahan hasil pangan dari potensi pertanian yang ada, 2). Membuat lumbung dapur dari lahan di sekitar masyarakat. 3). Melatih kegiatan berkesenian ibu – ibu yang berstatus “Janda”. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Dadapan, yang telah dilakukan sangat fokus terhadap “janda”, telah memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan mereka, secara ekonomis, psikologis sehingga anggota kelompok ini menjadi termotivasi dan berdaya.

### Daftar Pustaka

- Cholisin. (2011, Desember). Pemberdayaan Masyarakat. *Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011* , Pp. 19-20.
- Desa PM. wong cilik". 2006;(2000):1-21.
- Diah, A. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa* , 175-188
- Diakses dari Harian Ponorogopos edisi. No. 725 Tahun XV, 21 – 27 April 2016 pada 27 April 2016
- Diakses dari [http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines](http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=537:persiapan-perkawinan-ditinjau-dari-segi-biologis-dan-psikologis&catid=41:top-headlines) diakses 08 Desember 2018.
- Djaelani AR. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *FPTK IKIP Veteran Semarang*. 2013:82-92.
- Fallis A. No Title No Title. *J Chem Inf Model*. 2013;53(9):1689-1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004. [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)
- Hadi AP, Negeri DD. Tinjauan Terhadap Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. 2001.
- Hasil wawancara
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. [www.ejournal-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id)
- Hidayat, T. (2010 , September). Isu-Isu Aktual Penelitian Pemberdayaan Masyarakat. Pp. 1 – 11
- I G. W. Murjana Yasa. 2005:86-91
- Miles, MB dan AM Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE.
- Parker L. The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees ( janda ) in Indonesia. *Indones Malay World*. 2015;44(128):7-26. doi:10.1080/13639811.2015.1100863.

S RWV, Ekonomika F, Bisnis dan, Diponegoro U. Analisis peran ganda dan strategi pemberdayaan janda yang bekerja di kota semarang. 2013.

Setyowati L, Psikologi F, Surakarta UM. Kebermaknaan hidup pada janda. 2014.

Somantri GR. Memahami metode kualitatif. *Makara, Sos Hum.* 2005;9(2):57-65.  
<http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118>.

Suradisastra K. Farmer ' s Institutional Empowerment Strategy. 2008;26(70):82-91.

Tampubolon J. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok. *skripsi.* 2006.

Widayanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis. *Welfare Ilmu Kesejahteraan Sosial* , 87-102

## Personal Branding D\_Kadoor untuk Menaikkan Pupolaritas melalui Instagram

Amanah Rakhim Syahida dan Fathul Qorib

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tribhuwana Tungadewi

amanah.unitri@gmail.com

### Abstract

The purpose of doing this research is to know how personal branding a person made by utilizing social media. Like the *d\_kadoor* phenomenon of uploading a unique and unique video. In a number of videos shared by him, it looks Kadir Bachmid or *d\_kadoor* behaving witty. Most imitate the behavior of mothers, ranging from clothing, style to the theme of gossip about arisan. Research on *d\_kadoor* is a personal branding domain so that the theory used is personal branding. While the desired approach in this study is a qualitative approach with only one informant, namely Kadir Bachmid as *d\_kadoor* itself. The results of this study illustrate that personal branding can show popular (famous) people. With the following strategies: 1) social media as a primary need. 2) Creative, inofatif, and have high confidence in Social Media For Personal Branding.3) Sensitive to information that is becoming a trend in society.4) Be entertaining.5) Non verbal and verbal communication has an identity.

**Keywords:** *D\_Kadoor, Personal Branding, Agenda Setting, Publicity*

### Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *personal branding* seseorang dibuat dengan memanfaatkan media sosial. Seperti fenomena akun *d\_kadoor* yang mengunggah video unik dan mempunyai ciri khas. Dalam sejumlah video yang di *share* olehnya, Kadir Bachmid atau *d\_kadoor* bertingkah jenaka. Kebanyakan menirukan perilaku ibu-ibu, mulai dari busana, gaya bicara sampai tema gosip seputar arisan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan informan pemilik akun, Kadir Bachmid atau *d\_kadoor*. Hasil dari penelitian ini adalah *personal branding* dapat dibentuk melalui beberapa cara; 1). Memanfaatkan media sosial yang seakrang menjadi kebutuhan primer. 2). Kreatif, inovatif, dan memiliki tingkat percaya diri tinggi dalam media sosial untuk *personal branding*.3). Peka terhadap informasi yang sedang menjadi *trend* di masyarakat. 4). Bersifat menghibur. 5). Menggunakan komunikasi non verbal dan verbal yang memiliki ciri khas.

**Katakunci:** *D\_Kadoor, Personal Branding, Agenda Setting, Publisitas*

<i>Submite</i>	: 12 Agustus 2017
<i>Review</i>	: 22 Nov 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: ayubdwianggoro86@gmail.com

### Pendahuluan

Banyak diantara selebritis baru yang menggunakan atau yang terkenal karena menggunakan jejaring sosial, dengan cara memperkenalkan diri kepada khalayak. Seperti

fenomena *d\_kadoor* mengunggah video yang unik dan mempunyai ciri khas. Dalam sejumlah video yang di share olehnya, tampak Kadir Bachmid atau *d\_kadoor* bertingkah jenaka. Kebanyakan menirukan perilaku ibu-ibu, mulai dari busana, gaya bicara sampai tema gosip seputar arisan. Aksi kocak ini berhasil memikat puluhan ribu pengguna instagram sehingga jumlah followers di akun instagram *d\_kadoors* sampai dengan tanggal 13 April 2016 pukul 17.15 telah mencapai 507.000 follower. Keterangan dalam akun *d\_kadoor* tertulis bahwa Kadir Bachmid berprofesi sebagai artis Henna, yakni seni lukis pada kulit manusia, biasanya populer di kalangan wanita Arab dan India. Kadir menyebut postingannya hanyalah untuk kesenangan.

Solis dan Breakenridgedalam Rusfian (2015: 118) mengemukakan, segala sesuatu yang menggunakan internet dalam melakukan percakapan dapat dikatakan sebagai media sosial. Pendapat lain juga disampaikan Mayfield dalam Rusfian (2015:118) bahwa media sosial merupakan media yang penggunaannya dapat dengan mudah berpartisipasi dalam berbagi dan menyajikan konten.

Instagram adalah sebuah aplikasi yang dioperasikan melalui telepon genggam, yang fungsinya berbagi foto untuk memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai pengguna jejaring sosial lainnya, termasuk milik Instagram sendiri. Salah satu fitur begitu unik di Instagram ialah memotong foto menjadikan bentuk persegi, sehingga nampak seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Saat ini instagram ialah merupakan aplikasi jejaring sosial yang cukup buming di Indonesia, dengan berbagai kemudahan dalam berbagi foto, instagram menjadi salah satu aplikasi terlaris untuk kategori *freeware*.

Dalam penelitian personal branding *d\_kadoor* sangat erat kaitannya dengan teori agenda setting yang mana media yang menjadi peran utama dalam membentuk pencitraan seseorang. Penelitian empiris tentang teori ini dilakukan Mc Combs dan Shaw ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Banyak opini orang menyatakan walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku atau tindakan manusia itu belum menemukan power media yang sangat berpengaruh seperti yang disinyalir oleh pandangan ilmuwan dunia terhadap media konvensional, belakangan ini banyak masyarakat menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar berperan penting dalam membentuk realitas sosial kehidupan kita, ketika mereka telah melaksanakan tugas keseharian mereka untuk menonjolkan berita. Menurut Everett Rogers dan James Dearing (1988:18) menyatakan bahwa agenda setting merupakan

proses linear yang terdiri atas tiga tahap, yaitu: agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan.

## Metode

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena mengingat penelitian personal branding melalui media massa adalah merupakan penerapan yang dilakukan oleh *d\_kadoor*. Karena itu, membutuhkan pendalaman secara personal dan lebih mendalam dengan berbagai wawancara untuk mengetahui situasi penerapan sebenarnya. Yakni dengan metode wawancara mendalam dan pendekatan melalui realitas sosial sebagai objek kajiannya. Metode riset dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka dan presentasi secara langsung dan terus-menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali dan mendapatkan informasi dari *d\_kadoor* dan sampel followernya.

Penelitian ini memfokuskan diri pada kajian *personal branding* yang dilakukan oleh *d\_kadoor*, Penelitian ini dimulai pada level audio visual guna mengidentifikasi ada tidaknya konsistensi makna yang terjadi, dilanjutkan dengan analisis pada level-level teks yang tampak. Landasan yang dinilai tepat untuk menyusun desain penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan langkah dalam metode ilmiah dengan melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, yang diperoleh secara langsung (*primer*) atau dengan tidak langsung (*seconder*) untuk keperluan kebutuhan analisis data dan pelaksanaan pembahasan (*process*) suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban (*output*) dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti (Ruslan, 2004:27).

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisa kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data, baik melalui studi lapangan maupun studi pustaka. Untuk menganalisis data tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi lebih kepada kemampuan nalar untuk menghubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model alir Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo, tahap analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Suprayogo, 2001:193-195)

Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data juga dilakukan dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo dan sebagainya. Reduksi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun. Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah akun instagram *d\_kadoor* dan *kadir*, kemudian sebagai data pendukung yaitu follower *d\_kadoor*.

Penyajian data ialah menyajikan sekumpulan informasi sistematis dan tersusun yang memberi kemungkinandengan adanya penarikan kesimpulan untuk pengambilan tindakan. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasidari permulaan pengumpulan data, dengan begitu akan dimulai dengan mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alurnya terdapat sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan "*final*" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan.

Tahapan ini yakni Metode Analisis Data merupakan tahapan sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini (Koentjaraningrat, 2009:260).

## HasildanPembahasan

### Hasil

#### 1. Penyunting dan Penyiar Memainkan Peranan Penting dalam Menonjolkan Berita.

Dengan setiap sesion postingan foto dan video yang konsistensinya bisa memberikan kesan yang khas dimata publik, penyunting dan sekaligus penyiar didalam media sangat penting dalam menonjolkan setiap informasi apapun itu tentang segala hal khususnya dalam fenomena ini bersifat *entertainment* yang disuguhkan kepada publik. Pada gambar chapter 1 sampai chapter 3, menggambarkan bahwa penyunting dan penyiar *d\_kadoor* sendiri yang mana ia sangat berperan penting dalam berita yang ingin buat untuk ditayangkan dalam instagramnya.

## 2. Dapat Menggambarkan Apa yang Dianggap Penting oleh Masyarakat.

*D\_kadoor* selalu memberikan pemaknaan yang dianggap penting oleh penggunaan sesama instagram, dia selalui mempunyai ide non verbalnya melalui gaya bibir yang selalu dia hiasi dengan lipstick menor dengan berbagai macam warna, dan cara berbicara dengan memonyongkan bentuk bibirnya yang sexy. Kemudian menggunakan kerudung yang selalu ia kenakan dikepalanya, dengan berbagai macam model variasi model kerudung yang sedang trend di masyarakat.

## 3. Agenda Media Memengaruhi Agenda Publik.

Pada chapter 3 setiap isi agenda media yang sudah di setting oleh Kadir seperti menceritakan hal-hal yang sifatnya memberikan amanat kepada followernya. Pada gambar chapter 3 Kadir menyampaikan kepada publik agar tetap waspa dengan narkoba dan hindari penggunaan narkoba, dan masih banyak lagi amanat-amanat yang positif yang ia selalu sampaikan kepada followernya. Hal itu menjadi sebuah salah satu ciri khas juga di benak para followernya. Ia selalu menyampaikan pesan yang positif yang sangat berpengaruh untuk khalayak.

## 4. Membawa Seorang Individu Menjadi Dikenal Publik.

Terbukti bahwapada setiap ia memposting sebuah prodak di akun instagram *d\_kadoor*, maka akan berpengaruh juga pada penjualan pada prodak tersebut. Kadir didalam akun instagramnya juga selalu memperkenalkan bisnis henna yang sudah digelutinya. Namun ketika Kadir sudah mulai terkenal melalui instagram, ia memulai memanfaatkannya untuk memperkenalkan bisnis sendiri atau orang lain yang mengundangnya sebagai artisnya atau *guest star*.

## 5. Publisitas untuk memperoleh perhatian publik.

Pada dampak kepopuleran yang Kadir dapat melalui instagram, Kadir memiliki daya tarik kepada para followernya. Ketika itu kadir mempopulerkan wanita berhijab, lalu kemudian para fansnya juga mengakui bahwa ia mengikuti gaya Kadir mengenakan kerudung, yakni menggunakan model hijab, kemudian berbusana muslim yang tidak ketat. Itu adalah bukti bahwa Kadir sudah memperoleh perhartian publik.

## 6. Harus Menarik Perhatian.

Setiap mengunduh postingan ciri khasnya selalu mendapatkan like dari followernya rata-rata sebanyak 200.000 like. Hal ini sudah membuktikan bahwa Kadir sangat menarik banyak perhatian publik.

## 7. Didukung oleh Kegiatan Promosi Lainnya.

Beberapa gambar di atas mulai cepter 1 sampai 4 adalah ciri khas yang sudah masuk dibenak masyarakat, yang juga mempunyai nilai identitas sesosok *d\_kadoor* sehingga masyarakat ingin jauh lebih tau dan mengenal untuk bertemu dengan kadir. Dan ketika mulai populer dengan ciri khasnya kadir mulai banyak diundang di setiap acara-acara event, yang mana event tersebut mendukung acara tersebut, tidak itu saja kadir juga memperkenalkan prodak prodak makanan dan kosmetik, ia mengunggahnya di instagram sebagai bentuk promosi yang di perkenalkan kepada publik.

## 8. Memperkenalkan Citra dan Kesuksesan Pribadi.

Kadir selalu memperkenalkan keterkenalannya yang sudah ia dapatkan dengan waktu yang sangat cepat sampai show di negara hongkong sudah ia dapatkan dan show di televisi nasional, hal tersebut juga menggambarkan citra yang sudah terbentuk dan kesuksesan pribadi di bidang *entertainment-nya* yang sudah sangat bagus.

## 9. Dapat Membentuk Opini.

Pada gambar chapter 3 dan berdasarkan data lapangan hasil wawancara bersama Kadir adalah salah satu bentuk ia selalu menjadi opini publik. dikarenakan sudah termasuk menjadi publik figure yang menjadi panutan followernya.

## 10. Dapat Menciptakan Kredibilitas.

Setiap apa yang ia sampaikan secara positif akan menciptakan tingkat kepercayaan terhadap fans nya. Contoh; pada chapter 3 Kadir menggunakan lipstick yang meengenenakan identitas merek yang mungkin orang tidak banyak tahu, akan tetapi sesosok Kadir ini mengenakan lipstick tersebut para fansnya juga akan mengikutinya meski tanpa disadari Kadir bahwa ia

telah banyak dicontoh oleh para fansnya, dari gaya berlipstick, gaya bertutur katanya. Dan apa isi pesan yang disampaikan, ia sudah mendapatkan kepercayaan di mata publik.

## Pembahasan

### 1. Cerita Umum

*D\_kadoor* bercerita: “dulu itu saya Cuma ngepost bibir doank kan baru pertama kali, hnaaa...setelah itu aku nyobak (mencoba) di path (aplikasi media sosial) ternyata banyak yang respon temen-temen arabku, dan kebetulanku di jemberkan aku punya sodara namanaya Bella Hamzhi, dan mamanya Bella itu dan bella pernah bilang kalo misalnya kenapa gak kamu coba aja post di instagram mungkin banyak yang suka. Semenjak itu banyak orang yang ngelike ternyata banyak orang yang suka juga dengan gayaku, dari situ aku mulai berproses lagi, aku ngelihat (melihat) wajahku, pke (menggunakan) krudung, sampai pke wig (rambut pasangan).. ya.. ideku spontan si.... apa yang aku ingin lakukan aja... kayak gitu sih.. “(Kadir wawancara 3 Juli 2016).

Jadi dalam hal ini bisa dilihat bahwa seorang Kadir Bahmid yang juga mendengarkan masukan dari pihak luar untuk mengembangkan ide dan kegemarannya untuk itu seseorang bisa mengembangkan ide nya lebih baik dengan menerima dan menganalisis masukan tersebut masuk akal apa tidak. Dari sini kita akan tahu orang lain menilai dan menerima kita dengan ciri khas yang kita punya dengan respon yang baik.

### 2. Penonjolan Berita

Penonjolan berita dalam fenomena *d\_kadoor* artis selebgram yakni dimana ia menginformasikan apapun tentang dirinya melalui media instagram. Hal yang selalu menjadi kebutuhan bagi dirinya. *d\_kadoor* menyatakan ; *Yah.. karena kalau bukan dari aku sendiri ide ide untuk memposting di instagram aku gak ada lagi...kan dulu juga awalnya aku Cuma coba coba menggunakan akun sendiri terus bikin video bibir itu yang pke (menggunakan) lipstick..dan untuk musik aku memang suka musik ala india dan arab si kak..untuk ide ide penampilan aku mengikuti perkembangan apa yg lagi trend sekarang... gitu aja si.. “(Kadir wawancara 3 Juli 2016).*

Jadi untuk bisa mengembangkan sebuah ide kita harus tau membuat sebuah produksi informasi yang sangat memengaruhi

### 3. Dianggap Penting oleh Masyarakat

Apa yang menurut Kadir menarik sudah dianggap menarik pula dengan followernya, karena mereka merasa terhibur dengan posting Kadir yang setiap unggah di akun instagramnya banyak yang nge-like (menyukai). *D\_kadoor* menyatakan : ” *yahh.. itu spontan aja.. biasanya dari lingkunganku..dari keluarga, teman-temanku dan mengamati apa yang sekarang lagi trend aja..kemudian aku jdikan postingan eh.. ternyata banyak yang ngelike.. gitu aja ..*”  
“(Kadir wawancara 3 juli 2016).

### 4. Agenda Media Memengaruhi Agenda Publik

Seluruh agenda seorang Kadir menjadi *d\_kadoor* di dalam akun instagramnya, ialah sebuah cara bagaimana ia menghibur agar ia menjadi sebuah kebutuhan *intertainment* di mata publik. sehingga Agenda setting media ternyata berdampak kepada agenda publik. Berita atau topik yang dianggap penting oleh media ternyata juga menjadi penting oleh publik. Bahkan agenda setting juga mempengaruhi perubahan sikap masyarakat terhadap suatu hal. Media senantiasa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat penting dan tidaknya suatu hal dan mengarahkan persepsi masyarakat dalam menilai suatu kasus yang diberitakan *D\_kadoor*. Ia menyatakan; “ *untuk musik aku memang suka musik india dan arab si kak..untuk ide ide penampilan aku mengikuti perkembangan apa yg lagi trend sekarang... gitu aja si.. kemudian kenapa tidak mengikuti gaya yang lainnya seperti k-pop ? uhhh... mungkin aku awalnya kan ide dari lingkungan keluarga jadi belum begitu kearah situ sih idenya..*” (Kadir wawancara 3 Juli 2016).

*D\_kadoor* menyatakan pula bahwa “*Kalaulur cerita yang video menggambarkan ibu-ibu ramah tangga, mengatur alur cerita sehingga ada pesan dan kesan yang tersampaikan kepada public. D\_kadoor* menyatakan “*kalau itu yang menonjolkan cerita ibu ibu rumah tangga itukan, ehmm..aku kan sering ke rumah sodara sodaranya yang sudah nikah, disitukan pastikan ketemu tante-tante yang udah nikah, ketemu mbak-mbaknya yang sudah nikah, jadi setidaknya aku tau ibu-ibuk yang diomongin seperti apa..., jadi kok aku mikir kayak lucu dijadikan bahan ide untuk video itu..gitu..*” (Kadir wawancara 3 Juli 2016).

## 5. Membawa Seorang Individu Menjadi Dikenal Publik

Kadir bisa dikenal banyak orang karena menggunakan media sosial instagram. *D\_kadoor mengakui bahwa ;” iya... instagram itu sudah bagian kebutuhanlah yah buat aku.. soalnya kan dari situ orang banyak mengenal aku..”*(Kadir wawancara 3 Juli 2016).

## 6. Publisitas Untuk Memperoleh Perhatian Publik

Publisitas merupakan penyampaian informasi yang didesain untuk membangkitkan minat lebih tinggi pada perseorangan. *D\_kadoor menyatakan; “ yah semakin kesini untuk yang paling menarik perhatian. yang paling menonjol lipstik, terus hijab..sama wig rambut ...” alasan aku memilih ini jadi ciri khas ?.. kan waktu itu awal orang banyak yang mulai suka ketika aku menampilkan bibir aku ber-lipstick ..teruz kerudung hijab.. jadi itu sudah menjadi ciri khas yang aku gunakan...”*(Kadir wawancara 3 Juli 2016).

## 7. Menarik Perhatian

Untuk memperoleh perhatian di Instagram, tentu harus melakukan posting dengan topik yang update dan tidak membosankan. Walaupun bermaksud untuk mempromosikan tertentu, namun *d\_kadoor* lebih cermat dan trick dalam memilih topik yang menarik dan berkaitan dengan brand dirinya.

*D\_kadoor Menyatakan “biasanya aku ide-idenya untuk mencari hal baru dari lingkungan keluarga, terus teman-teman jalan, kadang juga lihat dari film gitu-gitu (begitu-begitu), aku juga melihat di internet berita yang lagi diperbincangkan apa... gitu sih ..”* (Kadir wawancara 3 Juli 2016).

*D\_kadoor menyatakan ;” iya.. sering setiap show banyak yang minta foto-foto terus tanda tangan bgtu...Kalau di instagram bisa dilihat dari like follower aku..* (Kadir wawancara 3 Juli 2016).

## 8. Didukung oleh Promosi dan Menciptakan Kredibilitas

*D\_kadoor* menjawab “ iyah dapat.. “ kemudian didukung oleh kegiatan promosi ” iyahh itu bener... semenjak aku mulai dikenal orang.. banyak panggilan event-event acara sekolah, terus acara anak kampuz entah itu seminar acara hijab atau menghibur aja..untuk yang masuk televisi pernah sih.. waktu itu masuk net tv.. tp gk bgtu sering sih...” (Kadir wawancara 3 Juli 2016).

## 9. Memperkenalkan Citra dan Kesuksesan Pribadi dan Membentuk Opini Publik

Berbicara Pencitraan tidak lepas dari preposisi seseorang terhadap citranya dimata publik sehingga melahirkan sebuah respon positif. Begitu juga akselerasi publik terhadap pribadi selalu dapat dilihat dari sejauh mana menampilkan kesan positif yang bisa membangun tingkat kepercayaan terhadap figur pribadi atau brand image sebuah Personal yang dikenal. *D\_Kadoor Menyatakan “ untuk pencitraan aku cukup melalui instagram saja, dan Cuma membuat post yang lucu aja seperti biasanya.. itu aja sih”*( Kadir wawancara 3 Juli 2016).

### Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan pembahasan/analisis data pada bab sebelumnya mengenai analisis personal branding *d\_kadoor* untuk menaikkan popularitas melalui instagram. Maka beberapa kesimpulan yang peneliti bisa simpulkan yakni sebagai berikut : Dalam fenomena selebgram *d\_kadoor* bisa disimpulkan bahwa, seorang Kadir yang dari latar belakang bukan artis bisa dikenal banyak orang hanya melalui media sosial instagram, dalam waktu tidak lama. Hal ini menunjukkan bahwa sangat berpengaruh sekali dampak media sosial terhadap masyarakat modern saat ini. Khususnya di kalangan anak muda di Indonesia, terbukti bahwa Kadir yang masih berusia 21 tahun memanfaatkan instagram untuk memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang mempunyai ciri khas yakni meniru gaya wanita hijab.

Media sosial instagram adalah sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi di kalangan masyarakat. Komunikasi yang terbentuk di aplikasi instagram yakni antara pengguna instagram melalui komentar di dalam postingan video atau foto setiap yang di unggah. Komunikasi yang dapat dilihat untuk menciptakan brand di dalam fenomena *d\_kadoor* ialah menggunakan bahasa jawa timuran. Sehingga masyarakat jawa timur sangat mudah memaknai tutur bicara yang digunakan oleh Kadir.

Brand yang terbentuk didalam dirinya yakni seorang wanita berhijab yang selalu mengenakan lipstick yang penuh warna dan kerudung nya yang selalu ia kenakan. Hal-hal kreatif yang ia posting dalam instagramnya membuat para followernya selalu tertarik untuk mengikuti aktifitasnya melalui instagram. Jadi dari rumusan masalah penelitian ini yakni “ bagaimanakah personal branding *d\_kadoor* untuk menaikkan popularitasnya melalui instagram ? ” dari fakta lapangan melalui lingkungan yang diamati, dan menciptakan sebuah ide yang lebih kreatif dan

humor dengan mengenakan kerudung hijab, busananya dan lipstiknya. Karena *d\_kadoor* mempunyai cara untuk membuat isi postingan yang selalu terkesan menghibur dimata followernya. Dan cara tersebut sudah diciptakan untuk dijadikan personal branding oleh Kadir, sehingga semakin dikenal khalayak atau publik citra *d\_kadoor*-nya. Dari pengamatan dan hasil wawancara kemudian peneliti menyimpulkan beberapa konfirmasi temuan lapangan dengan teori *agenda setting* dan *publisitas* sebagai berikut;

### **1. Media Sosial Sebagai Kebutuhan Primer**

Dalam hal ini selebgram Kadir menyatakan bahwa instagram memang sudah sangat penting dengannya. Karena dari instagram ia bisa terkenal dan banyak *job* panggilan *show-show* diberbagai kota khususnya jawa timur. Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi melalui media sangatlah memiliki tingkat respon yang sangat cepat dengan jarak jauh, dan penggunaan yang fleksibel untuk dibutuhkan kapanpun. Ditambah dengan adanya aplikasi instagram. Orang bisa menggunakan atau mengakses media sosial untuk menjadi komunikator dengan banyak komunikan dan dengan kepentingan masing-masing pengguna media sosial. Artinya adalah *feedback* yang diberikan media sosial sangat cepat, sehingga dengan waktu yang singkat akan mengetahui hasil dari *feedback* yang sudah disampaikan oleh seorang komunikator. Baik itu bersifat formal atau non formal orang bertujuan menggunakan instagram sebagai pilihan media sosial.

### **2. Kreatif, Inofatif, dan Memiliki Tingkat Percaya Diri Tinggi dalam Media Sosial Untuk Personal Branding**

Dalam hal ini selebgram Kadir selalu mencari ide dan pengamatan pada sebuah obyek dan subyek tertentu yang akan dijadikan agenda untuk membentuk dirinya menjadi lebih kreatif dan berinofatif. Dalam menciptakan personal branding juga dibutuhkan kreatifitas yang sangat tinggi dan percaya diri. Sehingga orang bisa menilai kualitas dan identitas diri kita untuk diperkenalkan kepada publik. Konsistensi *performance* juga dibutuhkan untuk membentuk citra diri kita agar menghasilkan brand yang sudah dikenali identitasnya dan diingat oleh publik. Kemudian dalam komunikasi media sosial bentuk bahasa baik formal atau non formal juga harus bisa membentuk penyampai pesan yang mudah dimaknai dengan baik kepada komunikan.

### 3. Peka Terhadap Informasi yang Sedang Menjadi Trend di Masyarakat.

Dalam hal ini selebgram Kadir selalu ia sampaikan apa yang sedang diamati di lingkungannya, dan informasi melalui media sosial lainnya apa dan seperti apa sekarang ini yang sedang populer diperbincangkan. Sehingga Kadir bisa menciptakan personal branding dirinya dari trend yang sudah ada, namun ia kombinasi dengan ciri khas budaya busana ketimurannya.

Dalam komunikasi media sosial yang peneliti amati dalam fenomena ini yakni seorang komunikator harus mengetahui yang sedang diperbincangkan banyak orang, baik itu dibidang apapun dan dari segala kalangan elemen masyarakat. Sehingga muncul opini yang sama dan memiliki persepsi yang sama pula. Seorang komunikator yang baik adalah memahami kondisi psikologi komunikannya sehingga dalam hal ini komunikator juga dituntut harus peka terhadap subyek dan obyek yang terkait. Di media sosial khususnya sebagai pengguna akun instagram sesama pemilik akun instagram juga harus saling memahami pemaknaan yang disampaikan. Karena jika terdapat *feedback* komentar bisa memiliki control emosional yang baik dan tidak menimbulkan masalah dalam menjalankan tindakan di dalam media sosial instagrm baik berupa komentar atau yang lainnya.

### 4. Bersifat Menghibur.

Dalam hal ini selebgram Kadir menonjolkan kesan menghiburnya dalam akun instagramnya *d\_kadoor* yang sudah dikenal oleh para followernya.

### 5. Komunikasi Non Verbal dan Verbal Memiliki Identitas.

Dalam hal ini selebgram Kadir memiliki ciri khas dalam berbahsa khususnya ia menggunakan bahasa jawa timuran. Sehingga hal ini juga salah satu identitas diri *d\_kadoor* dalam menggunakan bahasa. Kemudian kelihaiannya dalam menggunakan non verbalnya ialah berakting dan diiringi oleh musik yang ia sudah tentukan. Akting yang ia gunakan menggunakan budaya timur tengah menari baly dance, kemudian ia menari lenggak lengkok kakinya yang ia adopsi dari tarian india. Sehingga disimpulkan bahwa didalam media sosial agar memiliki citra identitas diri kita harus bisa memilih gaya bahasa dan jenis bahasa yang kita gunakan baik itu bahasa verbal atau non verbal.

### Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.

Koentjaraningrat. (2009). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: T. Gramedia

Ruslan, Rosady. (2004). *Metodologi Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Rusfian, Nurhayati. (2015). *Political Public Relations Dalam Media Sosial*: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Suprayogo, Imam. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remadja Rosdakarya.

Rusfian, Nurhayati. (2015). *Political Public Relations Dalam Media Sosial*: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: Indeks.

William L. Rivers - Jay W. Jensen Theodore Peterson. (2003) *.Media Massa dan Masyarakat Moderen*, Edisi Kedua. Jakarta: PRENADA MEDIA.

## Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pilkada 2015

*Penelitian Ini Didanai Oleh Hibah Muhammadiyah Gel.1 Tahun 2017*

**Jusuf Harsono**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

[jsfharsono@gmail.com](mailto:jsfharsono@gmail.com)

### Abstract

Plurality of political attitudes of citizens Muhammadiyah Ponorogo in the elections in 2015 is an interesting phenomenon because almost all citizens and sympathizers of this organization gives full support to the partner Regent and Vice Regent promoted by the National Mandate Party. This study to find out more about political attitudes of citizens muhammadiyah shown in local elections (Election) Ponorogo. Moreover, the research also seek out further orientations are used as a handle by Muhammadiyah cadres and elite that are part of a successful team. Informants in this study is regular and elite members or directors of the Muhammadiyah organization spread over several districts. Data collection in studies using interviews and documentation. The final goal of this study was to determine the political direction of Muhammadiyah then it could be a foundation in nominating candidates for the next general election

**Keyword:** *Election, Muhammadiyah, Political Attitude.*

### Abstraksi

Sikap politik warga Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 sangat menarik dibahas karena anomali dari jumlah pemilih yang berupa simpatisan organisasi ini memberikan dukungan kepada pasangan Bupati dan serta Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Selanjutnya dalam penelitian ini bertujuan mencari tahu lebih jauh tentang sikap politik warga muhammadiyah yang ditunjukkan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Ponorogo. Adapun informan dalam penelitian ini adalah warga Muhammadiyah dan elit organisasi Muhammadiyah yang tersebar di beberapa kecamatan. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah dengan mengetahui arah politik warga Muhammadiyah maka bisa dijadikan landasan dalam mengukung calon pada pemilihan umum kedepan.

**Kata Kunci:** *PILKADA, Muhammadiyah, Sikap Politik*

<i>Submite</i>	: 15 Agustus 2017
<i>Review</i>	: 15 November 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Januari 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: <a href="mailto:audra.jovani@uki.ac.id">audra.jovani@uki.ac.id</a>

## Pendahuluan

Perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015 adalah PEMILUKADA (pemilihan Kepala Daerah Langsung) yang pertama terjadi di Ponorogo, dimana pada saat itu juga berlangsung PEMILUKADA di hampir 200 Kota dan Kabupaten serta Propinsi di Indonesia. Perhelatan PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo yang menarik adalah besarnya jumlah warga Muhammadiyah di Ponorogo ikut andil besar dalam menentukan kemenangan calon kepala daerah di PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo. Besarnya pengaruh dari organisasi Muhammadiyah ini selanjutnya menjadikan “*pihak luar*” tertarik untuk menggandeng Muhammadiyah untuk mendukung calon-calon yang telah disiapkan demi meraih suara dari warga Muhammadiyah.

Sekalipun Muhammadiyah adalah sebuah *Interest group*, menurut pemahaman Gabriel Almond (Mas'ood, 1984) merupakan organisasi yang tidak berkehendak berebut kekuasaan publik secara langsung dalam peristiwa politik, seperti Pemilu tetapi para elitnya tidak bisa berdiam diri dalam percaturan politik setelah melakukan interpretasi terhadap situasi. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tidaklah menjadi organisasi yang mayoritas di Ponorogo, tetapi Muhammadiyah selalu menjadi organisasi yang ikut menentukan kemenangan bakal calon Bupati di Ponorogo. Muhammadiyah dengan menjadi organisasi yang ikut menentukan dalam penentuan kemenangan Calon Bupati di Ponorogo, tetapi perolehan suara yang diperoleh oleh warga muhammadiyah ataupun para elit muhammadiyah ternyata tidak menunjukkan angka maksimal.

Gerakan Muhammadiyah dalam bidang politik telah sesuai dengan Kittahnya yaitu dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti dan proposisi yang sebenar-benarnya dimana Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis dan konseptual. Gerakan organisasi Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan juga bagian gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah dalam Politik ini ditegaskan kembali pada Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang menegaskan bahwa *pertama*, Organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, yang mana tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu

Partai Politik atau organisasi apapun. *Kedua*, setiap anggota organisasi Muhammadiyah sesuai hak asasi yang diberikan keleluasaan untuk memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah. (Wiharto, 2017)

Kuatnya pengaruh dari organisasi ini yang menjadi pertimbangan bagi calon yang ingin maju dalam PILKADA atau pemilihan legislatif. Ketidakmaksimalan suara disaat PEMILKADA Kabupaten Ponorogo berbanding terbalik dengan pemilihan Presiden tahun 2014 dimana tahun 2004 hampir semua warga serta sipatisan Muhammadiyah menyumbang suara lebih dari 60.000 diberikan dukungan kepada Prof. Dr. Amien Rais sebagai calon Presiden RI. Sementara pada perhelatan Pilkada tahun 2005 Kabupaten Ponorogo, warga Muhammadiyah menunjukkan adanya perpecahan suara dengan tidak bisa terfokus pada satu calon. Perbedaan soliditas warga Muhammadiyah tersebut tentu menarik untuk dicermati dan diteliti mengingat selama ini komunitas ini dikenal sebagai komunitas yang mempunyai sikap politik yang solid. Dengan demikian, maka menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang arah politik warga Muhammadiyah baik warga Muhammadiyah biasa maupun elit dan pimpinan di tingkat daerah dalam menyumbangkan suaranya pada pilkada tahun 2015. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana sikap politik warga Muhammadiyah dalam PEMILUKADA 2015?

## Metode

Jenis penelitian yang akan dipakai untuk menjawab rumusan masalah adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif dimana akan ditekankan kepada analisis proses penyimpulan data secara deduktif dan induktif. Maka dari itu pendekatan kualitatif yang dipakai oleh peneliti bukan tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Rasionalitas Sikap Pemilih

Organisasi Muhammadiyah sejak kelahirannya dikenal sebagai gerakan islam yang terus berkiprah di ranah dakwah Muhammadiyah dan tidak berjuang di dalam politik serta tidak memiliki hubungan dengan kekuatan politik. Muhammadiyah membentengi dirinya dari Politik dengan Kittah (Garis Perjuangan) yang sudah mendarah daging didalam persyarikatan ini. Namun seiring dengan perkembangan jaman, setelah masa reformasi dimulai muncul kecenderungan untuk melibatkan Muhammadiyah dalam persentuhan dengan dunia politik. Pendirian partai politik dalam pemilihan umum berusaha menarik Muhammadiyah pada dukungan-dukungan politik tertentu dan pihak-pihak yang berkepentingan berusaha memperoleh dukungan politik Muhammadiyah tetapi sekali lagi Muhammadiyah bukanlah organisasi politik. (Nashir, 2008, hal. 1-2)Jurgen Habernas, dalam Piliang (Piliang, 2004), lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan rasional adalah sebagai tindakan bertujuan. Pendapat bahwa rasionalitas politik akan berkaitan dengan pilihan-pilihan, tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka mencapai sebuah tujuan politik tertentu. Tindakan rasional dalam sikap politik seseorang dijelaskan lebih lanjut mempertimbangkan segala resiko yang akan diterima karena sudah bertentangan dengan *main stream* dan semangat kolektifitas.

Jugen Habernas, dalam Piliang (Piliang, 2004), membedakan dua jenis rasionalitas lebih jauh dimana yang *pertama*, rasionalitas dari bawah yaitu rasionalisasi yang berkembang secara alamiah di kalangan masyarakat kelas bawah tanpa adanya komando atau koordinasai dari atas.*Kedua*, rasionalisasi dari atas yaitu rasionalisasi yang dikendalikan atau direkayasa oleh kelompok-kelompok elit dalam konteks politik massa. Piliang selanjutnya membedakan rasionalisasi politik mejadi dua yaitu *pertama*, berdasarkan pada pikiran praktis bahwa tujuan pergantian pimpinan untuk mencapai sebuah kondisi pragmatis kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran umum. Hal ini oleh piliang dinamakan sebagai *substantince practical rationality*.*Kedua*, untuk yang ini ia menyebut tujuan pergantian kepemimpinan adalah cara menciptakan perubahan sebagainya. Affan Gafar (Gafar, 2002, p. 96) menganggap bahwa pendekatan secara cultural masih relevan dalam memahami politik Indonesia secara kontemporer. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pola pembentukan dukungan dan

mobilisasi politik pada masa pemilihan umum, akan sangat tepat dengan menggunakan pendekatan cultural ketimbang secara struktural.

Sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya warga Muhammadiyah Ponorogo juga menunjukkan budaya politik yang kurang lebih sama, yaitu budaya politik yang *paternalistic*, yaitu sebuah sikap politik yang menganggap bahwa seseorang tertentu mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan warga yang lain. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki para elit itulah yang menjadikan warga mengikuti langkah-langkah politik yang diambil para elit Muhammadiyah dalam Pilkada tahun 2005. Pluralitas atau kemajemukan sikap politik elit Muhammadiyah telah menjadi referensi utama warga dalam menentukan pilihan untuk mendukung para Cabup-cawabup tersebut. Kedekatan seseorang pada elit yang kebetulan menjadi bagian dari tim sukses mempunyai kontribusi yang besar terhadap pluralitas sikap politik warga Muhammadiyah Ponorogo tersebut.

## 2. Deskripsi daerah Penelitian

### a. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111° 07' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 07° 49' hingga 08° 20' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Magetan, Madiun dan Nganjuk; Selatan – Kabupaten Pacitan; Barat – Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; Timur – Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan serta terbagi dalam 307 kelurahan / desa. (BPS, 2016, hal. 3-5)

Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota provinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo sendiri terletak pada 111° 07' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' hingga 8° 20' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten

Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah).Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan.(BPS, 2016, hal. 3-5)

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah kabupaten ponorogo yaitu 79 % terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18° s/d 31° Celcius. Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah terluas (di atas 100 km<sup>2</sup>) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.(BPS, 2016, hal. 3-5)

**PETA WILAYAH KABUPATEN PONOROGO**



*Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. iii)*

**b. Data Kependudukan**

Data jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang dihasilkan dari proyeksi BPS yaitu sebesar 867.393 jiwa pada tahun 2015. Kecamatan Ponorogo tercatat mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 76.785 jiwa, diikuti Kecamatan Babadan 65.452 jiwa dan

Kecamatan Ngrayun sebanyak 56.373 jiwa. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 mencapai 632 jiwa per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ponorogo yaitu 3.442 jiwa per km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Pudak yaitu 192 jiwa per km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang. Tercatat rasio jenis kelamin sebesar 99,91 yang berarti pada setiap 1.000 penduduk perempuan terdapat sekitar 999 penduduk laki-laki. (BPS, 2016, hal. 46)

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Ponorogo 2015**

Kecamatan District	Jenis Kelamin Sex			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ngrayun	28 166	28 207	56 373	99,85
2. Slahung	24 269	25 155	49 424	96,48
3. Bungkal	17 013	17 577	34 590	96,79
4. Sambit	17 688	17 996	35 684	98,29
5. Sawoo	26 575	27 561	54 136	96,42
6. Sooko	10 883	11 091	21 974	98,12
7. Pudak	4 643	4 735	9 378	98,06
8. Pulung	23 332	23 349	46 681	99,93
9. Mlarak	20 643	16 184	36 829	127,56
10. Siman	21 803	21 067	42 870	103,48
11. Jetis	14 132	14 898	29 030	94,86
12. Balong	20 343	21 283	41 628	95,59
13. Kauman	19 437	19 829	39 266	98,02
14. Jambon	19 261	19 880	39 141	96,89
15. Badegan	14 627	14 750	29 377	99,17
16. Sempung	17 612	18 005	35 617	97,82
17. Sukorejo	25 710	25 032	50 742	102,71
18. Ponorogo	38 040	38 745	76 785	98,18
19. Babadan	32 831	32 621	65 452	100,64
20. Jenangan	26 611	26 345	52 956	101,01
21. Ngebel	9 881	9 579	19 460	103,15
<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>433 504</b>	<b>433 889</b>	<b>867 393</b>	<b>99,91</b>

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/Indonesia Population Projection 2010–2035

Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 50)

Dari data diatas bisa dilihat kalau tingkat persebaran usia penduduk Kabupaten Ponorogo terbanyak adalah pada usia 40 sampai dengan 44 tahun dimana usia ini merupakan usia produktif.

### c. Data Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan, 307 desa/kelurahan, 1.002 lingkungan/dusun, 2.274 Rukun Warga (RW) dan 6.869 Rukun Tetangga (RT). Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari 45 orang, dengan jumlah 40 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi adalah sarjana (S1).(BPS, 2016, hal. 19)

**Tabel 2**  
**Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun, RW dan RT di Kabupaten Ponorogo 2015**

Kecamatan District	Kelurahan/ Desa Village	Lingkungan/ Dusun Circle Society	Rukun Warga Pillar of Member	Rukun Tetangga District Society
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ngrayun	11	40	145	439
2. Slahung	22	61	154	413
3. Bungkal	19	63	129	340
4. Sambit	16	46	93	302
5. Sawoo	14	54	160	490
6. Sooko	6	27	106	257
7. Pudak	6	19	31	79
8. Pulung	18	67	165	465
9. Mirak	15	49	104	267
10. Siman	18	45	95	289
11. Jetis	14	41	81	216
12. Balong	20	65	121	342
13. Kauman	16	54	113	303
14. Jambon	13	44	76	278
15. Badegan	10	34	45	229
16. Sampung	12	44	88	320
17. Sukorejo	18	58	139	388
18. Ponorogo	19	44	119	405
19. Babadan	15	56	123	480
20. Jenangan	17	60	120	402
21. Ngebel	8	31	67	165
<b>Kabupaten Ponorogo</b>	<b>307</b>	<b>1.002</b>	<b>2.274</b>	<b>6.869</b>

Sumber/Source: Badan Pembendayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kab. Ponorogo/Board of Society and Village Government of Ponorogo Regency

Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 21)

#### d. Data Perwakilan di DPRD

Jumlah perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, perolehan kursi terbanyak dari 10 Partai Politik yang ada bisa dilihat dari tabel dibawah ini bahwa Partai Golkar memiliki kursi terbanyak yaitu sejumlah 10 kursi dan disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah 7 kursi. Tiga partai berikutnya yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai PAN memiliki kursi yang sama di DPRD Kabupaten Ponorogo yaitu sejumlah 6 kursi. Sedangkan partai PID-P memiliki 5 kursi dan PKS 2 kursi, serta Partai PPP, Nasdem, dan Hanura memiliki masing-masing 1 kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 3**  
**Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai/Golongan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo tahun 2015**

Partai Politik <i>Political Parties</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Golkar	8	2	10
2. PKB	7	-	7
3. Gerindra	5	1	6
4. Partai Demokrat	6	-	6
5. PAN	5	1	6
6. PDI-P	4	1	5
7. PKS	2	-	2
8. PPP	1	-	1
9. Nasdem	1	-	1
10. Hanura	1	-	1
<b>Jumlah Total</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>45</b>

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo/Secretary DPRD of Ponorogo Regency

Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 22)

**Tabel 4**  
**Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai/Golongan dan Pendidikan di**  
**Kabupaten Ponorogo 2015**

Partai Politik Political Parties	Tingkat Pendidikan Education						Jumlah Total
	SD Primary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	Diploma 3 Dilpoma	Strata 1 Bachelor	Strata 2 Magister	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Partai Golkar	-	-	2	-	7	1	10
2. PKB	-	-	1	-	5	1	7
3. Gerindra	-	-	2	-	4	-	6
4. Partai Demokrat	-	-	-	-	3	3	6
5. PAN	-	-	1	-	2	3	6
6. PDI-P	-	-	-	-	3	2	5
7. PKS	-	-	1	-	1	-	2
8. PPP	-	-	-	-	1	-	1
9. Nasdem	-	-	-	-	1	-	1
10. Hanura	-	-	-	-	1	-	1
<b>Jumlah Total</b>	-	-	7	-	28	10	45

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo/Secretary DPRD of Ponorogo Regency

Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 23)

Dari tabel diatas kita bisa melihat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo tahun 2016. Jika kita lihat secara seksama dari tabel diatas maka masih ada anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sejumlah 7 anggota. Tetapi disisi lain juga telah terdapat anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang memiliki tingkat pendidikan S2 yang sejumlah 10 anggota sedangkan sisanya berpendidikan S1. Harapan yang timbul dari banyaknya anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi adalah setiap peraturan atau ide yang dimunculkan dari wakil rakyat ini bisa sangat bagus terutama untuk pembangunan Kabupaten Ponorogo.

**Tabel 5**  
**Jumlah Keanggotaan DPRD Menurut Daerah Pemilihan dan Partai di**  
**Kabupaten Ponorogo 2015**

Partai Politik Political Parties	Daerah Pemilihan Constituency						Jumlah Total
	I	II	III	IV	V	VI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Partai Golkar	2	2	2	2	1	1	10
2. PKB	2	1	1	1	1	1	7
3. Gerindra	-	1	1	2	1	1	6
4. Partai Demokrat	1	1	1	1	1	1	6
5. PAN	1	1	1	1	1	1	6
6. PDI-P	1	1	1	1	1	-	5
7. PKS	-	1	1	-	-	-	2
8. PPP	-	-	-	1	-	-	1
9. Nasdem	-	-	-	-	-	1	1
10. Hanura	-	-	-	-	-	1	1
<b>Jumlah Total</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>45</b>

Catatan/Note : Daerah Pemilihan/Constituency

I : Kecamatan/District Ponorogo, Babadan

II : Kecamatan/District Marak, Siman, Jetis, Jenangan

III : Kecamatan/District Sawoo, Sooko, Pudak, Pulung, Ngebel

IV : Kecamatan/District Ngrayun, Slahung, Bungal, Sambit

V : Kecamatan/District Balong, Jambon, Badegan

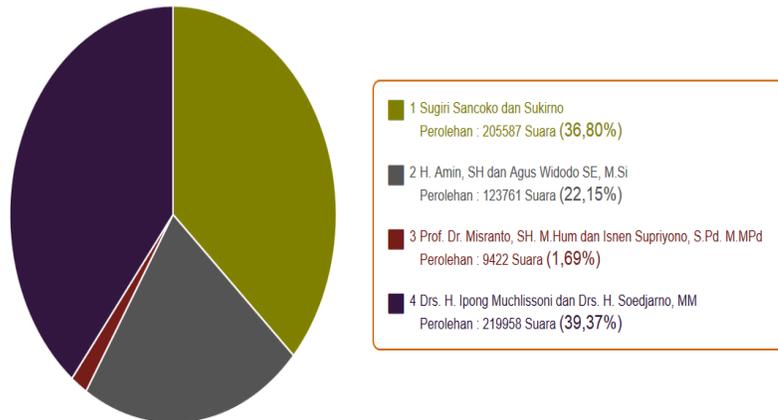
VI : Kecamatan/District Kauman, Sampung, Sukorejo

Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo/Secretary DPRD of Ponorogo Regency

*Sumber: Ponorogo Dalam Angka Tahun 2016(BPS, 2016, hal. 24)*

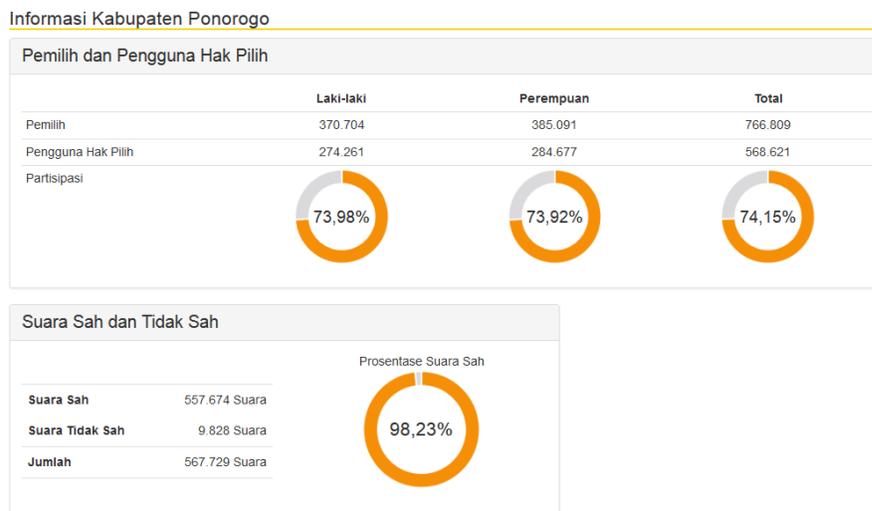
Dari data persebaran jumlah anggota DPRD menurut daerah pemilihan dan partai tahun 2015 maka bisa dilihat bahwa DAPIL IV menyumbang banyak kursi di DPR dimana DAPIL IV meliputi Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungal, dan Kecamatan sambit. Sedangkan DAPIL yang menyumbang paling sedikit jumlah anggota DPRD adalah berasal dari DAPIL V yaitu dari Kecamatan Balong, Kecamatan Jambon, dan Kecamatan Badegan.

**Tabel 6**  
**Hasil Perolehan Suara PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo 2015**



Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2015)

**Tabel 7**  
**Hasil Perolehan Suara PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo 2015**  
**(Menurut Jenis Kelamin dan Suara Sah)**



Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2015)

### 3. Analisis Data

#### a. Hasil Wawancara dengan Elit Muhammadiyah

Sikap Politik Organisasi Muhammadiyah pada PEMILUKADA tahun 2015 tidak melakukan politik praktis serta mendukung salah satu calon secara formal seperti yang diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo Bapak Ahmad Munir. Lebih lanjut Ketua PDM menyatakan bahwa organisasi Muhammadiyah hanya memfasilitasi ketentuan pasangan calon dengan warga Muhammadiyah sehingga fungsi dari organisasi Muhammadiyah hanya sebagai fasilitator yang bersifat informal. Selain itu menurut Bapak Syarifan Nurjan (Wakil Ketua PDM Ponorogo), pada event PEMILUKADA Ponorogo tahun 2015 Organisasi Muhammadiyah juga melakukan edukasi politik kepada warga tentang PEMILUKADA.

Menurut Bapak Abidin Cahyono (Wakil Ketua PDM), Organisasi Muhammadiyah tidak condong ke salah satu calon untuk berpolitik secara praktis sehingga organisasi Muhammadiyah condong untuk melakukan silaturahmi politik seperti mendatangi calon dan menghadirkan calon bersama warga sebagai pendidikan politik bagi warga. Harapan Organisasi Muhammadiyah terhadap semua pasangan calon dalam event PEMILUKADA ini adalah untuk membuat perubahan Ponorogo kearah lebih baik, religius dan maju. Selain itu, terkait ada atau tidak arahan dari Organisasi Muhammadiyah untuk mendukung salah satu calon menurut ketua dan sekretaris PDM adalah sesuai dengan aturan PP Pusat Muhammadiyah dimana elit Muhammadiyah hanya menganjurkan warga untuk memilih dengan pilihannya sendiri dan mengedukasi warga tentang politik. Organisasi Muhammadiyah tidak memberikan anjuran atau dorongan kepada warganya untuk mendukung salah satu calon sehingga yang dilakukan hanya memberikan arahan untuk memilih calon yang mereka anggap baik.

#### b. Hasil Wawancara dengan Warga Muhammadiyah

Pasangan cabup dan cawabup pada PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo tahun 2015 terdapat empat pasangan calon dimana keempat pasangan calon tersebut adalah *Calon pertama*, Sugiri Sancoko-Sukirno yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Golongan

Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan Sejahtera. *Calon kedua*, pasangan *incumbent*, Amin-Agus Widodo yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Calon ketiga*, Misranto-Isnen Supriyono dari jalur perseorangan (independent). *Calon keempat*, pasangan Ipong Muchlissoni-Sujarno yang diusung Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Nasional Demokrat.

Dari informan penelitian yang berjumlah 20 orang warga Muhammadiyah, calon yang dipilih dalam PEMILUKADA Ponorogo 2015 sangat beragam. Dari keempat calon yang ada, pilihan dari informan hampir merata kepada keempat pasangan calon. Pluralitas pilihan ini menandakan posisi Muhammadiyah atau Partai Amanat Nasional sebagai media politik Muhammadiyah memang tidak memberikan arahan untuk mendukung kepada salah satu pasangan calon dan memberikan kebebasan memilih kepada seluruh warga Muhammadiyah. Tidak adanya arahan dari elit Muhammadiyah ini berarti didalam tubuh Organisasi Muhammadiyah memang tidak ada himbuan dari atas, yaitu himbuan yang dikendalikan atau direayasa dari atas oleh kelompok-kelompok elit dalam konteks politik massa. Sebaliknya, Organisasi Muhammadiyah Ponorogo memberikan keleluasaan kepada setiap warganya untuk memilih pasangan calon sesuai hati nuraninya.

Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai gerakan Politik dari orang yang berlatarbelakang Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu partai pendukung pasangan nomor urut empat yaitu Ipong Muchlissoni-Sujarno. Menurut hasil dari wawancara dengan informan di lapangan dari 20 sampel yang diambil hampir seimbang atau 11 orang informan mendukung pasangan calon nomor urut tiga yang juga didukung partai PAN. Sedangkan 9 orang informan mendukung pasangan yang diusung oleh partai PAN. Keseimbangan antara dukungan kepada calon yang diusung oleh PAN ini memperlihatkan tidak adanya *paternalistik* di dalam warga Muhammadiyah tetapi disisi lain kecenderungan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas dari setiap warga Muhammadiyah yang berperan penting dalam mempengaruhi pilihannya dalam PEMILUKADA 2015.

Hal yang menarik dari keberagaman pilihan yang diambil oleh warga Muhammadiyah ini adalah hampir semuanya mengatakan memilih pasangan calon tersebut untuk satu tujuan yaitu "*menginginkan Ponorogo yang lebih baik*". Kecenderungan pilihan dan perhatian warga secara rasional lebih menitikberatkan wilayah administratif yaitu kota Ponorogo

daripada wilayah organisasi yang juga melekat pada diri mereka yaitu organisasi Muhammadiyah. Dualisme identitas diri ini memang kecenderungan akan menonjolkan salah satu identitas yang mereka anggap lebih besar ruang lingkungannya dan sangat mempengaruhi hidup suatu individu. Kecondongan pilihan warga ini juga sangat dipengaruhi karena tidak adanya anjuran pilihan dari organisasi Muhammadiyah untuk mendukung salah satu pasangan calon tetapi anjuran untuk memilih calon tertentu dilakukan oleh Partai Amanat Nasional sebagai gerakan Politik warga Muhammadiyah. Tetapi sekali lagi, sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya warga Muhammadiyah Ponorogo juga menunjukkan budaya politik yang kurang lebih sama yaitu budaya politik yang *paternalistic*. Budaya politik paternalistik sendiri merupakan sebuah sikap politik yang menganggap bahwa seseorang tertentu mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan warga yang lain. Karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki para elit itulah yang menjadikan warga mengikuti langkah-langkah politik yang diambil para elit Muhammadiyah. Sedangkan para elit Muhammadiyah berada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ponorogo dan bukan di partai maka dari itu mayoritas warga Muhammadiyah memiliki sikap politik yang majemuk atau bisa dikatakan tidak satu suara dan sangat *plural*.

Perbedaan sikap elit Muhammadiyah berpegang kepada sikap politik warga sehingga banyak warga Muhammadiyah untuk mengambil sikap politik sendiri-sendiri sesuai dengan cara pandang yang sangat praktis. Sebagian warga juga terbawa sikap politiknya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014. Warga persyarikatan terbagi menjadi pendukung caleg dari Golkar dan PAN. Fenomena ini berlanjut pada PEMILUKADA tahun 2015 sehingga perolehan suara terbanyak ada pada pasangan yang diusung oleh partai Golkar (Sugiri-Sukirno) dan PAN (Ipong-Sujarno).

## Kesimpulan

Sikap Politik Organisasi Muhammadiyah pada PEMILUKADA tahun 2015 tidak melakukan politik praktis serta mendukung salah satu calon secara formal serta organisasi Muhammadiyah hanya memfasilitasi ketentuan pasangan calon dengan warga Muhammadiyah sehingga fungsi dari organisasi Muhammadiyah hanya sebagai fasilitator yang bersifat informal

dan sarana edukasi politik kepada warga Muhammadiyah tentang PEMILUKADA. Organisasi Muhammadiyah tidak condong ke salah satu calon untuk berpolitik secara praktis sehingga organisasi Muhammadiyah condong untuk melakukan silaturahmi politik seperti mendatangi calon dan menghadirkan calon bersama warga sebagai pendidikan politik bagi warga. Harapan Organisasi Muhammadiyah terhadap semua pasangan calon dalam event PEMILUKADA ini adalah untuk membuat perubahan Ponorogo kearah lebih baik, religius dan maju.

Sesuai dengan aturan PP Pusat Muhammadiyah dimana elit Muhammadiyah hanya menganjurkan warga untuk memilih dengan pilihannya sendiri dan mengedukasi warga tentang politik, sehingga organisasi Muhammadiyah tidak memberikan anjuran atau dorongan kepada warganya untuk mendukung salah satu calon sehingga yang dilakukan hanya memberikan arahan untuk memilih calon yang mereka anggap baik. Sikap yang ditempuh oleh Organisasi Muhammadiyah ini selanjutnya berdampak kepada keberagaman pilihan yang diambil warga Muhammadiyah pada PEMILUKADA Kabupaten Ponorogo 2015. Pluralitas pilihan ini menandakan posisi Muhammadiyah memang tidak memberikan arahan untuk mendukung kepada salah satu pasangan calon dan memberikan kebebasan memilih kepada seluruh warga Muhammadiyah. Tidak adanya arahan dari elit Muhammadiyah ini berarti didalam tubuh Organisasi Muhammadiyah memang tidak ada himbauan yang diberikan dari atas, yaitu himbauan yang dikendalikan atau direayasa dari atas oleh kelompok elit dalam konteks politik massa. Sebaliknya, Organisasi Muhammadiyah Ponorogo memberikan keleluasaan kepada setiap warganya untuk memilih pasangan calon sesuai hati nuraninya.

Keseimbangan antara dukungan kepada calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai media politik Organisasi Muhammadiyah dan tidak adanya *paternalistik* di dalam warga Muhammadiyah tetapi disatu sisi kecenderungan ini memperlihatkan bahwa rasionalitas dari setiap warga Muhammadiyah yang berperan penting dalam mempengaruhi pilihannya dalam PEMILUKADA 2015.

Hal yang menarik dari keberagaman pilihan yang diambil oleh warga Muhammadiyah ini adalah hampir semuanya mengatakan memilih pasangan calon tersebut untuk satu tujuan yaitu *"menginginkan Ponorogo yang lebih baik"*. Kecenderungan pilihan dan perhatian warga secara rasional lebih menitikberatkan wilayah administratif yaitu kota Ponorogo daripada wilayah organisasi yang juga melekat pada diri mereka yaitu organisasi Muhammadiyah. Dualisme

identitas diri ini memang kecenderungan akan memprioritaskan salah satu identitas yang mereka anggap lebih besar ruang lingkungannya dan sangat mempengaruhi hidup suatu individu. Kecondongan pilihan warga ini juga sangat dipengaruhi karena tidak adanya anjuran pilihan dari organisasi Muhammadiyah untuk mendukung salah satu pasangan calon tetapi anjuran untuk memilih calon tertentu dilakukan oleh Partai Amanat Nasional sebagai gerakan Politik warga Muhammadiyah. Tetapi sekali lagi, seperti masyarakat Jawa secara umum, warga Muhammadiyah Ponorogo menunjukkan budaya politik *paternalistic*. Budaya politik paternalistik secara pengertian adalah sebuah sikap politik yang menganggap bahwa seseorang mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan warga yang lain. Karena kelebihan yang dimiliki para elit itulah yang menjadikan warga mengikuti langkah politik yang diambil para elit Muhammadiyah. Sedangkan para elit Muhammadiyah berada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ponorogo dan bukan di partai maka dari itu mayoritas warga Muhammadiyah memiliki sikap politik yang majemuk atau bisa dikatakan tidak satu suara dan sangat *plural*.

Dari penelitian ini maka perlu adanya saran membangun terkait dengan sikap politik warga Muhammadiyah dalam PEMILKADA Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Adapun saran yang bisa diberikan setelah terselesainya penelitian ini adalah dengan pluralnya sikap politik warga Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo maka perlu penyatuan visi misi serta arah politik yang jelas dari elit organisasi Muhammadiyah sehingga tidak terjadi perpecahan suara dari warga Muhammadiyah disaat berlangsungnya pemilihan umum baik Presiden, Legislatif ataupun Kepala Daerah. Dengan adanya arahan yang jelas tentang arah politik Muhammadiyah maka visi dan misi organisasi Muhammadiyah juga bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan tidak adanya perpecahan arah politik warga Muhammadiyah maka *'kebulatan'* suara yang dimiliki Muhammadiyah akan menjadi *bergaining position* (nilai tawar) bagi organisasi Muhammadiyah untuk bisa berpengaruh didalam menentukan arah kebijakan Pemerintah. Dengan jumlah warga dan simpatisan Muhammadiyah sebanyak kurang lebih 100.000 warga maka seharusnya bisa memainkan peran politik yang strategis.

### Daftar Pustaka

- BPS. (2016). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2016*. Ponorogo: BPS Ponorogo.
- Efferin, S.Darmadji, & Y., T. (2004). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi : Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Gafar, A. (2002). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KPU. (2015). *Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Ponorogo*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- LPCR. (2012). *Tata Cara Menjadi Anggota Muhammadiyah*. Yogyakarta: LPCR PP Muhammadiyah.
- Mas'oe'd, M. (1984). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Meleong, J. L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif (ed2)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nashir, H. (2008). *Kittah Muhammadiyah tentang Politik*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Piliang, Y. A. (2004, April 25). Dua Rasionalitas Politik. *Kompas*.
- Wiharto, M. (2017, Maret 29). *Strategi Perjuangan Muhammadiyah (1)*. Dipetik November 25, 2017, dari pdmjogja.org: <https://pdmjogja.org/strategi-perjuangan-muhammadiyah-1/>
- Zainuddin M., M. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

## Praktik “PR Excellent” Humas Pemerintah Daerah

**Imon Dwi Budi Ajiyanto, Rachmat Kriyantono, Maulina Pia Wulandari**

Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Brawijaya Malang

[imonajianto@student.ub.ac.id](mailto:imonajianto@student.ub.ac.id), [rachmat\\_kr@ub.ac.id](mailto:rachmat_kr@ub.ac.id), [mpiawulandari@ub.ac.id](mailto:mpiawulandari@ub.ac.id)

### Abstract

This study aims to describes the implications of the issuance of the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology (Permenkominfo) no. 14/2016 on Local Government PR, especially districts / municipalities. Researcher explore how the perception of Government PR Officials, how the placement of Local Government PR on the structure of Local Government Organization (OPD) and how the practice excellent PR by Local Government PR based on the principles of Excellence Theory with the implementation of Permenkominfo regulating the form, type, nomenclature, merging affairs, organizational structure, duties and functions of Field of Communication and Information. The Excellence Theory is one of the theories in the field of PR studies and is an effective standard of PR and explains the ideal PR characteristics in an organization. Descriptive qualitative research method with in-depth interview data collection technique to the Communication and Information Management Officers and completed with document tracking. The results showed that the Communication and Information Management Officers have understood the regulation. However, not all Local Government have merged PR Division in the Dinkominfoas the implementation of Permenkominfo no. 14/2016. Placement of Local Government PR still variations in OPD structure of each Local Government. Although it is found that the excellent PR practice in general is good, but coordination needs to be done so that there is no overlapping in task distribution in Field of Communication and Information Management in Local Government.

**Keywords:** *Implementation, Local government, Public relations, Excellence Theory*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan implikasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 14/2016 pada Humas Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya kabupaten / kota. Peneliti menggali bagaimana persepsi pejabat kehumasan Pemda, bagaimana penempatan Humas Pemda pada struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan bagaimana praktik “PR Excellent” oleh Humas Pemda berdasarkan prinsip-prinsip Teori *Excellence* dengan diterapkannya Permenkominfo yang mengatur penggabungan urusan, susunan organisasi, tipe, bentuk, nomenklatur, tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika. Teori *Excellence* merupakan salah satu teori dalam bidang kajian PR dan menjadi ukuran standar humas yang efektif serta menjelaskan karakteristik PR yang ideal dalam sebuah organisasi. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam kepada Pejabat Pengelola Komunikasi dan Informasi dan dilengkapi dengan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat pengelola komunikasi dan informasi telah memahami

regulasi tersebut. Namun belum semua Pemda menggabungkan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai implementasi Permenkominfo No. 14/2016. Penempatan Humas Pemda masih bervariasi pada struktur OPD masing-masing Pemda. Meski didapatkan bahwa praktik “PR *Excellent*” Humas PEMDA secara umum berjalan baik, namun koordinasi perlu terus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengelolaan bidang komunikasi dan informatika di PEMDA.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Pemerintah Daerah, Humas, Teori Excellence*

<i>Submite</i>	: 05 Oktober 2017
<i>Review</i>	: 15 Nov 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: rebbekarisma@gmail.com

## Pendahuluan

Artikel ini membahas implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 14/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, terutama pada humas Pemerintah Daerah (Pemda) di kabupaten/kota. Permenkominfo ini sebagai upaya penguatan struktur humas Pemda sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.18/2016 tentang Perangkat Daerah (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016a). Ada beberapa hal yang diatur dalam Permenkominfo ini yaitu penggabungan urusan, bentuk, tipe, susunan organisasi, nomenklatur, tugas dan fungsi bidang komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) (Budiman, 2017).

Penelitian ini penting dilakukan karena sejak peraturan ini ditetapkan oleh Kemenkominfo pada tanggal 18 Agustus 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 September 2016, belum semua PEMDA telah mengimplementasikan peraturan tersebut. Berdasarkan peraturan ini, PEMDA harus menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi dengan Permenkominfo No. 14/2016 paling lambat enam bulan sejak diundangkan (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016a).

Selain itu, implementasi Permenkominfo oleh masing-masing PEMDA cenderung beragam dan bergabungnya humas ke dalam Dinkominfo atau tetapnya posisi humas di bawah koordinasi Sekretariat Daerah (Setda), tergantung dari kebijakan masing-masing Pimpinan Daerah. Bahkan Menkominfo Rudiantara menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepadamasing-masing Pemda dalam menempatkan bagian humasnya. “...Dinas Kominfo sekaligus juga humas

yang ada disitu. Tapi ada humasnya yang di Pimpinan Daerahnya. Nah ini tergantung kepada Dinas Kominfo sama humasnya lah, saya *nggak* ngatur sampai detail...”(Rudiantara, 2017).

Padahal Menkominfo Rudiantara mengatakan restrukturisasi atau penggabungan urusan kehumasan ke dalam OPD Dinkominfo sesuai Permenkominfo No. 14/2016 sebagai integrasi yang ideal bagi humas Pemerintah. Karena ada alur yang jelas, berawal dari kementerian di tingkat pemerintah pusat sampai yang paling bawah, yaitu kabupaten/kota. Sehingga humas pemerintah dapat dengan mudah menjelaskan saat masyarakat memerlukan informasi secara menyeluruh (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015).

Selain itu, menurut Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur *e-Government* Kemenkominfo Bambang Dwi Anggono, Bagian Humas Sekda dengan Dinkominfo merupakan satu rumpun urusan Pemerintahan yakni urusan Komunikasi dan Informatika. Sehingga jika ada dua OPD yang berbeda melaksanakan urusan yang sama adalah suatu kesalahan dan perlu dievaluasi kembali. Sementara pembentukan perangkat daerah dilakukandengan proses *assessment* melalui *score* variabel yang harus dipenuhi. Penghitungan *score* Dinas Kominfo itu salah satunya menggunakan variabel indikator kehumasan (Budiman, 2017).

Langkah-langkah di atas merupakan tindak lanjut dan upaya Pemerintah untuk menerapkan kebijakan dalam rangka memanfaatkan humas sebagai profesi strategis, yaitu revitalisasi kehumasan dalam menempatkan kembali bagaimana pentingnya fungsi dan peran humas di sebuah organisasi pemerintah, perubahan mendasar dan mengubah kinerja humas pemerintah yang disebut transformasi kehumasan dan konseptualisasi kehumasan sebagai upaya ideal bagi suatu lembaga (Bratakusumah, 2016).

Selain itu, Permenkominfo No. 14/2016 penting untuk dipedomani agar terwujud adanya sinergitas kelembagaan perangkat daerah dalam menjalankan berbagai fungsi yang menjadi kewenangan daerah yang berlandaskan UU No. 23/2014 tentang Pemda (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016b). Apalagi dalam pembentukan OPD, Pemerintah telah melaksanakan hal tersebut berdasarkan delapan asas sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Kedelapan asas tersebut antara lain asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah (Presiden RI, 2016). Sebagai integrasi yang ideal berdasarkan asas efektivitas dan

tata kerja yang jelas, Pemerintah berharap Lembaga Kehumasan Pemda pada Dinkominfo dapat lebih efektif dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Sebab, tata kerja pada struktur yang sifatnya memudahkan dapat dilaksanakannya pengendalian yang jelas atas peran, tanggung jawab dan akuntabilitas komunikasi, standarisasi praktik manajemen dan profesional (Moss, Likely, Sriramesh, & Ferrari, 2016).

Menurut Moss, dkk (2016), konsep struktur yang ditemukan dalam studi *excellence* menurut Grunig, Grunig & Dozier (2002); Grunig (1992) berfokus pada membangun kerangka kerja yang luas untuk mendefinisikan apa yang merupakan “*excellence communication and public relations management*”, dengan penekanannya berpusat pada seberapa pentingnya struktur organisasi pada tingkat departemen. Bahwa struktur berfungsi untuk menentukan peran dan tugas praktisi agar dapat meningkatkan pengaruhnya dalam organisasi dan diperlukan struktur yang terbaik bagi organisasi humas yang memungkinkan melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi (Grunig, 1992). Sehingga dengan kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai praktik Public Relations *excellent* (PR *excellent*) sesuai teori *excellence* yang merupakan standar ideal dan efektivitas organisasi kehumasan (Kriyantono, 2014).

Demikian juga restrukturisasi atau penempatan humas pada struktur yang berbeda akan berpengaruh pada efektivitas humas. Dalam struktur kelembagaan, *Teori Excellence* mengatakan bahwa humas efektif jika memenuhi beberapa persyaratan (Grunig, dkk, 2002; Prastya, 2016), diantaranya humas memiliki akses ke koalisi dominan, memiliki bagian tersendiri, tidak digabung dengan divisi/bagian yang lain dan bukan pula disubordinasi oleh divisi lain / bagian yang lain, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dipimpin oleh manajer strategis dan melakukan komunikasi dua arah dan simeteris. Sehingga dari pendapat Grunig, dkk, (2002); Prastya (2016), penempatan humas pada struktur yang mempertimbangkan syarat di atas diyakini mampu meningkatkan efektivitas humas dan sebaliknya. Namun Moss, dkk (2016) mengingatkan bahwa struktur setiap saat ditentukan oleh *dominant coalition* yang ada di dalam organisasi.

Menurut Kriyantono (2015a) dari kajian teori *excellence* terdapat 10 prinsip standar dan efektivitas organisasi kehumasan yang dilahirkan kurang lebih tiga dekade terakhir, yaitu humas adalah: bagian *dominant coalition* yang dapat langsung berkomunikasi dengan manajemen puncak (*empowerment*); fungsi strategis manajemen (*involvement*); terintegrasi ke dalam satu

departemen sendiri (*integration*); harus melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, bukan hanya teknisi komunikasi (*managerial*); fungsi manajemen yang terpisah dari fungsi manajemen yang lain (*independence*); bersifat simetris dua arah dalam menjalin relasi publik (*symmetrical model*); sistem komunikasi internal bersifat simetris dua arah (*symmetrical internal communication*); fungsi humas dilaksanakan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge*); adanya diversitas peran dalam menjalankan fungsi (*rolediversity*); dan humas harus mengutamakan kode etik dan integritas profesi (*ethical publicrelations*).

Menurut beberapa pakar, teori *excellence* menentukan bagaimana melakukan hubungan masyarakat dalam situasi ideal (Pompper, 2004). Peran humas berkaitan dengan pemahaman ideal tentang apa yang seharusnya humas lakukan dalam sebuah organisasi, sedangkan fungsihumas lebih dipahami sebagai praktik humas dalam organisasi (ThurLOW, Kushniryk, Yue, Blanchette, Murchland & Simon, 2016). Huang (2012) mengatakan efektivitas humas didefinisikan sebagai "sejauh mana hubungan masyarakat sebagai subsistem sosial sebuah organisasi, diberi sumber daya dan sarana tertentu, memenuhi tujuannya tanpa melumpuhkan sarana dan fungsinya sumber daya dan tanpa menempatkan keregangan yang tidak semestinya pada anggotanya".

Meski demikian, teori *excellence* belum tentu dapat diaplikasikan pada organisasi yang berbeda negara. Seperti pada penelitian-penelitian terdahulu, antara lain penelitian Wu, Taylor, & Chen (2001) di Taiwan, diketahui humas berkomitmen untuk melayani klien, fokus pada informasi positif tentang klien, praktisi memahami nilai *two-ways communications* dan memilihnya sebagai model kedua yang paling banyak dipakai, humas mendukung tujuan kesuksesan dan prestasi pribadi praktisi, praktisi mengikat kesuksesan pribadi dengan kesuksesan klien atau organisasi. Sementara itu latar belakang pendidikan tinggi disebut diperlukan agar dapat melaksanakan praktik "PR *Excellent*". Kemudian penelitian Rhee (2004) di Korea Selatan didapat bahwa pengetahuan menjadi kunci praktisi humas melaksanakan praktik "PR *Excellent*" meski tidak semua prinsip teori humas global dapat diaplikasikan dalam praktik humas Korea Selatan.

Selanjutnya penelitian Lim, Goh & Sriramesh (2005) di Singapura yang meneliti sejauh mana strategi manajemen humas dalam mempraktikkan empat prinsip humas berdasarkan teori *excellence*. Diketahui humas di Singapura memiliki status yang lebih rendah dibandingkan

dengan periklanan dan pemasaran. Humas juga tidak digunakan sebagai alat bisnis strategis dan para humas profesional tidak mempraktikkan humas *excellence* karena kurang mendapatkan pelatihan humas strategis. Sementara Kent & Taylor (2007) menemukan bahwa praktik humas di Bosnia dipengaruhi oleh interpretasi budaya lokal di urutan tertinggi, diikuti dengan model press agentry, model pengaruh personal, model informasi publik, model asimetris dan model simetris (*excellence*). Sehingga didapatkan bahwa model komunikasi simetris sesuai teori *excellence* bukan model populer dalam praktik humas di Bosnia dan berbeda dengan apa yang dilakukan humas di Amerika, Inggris dan Kanada.

Di Indonesia, hasil penelitian Kriyantono (2015a), tentang humas Perguruan Tinggi (PT) membuktikan bahwa ada kesamaan dan ketidaksamaan penerapan Teori *Excellence* di Indonesia dan Barat. Beberapa prinsip diadopsi karena berlaku universal namun sebagian prinsip lainnya diterapkan sesuai konteks di Indonesia. PR sesuai konteks Indonesia dapat dilaksanakan menurut *local wisdom* atau kearifan lokal, oleh karena itu tidak perlu memasukan keseluruhan prinsip milik teori Barat ke dalam teori maupun praktik (Kriyantono & Mckenna, 2017).

Demikian pula penelitian Kriyantono (2017) yang menggunakan 10 prinsip teori *excellence* untuk membedakan praktisi PR dengan praktisi humas. Didapatkan bahwa praktisi PR cenderung memiliki keseimbangan prioritas antara publik internal dan eksternal, dibandingkan dengan praktisi humas; Praktisi PR cenderung menampilkan peran manajerial daripada praktisi humas; dan praktisi PR cenderung lebih *excellent* dari pada praktisi Humas. Penelitian Kriyantono (2017) juga kembali menegaskan bahwa di Indonesia, teori *excellence* masih mengadopsi sebagian, bukan seluruh prinsip, disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Jadi ada kesamaan dan ketidaksamaan penerapan teori *excellence* di Indonesia dan Barat (Huang-Horowitz, 2012; Mc Quail, 2000).

Meskipun temuan Kriyantono (2017) menguatkan model humas karya Grunig & Hunt (1984) yaitu humas swasta dan humas pemerintah telah sama-sama mengimplementasikan model *two-ways communications* dan mengkonfirmasi bahwa praktik humas di Indonesia telah berkembang bersamaan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal yang sama dikatakan Djusan (2012) dalam penelitiannya yang menyoroti perubahan pergeseran paradigma PR setelah tahun 1999 serta tantangan praktik humas pemerintah akibat implementasi desentralisasi berdasarkan

UU No. 22/1999 yang direvisi menjadi UU No. 32/2004 tentang PEMDA yang kini telah mengalami revisi kedua kalinya menjadi UU No. 12/2008.

Tantangan yang dihadapi humas pemerintah daerah yaitu sumber daya manusia sebagai juru bicara, kelembagaan yaitu kedudukan humas dalam struktural humas serta praktiknya, infrastruktur pendukung kerja humas dan sinergitas antarpemerintah serta satuan kerja. Djusan (2012) memprediksi dengan otonomi daerah maka praktik humas pemerintah berbeda-beda antar daerah. Dalam tugas dan fungsinya, humas Pemda lebih menekankan pada pelayanan publik dengan memberikan informasi aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan informasi yang tidak diperoleh masyarakat atau tidak tersedia di media massa (Sari, 2012). Hal tersebut sejalan dengan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Kusumawardani & Dalimonthe, 2016).

Putra & Melbourne (2008); Prastya (2016) menyebut praktik ideal humas di Indonesia belum maksimal dan masih sulit untuk dicapai. Sebab penelitian Putra & Melbourne (2008) menyoroti permasalahan-permasalahan dalam praktik humas yakni berkaitan dengan penempatan humas pada struktur organisasi dan pengembangan profesionalisme. Putra & Melbourne (2008) beralasan bahwa, belum ada konsep yang jelas bagaimana peran manajerial PR dan belum banyak literatur tentang *best practice* peran manajerial PR dalam konteks Indonesia.

Sementara Prastya (2016) mengatakan selain terkendala permasalahan struktural, yaitu mencakup infrastruktur (ilmu pengetahuan, alat dan teknologi) dan pembentukan struktur divisi humas di sebuah organisasi, juga mencakup cara pandang organisasi terhadap praktik humas, minimnya pemahaman organisasi mengenai humas, kurangnya pengetahuan praktisi humas mengenai peran manajerial, pemahaman pimpinan puncak mengenai humas, posisi, tugas, peran dan kewenangan.

Mengenai permasalahan penempatan humas banyak pimpinan manajemen menempatkan humas pada level yang sangat rendah, humas lebih banyak membantu bagian lain, contohnya seperti pemasaran, daripada yang independen (Putra & Melbourne, 2008), ditempatkan tidak secara proporsional, sehingga seringkali dianggap tumpang tindih dengan bidang lain (Yulianita, 2002). Banyak pimpinan organisasi puncak baik swasta maupun pemerintah, tidak melihat humas sebagai bagian penting dalam fungsi manajemen, walaupun pimpinan puncak menyadari arti penting humas dan memiliki bagian humas dalam organisasinya (Putra & Melbourne, 2008).

Misalnya posisi humas di suatu struktur organisasi Perguruan Tinggi (PT) tidaklah sama, tergantung pada bagaimana perhatian dan keinginan pimpinan memandang peran humas itu penting atau tidak (Nasution, 2006).

Padahal seharusnya humas ditempatkan pada posisi atas pada level struktur organisasi, sebab praktisi humas penting untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan peran manajerial (Childers, 1989). Demikian juga apabila humas sebagai bagian *dominant coalition*, maka humas harus ditempatkan di bawah pimpinan, di level puncak dalam struktur organisasi (Depari, 1994; Rachmadi, 1994; Effendy, 1986). Sesuai dengan sifat komunikasi yang *omnipresent* atau *ubiquity*, yaitu ada dimana-mana dan kapan saja, humas seperti aliran “darah” dalam tubuh atau organisasi agar dapat berkoordinasi dan bekerja sama (Husni, Sugiyanto, & Nurnisya, 2017). Dengan hal tersebut peran humas diharapkan dapat menjadi mata dan telinga serta tangan kanan bagi top manajemen dalam organisasi/lembaga (Sari, 2012). Oleh karena itu, manajemen puncak akan memberi tempat semestinya jika humas dianggap penting dan berkontribusi signifikan kepada organisasi, begitu juga sebaliknya (Husni, dkk, 2017).

Dengan penempatan humas pada posisi strategis, humas dapat memberi masukan informasi atau sampaikan kebijakan pada tingkat level puncak / pimpinan (Rachmadi, 1994). Sementara itu dengan keterlibatan humas dalam pengambilan keputusan dapat dipahami oleh praktisi humas, apa alasan pengambilan keputusan tersebut dan dapat juga merencanakan dan melaksanakan program kerja untuk mendukung setiap kebijakan perusahaan, sehingga dalam manajemen lembaga publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan juga menjadi pergeseran paradigma utama bagi lembaga publik yang secara signifikan bermanfaat positif (Nyhan, 2015). Partisipasi dalam pengambilan keputusan tak hanya sebagai keinginan manajer untuk melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan, tetapi juga adanya persepsi oleh mereka bahwa keterlibatannya itu sangat berarti (Nyhan, 2015). Sebab secara teoritis keterlibatan humas dalam manajemen strategis seperti pembuatan keputusan merupakan hal penting dan mengindikasikan ciri khas humas yang sangat baik (J. E. Grunig & Grunig, 2008). Tetapi untuk memiliki akses pimpinan puncak, humas yang memiliki posisi rendah harus memenuhi persyaratan untuk menjadi humas yang profesional dan memiliki kualifikasi yang kompeten. Sehingga saat berada di *dominant coalition* humas dapat efektif melaksanakan tugasnya (Putra & Melbourne, 2008).

Disimpulkan dari beberapa penelitian di atas bahwa teori *excellence* sebagai standar ideal dan efektivitas humas belum tentu dapat diaplikasikan pada organisasi yang berbeda negara. PR sesuai konteks Indonesia dapat dilaksanakan menurut *local wisdom* atau kearifan lokal, pendidikan tinggi dan pengetahuan diperlukan sebagai kunci agar dapat melaksanakan praktik “PR *Excellent*”, praktisi PR cenderung menampilkan peran manajerial daripada praktisi humas dan praktisi PR cenderung lebih *excellent* dari pada praktisi Humas. Selain itu, dengan otonomi daerah dimungkinkan maka praktik humas pemerintah berbeda-beda antar daerah.

Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik meneliti humas PEMDA yaitu terkait di implementasikannya Permenkominfo No. 14/2016 yang mengatur penggabungan urusan bidang komunikasi dan informasi terhadap praktik “PR *Excellent*” humas Pemda dalam struktur OPD di Indonesia. Peneliti berasumsi sesuai penelitian-penelitian yang telah di paparkan diatas, bahwa prinsip-prinsip teori *excellence* tidak diterapkan seluruhnya atau sebagian saja dalam praktik humas PEMDA sesuai konteks Indonesia yang dilaksanakan menurut kearifan lokal. Peneliti juga berasumsi sesuai hasil penelitian bahwa dengan otonomi daerah maka implementasi Permenkominfo No. 14/2016 terhadap penempatan humas PEMDA berbeda-beda antar daerah. Data menunjukkan sejak diimplementasikan Permenkominfo No.14/2016, tidak semua PEMDA menempatkan humas PEMDA pada Dinkominfo. Untuk mengetahui kebenaran asumsi tersebut, perlu dilakukan kajian ilmiah secara menyeluruh. Untuk itu, kajian ini penting dilaksanakan karena sejak implementasi Permenkominfo No. 14/2016 pada akhir tahun 2016 belum pernah dilaksanakan evaluasi. Sehingga hasil kajian ini diharapkan mampu mengurai permasalahan yang terjadi sebagai evaluasi dan merekomendasikan langkah-langkah apa yang akan diambil bagi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam implementasi Permenkominfo No. 14/2016 ke depan.

## Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif analisis deskriptif, tujuannya membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya atau sesuai dengan fakta-fakta (Kriyantono, 2006); (Sukmadinata, 2009). Analisis datanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dan mempertimbangkan masukan ataupun pendapat orang lain yang juga disebut sebagai narasumber (Sukmadinata, 2009). Oleh karenanya, untuk mendapatkan

pendapat berupa kata-kata lisan maupun tertulis, peneliti melakukan wawancara terkait implementasi Permenkominfo No. 14/2016 di masing-masing instansinya.

Peneliti mewawancarai para Kepala Bagian/Sub Bagian atau Bidang/Kepala Seksi dan Kepala Dinkominfo sebagai Pejabat yang mengelola Bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah di beberapa Pemerintah Daerah, antara lain Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal, Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, Kepala Seksi Humas dan Komunikasi Publik Dinkominfotik Kabupaten Brebes, Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara, Kepala Dinkominfo Kota Surabaya dan Kepala Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan informan didasarkan kemudahan akses dan kesediaan informan untuk diwawancarai. Pemilihan informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Wawancara dilaksanakan antara bulan Mei-November 2017 dilaksanakan dengan tatap muka dan melalui email dan *internet message*. Wawancara email dan *internet message* ini dilaksanakan karena jarak yang jauh antara peneliti dengan informan sehingga memudahkan pengumpulan data (Evans, Twomey, & Talan, 2011; Mann & Stewart, 2000) dikutip Kriyantono, (2015b). Selain wawancara, peneliti melakukan studi pustaka/kajian dokumen berupa dokumen publik yang dimuat di website dan berita-berita yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2006).

Data diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu yang berpedoman pada teori *excellence*, yang mempertimbangkan kesahihan (kevalidan), dengan memperhatikan kompetensi subjek penelitian dan tingkat autentisitasnya (Kriyantono, 2006). Selain itu, kategori-kategori yang digunakan bisa bertambah atau berkurang disesuaikan dengan data di lapangan. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam menganalisa penerapan Permenkominfo No. 14/2016 dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pengembangan metode dan keluasan studi. Contohnya survey dengan populasi seluruh Humas Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Permenkominfo No. 14 Tahun 2016 dan daerah yang belum. Karenanya penelitian ini tidak bermaksud menggeneralisasi data, hanya menggambarkan persepsi dan pandangan informan, bukan mencerminkan situasi keseluruhan praktik humas dalam tata kelola komunikasi di Pemerintah Daerah di Indonesia secara keseluruhan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Persepsi tentang Permenkominfo No. 14 Tahun 2016*

Permenkominfo No. 14/2016 yang mengatur penggabungan urusan, susunan organisasi, bentuk, tugas dan fungsi, tipe, nomenklatur Humas Pemda dilandasi Perpres No. 54 Tahun 2015 pasal 18 dan pasal 19. Pasal 18 menyebut Dirjen Informasi dan Komunikasi (IKP) Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan IKP. Sementara pasal 19 mengatur dalam pelaksanaan tugas sesuai pasal 18, Dirjen IKP menyelenggarakan salah satunya fungsi peningkatan peran media publik, perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, serta pengembangan lembaga kehumasan dan informasi pemerintah. Sementara berdasarkan UU No. 39/2008 dan UU No. 23/2014 mengelompokkan urusan komunikasi dan informatika sebagai urusan Wajib non pelayanan dasar. Selanjutnya komponen urusan kongkruen komunikasi dan informatika, didalamnya ada kehumasan yang termasuk urusan komunikasi dan informatika, yang menjadi bagian dari fungsi IKP.

Dalam menetapkan kelembagaan perangkat daerah didalamnya termasuk perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Daerah menggunakan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Permenkominfo No. 13/2016. Hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika. Penghitungan variabel setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis hasilnya menjadi pemetaan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika. Untuk memahami penerapan Permenkominfo No. 14 Tahun 2016 di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan sejak akhir 2016, perlu dikaji bagaimana persepsi atau pandangan Pejabat Humas Pemerintah Daerah terhadap Permenkominfo karena tidak semua Pemerintah Daerah menerapkan Permenkominfo tersebut.

Kepala Bidang Humas dan IKP Dinkominfo Kabupaten Purbalingga mengatakan dengan adanya Permenkominfo No. 14/2016, menuntut Humas untuk berada di dalam OPD Dinkominfo, terpisah dari OPD Setda. “Sejatinya penggabungan Humas ke dalam OPD karena merujuk pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga dalam rangka mendukung dan mempercepat penyampaian informasi berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah sebagaimana tertuang dalam Inpres No. 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik”.

Ditambahkannya, humas yang bernaung di bawah Dinkominfo di dalam menjalankan fungsi diseminasi informasi kepada publik lebih solid dengan bidang lainnya. Sebab Bidang Informatika dan Bidang Statistik yang saat ini berada dalam satu atap, mendukung jaringan dan menyediakan data pendukung yang diperlukan oleh humas saat meramu informasi yang akan disebarkan kepada publik. Seperti sarana dan prasarana, aplikasi, internet, statistik yang terkait kebutuhan data.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinkominfo Kabupaten Brebes mengatakan Kabupaten Brebes sesuai hasil pemetaan berkategori Sedang telah mengimplementasikan Permenkominfo No. 14/2016 sebagai dasar penempatan Humas Pemerintah Daerah dalam Dinkominfo. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes No. 5/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, Humas ditempatkan di salah satu Bidang dari dua Bidang di Dinkominfo yaitu Bidang Komunikasi dan Kehumasan. Terdapat Seksi Humas dan Komunikasi Publik dan Seksi pengelolaan Informasidan Diseminasi di bawah Bidang Komunikasi dan Kehumasan. Senada dengan apa yang diungkapkan Humas Kabupaten Purbalingga, Humas Kabupaten Brebes dalam berkoordinasi dengan bidang lain lebih mudah. Namun sarana dan prasarana *Information Technology* (IT) dan anggaran menjadi kendala.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal menyatakan bahwa memang dasar hukum Humas Pemerintah Daerah masuk Dinkominfo kuat. Namun pimpinan puncak yakni Walikota berkehendak agar Bagian Humas dan Protokol tetap berada di OPD Setda. “Pimpinan bagaimana memandang Bagian yang penting harus menjadi orang pertama yang bisa berhubungan langsung dengan Walikota. Kalau Kepala Bagian bisa langsung berhubungan, tetapi kalau Kepala Bidang tidak mungkin karena harus lewat Kepala Dinas. Apalagi wacana Kepala Dinas Kominfo tidak menjadi juru bicara Walikota”.

Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Dinkominfo Kota Surabaya, bahwa sesuai analisis Walikota Surabaya, masih menganggap ada kebutuhan untuk Humas tidak digabung dengan Dinkominfo. Diakuinya sesuai dengan aturan berdasarkan UU, PP dan Permenkominfo, Humas itu masuk ke dalam Dinkominfo, sehingga ia pun jika diberikan pilihan maka ia lebih memilih Humas dijadikan satu dengan Dinkominfo. Meskipun tidak digabung, sudah ada pembagian

tugas diantara Bagian Humas Setda Kota Surabaya dan Dinkominfo Kota Surabaya. Sehingga diharapkan Bagian Humas fokus pada tugas Humas dalam mengakses langsung ke *dominant coalition*.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro mengatakan Kabupaten Bojonegoro tidak menerapkan Permenkominfo No. 14 Tahun 2016. Pihaknya telah membahas di Tim OPD saat pembentukan OPD di akhir tahun 2016 bahwa peran Humas adalah juru bicara pimpinan (jubir) sedangkan Kominfo lebih banyak pada sumber daya komunikasinya, yaitu bagaimana menyiapkan sumber daya komunikasi, yang terdiri dari pengelola dan pengguna. “Pengelola adalah internal kita birokrasi dan pengguna adalah masyarakat. Bagaimana membuat masyarakat itu mentalnya terevolusi, bukan masyarakatnya yang mengeluh tetapi bagaimana masyarakat yang memberikan aspirasi dan ide. Dan itu perlu tersubstansi dan terukur”.

Sedangkan Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara memandang nomenklatur OPD Bidang Kominfo sudah sesuai dengan Permenkominfo No. 14/2016. Sesuai UU No. 23/2014, sesuai OPD baru Bidang Kominfo pada Dinhubkominfo yang kemudian berubah menjadi Dinkominfo. Secara teoritis, penempatan humas harus sesuai dengan sifat komunikasi yang *omnipresent* atau *ubiquity*, yaitu ada dimana-mana dan kapan saja atau humas seperti aliran “darah” dalam tubuh atau organisasi agar dapat berkoordinasi dan bekerja sama (Husni, dkk, 2017). Dengan hal tersebut peran humas diharapkan dapat menjadi mata dan telinga serta tangan kanan bagi top manajemen dalam organisasi / lembaga (Sari, 2012). Oleh karena itu, manajemen puncak akan memberi tempat semestinya jika humas dianggap penting dan berkontribusi signifikan kepada organisasi, begitu juga sebaliknya (Husni, dkk, 2017). Demikian juga seharusnya profesi strategis yang dimiliki oleh humas wajib dimanfaatkan dalam lingkup birokrasi atau pemerintahan di Indonesia (Kusumawardani & Dalimonthe, 2016).

Banyak pimpinan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, tidak melihat humas sebagai bagian penting dalam fungsi manajemen walaupun mereka menyadari arti penting humas dan mereka memiliki bagian humas dalam organisasinya (Putra & Melbourne, 2008). Misalnya posisi humas di suatu struktur organisasi Perguruan Tinggi (PT) tidaklah sama, tergantung pada bagaimana perhatian dan keinginan pimpinan memandang peran humas itu penting atau tidak (Nasution, 2006).

Demikian hal yang harus dimiliki oleh Humas yakni akses langsung ke dalam kelompok dominan. Sehingga Humas dapat melaksanakan perannya menyampaikan masukan kepada pimpinan tertinggi (Kriyantono, 2014). Masukan-masukan yang diberikan oleh Humas berupa hal-hal yang melibatkan publik, nilai-nilai dan pengambilan keputusan secara etis (Bowen, Rawlins, & Martin, 2010). Sehingga dengan mengambil bagian dari *dominantcoalition* maka efektivitas organisasi diharapkan mampu tercapai (Grunig, 1992).

Data di lapangan memperlihatkan Humas Pemerintah Daerah yang tidak bergabung kedalam Dinkominfo mampu memperkuat penjelasan teoritis ini, yaitu Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal mengatakan bahwa bagaimana Pimpinan memandang Bagian yang penting harus menjadi orang pertama yang bisa berhubungan langsung dengan Walikota. Kalau Kepala Bagian bisa langsung berhubungan, tetapi kalau Kepala Bidang tidak mungkin karena harus melewati Kepala Dinas.

### ***Posisi Humas Pemerintah Daerah***

Peran dan fungsi humas sangat penting bagi sebuah organisasi. Berdasarkan teorisisistem, humas memiliki kemampuan mempengaruhi berfungsinya keseluruhan sistem organisasi (Laborde, 2005). Almaney (1947) menyebut humas merupakan bagian dari struktur organisasi, yang dapat menciptakan kesinambungan antar subsistem di dalam organisasi melalui fungsi dan perannya. Fungsi dan peran PR memberi sumbangsih dalam menciptakan keseimbangan sistem di dalam sebuah struktur organisasi.

Sementara Grunig & Hunt (1984); Grunig & Grunig (2008) mengatakan PR merupakan "*management of communications between an organization and its public*", yang mengkonstruksi dan mempertahankan hubungan atau relasi yang harmonis dan bermanfaat serta saling menguntungkan antara organisasi dengan publik sebagai kontribusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi (Gregory, 2005; Cutlip, Center, & Broom, 1978; (Kriyantono, 2014). Dengan harapan hubungan harmonis tersebut membentuk citra positif (Husni, dkk, 2017) dan reputasi (Gregory, 2004).

Kesuksesan dan kegagalan organisasi merupakan tanggung jawab kewenangan dan kekuasaan manajer lini (Husni, dkk, 2017). Sebagai fungsi manajemen komunikasi, humas

sebagai *supporting unit* (Husni, dkk, 2017), agar organisasi mencapai tujuan-tujuannya melalui komunikasi yang efektif dan relasi-relasi yang konstruktif (Kriyantono, 2015b).

Sebagai pusat aktivitas, efektivitas pelaksanaan kinerja PR yang memiliki kedudukan dalam organisasi (Husni, dkk, 2017), tidak hanya dapat diperoleh dengan cara melaksanakan persiapan dan mengaplikasikan program kerja PR dengan tepat dan sebaik-baiknya. Peran PR sebagai alat vital bagi manajemen strategis (Dozier, Grunig, & Grunig, 1995), juga tergantung kedudukan, peranan dan tugas serta fungsi humas dalam sebuah organisasi yang dianggap sangat penting (Kusumawardani & Dalimonthe, 2016). Dilihat dari peran dan fungsi PR yang penting, penempatan PR pada struktur organisasi merupakan hal yang rasional (Cutlip, dkk, 1978). Sementara tujuan organisasi harus dibuat secara efisien dan efektif sehingga dengan penempatan PR yang tepat pada struktur organisasi, dapat mendukung arah gerak dan kinerja PR di organisasi (Ashkenas, Ulrich, Jick, & Kerr, 2002). Untuk itu, PR seharusnya ditempatkan pada level atas di dalam suatu organisasi atau level strategis (Cutlip, dkk, 1978). Kemudian menurut Grunig, dkk (2002), humas memiliki bagian sendiri, tidak digabung dengan divisi / bagian lainnya, masuk dalam struktur atas (*dominant coalition*), humas dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh *dominant coalition*. Dengan implementasi Permenkominfo No. 14/2016, menunjukkan penempatan humas Pemerintah Daerah di beberapa daerah bervariasi atau beragam. Data di lapangan dan tinjauan dokumen ditemukan empat posisi humas pada struktural OPD:

1. Humas yang ditempatkan di Bagian sendiri pada struktur OPD Setda, seperti Pemerintah Kota Surabaya dengan nomenklatur Bagian Hubungan Masyarakat (Peraturan Walikota (Perwal) Surabaya No. 44/2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya).
2. Humas yang ditempatkan satu Bagian bersama Sub Bagian Protokol seperti di Pemerintah Kota Tegal (Perwal No. 16/2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli & Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal) dengan nomenklatur Bagian Humas dan Protokol.
3. Humas yang ditempatkan di Sub Bagian pada Bagian OPD Setda seperti Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Bagian Umum Setda Kabupaten Banjarnegara (Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, 2017)

4. Humas yang ditempatkan pada Bidang di bawah koordinasi OPD Dinas Kominfo seperti Kabupaten Brebes (Bidang Komunikasi dan Kehumasan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 102/2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes) dan Kabupaten Purbalingga (Bidang Humas dan IKP sesuai Perbup No.90/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga). Nomenklatur Bidang Kehumasan juga berbeda. Misal di Kabupaten Brebes nomenklaturnya Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinkominfotik. Sedangkan di Kabupaten Purbalingga nomenklaturnya Bidang Humas dan IKP Dinkominfo.

Dari empat posisi penempatan Humas Pemerintah Daerah di struktur OPD diatas, sesuai pandangan (Grunig, 1992), Pemkot Surabaya menempatkan humasnya pada bagian sendiri. Yakni Bagian Humas Setda Pemkot Surabaya. Sementara humas lainnya masih digabung dengan Sub Bagian Protokol di bawah koordinasi Bagian Humas dan Protokol Setda seperti di Pemkot Tegal dan digabung dengan Seksi Komunikasi di bawah koordinasi Dinkominfo seperti di Pemerintah Kabupaten Brebes. Bahkan di Kabupaten Banjarnegara, humas ditempatkan menjadi Subbagian bersama protokol di bawah Bagian Umum. Selain Sub Bagian Humas dan Protokol Bagian Umum mengkoordinir Sub Bagian Tata Usaha (TU) dan Sub Bagian Rumah Tangga. Juga ditemukan bahwa Humas pemerintah daerah umumnya berada di eselon III (Bagian/Bidang). Kecuali untuk Sub Bagian Humas dan Protokol Bagian Umum Setda Kabupaten Banjarnegara berada di eselon IV. Hal tersebut menunjukkan humas pemerintah daerah tidak berada pada struktur yang tinggi. Struktur tinggi dalam OPD adalah eselon II, setingkat Kepala Dinas.

Dengan posisi tersebut, tanggung jawab Humas Pemerintah Daerah langsung kepada Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Humas di posisi Bagian sendiri atau satu Bagian bersama dengan Sub Bagian Protokol. Misalnya Bagian Humas Setda Pemkot Surabaya, Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal dan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro.

Humas Pemkot Tegal mengatakan bisa langsung berhubungan dengan pimpinan dan memiliki akses yang mudah kepada pimpinan puncak. Meskipun tugas sebagai juru bicara belum berjalan maksimal, tetapi dalam rapat-rapat pengambilan keputusan pihaknya selalu ikut serta. Humas Pemkot Tegal beralasan menjadi juru bicara selain memiliki keterampilan dan kemampuan dalam berkomunikasi, juga diperlukan wawasan yang luas tentang perkembangan

terkini. Selain itu, dalam memberi masukan juga ada landasan yang kuat. Sebagai Humas telah mempersiapkan data-data yang berupa analisis berita-berita dari media maupun data pendukung lainnya.

Sementara Humas Kabupaten Brebes menyebut pada posisi saat ini yang berada dibawah koordinasi Dinkominfo, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Kepala Seksi Humas dan Komunikasi Publik, naik ke Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan, kemudian naik ke Kepala Dinkominfo dan baru naik ke Bupati atau pimpinan puncak. “Dulu waktu di Setda dari Kasubag naik ke Kabag, bisa langsung ke Bupati”. Untuk tugas juru bicara pimpinan, seharusnya dilaksanakan oleh Kabid namun karena Kabid bukan berasal dari orang yang mengerti atau tidak punya *background* komunikasi, sehingga juru bicara di *handle* oleh Kasie. Kasie Humas dan Komunikasi Publik mengatakan “Juru bicara harusnya eselon lebih tinggi, selama ini yang bertemu wartawan ya kami. Dikhawatirkan kalau kami bicara namun tidak sesuai nanti menjadi masalah, atau berbicara kedia tetapi disepelekan oleh atasan”. Eselon Kasie adalah eselon IV sedangkan Kabideselonnya adalah III. Untuk itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, ia berinisiatif menjembatani Bupati dengan wartawan dalam press conference atau *stop door*. Apalagi berkaitan dengan permasalahan pelurusan berita di media massa. Sementara untuk kegiatan rapat-rapat dalam pengambilan keputusan, pihaknya tidak selalu diikutsertakan. Biasanya cukup dihadiri oleh Kepala Dinas, namun informasi hasil rapat belum tentu diinformasikan oleh Kepala Dinas kepada bawahannya.

Temuan ini jika dikaitkan dengan teori *excellence* (Grunig, 2002), keterlibatan humas dalam proses manajemen, melakukan perencanaan strategis (Grunig, 1992), pengambilan keputusan secara objektif oleh humas yang terlibat dalam fungsi manajemen strategis dimungkinkan dapat terjadi (Bowen, dkk, 2010). Sehingga (Kriyantono, 2014a) menyebut hasil keputusan diharapkan lebih baik karena didasarkan perspektif humas yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hubungan organisasi dengan publik.

Di Humas Pemerintah Daerah posisi dalam struktur masih bervariasi, tidak seragam dan ada yang bersama Sub Bagian dalam satu Bagian atau Seksi lain dalam satu Bidang. Padahal merujuk pada (Bowen, dkk, 2010), fungsi humas memiliki otonomi sendiri dan tidak tercampur dengan fungsi-fungsi organisasi lainnya. Dengan fungsi yang terintegrasi, *publicrelations* memiliki akses dan kewenangan di semua tingkatan dan fungsi organisasi. Humas juga idealnya

adalah fungsi yang terpisah dari fungsi lain, yakni humas harus mempunyai departemen sendiri yang menjadi bagian dari manajemen strategis (Grunig, 1992). Kriyantono (2014); Bowen, dkk, (2010) menyatakan terpisahnya humas dari fungsi organisasi lainnya seperti *marketing*, *humas resources development*, ataupun keuangan bertujuan untuk mencegah percampuran dengan manajemen lain ke dalam peran dan tanggung jawab manajemen komunikasi.

Temuan lainnya Humas Pemerintah Daerah belum ditempatkan dalam struktur atas. Padahal semakin tinggi strukturnya, maka humas lebih mudah mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Grunig, dkk, 2002; Kriyantono, 2014; Kriyantono, 2015a). Namun untuk menjadi bagian koalisi dominan dan dapat terlibat dalam koalisi dominan, kemampuan humas harus ditingkatkan. Mulai dari meningkatkan pengalaman, profesionalisme maupun pendidikan (Grunig, 1992). Putra & Melbourne (2008) juga menyoroti permasalahan-permasalahan dalam praktik humas yakni berkaitan dengan penempatan humas pada struktur organisasi dan pengembangan profesionalisme. Selain itu penempatan humas Pemda yang beragam antardaerah sesuai dengan apa yang sampaikan Djusan (2012), yaitu setiap daerah merupakan daerah otonomi yang mempunyai wewenang mengatur urusan pemerintahan sesuai UU No. 32/2004 tentang Pemda yang telah mengalami revisi kedua kalinya menjadi UU No. 12/2008, maka praktik humas pemerintah berbeda-beda antar daerah.

### ***Pembagian Tugas Humas dan Dinkominfo***

Sesuai UU No. 23/2014, bahwa Kominfo merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, yang dapat dibentuk dan disusun Dinas sendiri (atau digabung sesuai rumpun). Dinkominfo mencakup diantaranya sub urusan IKP dan salah satu fungsi IKP adalah Kehumasan (UU No. 39/2008, Perpres 54/2015 yang selanjutnya diterapkan dalam UU No.23/2014, PP No. 18/2016 dan Permenkominfo No. 14/2016). Dalam pelaksanaannya, beberapa Pemerintah Daerah masih memisahkan humasnya di bawah koordinasi Setda, tidak digabung di bawah koordinasi Dinkominfo sesuai Permenkominfo No. 14 Tahun 2016.

PR menurut Grunig & Hunt (1984) adalah bagian dari manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. Manajemen komunikasi terdapat pada masing-masing Humas dan Dinkominfo yang belum mengimplementasikan Permenkominfo No. 14/2016 dengan berbagai pertimbangan. Pertanyaannya yang muncul apakah praktik Humas dan Dinkominfo tumpang

tindih? Kepala Dinkominfo Kota Surabaya menolak hal tersebut. Meskipun tidak digabung, sudah ada pembagian tugas diantara Bagian Humas dan Dinkominfo. Sehingga Humas fokus pada tugas Humas dalam mengakses langsung ke *dominant coalition*. Kepala Dinkominfo Kota Surabaya mengatakan “Kami pun ketika menentukan tidak digabung, harus ada pembagian yang jelas. Sebenarnya Humas mengerjakan apa, kominfo mengerjakan apa. Karena di dalam PP maupun Permen itu sudah jelas, rincian tugas dan kewenangannya masing-masing”. Setelah pembagian jelas, juga ditindaklanjuti dengan koordinasi. “Jadi diperlukan koordinasi dan komitmen sehingga tidak terjadi ada perselisihan”.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal juga mengatakan antara Bagian Humas dan Dinkominfo telah dilaksanakan pembagian tugas dan peran. Sehingga terjadinya tumpang tindih tidak perlu dikhawatirkan. Dinkominfo memiliki Bidang Komunikasi dan Informasi yang tugasnya lebih memberdayakan kelompok informasi masyarakat (KIM), kemudian yang khusus publikasi informasi di luar media *mainstream*. Bahkan Dinkominfo lebih menangani sisi infrastruktur, jaringan, aplikasi seperti *e-government*, *smartcity* dan bidang informasi dan komunikasi dengan melibatkan masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal, Dinkominfo tidak berkaitan dengan tugas humas, KIM dengan kaitannya penyampaian informasi melalui budaya atau publikasi kebijakan pemerintah melalui kesenian. “Humas cenderung lebih membangun hubungan dengan media. Kalau kita tetap yang *mainstream*, lebih pada pencitraan, pemberitaan, komunikasi dan publikasi dengan media luar *banner*, spanduk dan media konvensional dan *new media*”.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara mengatakan tugas-tugas yang sepadan telah dilebur ke Dinkominfo. Implikasinya Sub Bagian Santel dan Bidang Statistik dipindah dibawah koordinasi Bappeda. Sementara Sub Bagian Humas dan Protokol dibawah koordinasi Bagian Umum Setda. Ditegaskan Kepala Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara, dengan struktur OPD Sub Bagian Humas dan Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara tidak ada tumpang tindih dalam hal tugas masing-masing OPD.

Sesuai pendapat Kriyantono (2015a), proposisi dapat dibangun berdasarkan kecenderungan pola-pola hubungan antardata. Dalam penelitian ini dapat diperoleh dari persepsi dan pendapat informan terkait implementasi Permenkominfo No. 14 Tahun 2016. Antara lain:

1. Pejabat pengelola Bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah cenderung telah memahami Permenkominfo No. 14/2016.
2. Jika Pimpinan Daerah memandang humas adalah bagian yang penting, humas cenderung ditempatkan pada struktur yang tinggi, memiliki akses yang mudah ke *dominant coalition* dan memiliki bagian sendiri pada struktur OPD.
3. Tugas manajerial cenderung dapat dilaksanakan dengan baik oleh humas Pemda jika posisi Humas Pemda ada pada struktur yang tinggi.
4. Humas yang berada di bawah koordinasi Setda, harus saling berkoordinasi dengan Dinkominfo agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan tugas.
5. Humas yang bergabung di bawah koordinasi Dinkominfo, cenderung lebih mudah berkoordinasi dan bekerja sama serta saling mendukung dengan bidang lain
6. Agar tugas juru bicara pimpinan dapat dilaksanakan dengan baik, pejabat humas Pemda harus memiliki pengetahuan yang luas dan mengetahui perkembangan terkini serta mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Proposisi-proposisi di atas kebenarannya hanya terbatas pada lingkup penelitian ini, sementara untuk lingkup yang lebih luas perlu diuji dalam kembali dalam penelitian menggunakan hipotesis (Kriyantono, 2015a), dengan informan atau responden yang lebih banyak lagi, agar dapat dihasilkan generalisasi yang dipercaya. Menurut Kriyantono (2015a), proposisi penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang meneguhkan atau menguatkan teori dan proposisi yang khas yang melekat pada objek penelitian.

## Kesimpulan

Penelitian telah berhasil mendeskripsikan praktik “PR *Excellent*” Humas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan implementasi Permenkominfo No. 14/2016 terhadap Humas Pemerintah Daerah. Diketahui Pejabat Humas dan Pejabat Dinkominfo sebagai pejabat pengelola Bidang Komunikasi dan Informatika di daerah telah memahami Permenkominfo No.14/2016 sebagai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam Permenkominfo tersebut, diatur tentang Penggabungan Urusan, Susunan Organisasi, Bentuk, Nomenklatur, Tipe, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) termasuk Lembaga Kehumasan Pemerintah Daerah (Pemda). Namun ada daerah yang belum menggabungkan Humas Pemerintah Daerahnya di bawah koordinasi Dinkominfo dan masih berada di OPD Setda masing-masing kabupaten/kota.

Bergabung atau tidaknya humas ke dalam Dinkominfo tergantung kebijakan Pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut tergantung bagaimana perhatian dan keinginan pimpinan memandang peran humas itu penting atau tidak (Nasution 2006). Demikian pula dalam

peran dari *dominant coalition* yang diharapkan dapat mencapai efektivitas organisasi (Grung, 1992). Humas Pemerintah Daerah yang tidak bergabung ke dalam Dinkominfo mampu memperkuat penjelasan teoritis ini, yakni bagaimana Pimpinan memandang Bagian yang penting harus menjadi orang pertama yang bisa berhubungan langsung dengan pimpinan. Sehingga humas memiliki akses yang mudah ke *dominant coalition*.

Sementara implementasi Permenkominfo No. 14/2016, menunjukkan penempatan humas Pemerintah Daerah ada empat posisi pada struktural OPD masing-masing daerah, yaitu 1). Humas yang ditempatkan di Bagian sendiri pada struktur OPD Setda, 2). Humas yang ditempatkan satu Bagian bersama Sub Bagian Protokol 3). Humas yang ditempatkan di Sub Bagian pada Bagian OPD Setda. 4). Humas yang ditempatkan pada Bidang di bawah koordinasi OPD Dinas Kominfo. Selain itu nomenklatur Bidang Kehumasan di Dinas Kominfo juga berbeda. Misal ada yang nomenklaturnya Bidang Komunikasi dan Kehumasan Dinkominfo dan ada juga nomenklaturnya Bidang Humas dan IKP Dinkominfo.

Proposisi yang dihasilkan dalam penelitian ini ada enam, yaitu: 1.) Pejabat pengelola Bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah cenderung telah memahami Permenkominfo No. 14/2016, 2.) Jika Pimpinan Daerah memandang humas adalah bagian yang penting, humas cenderung ditempatkan pada struktur yang tinggi, memiliki akses yang mudah ke *dominant coalition* dan memiliki bagian sendiri pada struktur OPD, 3). Tugas manajerial cenderung dapat dilaksanakan dengan baik oleh humas Pemda jika posisi Humas PEMDA ada pada struktur yang tinggi. 4). Humas yang berada di bawah koordinasi Setda, harus saling berkoordinasi dengan Dinkominfo agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan tugas, 5). Humas yang bergabung di bawah koordinasi Dinkominfo, cenderung lebih mudah berkoordinasi dan bekerja sama serta saling mendukung dengan bidang lain, dan 6). Agar tugas juru bicara pimpinan dapat dilaksanakan dengan baik, pejabat humas Pemda harus memiliki pengetahuan yang luas dan mengetahui perkembangan terkini serta mendapatkan pendidikan dan pelatihan.

Secara teori, dari keenam proposisi di atas, proposisi 2, 3 dan 6 memenuhi 10 prinsip standar efektivitas humas. Antara lain memiliki akses yang mudah ke *dominant coalition* dan langsung berkomunikasi dengan manajemen puncak (*empowerment*), memiliki bagian sendiri atau terintegrasi ke dalam satu departemen sendiri (*integration*). Juga memenuhi prinsip sebagai fungsi manajemen dan terpisah dari fungsi manajemen yang lain (*independence*). Prinsip lain

yang dipenuhi yakni fungsi strategis manajemen (*involvement*) dan penguasaan pengetahuan tentang bidang PR oleh praktisi PR. Sementara proposisi karakteristik yang khas melekat pada Humas Pemerintah Daerah terdapat pada proposisi 1, 4 dan 5.

Secara umum, dengan memenuhi prinsip standar efektivitas humas, dapat dikatakan efektivitas humas berjalan baik. Humas Pemda tidak menyerap semua prinsip efektivitas humas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat McQuail (2000) dan Huang-Horowitz (2012). Sementara walaupun pejabat pengelola Bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah cenderung telah memahami Permenkominfo No. 14/2016, namun belum semua humas PEMDA bergabung di bawah koordinasi Dinkominfo karena tergantung kebijakan Pemimpin Daerah.

Kendala yang berpeluang untuk dihadapi oleh humas pemerintah daerah sehingga mengurangi keefektifan kinerja organisasi humas yaitu kepercayaan Pimpinan Daerah dengan memberikan akses ke *dominant coalition* tidak dimanfaatkan secara maksimal. Seperti menjadi juru bicara pimpinan puncak tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki keterampilan, pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi humas Pemda, struktur humas sebagian besar Pemda belum sesuai implementasi Permenkominfo No.14/2016 bahkan ada Pemda yang menempatkan pada struktur yang tidak mungkin terlibat dalam pengambilan keputusan. Meskipun dengan belum digabungkannya humas dengan Dinkominfo dinilai tidak terjadi tumpang tindih antara humas dan Dinkominfo, namun tetap diperlukan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang intens diantara kedua OPD dalam satu pemerintahan daerah.

Implementasi Permenkominfo No. 14/2016 terhadap humas pemerintah daerah belum seperti yang diharapkan. Penempatan humas pada struktur OPD masing-masing kabupaten / kota bervariasi sesuai kebijakan pimpinan daerah dan otonomi daerah. Untuk itu perlu ketegasan dari Pemerintah dalam implementasi Permenkominfo No. 14/2016. Selain memudahkan dalam pembinaan Humas Pemda, implementasi Permenkominfo 14/2016 juga dapat mewujudkan integrasi yang ideal bagi humas Pemerintah dengan alur yang jelas, dari kementerian hingga kabupaten / kota dan mempertimbangkan efektivitas praktik Humas PEMDA sehingga dapat melaksanakan praktik “PR *Excellent*” dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Almaney, A. (1947). Communication and The Systems Theory of Organization. *The Journal of Business Communication*, 12(1), 35–43.
- Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., & Kerr, S. (2002). The boundaryless organization. *Facilities*, 20(10), 350–350. <https://doi.org/10.1108/f.2002.20.10.350.3>
- Bowen, S., Rawlins, B., & Martin, T. (2010). *Best Practice for Excellence in Public Relations from Overview of The Public Relations Function*. Harvard: Harvard Business Publishing.
- Bratakusumah, D. S. (2016). Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas. Retrieved from <https://www.slideshare.net/DeddySupriadyBrataku/reformasi-birokrasi-kehumasan-untuk-optimalisasi-peran-dan-fungsi-humas>
- Budiman, F. (2017). Bambang Dwi Handono: Kehumasan Bagian Dinas Kominfo. Retrieved from <http://www.padang-today.com/bambang-dwi-anggono-kehumasan-bagian-dinas-kominfo/>
- Childers, L. (1989). Credibility of Public Relations at the NRC. *Public Relations Research Annual*, 1(1–4), 97–114. [https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr0101-4\\_5](https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr0101-4_5)
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (1978). *Effective Public Relations*. New Jersey: Prentice Hall.
- Depari, E. (1994). *Public Relations dalam Dunia Usaha, Prospek, Peluang dan Tantangannya. Makalah pada Seminar Public Relations dalam Memengangkan Pertarungan di Dunia Usaha*, Jakarta.
- Djusan, A. (2012). Praktik Government Public Relations Paska Otonomi Daerah (Sebuah Tinjauan dengan Kasus Penyuluh KB Sebagai Government Public Relations Bidang KB) Aizirman Djusan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 61–70.
- Dozier, D. M., Grunig, L. A., & Grunig, J. E. (1995). *Manager's Guide to Excellence in Public Relations and Communication Management*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Effendy, O. U. (1986). *Human Relations dan Public Relations dalam Management*. Bandung: Alumni.
- Gregory, A. (2004). Public Relations and Management. In A. Theaker (Ed.), *Public Relations Handbook* (2nd ed., pp. 48–65). London And New York: Routledge Taylor & Francis Group.

- Gregory, A. (2005). *Public Relations Dalam Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Grunig, J. E. (1992). *Excellence in Public Relations and Communications Management*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates inc. Publishers.
- Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (2008). Excellence theory in public relations: Past, present, and future. *Public Relations Research, 1*, 327–347. [https://doi.org/10.1007/978-3-531-909189\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-531-909189_22)
- Grunig, J. E., & Hunt, T. T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt: Rinehart and Winston.
- Grunig, L. A., Grunig, J. E., & Dozier, D. M. (2002). Excellent Public Relations and Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three Countries. *A Study of Communication Management in Three Countries*, 653. <https://doi.org/10.4324/9781410606617>
- Huang-Horowitz, N. C. (2012). Conceptualizing a theoretical model for the practice of public relations in the small business environment. *Public Relations Journal of Public Relations Society of America, 6*, 1–35.
- Huang, Y.-H. C. (2012). Gauging an Integrated Model of Public Relations Value Assessment (PRVA): Scale Development and Cross-Cultural Studies. *Journal of Public Relations Research, 24*(3), 243–265. <https://doi.org/10.1080/1062726X.2012.671987>
- Husni, M., Sugiyanto, D. R., & Nurnisya, F. (2017). *Reputasi Yang Berkarakter*. (A. Wikan, Ed.). Jakarta: PT Media Piar Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2015). Menkominfo: Humas Pemerintah Harus Tingkatkan Inovasi, Kreativitas dan Karya. Retrieved from <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6435/Menkominfo%3A+Humas+Pemerintah+Harus+Tingkatkan+Inovasi,+Kreativitas+dan+Karya>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016a). Ini Pedoman Menyiapkan Perangkat Daerah Bidang Kominfo. Retrieved from [https://kominfo.go.id/content/detail/8095/inipedoman-menyiapkan-perangkat-daerah-bidang-kominfo/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/8095/inipedoman-menyiapkan-perangkat-daerah-bidang-kominfo/0/berita_satker)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2016b). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika*.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Pnadamedia.

- Kriyantono, R. (2014). *Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Perneradamedia.
- Kriyantono, R. (2015a). Konstruksi Humas Dalam Tata Kelola Komunikasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Era Keterbukaan Informasi Publik, *18*(2), 117–126.
- Kriyantono, R. (2015b). *Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Kritikal Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia.
- Kriyantono, R. (2017). Do the different terms affect the roles? A measurement of excellent and managerial role of business and government public relations practices in Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, *15*(6), 193–209.
- Kriyantono, R., & Mckenna, B. (2017). Developing a Culturally-Relevant Public Relations Theory for Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, *33*(1), 1–16.
- Kusumawardani, Q. D., & Dalimonthe, H. L. N. (2016). Cyber Government Public Relations (GPR) dalam Rangka Meningkatkan Citra Indonesia (Nation Branding). In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi* (pp. 1–11).
- Laborde, E. J. (2005). *Corporate Public Relations Practitioners' Perceptions of Program Evaluation and Encroachment Effect*. The Florida State University. Retrieved from <http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-03052005-172650/unrestricted/LabordeThesis.pdf>
- Lim, S., Goh, J., & Sriramesh, K. (2005). Applicability of the Generic Principles of Excellent Public Relations in a Different Cultural Context: The Case Study of Singapore. *Journal of Public Relations Research*, *17*(4), 315–340. [https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr1704\\_1](https://doi.org/10.1207/s1532754xjpr1704_1)
- McQuail, D. (2000). Some Reflections on the Bias of Media Theory. *Asian Journal of Communication*, *10*(2), 113.
- Moss, D., Likely, F., Sriramesh, K., & Ferrari, M. (2016). Structure of the public relations / communication department: Key findings from a global study. *Public Relations Review*, *43*(1), 80–90. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.10.019>
- Nasution, Z. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan. Konsep, Fenomena dan Aplikasinya*. Malang: UMM Press.
- Nyhan, R. C. (2015). Trust and Its Role in Public Sector Organizations, *30*(1).

- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. (2017). Tupoksi. Retrieved from <http://www.banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/pemerintahan2/kelembagaan/setda/bagumum/item/62-tupoksi-bagian-umum>
- Pompper, D. (2004). Linking ethnic diversity & two-way symmetry: Modeling female African American practitioners' roles. *Journal of Public Relations Research*, 16(3), 269–299.
- Prastya, N. M. (2016). Problem Struktural dalam Praktek Peran Manajerial Public Relations: Kasus Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 107–119.
- Presiden RI. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Putra, I. G. N., & Melbourne, R. (2008). Konteks Historis Praktek Humas Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 178–190.
- Rachmadi, F. (1994). *Public Relations dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramedia.
- Rhee, Y. (2004). The employee-public-organization chain in relationship management: A casestudy of a government organization. *Journal of Doctoral Dissertation*, 16–45.
- Rudiantara. (2017). *Focus Group Discussion (FGD) Komunikasi Pemerintah di Era Digital*. Surabaya.
- Sari, B. W. N. (2012). *Humas Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukmadinata, S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Thurlow, A., Kushniryk, A., Yue, A. R., Blanchette, K., Murchland, P., & Simon, A. (2016). Evaluating excellence: A model of evaluation for public relations practice in organizational culture and context. *Public Relations Review*, 43(1), 71–79. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.10.013>
- Wu, M. Y., Taylor, M., & Chen, M. J. (2001). Exploring societal and cultural influences on Taiwanese public relations. *Public Relations Review*, 27(3), 317–336. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(01\)00089-3](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(01)00089-3)
- Yulianita, N. (2002). Pengaruh Kepemimpinan Manajer Public Relations Terhadap Kualitas Manajemen Public Relations dan Korelasinya dengan Efektivitas Sistem Komunikasi Perusahaan. *Mediator*, 3(2), 221–240.

## **Analisis Efektifitas Pola Rekrutmen Kader Rantingmuhammadiyah Di Ponorogo**

*Penelitian Ini Didanai Oleh Hibah Muhammadiyah Gel.1 Tahun 2017*

**Robby Darwis Nasution**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

darwisnasution69@gmail.com

### **Abstract**

An organization if you want to continue to grow then the main requirement is to have enough professional resources that can support all kinds of vision, mission or goals of the organization. To get members who have a high professionalism of course required a good recruitment and not just random, because how many members of an organization would be meaningless if not have adequate competence. Conversely, if an organization, although having few members but in each member has adequate competence, then the rate of development of the organization will run well then it is important that large organizations such as Muhammadiyah looking for the right pattern in recruitment cadres in order to support organizational performance. Furthermore, in this research will use descriptive qualitative research method by taking samples from three twigs in Ponorogo regency which represents the central city area, the central area and the periphery. The conclusion this research is recruitment pattern owned by the Muhammadiyah organization is Muhammadiyah educational institution, employee charity Muhamamdiyah, and the general public and there is no direct recruitment process. Orientation or encouragement of prospective members to participate in Muhammadiyah organization other than it is as a medium of learning and means of worship (non-profit oriented). This is very different from the existing recruitment theory where recruitment theory in general is on profit oriented organizations or companies.

**Keywords:** *Recruitment, Twig, Muhammadiyah*

### **Abstrak**

Sebuah organisasi jika ingin terus bisa berkembang maka syarat utamanya adalah memiliki cukup sumber daya yang profesional sehingga bisa mendukung segala macam visi, misi ataupun tujuan dari organisasi. Untuk memperoleh anggota yang memiliki profesionalisme yang tinggi tentunya diperlukan rekrutmen yang bagus dan tidak sekedar asal-asalan, karena seberapa banyak anggota suatu organisasi tidak akan ada artinya jika tidak memiliki kompetensi yang memadai. Sebaliknya, jika suatu organisasi meskipun memiliki sedikit anggota tetapi di setiap anggota tersebut memiliki kompetensi yang memadai, maka laju dari perkembangan organisasi tersebut akan berjalan dengan baik maka penting sekali organisasi besar seperti Muhammadiyah mencari pola yang tepat dalam perekrutan kader demi mendukung kinerja organisasi. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel dari tiga ranting di Kabupaten Ponorogo yang mewakili daerah pusat kota,

daerah tengah dan daerah pinggiran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola rekrutmen yang dimiliki organisasi Muhammadiyah adalah lembaga pendidikan Muhammadiyah, pegawai amal usaha Muhammadiyah, serta masyarakat umum dan tidak ada proses rekrutmen secara langsung. Orientasi atau dorongan calon anggota untuk ikut dalam organisasi Muhammadiyah selain hal tersebut adalah sebagai media pembelajaran dan sarana untuk beribadah (*non-profit oriented*). Hal ini sangat berbeda sekali dengan teori rekrutmen yang ada dimana teori rekrutmen pada umumnya adalah pada organisasi atau perusahaan yang *profit oriented*.

**Kata Kunci:** *Rekrutmen, Ranting, Muhammadiyah*

<i>Submite</i>	: 14 Agustus 2017
<i>Review</i>	: 10 Desember 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Januari 2017
<i>Surel Correspondensi</i>	: <a href="mailto:audra.jovani@uki.ac.id">audra.jovani@uki.ac.id</a>

## Pendahuluan

Salah satu poin penting dalam perhelatan muktamar ke 54 yang diadakan di Malang Jawa Timur adalah terkait keprihatinan pimpinan dan warga Muhammadiyah terhadap kondisi cabang dan ranting Muhammadiyah. Lebih lanjut dalam Muktamar ke 45 tahun 2005 di Malang Jawa Timur menetapkan untuk merevitalisasi Cabang dan Ranting sebagai salah satu prioritas Program Konsolidasi Organisasi. Komitmen ini dilanjutkan lagi pada Muktamar ke 46 tahun 2010 di Yogyakarta. Cara yang ditempuh antara lain dengan melakukan pengembangan Cabang dan ranting secara kuantitatif terbentuknya PCM di 70% jumlah kecamatan, dan terbentuknya PRM di 40% jumlah desa, dan juga secara kualitatif dengan menghidupkan kepengurusan Cabang dan Ranting yang mati, serta mengaktifkan Cabang dan Ranting yang belum aktif. (Permata 2015, 1-2)

Jika dilihat secara kuantitas, jumlah Cabang dan terutama Ranting Muhammadiyah masih minim dimana dari 5.263 jumlah kecamatan di Indonesia baru 3.221 yang memiliki Cabang Muhammadiyah atau sekitar 61%. Sementara di sisi lain, tingkat Ranting kondisinya lebih parah dimana karena baru ada 8.107 Ranting Muhammadiyah dari 62.806 jumlah desa yang ada, atau hanya 12% sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dan popularitas Muhammadiyah belum tercermin dalam kuantitas organisatorisnya. (Permata 2015, 1) Di sisi lain secara kualitas, perbandingan dengan beberapa ormas Islam yang lain, Muhammadiyah jauh lebih unggul namun masih jauh dari harapan warga Muhammadiyah sendiri. *Pertama*, secara organisatoris masih rapuh. Masih banyak Cabang dan Ranting yang belum memiliki kepengurusan yang lengkap, dan belum mampu menjalankan tertib organisasi, dalam hal administrasi, keuangan, maupun

kegiatan. *Kedua*, belum adanya tertib organisasi menyebabkan kepengurusan Cabang dan Ranting rentan konflik internal, terutama terkait dengan pengelolaan amal usaha. *Ketiga*, lemah inisiatif, cenderung pasif dan menunggu instruksi dari atas. *Keempat*, kondisi di atas diperparah oleh fakta bahwa SDM pimpinan Cabang dan Ranting masih banyak didominasi oleh kalangan usia lanjut. *Kelima*, akibatnya Cabang dan Ranting Muhammadiyah cenderung monoton dalam mengadakan kegiatan, serta kurang mampu merespon perkembangan dan tuntutan lokalitas. *Keenam*, kondisi di atas akhirnya membuat organisasi di tingkat Cabang dan Ranting memiliki daya saing yang rendah dibanding organisasi Islam baru yang banyak bermunculan, yang telah banyak “*mengambil alih*” jamaah maupun amal usaha Muhammadiyah. (Permata 2015, 1)

Sebuah organisasi jika ingin terus bisa berkembang maka syarat utamanya adalah memiliki cukup sumber daya yang profesional sehingga bisa mendukung segala macam visi, misi ataupun tujuan dari organisasi. Untuk memperoleh anggota yang memiliki profesionalisme yang tinggi tentunya diperlukan rekrutmen yang bagus dan tidak sekedar asal-asalan, karena seberapa banyak anggota suatu organisasi tidak akan ada artinya jika tidak memiliki kompetensi yang memadai. Sebaliknya, jika suatu organisasi meskipun memiliki sedikit anggota tetapi di setiap anggota tersebut memiliki kompetensi yang memadai, maka laju dari perkembangan organisasi tersebut akan berjalan dengan baik. Jika kita melihat beberapa tahun terakhir banyak penelitian yang mengkaji lebih jauh tentang sumber daya manusia, dimana kesimpulan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara keefektifan pengelolaan sumberdaya manusia terhadap kelangsungan hidup organisasi. Pada kenyataannya adalah perekrutan menjadi satu hal yang penting dalam keefektifan sumberdaya itu sendiri. (Sudiro 2011, 52) dari konsep yang disebutkan diatas terlihat bahwa bukan hanya jumlah anggota yang menjadi prioritas sebuah organisasi tetapi kualitas (militansi) sangat berpengaruh terhadap kemajuan organisasi tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat di tingkat regional, nasional maupun global maka tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi terutama di Indonesia juga akan semakin meningkat. Tantangan yang dirakan oleh organisasi adalah meliputi kinerja, produktivitas, pelayanan, anggaran (biaya), waktu, lingkungan, perilaku kerja, dan sebagainya. Selain itu tantangan juga muncul dari sisi eksternal organisasi seperti tuntutan (*pressure*) yang semakin

meningkat dari berbagai komponen masyarakat (*customer*), lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai perubahan yang sifatnya tidak terduga. (Rahayuningsih 2012, 2)

Selain itu juga, di era yang semakin maju seperti sekarang ini, masyarakat baik yang berusia muda maupun usia tua semakin modern dalam menyingkapi ataupun menentukan langkah yang diambil. Ciri dari masyarakat yang modern antara lain setiap individu memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi sehingga setiap tindakan selalu didasarkan kepada rasionalitas ataupun logika. Dengan tingginya rasionalitas dari masyarakat modern ini tentunya menciptakan tantangan tersendiri terhadap kegiatan perekrutan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, sehingga kedepan perekrutan ini tidak semakin mudah tetapi akan semakin sulit. Rasionalitas dari individu modern akan selalu berbasis juga kepada pertimbangan ekonomi, dimana setiap langkah yang akan diambil selalu mempertimbangkan untung rugi. Dengan semakin berkembangnya pola masyarakat maka sangat tidak mudah untuk bisa merekrut anggota terutama yang berusia remaja untuk ikut dalam pergerakan organisasi seperti Muhammadiyah.

Dalam Pengembangan Program Muhammadiyah (2010-2015) juga menekankan penguatan sumberdaya melalui sistem pengkaderan dan regenerasi dalam Muhammadiyah secara konsisten dan berkelanjutan. (M. P. Muhammadiyah 2015, 4-5) Dalam Organisasi Muhammadiyah, kaderisasi merupakan program yang penting dan strategis mengingat misi serta eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dengan demikian maka Muhammadiyah harus selalu bergerak untuk membangun kemajuan. Keberadaan kader-kader yang bermutu dan konsisten memiliki arti penting bagi persyarikatannya dimana keberadaan kader itu bukan saja untuk kelangsungan regenerasi dan suksesi kepemimpinan yang terjaga, tetapi juga penambahan personil yang memperkuat barisan dakwah dan jihad yang terorganisir. (M. P. Muhammadiyah 2015, 7)

Di Ponorogo sendiri rekrutmen yang terjadi sangatlah lemah di sisi jumlah pemuda terutama di daerah pinggiran dimana di beberapa ranting Muhammadiyah hanya memiliki sedikit anggota yang bisa diajak berperan aktif untuk memajukan persyarikatan Muhammadiyah baik di tingkat ranting ataupun cabang. Kendala ini tentu saja patut untuk diapresiasi sebagai permasalahan yang penting karena jika sebuah organisasi tidak memiliki cukup anggota dengan militansi tinggi terutama di tingkat bawah ranting, maka dipastikan program kerja organisasi

secara universal tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kendala yang sering dialami oleh ranting Muhammadiyah dalam perekrutan kader adalah sulitnya merekrut anggota atau kader usia muda sehingga ranting Muhammadiyah diisi oleh anggota-anggota yang rata-rata usianya 30 tahun keatas. Hal ini akan mengancam keberlangsungan organisasi tersebut mengingat usia dari kader atau anggota akan mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri. Dari urian diatas maka penting sekali organisasi besar seperti Muhammadiyah mencari pola yang tepat dalam perekrutan kader demi mendukung kinerja organisasi yang berkemajuan.

### **Metode Penelitian & Tinjauan Pustaka**

Sebagai landasan berpikir peneliti maka akan dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan mengambil sampel dari tiga ranting di Kabupaten Ponorogo yang diwakili dari ranting di daerah pusat kota, daerah tengah dan daerah pinggiran. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang diwakili oleh Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Ketua ranting, Sekretaris Ranting, serta warga Muhammadiyah. Sedangkan dalam pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggali dari dokumen-dokumen ataupun sumber elektronik guna mendukung data primer yang didapat dilapangan.

### **Pola Pengkaderan Muhammadiyah**

Pengembangan Program Muhammadiyah (2010-2015) menekankan kepada penguatan sumberdaya melalui sistem pengkaderan dan regenerasi dalam Muhammadiyah secara konsisten dan berkelanjutan.(M. P. Muhammadiyah 2015, 4-5) Dalam Organisasi Muhammadiyah, kaderisasi menjadi program yang sangat penting dan strategis mengingat misi serta eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Muhammadiyah harus selalu bergerak untuk membangun kemajuan. Dalam gerakannya itu keberadaan kader-kader yang bermutu dan konsisten memiliki arti penting bagi persyarikatan. Keberadaan kader itu bukan saja untuk kelangsungan regenerasi dan suksesti kepemimpinan yang terjaga, tetapi juga penambahan personil yang memperkuat barisan dakwah dan jihad yang terorganisir.(M. P. Muhammadiyah 2015, 7)

Adapun pengertian dari Sistem Pengkaderan Muhammadiyah (SPM) adalah seperangkat unsur dan keseluruhan komponen yang saling berkaitan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas yang berhubungan dengan kader dan kaderisasi di Muhammadiyah. (M. P. Muhammadiyah 2015, 43) Dalam sistem pengkaderan yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah, penitikberatan pengkaderan Muhammadiyah menjadi upaya penanaman nilai, sikap dan cara berpikir, serta peningkatan kompetensi dan integritas terutama dalam aspek ideologi, ilmu pengetahuan dan wawasan, serta kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi segenap pimpinan, kader dan anggota/warga Muhammadiyah. (M. P. Muhammadiyah 2015, 48)

### **Klasifikasi Anggota Muhammadiyah**

Menurut Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah, umat Muhammadiyah dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Anggota Muhammadiyah, Warga Muhammadiyah, dan Simpatisan Muhammadiyah. Adapun perbedaan dari ketiganya adalah sebagai berikut: (LPCR 2012, 1-2)

- a. Anggota Muhammadiyah, yaitu mereka yang memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (KTAM). Kelompok ini biasanya terbagi menjadi dua yaitu, *pertama*, mereka yang ber-KTAM dan menjadi pengurus, *kedua*, mereka yang ber-KTAM saja tanpa terlibat dalam struktur Muhammadiyah.
- b. Warga Muhammadiyah, yaitu mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan Muhammadiyah meskipun tidak memiliki KTAM maupun menjabat di struktur organisasi. Namun, keberadaan mereka sangat memajukan Muhammadiyah di berbagai struktur terutama di Cabang dan Ranting. Kelompok jenis ini biasanya mereka hidup di lingkungan keluarga Muhammadiyah atau setidaknya mereka pernah mengenyam pendidikan di institusi milik Muhammadiyah.
- c. Simpatisan Muhammadiyah, yaitu mereka yang memiliki cara pandang dan praktik ibadah yang sama dengan tuntunan Muhammadiyah meskipun tidak terlibat aktif dalam kegiatan Muhammadiyah maupun tidak memiliki KTAM bahkan tidak tahu tentang Muhammadiyah.

### **Rekrutmen Dalam Muhammadiyah**

Dalam dokumen keputusan muktamar Muhammadiyah ke-46 tentang Revitalisasi Kader dan Anggota Muhammadiyah telah dijabarkan lebih jauh karena memerlukan proses intensifikasi dan optimalisasi yang berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun tahapan dari proses rekrutmen dalam rangka revitalisasi kader adalah sebagai berikut: (Muhammadiyah 2010, 120)

- a. Pemetaan dan pendataan segenap potensi dan distribusi kader, baik di lingkungan keluarga, organisasi otonom, amal usaha khususnya lembaga pendidikan dan panti asuhan, dan sumber-sumber kader lainnya secara lebih terprogram.
- b. Menjadikan Baitul Arqam, Darul Arqam, dan bentuk-bentuk pelatihan pengembangan kompetensi lain yang dibutuhkan oleh kader sebagai basis perekrutan dan distribusi kader yang sistematis.
- c. Perlibatan Kader-kader potensial yang belum masuk dalam struktur kepemimpinan dalam berbagai kegiatan persyarikatan.
- d. Pembinaan intensif keluarga dan anak-anak pimpinan persyarikatan sebagai salah satu sumber perekrutan kader.
- e. Pemanfaatan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang bersifat intensif dan berkelanjutan sebagai salah satu sumber perekrutan kader disertai pembinaan yang tersistem.
- f. Memanfaatkan jaringan organisasi Muhammadiyah di luar negeri untuk melakukan perekrutan kader.

Selain sistem rekrutmen kader, terdapat juga rekrutmen dalam rangka revitalisasi anggota sebagai pelaku gerakan yang memerlukan proses intensifikasi yang berlangsung secara tersistem dan berkelanjutan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses rekrutmen bagi anggota adalah sebagai berikut: (Muhammadiyah 2010, 122-123)

- a. Memperluas jumlah anggota Muhammadiyah secara proaktif dan terprogram sesuai dengan persyaratan-persyaratan organisasi yang diintegrasikan dengan kegiatan dakwah dan aktivitas amal usaha Muhammadiyah dalam masyarakat.
- b. Menentukan kelompok sasaran dan basis anggota mana yang akan direkrut (kalangan pemuda, kelompok laki-laki, kelompok perempuan, penduduk kota/desa, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan, dan sebagainya) dengan sistem perekrutan yang tersistem dan terprogram.

- c. Menyiapkan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk melakukan rekrutmen anggota Muhammadiyah secara tersistem, termasuk melalui penerbitan Kartu Anggota Muhammadiyah yang dikelola secara aktif dan terorganisir.
- d. Memperbanyak forum-forum pengajian serta kegiatan kemasyarakatan yang terbuka untuk umum sebagai salah satu wahana perekrutan anggota Muhammadiyah secara proaktif dan terorganisasi.
- e. Memperluas jaringan dan aktivitas Muhammadiyah secara offensive dalam masyarakat termasuk melalui aktivitas dan pimpinan Muhammadiyah yang aktif di garda paing depan dalam menyuarakan kepentingan bersama dan membela hak-hak dasar masyarakat sehingga melahirkan simpati dan dukungan terhadap Muhammadiyah.
- f. Publikasi informasi tentang Muhammadiyah serta materi-materi keagamaan yang menjangkau segenap lapisan masyarakat.
- g. Mengembangkan amal-amal pelayanan sosial kemasyarakatan melalui fungsi pelayanan Amal Usaha dan program serta aktivitas Muhammadiyah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menarik simpati dan dukungan masyarakat/obyek dakwah terhadap Muhammadiyah.
- h. Menggarap segmen sosial yang selama ini kurang dilakukan Muhammadiyah dalam menjangkau sasaran warga masyarakat sebagai calon anggota Muhammadiyah di pedesaan, pusat-pusat aktivitas kota-kota besar, dan ruang-ruang sosial potensial lainnya.
- i. Memperlakukan anggota sesuai dengan alam pikiran dan kondisi yang dihadapi untuk diarahkan ke peningkatan dan pengembangan kualitas sesuai dengan prinsip dakwah.

### **Teori Rekrutmen**

Terdapat beberapa definisi tentang rekrutmen diman asalah satunya dari Breugh (1992) dalam Alison E. Barber yang menyatakan bahwa perekrutan pekerja termasuk dalam aktivitas organisasi yang mempengaruhi jumlah dan atau tipe dari lamaran yang ditujukan untuk posisi tertentu serta mempengaruhi diterimanya suatu penawaran pekerjaan.(Sudiro 2011, 52) Sedangkan dari pakar lain yaitu Ivancevich dan Lee Soo Hoon (2002) mengatakan bahwa perekrutan mengarah kepada aktivitas organisasi yang berpengaruh terhadap jumlah dan jenis

dari pelamar yang mengajukan lamaran untuk suatu pekerjaan serta kesesuaian pelamar dengan pekerjaan yang ditawarkan. (Sudiro 2011, 52)

Secara umum, rekrutmen dapat diartikan sebagai serangkaian proses dalam penerimaan anggota baru dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan dimana tujuan dalam kegiatan rekrutmen adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas, sehingga berguna kelangsungandari suatu organisasi. Menurut pakar Dunnette (1998:401), didalam teori rekrutmen terdiri dari tiga yang paling utama yaitu, *process variable*, *independent variable*, dan *dependent variable*. Dari ketiga variabel yang telah disebutkan merupakan rangkaian yang saling terkait satu dengan yang lain. Jika dijabarkan lebih lanjut, *process variable* adalah suatu mekanisme dalam psikologi atau lingkungan yang dianggap sebagai hal yang menentukan hasil dari macam-macam metode rekrutmen. Selanjutnya *independent variable* adalah suatu gambaran umum tentang praktik rekrutmen. Sedangkan pengertian dari *dependent variable* adalah hasil dari proses rekrutmen tersebut. Setiap variabel-variabel tersebut pun masih dibagi menjadi beberapa elemen. *Independent variable* adalah seperangkat peraturan, prosedur, keputusan keputusan yang dianggap sebagai bagian dari rekrutmen organisasi. Variabel ini dibagi menjadi 3 elemen, yaitu: *recruiter*, *recruitmen source*, dan *administrative policies and procedures*. (Rachmanto 2015)

Rekrutmen menurut Mathis dan Jakson (2001) mengatakan bahwa rekrutmen merupakan proses yang menghasilkan sejumlah pelamaryang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaanatau organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawandkk. (1997) yang mengatakan bahwa rekrutmen adalah suatu proses untukmendapatkan tenaga yang berkualitas guna bekerja padaperusahaan atau instansi. Sedangkan menurut ahli lainmenyebutkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari,menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlahorang, baik dari dalam maupun dari luar perusahaansebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentuseperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM.(Yullyanti 2009, 132)

Salah satu komponen utama dari srategi rekrutmen adalah dengan merencanakan pemikat bagi pelamar kerja yang rasional sehingga dalam kondisi tertentu terkadang organisasi atau instansi terkadang akan menemui kesulitan dalam memikat orang-orang yang dibutuhkan yang khususnya posisi staf ahli. Selain itu untuk memperkuat upaya rekrutmennya sendiri, organisasi atau instansi perlu menentukan daya tarik atau bujukan efektif yang akan ditawarkan.(admin 2016)

Untuk menunjang keberhasilan kinerja dan profesionalitas pegawai maka dibutuhkan perencanaan kepegawaian yang saat ini belum berdasar pada kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penempatan pegawai dengan prinsip menempatkan orang dengan posisi yang tepat atau secara umum kita kenal dengan *the right man on the right place*. Anggota adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan riil organisasi. Hal ini perlu dilakukan perencanaan kebutuhan anggota secara tepat sesuai beban kerja yang ada dan hal tersebut dengan didukung adanya proses rekrutmen yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Mondy dan Noe (1996) menyebutkan bahwa: "*Human resource planning (HRP) is the process of systematically reviewing human resource requirements to ensure that the required numbers of employees, with the required skills are available when they are needed*". (Yullyanti 2009, 131)

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan rekrutmen diantaranya adalah manajemen organisasi harus mengetahui benar apa yang dibutuhkan organisasi. Selain itu, organisasi juga harus mengetahui pula kandidat aktual dibandingkan gambaran ideal yang dibutuhkan. (Rahayuningsih 2012, 3) Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan rekrutmen, maka perlu strategi khusus diantaranya *pertama*, Menyiapkan data komprehensif terbaru tentang tingkat ke luar-masuk anggota, data biaya rekrutmen, dan data keberhasilan retensi. *Kedua*, Menyusun model kompetensi yang mendukung secara langsung strategi bisnis. *Ketiga*, Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kompetensi di jajaran organisasi, termasuk GAP (jarak) yang perlu diisi. *Keempat*, Menyusun deskripsi posisi yang relevan secara akurat, termasuk deskripsi jalur pengembangan karir. *Kelima*, Mengetahui secara detail tentang situasi remunerasi di pasar. *Keenam*, Memiliki proses evaluasi kandidat yang teruji (Rahayuningsih 2012, 3-4) Selain itu, menurut Sudiro perekrutan merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat (*attract*) pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Keberhasilan perekrutan juga harus mengedepankan beberapa aspek berikut: (Sudiro 2011, 52-54)

- a. Terdapat media komunikasi yang yang bisa dibaca oleh pelamar (misal: organisasi mengiklankan lowongan yang bisa dibaca oleh pelamar)

- b. Menyasar pelamar yang cocok antara karakteristik pribadinya dan persyaratan pekerjaan.
- c. Pelamar harus termotivasi untuk melamar.

## Hasil dan Pembahasan

Untuk penyajian data dan display data akan berguna untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran penelitian secara keseluruhan. Display data berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dsb. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

### a. Hasil wawancara dengan pengurus Lembaga Pengembangan Cabang Dan Ranting (LPCR) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

Menurut Bapak Aliyadi yang berposisi sebagai ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Kabupaten Ponorogo, rekrutmen anggota Muhammadiyah dilakukan melalui lembaga-lembaga dibawah naungan organisasi Muhammadiyah baik Organisasi Otonom (ORTOM) maupun Amal Usaha (AUM). Untuk perekrutan di Kabupaten Ponorogo seringkali penjangkaran kader dilakukan melalui Lembaga pendidikan seperti SMA dan Universitas, Amal Usaha seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan Rumah Sakit Aisiyah, serta beberapa kegiatan pemuda Muhammadiyah seperti Taruna Melati. Adapun sasaran dari rekrutmen ini adalah siswa atau mahasiswa dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, pegawai amal usaha Muhammadiyah, serta masyarakat umum.

Lebih lanjut menurut Bapak Sugeng Riyadi selaku Sekretaris LPCR Kabupaten Ponorogo, dalam perekrutan kader Muhammadiyah memiliki kecenderungan untuk melakukan rekrutmen dengan menggunakan pendekatan personal. Menurut beliau, pendekatan personal dalam perekrutan kader Muhammadiyah sangat efektif jika diterapkan di tingkat Ranting didalam kegiatan Baitul Arqam yang rutin dilaksanakan. Adapun tujuan dari kadernisasi dan rekrutmen ini adalah menurut Bapak Aliyadi Ketua LPCR untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah serta memperluas ruang dakwah Muhammadiyah sehingga cita-cita dan tujuan dari Organisasi Muhammadiyah bisa tercapai.

Kegiatan Kaderisasi dilaksanakan oleh Organisasi Muhammadiyah minimal satu tahun sekali tetapi tidak ada batasan waktu yang pasti, dengan kata lain rekrutmen bisa dilaksanakan sewaktu-waktu dan jumlah kader yang diterima setiap tahun minimal 228 anggota dengan melihat jumlah KTA yang diterbitkan. Secara spesifik, rekrutmen anggota Muhammadiyah yang sudah terlaksana selama ini di Kabupaten Ponorogo tidak pernah memanfaatkan media baik elektronik maupun cetak sebagai sarana promosi dan sosialisasi rekrutmen kader Muhammadiyah.

#### **b. Hasil Wawancara Dengan Pengurus Ranting**

Melalui wawancara dengan pengurus ranting dari tiga wilayah yang berbeda yaitu Ranting Mangkujayan, Ranting Tamanarum, dan Ranting Pandak, pengurus ranting menyatakan bahwa tidak ada kegiatan rekrutmen khusus yang dilaksanakan oleh ranting dengan tujuan untuk menjaring masyarakat umum untuk ikut masuk dalam organisasi Muhammadiyah. Kegiatan penjangkaran kader dilakukan melalui masjid-masjid, pengajian rutin, Amal Usaha Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah ataupun kegiatan pemuda seperti ada Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) serta Taruan Melati. Rata-rata jumlah kader ranting baru yang masuk di setiap tahunnya adalah minimal 10 orang kader di setiap tahunnya. Lebih lanjut menurut bapak Suharto (Ketua Ranting Tamanarum), rendahnya jumlah kader baru setiap tahun ini dikarenakan rendahnya tingkat ketertarikan warga untuk mengikuti Organisasi Muhammadiyah.

Rekrutmen di organisasi Muhammadiyah, rekrutmen yang dilaksanakan tidak memberikan syarat khusus kepada calon kader untuk bisa ikut serta menjadi anggota organisasi Muhammadiyah. Adapun sasaran dari rekrutmen kader Muhammadiyah di tingkat ranting adalah siswa yang sekolah di lembaga pendidikan Muhammadiyah, remaja masjid keluarga anggota ranting, serta masyarakat umum. Menurut pengurus Ranting Muhammadiyah, tujuan diadakannya rekrutmen di organisasi Muhammadiyah adalah sebagai sarana regenerasi penerus perjuangan Muhammadiyah dan memperkuat Muhammadiyah secara kelembagaan.

Pelaksanaan rekrutmen di tingkat Ranting Muhammadiyah menurut informan yang terdiri dari pengurus ranting, tidak pernah menggunakan atau memanfaatkan media elektronik

ataupun media cetak untuk mensosialisasikan rekrutmen yang dilaksanakan ataupun sosialisasi tentang program Muhammadiyah dengan tujuan masyarakat secara umum menjadi tertarik untuk masuk dalam organisasi Muhammadiyah.

### c. Hasil Wawancara Dengan Anggota Ranting

Menurut para informan yang diwawancarai terkait dengan orientasi dorongan keikutsertaan informan ke dalam organisasi Muhammadiyah adalah sebagai media dakwah serta merupakan gerakan nyata dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, orientasi dorongan untuk ikut dalam organisasi Muhammadiyah selain hal tersebut adalah sebagai media pembelajaran dan sarana untuk beribadah.

Menurut anggota ranting muhammadiyah yang dalam hal ini dijadikan sebagai informan penelitian ini, menurut para informan bahwa mereka masuk dan ikut serta ke dalam organisasi Muhammadiyah melalui tiga jalan, yaitu melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah, melalui proses rekrutmen yang diselenggarakan oleh ranting Muhammadiyah serta melalui anggota keluarga yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota Muhammadiyah. Terkait dengan rekrutmen melalui anggota keluarga anggota Muhammadiyah, menurut informan bahwa tidak ada himbauan dari untuk mengajak saudara atau teman untuk masuk dan ikut serta ke dalam organisasi Muhammadiyah. Selain tidak adanya himbauan dari ranting untuk mengajak keluarga dari anggota Muhammadiyah, ranting juga dirasa masih kurang aktif dalam melaksanakan pembinaan kepada keluarga kader ranting Muhammadiyah. Keikutsertaan dan dorongan untuk mengajak keluarga anggota Muhammadiyah untuk ikut serta ke dalam organisasi Muhammadiyah adalah lebih merupakan dorongan pribadi dari anggota ranting Muhammadiyah.

Kegiatan ranting dalam rangka pengembangan kader, informan dari ketiga ranting yang dijadikan ranting hampir semuanya mengatakan bahwa kegiatan pengembangan kemampuan kader sudah rutin dilaksanakan minimal setiap bulann sekali baik melalui pengajian rutin, pertemuan rutin, pengajian hari jumat, Baitul Arqam, taruna melati MABIT (Malam Bina Iman Taqwa) ataupun kajian Al-Qur'an yang dilaksanakan satu minggu sekali. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan kader ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan keilmuan kader baik terkait dengan Islam ataupun

Muhammadiyah dan juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar kader ranting Muhammadiyah.

### **Analisis Data**

Pola rekrutmen yang dilaksanakan oleh Ranting Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo ternyata sudah sesuai dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tentang Revitalisasi Kader dan Anggota Muhammadiyah dimana rekrutmen anggota Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo dilakukan melalui lembaga-lembaga dibawah naungan organisasi Muhammadiyah baik Organisasi Otonom (ORTOM) maupun Amal Usaha (AUM), lembaga pendidikan Muhammadiyah (seperti SMA Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo), Amal Usaha (seperti Rumah Sakit Muhammadiyah dan Rumah Sakit Aisiyah), serta beberapa kegiatan pemuda Muhammadiyah seperti Taruna Melati dan Baitul Arqam. Secara garis besar ada tiga cara rekrutmen yang dilakukan organisasi Muhammadiyah di Ponorogo yaitu melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah, melalui proses rekrutmen yang diselenggarakan oleh ranting Muhammadiyah serta melalui anggota keluarga yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota Muhammadiyah. Perekrutan yang dilakukan melalui AUM ataupun lembaga-lembaga Muhammadiyah yang lain ini terbukti efektif meningkatkan jumlah KTA yang diterbitkan oleh Muhammadiyah. Untuk jumlah kader baru di tingkat Kabupaten minimal 228 orang anggota pertahun atau jika dilihat di ruang yang lebih sempit di tingkat ranting rata-rata jumlah kader baru adalah minimal 10 orang anggota di setiap tahunnya dengan melihat jumlah Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan. Selain itu, tujuan utama diadakannya rekrutmen juga sudah sesuai dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah serta memperluas ruang dakwah Muhammadiyah sehingga cita-cita dan tujuan dari Organisasi Muhammadiyah bisa tercapai.

Kegiatan pengembangan kemampuan kader sudah rutin dilaksanakan minimal setiap bulann sekali baik melalui pengajian rutin, pertemuan rutin, pengajian hari jumat, Baitul Arqam, taruna melati MABIT (Malam Bina Iman Taqwa) ataupun kajian Al-Qur'an yang dilaksanakan satu minggu sekali. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan pengembangan kemampuan kader inni adalah sebagai sarana untuk meningkatkan keilmuan kader baik terkait dengan Islam ataupun

Muhammadiyah dan juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar kader ranting Muhammadiyah.

Perekrutan kader Muhammadiyah Ponorogo tidak memiliki kegiatan rekrutmen khusus yang dilaksanakan oleh ranting dengan tujuan untuk menjaring masyarakat umum untuk ikut masuk dalam organisasi Muhammadiyah. Sasaran dari rekrutmen yang dilakukan oleh ranting Muhammadiyah adalah siswa atau mahasiswa dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, pegawai amal usaha Muhammadiyah, serta masyarakat umum. Hal ini menjadi suatu ganjalan yang berarti bagi bertambahnya kader ranting setiap tahunnya dimana menurut teori rekrutmen yang dikemukakan oleh Sudiro (2012), kemungkinan besar yang menjadi kendala dalam merekrut masyarakat umum adalah lemahnya daya tarik yang diberikan organisasi Muhammadiyah. Rekrutmen anggota Muhammadiyah yang sudah terlaksana selama ini di Organisasi Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo belum pernah memanfaatkan media baik elektronik maupun cetak sebagai sarana promosi dan sosialisasi rekrutmen kader Muhammadiyah sehingga masyarakat secara umum menjadi tertarik untuk masuk dalam organisasi Muhammadiyah. Kecenderungan pola rekrutmen yang dilaksanakan lebih kepada rekrutmen dengan menggunakan pendekatan personal karena dinilai sangat efektif jika diterapkan di tingkat Ranting (Desa) yang memiliki kultur adat istiadat yang masih sangat kental.

Jika diatas telah dianalisis pola rekrutmen kader ranting Muhammadiyah dari Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) serta dari pengurus ranting, maka selanjutnya akan dilakukan analisis hasil wawancara dengan beberapa anggota ranting Muhammadiyah terkait dengan dorongan untuk masuk dan ikut dalam organisasi Muhammadiyah. Melalui studi lapangan diketahui bahwa sebagian besar anggota ranting Muhammadiyah memiliki orientasi atau dorongan keikutsertaan ke dalam organisasi Muhammadiyah adalah sebagai media dakwah serta merupakan gerakan nyata dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, orientasi dorongan untuk ikut dalam organisasi Muhammadiyah selain hal tersebut adalah sebagai media pembelajaran dan sarana untuk beribadah. Hal ini sangat berbeda sekali dengan teori rekrutmen yang ada dimana teori rekrutmen pada umumnya adalah pada organisasi atau perusahaan yang *profit oriented* sehingga dorongan yang muncul dari calon pelamar (calon pegawai) juga memiliki orientasi kearah *profit*. Berbeda dengan rekrutmen di lembaga atau organisasi berbasis agama dimana calon anggota organisasi memiliki dorongan *non-profit oriented* yang dalam

organisasi Muhammadiyah ini adalah kegiatan dakwah serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dorongan yang muncul dari calon anggota ranting Muhammadiyah berasal dari dorongan pribadi karena organisasi Muhammadiyah tidak melaksanakan himbauan untuk mengajak saudara atau teman untuk masuk dan ikut serta ke dalam organisasi Muhammadiyah. Selain tidak ada himbauan dari ranting untuk mengajak keluarga dari anggota Muhammadiyah, ranting juga dirasa masih kurang aktif dalam melaksanakan pembinaan kepada keluarga kader ranting Muhammadiyah. Keikutsertaan dan dorongan untuk mengajak keluarga anggota Muhammadiyah untuk ikut serta ke dalam organisasi Muhammadiyah adalah lebih merupakan dorongan pribadi dari anggota ranting Muhammadiyah. Dorongan pribadi yang melandasi calon anggota organisasi Muhammadiyah ini masih bersifat murni dimana tidak ada faktor lain dari luar dirinya yang bisa mempengaruhi pilihannya. Tidak adanya faktor luar yang mempengaruhi sikap dan pilihan calon anggota Muhammadiyah ini karena organisasi yang akan dimasuki merupakan organisasi berbasis agama sehingga dorongan yang muncul lebih bersifat keyakinan atau bisa dikatakan sebagai keimanan terhadap agama tersebut.

## **Kesimpulan**

Dari pembahasan dan sajian serta analisis data di atas maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan terkait dengan pola rekrutmen kader ranting Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Pola rekrutmen yang dilaksanakan oleh Ranting Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo ternyata sudah sesuai dengan Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-46 tentang Revitalisasi Kader dan Anggota Muhammadiyah. Selain itu, tujuan utama diadakannya rekrutmen juga sudah sesuai dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah serta memperluas ruang dakwah Muhammadiyah sehingga cita-cita dan tujuan dari Organisasi Muhammadiyah bisa tercapai. Perekrutan kader Muhammadiyah Ponorogo tidak memiliki kegiatan rekrutmen khusus yang dilaksanakan oleh ranting dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat umum untuk ikut masuk dalam organisasi Muhammadiyah. Sasaran dari rekrutmen yang dilakukan oleh ranting Muhammadiyah adalah siswa atau mahasiswa dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, pegawai amal usaha Muhammadiyah, serta masyarakat umum. Hal ini menjadi suatu ganjalan yang berarti bagi

bertambahnya kader ranting setiap tahunnya dimana menurut teori rekrutmen yang dikemukakan oleh Sudiro (2012), kemungkinan besar yang menjadi kendala dalam merekrut masyarakat umum adalah lemahnya daya tarik yang diberikan organisasi Muhammadiyah. Kecenderungan pola rekrutmen yang dilaksanakan lebih kepada rekrutmen dengan menggunakan pendekatan personal karena dinilai sangat efektif jika diterapkan di tingkat Ranting (Desa) yang memiliki kultur adat istiadat yang masih sangat kental.

Orientasi dorongan untuk ikut dalam organisasi Muhammadiyah selain hal tersebut adalah sebagai media pembelajaran dan sarana untuk beribadah. Hal ini sangat berbeda sekali dengan teori rekrutmen yang ada dimana teori rekrutmen pada umumnya adalah pada organisasi atau perusahaan yang *profit oriented* sehingga dorongan yang muncul dari calon pelamar (calon pegawai) juga memiliki orientasi kearah *profit*. Berbeda dengan rekrutmen di lembaga atau organisasi berbasis agama dimana calon anggota organisasi memiliki dorongan *non-profit oriented* yang dalam organisasi Muhammadiyah ini adalah kegiatan dakwah serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dorongan yang muncul dari calon anggota ranting Muhammadiyah berasal dari dorongan pribadi karena organisasi Muhammadiyah tidak melaksanakan himbauan untuk mengajak saudara atau teman untuk masuk dan ikut serta kedalam organisasi Muhammadiyah. Selain tidak ada himbauan dari ranting untuk mengajak keluarga dari anggota Muhammadiyah, ranting juga dirasa masih kurang aktif dalam melaksanakan pembinaan kepada keluarga kader ranting Muhammadiyah. Dorongan pribadi yang melandasi calon anggota organisasi Muhammadiyah ini masih bersifat murni dimana tidak ada faktor lain dari luar dirinya yang bisa mempengaruhi pilihannya. Tidak adanya faktor luar yang mempengaruhi sikap dan pilihan calon anggota Muhammadiyah ini karena organisasi yang akan dimasuki merupakan organisasi berbasis agama sehingga dorongan yang muncul lebih bersifat keyakinan atau bisa dikatakan sebagai keimanan terhadap agama yang diyakini oleh calon anggota.

Perbedaan mendasar inilah yang menjadikan rekrutmen di lembaga atau organisasi yang berbasis agama sangat berbeda dengan rekrutmen di perusahaan ataupun di lembaga yang bersifat *profit*. Dorongan yang muncul dari seorang individu tanpa ada faktor dari luar yang mempengaruhi pilihannya menjadi kunci dari pola rekrutmen ini dimana semakin sering organisasi berbasis agama tersebut memperkuat keyakinannya atau ideologi terhadap agama yang dianut maka semakin banyak anggota yang akan bergabung dengan organisasi tersebut.

Begitupun sebaliknya, jika keyakinan ataupun ideologi yang ditanamkan oleh lembaga atau organisasi berbasis agama itu tidak terlalu kuat maka juga akan sedikit jumlah anggota yang akan ikut serta dalam organisasi tersebut. Ini terbukti di organisasi Muhammadiyah dimana meskipun tidak dilakukan rekrutmen secara umum dan bersifat terbuka ataupun dipublikasikan melalui media (cetak maupun elektronik), anggota organisasi Muhammadiyah ini semakin banyak dan terus bertambah sehingga organisasi berbasis agama ini menjadi organisasi yang besar.

Setelah disimpulkan dari penelitian ini, maka tentu sangat tepat jika terdapat saran yang bersifat membangun terkait dengan pola rekrutmen kader ranting Muhammadiyah ini. Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan penguatan ideologi Muhammadiyah baik untuk anggota Muhammadiyah ataupun pengenalan kepada masyarakat secara umum tentang pandangan hidup Muhammadiyah.
2. Untuk melaksanakan rekrutmen dengan pola dakwah maka perlu menggunakan media cetak atau elektronik sebagai sarana menyebarkan informasi sehingga masyarakat umum lebih tertarik lagi untuk ikut dalam organisasi Muhammadiyah ini.
3. Perlu adanya penguatan kader ranting serta pengenalan tentang pandangan hidup bermuhammadiyah kepada saudara atau keluarga dari kader Muhammadiyah.
4. Perlu perencanaan yang khusus untuk melakukan rekrutmen di setiap tahunnya dengan tujuan untuk bisa menjaring lebih banyak calon anggota muhammadiyah yang potensial.

### Daftar Pustaka

- admin. *Strategi Rekrutmen Karyawan Untuk Mendapatkan SDM Terbaik*. 16 November 2016.  
<http://pakarkinerja.com/strategi-rekrutmen-karyawan-untuk-mendapatkan-sdm-terbaik/>.
- LPCR. *Tata Cara Menjadi Anggota Muhammadiyah*. Yogyakarta: LPCR PP Muhammadiyah, 2012.
- Meleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammadiyah. “Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 46 Tentang Revitalisasi Kader dan Anggota Muhammadiyah.” <http://www.umm.ac.id/>. 15 April 2010.  
<http://www.umm.ac.id/files/file/mdc/Revitalisasi-Kader-dan-Anggota-Muhammadiyah.pdf>.
- Muhammadiyah, MPK PP. *Sistem Pengkaderan Muhammadiyah*. Yogyakarta: MPK PP Muhammadiyah, 2015.
- Narbuko, C., dan A. Achmadi. *Metode Penelitian Kualitatif (ed2)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Permata, Ahmad Norma. “MENGENAL LEMBAGA PENGEMBANGAN CABANG DAN RANTING MUHAMMADIYAH.” <http://lpcr.muhammadiyah.or.id/>. 21 Oktober 2015.  
<http://lpcr.muhammadiyah.or.id/muhfile/lpcr/download/MENGENAL%20LEMBAGA%20PENGEMBANGAN.pdf>.
- Rachmanto, Rizky Hadi. *Teori dan Proses Rekrutmen*. 17 Juni 2015.  
[http://www.kompasiana.com/blankstate/teori-dan-proses-rekrutmen\\_54f4106e7455137f2b6c8651](http://www.kompasiana.com/blankstate/teori-dan-proses-rekrutmen_54f4106e7455137f2b6c8651).

Rahayuningsih, Sri. "Membangun Karier Meningkatkan Kualitas Organisasi Yang Efektif." *eprints.unisbank.ac.id/696/1/ARTIKEL-59.pdf*, 2012: 59.

Sudiro, Achmad. *Perencanaan Sumberdaya Manusia*. Malang: UB Press, 2011.

Yullyanti, Ellyta. "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Pada Kinerja Pegawai." *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 2009: 131-139.

Zainuddin M., Masyhuri. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

## Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas

(Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku)

Nancy Rahakbauw & David Marthen Salakory

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku

[nancyiksfisipukim@gmail.com](mailto:nancyiksfisipukim@gmail.com), [davidsalakory@gmail.com](mailto:davidsalakory@gmail.com)

### Abstract

Social protection is a means of important to relieve the impact of poverty and afflictions faced by vulnerable groups such as women .It cannot be denied that women were treated in a discriminatory manner and has gotten the stigma in specific conditions. Women often victims, both with the sacred printing domestic and public domain, this condition more complicated again, if the woman has with disability. Limited and inability as a female either physically and psychologically cause women with disability not able to meet a need maximally. Research aims to understand social protection forms received and constraints experienced by women with disability in get access to range of services available or provided by the government. Research will be implemented in an institution the set of women with disability Indonesia (HWDI) Kota Ambon, Provinsi Maluku .This research used the qualitative method which describes about the forms of social protection as well as constraints experienced by the Women Disability. The object of this research is focused on the members of the HWDI organization. Results of the research show that the received protection form, though Women Disability is social insurance, social assistance and Social Empowerment and obstacles faced in accessing services is uneven dissemination of information as well as physical limitations and treatment diskirminasi of the community and the public is not aksesibiti for persons with Disability.

**Keywords:** *Women, Disability, and Social Protection.*

### Abstraksi

Perlindungan Sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok yang rentan seperti perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan selalu diperlakukan secara diskriminatif dan dan mendapat stigma dalam kondisi-kondisi tertentu. Perempuan seringkali menjadi korban baik di ranah domestik maupun ranah publik, kondisi ini semakin dipersulit lagi, apabila perempuan tersebut mengalami Disabilitas.Keterbatasan dan ketidakmampuan sebagai seorang perempuan baik secara fisik maupun psikis menyebabkan Perempuan Disabilitas tidak dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan sosial yang diterima serta kendala yang dialami oleh Perempuan Disabilitas dalam memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang tersedia atau disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan tentang bentuk-bentuk perlindungan sosial serta kendala yang dialami oleh Perempuan Disabilitas. Obyek penelitian ini di fokuskan pada anggota organisasi HWDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk perlinndungan yang diterima olah Perempuan Disabilitas adalah Asuransi Sosial,

Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Sosial dan kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan adalah Diseminasi Informasi yang tidak merata serta keterbatasan fisik dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat serta fasilitas umum yang tidak aksesibiti bagi penyandang Disabilitas.

**Kata Kunci:** *Perempuan, Disabilitas, dan Perlindungan Sosial*

<i>Submite</i>	: 10 Agustus 2017
<i>Review</i>	: 14 November 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: <a href="mailto:jovani.audra@gmail.com">jovani.audra@gmail.com</a>

## Pendahuluan

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional, secara luas, perlindungan sosial merupakan tindakan dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan kelompok miskin, kelompok rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok termarginalisasi di setiap Negara. Berbagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan Negara kepada warganya dengan tujuan agar setiap orang mendapatkan akses terhadap layanan yang diberikan. Disamping itu juga produk undang-undang yang dihasilkan untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya. Perempuan sebagai bagian dari warga Negara juga, perlu mendapatkan perlindungan sosial sama seperti laki-laki. Jika dibandingkan dengan laki-laki, maka perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminatif dengan memiliki konndisi ganda seperti gangguan fisik (Disabilitas). Kondisi inilah yang masih mewarnai kehidupan perempuan disabilitas saat ini. Data International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa jumlah Disabilitas di Indonesia yaitu 11,580,117 orang.

Berdasarkan hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2012, persentase perempuan penyandang disabilitas secara nasional sebesar 2,55 persen terhadap total penduduk. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di pedesaan, yaitu 2,28 persen berbanding 2,81 persen. Jika dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas relatif lebih rendah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat (Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 2009).

Dahulu istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi pembahasan penting di kalangan para pengiat sosial disabilitas di Indonesia. Terutama bagi perempuan disabilitas, diskriminasi yang dialami berlipat ganda. Kondisi inilah yang menyebabkan perempuan disabilitas selalu dipandang sebelah mata dan tidak diberi ruang untuk dapat mengembangkan diri. Perlakuan-perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas terutama perempuan terlihat dalam berbagai ruang- ruang publik seperti fasilitas umum yang tidak representatif, pendidikan, kesehatan dan juga lapangan pekerjaan yang tidak berpihak pada perempuan disabilitas, kondisi inilah yang menyebabkan penyandang perempuan disabilitas selalu dipandang sebagai warga kelas dua. Meskipun disadari bahwa berbagai kebijakan dalam bentuk aturan maupun undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas namun belum dirasakan dampaknya bagi kehidupan perempuan disabilitas. Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban dalam setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan, perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun dalam pergaulan sosial.

Secara etimologis perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti tuan, orang yang mahir, berkuasa, hulu atau yang paling besar. Kata perempuan berhubungan dengan “ampu sokong”, yakni memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali. Perempuan seakar juga dengan kata puan, yang merupakan sapaan hormat kaum hawa. Menurut Plato, perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sementara Kartini Kartono mengatakan bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya adat istiadat, sistem sosial-ekonomi, dan pengaruh-pengaruh pendidikan.

Menurut Fakih (2005: 45) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (Kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: kala menjing) dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar. Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan pada perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban kerja, dan kekerasan terhadap perempuan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi hak hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk dilindungi. Pengakuan internasional tentang eksistensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya mengafirmasikan posisi dan peran mereka sebagai manusia sebagaimana layaknya manusia laki-laki. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan HAM. Dalam

setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan, perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun dalam pergaulan sosial. Perempuan juga manusia, pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya mengakui dan menghormati hak asasi perempuan sebagai hak yang inheren yang tidak bisa dipisahkan.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), atau yang lebih dikenal dengan konvensi perempuan sudah lebih dari tiga dekade diadopsi oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 1979. Konvensi ini berpijak pada kondisi bahwa meskipun sudah ada berbagai instrument internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana perempuan termasuk dalam subjek yang diatur, namun pada kenyataannya diberbagai belahan dunia, perempuan kerap menjadi warga negara yang terpinggirkan. Bukan hanya tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki namun juga tidak diakui perannya yang sangat sentral diranah publik. (Kartika, 2017)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yaitu: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment” definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai

bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Dalam konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 tentang penyandang disabilitas perempuan menyebutkan bahwa (1) Negara-negara pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. (2) Negara-negara pihak harus mengambil. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah yang memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. (Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan pada seseorang. Hak boleh digunakan atau tidak digunakan. Hak asasi manusia diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia ada dan dilindungi oleh Negara. Berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 39 tahun 1999 diatur bahwa setiap orang yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan dalam ketentuan ini antara lain, orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) UU no 39 tahun 1999 mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Jadi penyandang disabilitas berhak atas pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandirian, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, ketenagakerjaan, rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon berbagai resiko kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial merupakan bagian dari dan berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial dalam mendorong kerbelanjutan kehidupan masyarakat, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta prinsip fundamental dari pekerjaan sosial.

Menurut Shepherd, Marcus, dan Barrientos (2002;5) yaitu Perlindungan sosial merujuk pada proses, kebijakan, serta berbagai intervensi yang dilakukan guna merespon resiko ekonomi, politik, dan sosial, terutama yang dihadapi oleh kelompok rentan dan miskin agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Perlindungan sosial adalah skema yang melembaga untuk melindungi orang dari berbagai resiko yang mengancam kehidupannya, mulai dari sakit hingga kematian, kecelakaan kerja hingga pensiun.

Perlindungan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (sebagai pemangku kewajiban terhadap hak-hak warga) maupun oleh masyarakat (sebagai wujud tanggung jawab sosial) untuk menciptakan berbagai bentuk intervensi untuk warga terutama kelompok-kelompok yang rentan tidak mengalami resiko pelanggaran hak, terhindar dari berbagai kemungkinan hidup tidak layak karena gunjangan perubahan atau kerentanan sosial. Perlindungan sosial juga ditujukan untuk mengembangkan berbagai kesempatan dan meningkatkan kemampuan warga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ketika mengalami resiko tersebut.

Suharto (2009; 42), ada tiga tujuan utama perlindungan sosial yaitu: 1). Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan. 2). Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi. 3). Memungkinkan kelompok—kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Dalam UU No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa; Jaminan sosial sebagai perwujudan daripada sekuritas sosial adalah seluruh system perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis ingin menggambarkan bentuk-bentuk Perlindungan Sosial yang diterima oleh Perempuan Disabilitas dan Hambatan dalam mengakses layanan yang tersedia. Pendekatan ini dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif yaitu, analisis yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. (Kartika, 2017)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena secara konseptual memperhatikan pemahaman perilaku manusia (individu) dari perspektif individu itu sendiri. Data yang terkumpul berupa hasil wawancara dengan responden dan observasi terhadap dokumen yang dipakai. Data dokumen untuk wawancara berasal dari semua dokumen yang dipakai responden. (Andriani, 2003)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. (Aslichati, 2007)

Dalam penelitian ini diperlukan data, yang terdiri dari:

- 1) Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancaramendalam terhadap informan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus mengenai masalah penelitian yang dilakukan.
- 2) Data sekunder adalah data yang bersifat melengkapi dan berkaitan dengandata yang berhubungan dengan penelitian yang dapat memberikan informasiseperti manusia, situasi, dan benda-benda lainnya yang berhubungan denganpenelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang dalam analisa ini mengemukakan data yang sudah didapatkan di lapangan dengan cara mereduksi data. Untuk itu, data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka dilanjutkan pada tahap berikutnya (Sugiyono, 2009: 5)

Data yang telah diperoleh, kemudian dikodifikasi dan dikategorisasi, telah itu disusun secara sistematis, sesuai dengan rumusan masalah, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

## Hasil Dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Perlindungan Sosial bagi Perempuan Disabilitas. Dalam temuan penelitian yang dilakukan terhadap perempuan Disabilitas sesuai dengan tujuan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut.

### A. Penyandang Disabilitas

#### 1. Karakteristik Disabilitas

Penyandang Disabilitas Perempuan yang menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku adalah orang-orang yang berasal dari berbagai usia, agama dan suku baik dari Maluku maupun luar Maluku. Jumlah anggota HWDI awal berdiri pada tahun 2005 – 2017 anggota yang tergabung berjumlah 150 orang dan seiring berkembangnya waktu, orang-orang tersebut kemudian mengalami kematian dan berpindah ke luar Maluku. Dan ini aktif sebagai anggota HWDI berjumlah 35 orang. Dari 35 orang, 10 orang menjadi informan dalam penelitian ini.

Keterlibatan mereka sebagai anggota dalam Perhimpunan Wanita Disabilitas merupakan cara yang dilakukan untuk dapat mengembangkan diri dengan rekan-rekan senasib. Mereka menyadari bahwa, keterbatasan fisik yang dimiliki menyebabkan mereka tidak dapat melakukan apapun dan membatasi ruang gerak mereka dalam berinteraksi dengan orang-orang diluar komunitas mereka. Kondisi yang terbatas dalam melakukan berbagai hal, menyebabkan mereka lebih merasa aman dan nyaman berada di dalam rumah atau lembaga. Seperti yang diungkapkan oleh ketua HWDI (MAR), bahwa anggota-anggota HWDI adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki keterbatasan

secara fisik sehingga mereka suka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa mereka yang tergabung di HWDI di dorong untuk dapat mengenali potensi yang mereka miliki serta dapat mengembangkan rasa percaya diri. Cara yang ditempuh adalah melibatkan mereka jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerja baik pemerintah maupun swasta, hal ini sangat membantu anggota dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah wadah bagi anggota dalam berbagi dan saling menguatkan.

Ungkapan yang senada juga disampaikan oleh informan LS, FS, MHP, YFH, FS, AW, dan YL yaitu bahwa mereka dapat mengembangkan diri dan percaya diri walaupun mereka berada ditengah-tengah orang yang tidak disabilitas. Keterlibatan mereka merupakan upaya lembaga dalam memberikan ruang-ruang pertemuan dengan berbagai orang agar mereka tidak merasa minder apabila berada di lingkungan sosial yang berbeda. Cara pandang informan dalam menyikapi dorongan atau usaha yang dilakukan lembaga, juga berbeda karna dipengaruhi oleh usia dan pengalaman hidup. Anggota HWDI terdiri dari beragam usia yaitu mulai 18 - 60 tahun. Yang berusia muda, mereka lebih memilih untuk mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan, sementara dewasa lebih memilih untuk di rumah karena mobilitas mereka tidak lagi seperti rekan yang lebih muda. Seperti yang diungkapkan oleh HTT, CMT, MHP dan ERAE yaitu kami sangat senang dan termotivasi, apabila lembaga melibatkan kami dalam berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh lembaga maupun diluar lembaga. Sementara LT, YFH, AW, FS, YL dan FS mengungkapkan bahwa, mereka juga senang dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang mobilitasnya tinggi

## 2. Jenis Disabilitas

Anggota Himpunan Disabilitas Indonesia Maluku yang terdiri dari beragam suku, agama dan usia, juga memiliki disabilitas yang berbeda. Dari 35 anggota yang aktif dan yang dijadikan informan sepuluh orang (10), memiliki kondisi disabilitas yang berbeda. Yang mengalami Tuna Daksa yaitu: cacat fisik adalah LS, MHP, FS, YL, AW dan YFH, sementara yang mengalami cacat tubuh adalah FS. Selain tuna daksa, ada juga Tuna Rungu dan Tuna Wicara yaitu HTT, CMT dan ERAE. Selain mereka yang dijadikan informan kunci, Ketua

HWDI MAR juga mengalami disabilitas fisik. Beragam disabilitas yang ada di HWDI, juga memengaruhi proses interaksi diantara anggota-anggotanya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua HWDI bahwa, seringkali terjadi kesalahpahaman apabila anggota lain menyampaikan informasi kepada tuna rungu maupun tuna wicara dan mereka tidak memahami apa yang disampaikan, maka mereka akan merasa tersinggung. Ungkapan yang senada juga disampaikan oleh LT, YTH yaitu seringkali serba salah, apabila ada rekan tuna wicara maupun tuna rungu tidak dapat memahami informasi yang disampaikan maka mereka akan meninggikan suaranya dengan mimik wajah yang marah serta gerakan tangan agar rekan mereka yang tuna daksa dapat menerima apa yang disampaikan.

### 3. Respon Psikososial Disabilitas

Setiap individu yang dilahirkan dari Rahim seorang ibu, menghendaki agar terlahir sempurna tanpa mengalami kekurangan. Namun ketika mengetahui ada yang tidak lengkap dalam tubuhnya maka mereka akan menunjukkan sikap maupun respon yang berbeda. Ada yang mengetahui kondisi disabilitanya dari orang tua maupun keluarga. Keberadaan disabilitas yang dialami oleh mereka diketahui setelah mereka masuk usia sekolah dasar (SD). Dari ungkapan yang disampaikan oleh informan yaitu LT, MP, YFH, CMT, ERAE, FS, AW, HTT, FS dan YL terkait dengan kondisi disabilitasnya yaitu mereka mengetahui melalui cerita orang tua, bahwa mereka yang mengalami disabilitas fisik atau tuna daksa disebabkan karena suntikan yang diberikan pada saat mereka bayi namun setelah beberapa hari kemudian kaki mereka seakan tidak dapat menahan tubuh dan kemudian mereka jatuh. Sementara yang mengalami Tuna Wicara maupun Tuna Runggu mereka tidak dapat berbicara sejak bayi.

Respon yang ditunjukkan oleh mereka yang mengalami disabilitas fisik juga berbeda dimana, ada yang tidak ingin berinteraksi dengan teman-temannya, dan ada juga yang mengurung diri karena merasa berbeda dengan yang lain. Dari ungkapan LT, MHP, YFH, YL, FS, AW dan FS bahwa setelah mengetahui mereka berbeda dengan yang lain, dan tidak memiliki masa depan menyebabkan mereka menjadi minder, malu, tidak berani, serta kurang percaya diri apabila berada di luar komunitas dan mengisolasi tidak keluar berinteraksi di lingkungan sosialnya. Sementara CMT, HTT dan ERAE yang mengalami disabilitas tuna

runggu dan wicara tidak menunjukkan respon sebab mereka tidak mendengar, namun menurut orang tua CMT,HTT dan ERAE mereka telah pasrah terhadap kondisi anaknya. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah berdamai dengan diri untuk bisa menerima apa yang mereka alami. Dengan penerimaan konsep diri membuat mereka dapat menerima berbagai kegiatan untuk mengembangkan pootensi yang dimiliki.

## **B. Bentuk Bentuk Perlindungan Sosial**

### **1. Asuransi Sosial**

Asuransi sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara untuk memperoleh penghidupan yang layak.Pemberian dalam bentuk kartu perlindungan social yang diperuntukan untuk memeriksa kesehatan.Pemberian ini belum dirasakan oleh semua anggota HWDI, hanya sebagian orang saja yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kartu tersebut.menurut ketua HWDI, HWDI tidak memberikan bantuan dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan tapi bekerja sama dengan dinas sosial kota untuk pengurusan BPJS sebagai bentuk perlindungan terutama pemeriksaan kesehatan. realisasi penggunaan kartu BPJS belum maksimal didapatkan oleh anggota karena proses pengurusan yang dilakukan membutuhkan waktu.

Pemberian kartu BPJS dan JAMKESMAS bagi disabilitas merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi kesehatan setiap anggota terutama keluarga miskin.Dengan memanfaatkan kartu BPJS maupun JAMKESMAS dapat mengurangi pengeluaran dalam membeli obat-obatan atau pemeriksaan lainnya.Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan bahwa, mereka belum semua mendapatkan kartu tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeriksaan maupun pengobatan.Hal ini disampaikan oleh YFH bahwa dapat menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIS) ketika sakit atau pembelian obat-obatan ada pengurangan. Sementara anggota yang lain belum dapat menikmati fasilitas KIS karena masih dalam proses pengurusan. Seperti yang diungkapkan oleh CMT,ERAE, YS, YL, MHP,AW, LT, HTT, dan YS, bahwa mereka sampai sekarang belum merasakan manfaat penggunaan kartu Indonesia Sehat sehingga pada saat sakit ataupun beli obat mereka harus membayar dengan biaya sendiri dan sangat terbebani jika biaya yang dikeluarkan melebihi dari uang mereka.

## 2. Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan terutama bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental maupun social. Bantuan social dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang maupun tidak langsung dalam bentuk barang. Pemberian bantuan sosial hanya diberikan kepada orang-orang yang mengalami keterbatasan dan mereka perlu mendapat bantuan baik dari pemerintah maupun swasta. Pemberian bantuan sosial yang diterima oleh anggota HWDI berasal dari Pemerintah Kota dalam hal Dinas Sosial dan instansi terkait, dimana setiap anggota yang menerima bantuan social terlebih dahulu diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui HWDI, masyarakat dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang lain pada umumnya diberikan bantuan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) seperti penjualan bahan kebutuhan pokok, dan juga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Beras Miskin (Raskin). Selain mendapat bantuan berupa UEP, BLT dan Raskin, penyandang Disabilitas juga diberikan alat bantu seperti kursi roda dan kayu penyanggah (Tongkat) untuk berjalan.

Bantuan sosial yang diberikan merupakan stimulasi bagi para disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta mandiri. Hal ini seperti diungkapkan oleh ketua HWDI bahwa mereka dibantu oleh Pemerintah Kota Ambon khususnya DINSOS agar anggotanya mampu meningkatkan penghidupan yang lebih layak tanpa merasa berbeda secara ekonomi maupun social. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Seksi Dinas Sosial Kota Ambon (AP), bahwa bantuan social yang diterima oleh anggota HWDI merupakan suatu cara untuk melakukan penanggulangan resiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, keluarga maupun komunitas. Bantuan social yang diterima memiliki dampak yang sangat positif dirasakan oleh penyandang disabilitas maupun keluarganya. Mereka mengungkapkan bahwa, bantuan yang diterima oleh anggota keluarga membawa perubahan yang cukup signifikan bagi pengembangan hidup kearah yang lebih baik.

### 3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam memberikan penguatan bagi penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok disabilitas yang kuat dan mandiri. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui HWDI didasarkan atas potensi yang dimiliki oleh disabilitas selain itu, pemberdayaan bagi disabilitas juga didasarkan pada derajat kecacatannya, apabila derajat kecacatannya berat maka akan menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan bagi mereka. Kondisi ini disampaikan oleh Ketua HWDI (MR) maupun Kepala Seksi Disabilitas DINSOS Kota Ambon (AP), bahwa penyandang disabilitas berat tidak dapat mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena terkendala alat transportasi yang dipergunakan oleh mereka. Namun, bagi yang memiliki derajat kecacatan yang ringan, mereka akan diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kiriman nama yang telah diseleksi oleh HWDI terhadap anggotanya yang memiliki potensi dan minat sesuai dengan program pemberdayaan yang ditawarkan oleh pemerintah. Anggota HWDI yang mengikuti program pemberdayaan dari Pemerintah Kota Ambon yaitu keterampilan menjahit, perbengkelan dan salon kecantikan. Pemberdayaan disabilitas dilakukan bersama dinas terkait dalam memberikan materi pelatihan.

Tujuan pemberdayaan bagi disabilitas yang memiliki “*Passion*” dalam mengikuti pelatihan adalah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan agar mereka dapat mandiri secara social maupun ekonomi.

### C. Hambatan Disabilitas Dalam Mengakses Layanan

#### 1. Diseminasi Informasi

Program-program yang ditawarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sesungguhnya belum menyentuh pada sasaran. Hanya sebagian masyarakat yang dapat mengakses informasi terkait dengan program yang ada. Namun bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas baik Tuna Daksa maupun Tuna Wicara

dan Rungu terutama yang derajat kecacatannya berat maka akan sulit bagi mereka dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Diseminasi informasi yang tidak maksimal sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan program-program yang diperuntukan bagi mereka. Penelitian yang kami lakukan membuktikan bahwa, tidak semua program pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat miskin terutama yang memiliki keterbatasan fisik, mental, social maupun ekonomi dapat diakses bahkan diseminasi informasi hanya bagi kalangan tertentu saja.

Situasi ini diakui oleh pihak HWDI maupun DINSOS bahwa banyak program pemerintah yang bukan hanya dijalankan oleh DINSOS saja tapi juga instansi-instansi lain yang memiliki program bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah social. Pemberian bantuan Raskin, Kartu Indonesia Sehat maupun BLT merupakan program pemerintah yang diberikan kepada orang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik seperti mengalami kecacatan khusus, seharusnya menerima bantuan tersebut namun tidak semua memperoleh bantuan yang menjadi hak mereka. Pemerintah melalui pihak ketiga dalam menyalurkan bantuan tersebut lebih memilih anggota masyarakat yang memiliki kedekatan secara emosional daripada orang yang harus memperoleh bantuan tersebut. Kondisi ini sangat disayangkan ketika masyarakat yang seharusnya menikmati justru tidak menikmatinya.

## 2. Keterbatasan Fisik

Setiap orang yang dilahirkan ke dunia menghendaki agar hidupnya dapat dijalankan secara normal tanpa terbebani oleh apapun juga. Namun ketika kenyataan yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas bahwa mereka beda dengan yang lain maka mereka akan menarik diri dari pergaulan sosialnya. Keterbatasan menjadi sesuatu hal yang selalu dialami oleh siapapun juga termasuk penyandang disabilitas. Mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti orang normal terutama bagi derajat kecacatan yang berat seperti tidak memiliki kaki, lumpuh total dan tidak dapat memengang apapun juga dengan kaki maupun tangan. Diamping itu, keterbatasan fisik menjadikan mereka tidak dapat mengembangkan diri dan hanya mengandalkan keluarga dalam kehidupan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh

anggota HWDI yaitu FS, mereka ingin melakukan berbagai hal dalam mengembangkan diri namun terbatas secara fisik.

Fisik yang lemah dan juga akses yang terbatas menyebabkan penyandang disabilitas hanya mampu melakukan aktivitas di dalam rumah serta hanya menunggu kedatangan orang lain untuk membantu meringankan kondisi yang dialaminya.

### **3. Keterbatasan Sarana Aksesibilitas Bagi Disabilitas**

Kota Ambon merupakan kota inklusif berdasarkan penetapan Walikota Ambon yaitu Bapak Richard Louhapessy. Ambon sebagai Kota inklusif menunjukkan bahwa setiap fasilitas yang diperuntukan bagi masyarakat sudah sesuai dengan standar inklusifitas suatu kota agar masyarakat terutama penyandang disabilitas akan merasa nyaman dan aman ketika menggunakan fasilitas tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Ambon bagi penyandang disabilitas masih jauh dari kata “Inklusif”. Hal ini ketika kami konfirmasi kepada Kasie Disabilitas DINSOS Kota Ambon (AP) tentang fasilitas sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas diakui bahwa gedung maupun kantor belum ramah bagi disabilitas. Seperti kantor DINSOS Kota Ambon yang terletak di Wilayah Passo sangat tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Hal senada juga diungkapkan oleh ketua HWDI (MR) bahwa betapa sulit menjangkau kantor Dinas Social yang berada jauh dari kota dengan menggunakan kendaraan roda dua, karena kondisi fisik yang tidak mendukung (Tuna Daksa).

Penetapan Kota Ambon sebagai Kota Inklusif tidak hanya sebatas slogan namun disertai dengan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung agar penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dengan mudah. Disamping itu juga, perlu integrasi antara dinas-dinas terkait dalam menghadirkan kota yang benar-benar inklusif atau ramah bagi penyandang disabilitas. Pelayanan public dihadirkan hanya bagi orang normal saja, sehingga sarana berupa gedung tidak dikonstruksikan bagi penyandang disabilitas seperti tidak menggunakan lift atau tempat yang khusus agar mudah diakses.

#### 4. Diskriminasi Lingkungan Sosial Terhadap Disabilitas

Diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas merupakan masalah nyata yang dihadapi oleh mereka. Dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang aneh dan berbeda dengan orang lain. Dianggap memiliki tubuh yang berbeda dengan yang lain. Mereka di tempatkan dalam strata social yang rendah bahkan tidak memiliki peran yang berarti di masyarakat. Masyarakat kita belum belum memiliki kesadaran dalam menerima hal-hal yang berbeda dengan kehidupan mereka.

Kontruksi sosial terhadap penyandang disabilitas menimbulkan diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, mereka mengatakan bahwa diskriminasi yang mereka terima ketika berada ditempat umum seperti Rumah Sakit, mereka tidak mendapat perlakuan yang baik pada saat pemeriksaan maupun mengantri obat. Menurut mereka, perlakuan bagi penyandang disabilitas disamaratakan dengan yang bukan penyandang disabilitas. Disamping itu, saat menggunakan kendaraan umum, mereka sangat kesulitan ketika harus menaiki mobil dengan posisi yang tinggi terutama bagi disabilitas Tuna Daksa (kaki). Perlakuan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penetapan kota inklusif belum dipahami dengan baik oleh warga Kota Ambon.

#### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, penyandang disabilitas yang menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku memiliki karekteristik dari segi Usia, Agama maupun suku sangat beragam dan mereka dapat beriteraksi dengan baik satu dengan yang lain.
2. Jenis-jenis Disabilitas yang dialami oleh Anggota HWDI juga beragam seperti Tuna Daksa (Cacat Fisik), Tuna Rungu (Gangguan Pendengaran/Tuli), dan Tuna Wicara (Gangguan Bicara/Bisu).
3. Bentuk bentuk perlindungan social yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengembangkan potensi yang mereka miliki yaitu Asuransi Sosial berupa pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIS). Selain itu, Bantuan Sosial

berupa UEP (Usaha Ekonomi Produktif), BLT dan Raskin serta Pemberdayaan Sosial berupa pelatihan menjahit, Salon dan Perbengkelan.

4. Hambatan yang dihadapi oleh penyandang Disabilitas dalam mengakses layanan yaitu minimya informasi terhadap program-program pemerintah, keterbatasan fisik dalam mengikuti berbagai aktifitas, aksesibilitas yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas terutama fasilitas umum mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bagi kepentingan mereka.
5. Diskriminasi yang masih kuat di masyarakat menyebabkan "*Mind Set*" masyarakat terhadap penyandang disabilitas terjewatahkan dalam tindakan-tindakan yang diberikan kepada mereka.

#### **Saran bagi Pemerintah Kota Ambon dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku.**

- a. Menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga selaras dengan penetapan Kota Ambon sebagai kota "Inklusif"
- b. Perlu membangun kerjasama yang terpadu terutama dalam menyediakan pelayanan public agar pennyandang disabilitas menndapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi.
- c. Perlu meningkatkan sosialisasi atau diseminasi informasi terkait Kota Inklusif bagi masyarkat sehingga tidak menghadirkan perlakuan diskirinatif bagi penyandang disabilitas
- d. Secara khusus bagi DINSOS Kota Ambon, perlu melakukan pelatihan yang berbasis pada komunitas dimana penyandang disabilitas tinggal.
- e. Perlu mengembangkan program-program yang mendukung anggota HWDI sehingga tidak hanya mengandalkan intervensi dari pemerintah.
- f. Pengembangan kapasitas bagi perempuan disabilitas dalam rangka meningkatkan kemampuan dan potensi untuk dapat berkembang dan mandiri.

### Daftar Pustaka

- Andriani, J. (2003). STUDI KUALITATIF MENGENAI KRITERIA MENYITIR DOKUMEN: Kasus pada Beberapa Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Juznia Andriani. Perpustakaan pertanian , 10-19.
- Aslichati, L. (2007). Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. Organisasi dan Manajemen , 1 - 7.
- Barnes Collin dan Mercer Geof. (2007), Disabilitas Sebuah Pengantar, Jakarta: UIN
- Fakih Mansour (2008), Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Irawan Prasetya (2006), Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, DIA FISIP UI
- Kartika, I. M. (2017). EKSISTENSI PEREMPUAN BALI DALAM POLITIK. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya , 1- 20.
- Muhtaj El Majda (2013), Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, Rajawali Press.
- Sugiyono (2013), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV Alfabeta
- Suharto Edy (2009), Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonnesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung.CV Alfabet
- ..... (2007), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung,CV Alfabeta
- ..... (2006), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

## Keunggulan Kompetitif Kelompok Pedagang Sektor Informal Pendetang

Slamet Santoso

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ssantoso\_0219@yahoo.co.id

### Abstract

This study aims to to understand and illustrating the effort to encourage school a competitive advantage well as to the vendors angkringan order to be able to maintain a venture thus being able to compete in the city of ponorogo. Was used in the study a qualitative approach was adopted by applying a technique purposive the sampling method of as the determination of the subject matter of the research. The technique of an excavation data using in depth interviews and observation. While the technique of of the data analysis use the model interactive. The research results show that 1). a group of traders both jews and the proselytes angkringan in the city of ponorogo it is able to defend and develop their business; 2). their ability in of maintaining and developing its business caused by existence of the superiority and dominion of maintained the company competitiveness in government in their efforts to arab nations as a bloc; 3). a competitive edge of which there are applied with the value of the belief or joined as regards allah religion will try to get away and value of please the power to do anything help each other out local community and is developing in the group historically traders angkringan; and 4). the value of the community's trust and the value of help one another are not limited to financial problems or business capital, but in the form of information important about business opportunities, help residence, and scouted for permission to occupy a location strategic to venture angkringan in the city ponorogo.

**Keywords:** *Competitive Advantage , Traders Informal Sector , Newcomers*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan upaya pengembangan keunggulan kompetitif para pedagang angkringan agar mampu mempertahankan usaha dan mampu bersaing di Kota Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling sebagai penentuan subyek penelitian. Teknik penggalan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kelompok pedagang Angkringan pendatang di Kota Ponorogo mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya; 2) Kemampuan mereka dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya disebabkan adanya keunggulan kompetitif di dalam usaha kelompok tersebut; 3) Keunggulan kompetitif yang ada dilandasi dengan nilai kepercayaan atau rasa saling mempercayai dan nilai tolong menolong atau saling membantu yang berkembang di dalam kelompok pedagang Angkringan; dan 4) Nilai kepercayaan dan nilai tolong menolong tidak terbatas pada permasalahan financial atau modal usaha, tetapi berupa informasi yang penting tentang peluang usaha, membantu tempat tinggal, dan membantu mencarikan ijin untuk menempati sebuah lokasi yang strategis untuk usaha Angkringan di Kota Ponorogo.

**Kata Kunci:** *Keunggulan Kompetitif, Pedagang Sektor Informal, Pendetang*

<i>Submite</i>	: 04 Desember 2017
<i>Review</i>	: 12 Desember 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Januari 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: hayat.150318@gmail.com

## Pendahuluan

Istilah sektor informal pertama sekali diperkenalkan di Ghana pada tahun 1971 oleh seorang peneliti dari Manchester bernama Keith Hearth. Sektor informal tersebut mulai menjadi pembahasan di kalangan pengamat pembangunan setelah diterbitkan hasil laporan penelitian oleh ILO dan UNDP. Senthuraman (Soeratno; 2000), dalam bukunya yang berjudul *"The Urban Informal Sector in Developing Countries"* terbitan ILO 1981, memberikan definisi umum sektor informal adalah sektor ekonomi yang terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing, dan dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh faktor kapital, baik fisik maupun ketrampilan.

Menurut pendapat Damsar (1997), ciri-ciri dinamis dari konsep sektor informal yang diajukan Hart menjadi hilang ketika telah dilembagakan dalam birokrasi ILO. Informalitas didefinisikan ulang sebagai sesuatu yang sinonim dengan kemiskinan. Sektor informal menunjukkan kepada cara perkotaan melakukan sesuatu dengan dicirikan dengan: 1) Mudah memasukinya dalam arti keahlian, modal, dan organisasi; 2) Perusahaan milik keluarga; 3) Beroperasi pada skala kecil; 4) Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana; dan 5) Pasar yang tidak diatur dan berkompetitif.

Karakteristik negatif yang dilekatkan pada sektor informal oleh ILO, banyak mendapatkan kritikan tajam dari berbagai ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang Sosiologi, khususnya Sosiologi Ekonomi. Mereka menganggap bahwa aktivitas sektor informal merupakan suatu tanda berkembangnya dinamika kewiraswastaan masyarakat. Menurut Hernando de Soto dalam *The Other Parh* (Damsar; 1997) informalitas merupakan respons masyarakat terhadap negara merkantalis yang kaku. Oleh karena itu, tidak seperti gambaran ILO yang melihatnya sebagai mekanisme kelangsungan hidup dalam merespons ketidakcukupan lapangan pekerjaan modern, melainkan sebagai serbuan kekuatan pasar nyata dalam suatu ekonomi yang dikekang oleh regulasi (pengaturan) negara. Menurut Wauran (2012), keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala

kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja.

Usaha sektor informal banyak dianggap sebagai usaha tingkat rendah yang hanya membutuhkan sedikit modal dan menghadapi ketidakjelasan tingkat pendapatan. Namun demikian, sektor informal juga dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berperan sebagai pengaman ekonomi nasional karena masalah lapangan perkerjaan dan ketimpangan yang belum mendapat perlindungan dari pemerintah. Menurut Wahyu (2012), sektor informal banyak muncul di perkotaan seiring dengan penambahan penduduk. Keadaan ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian serta dukungan dari pemerintah. Pandangan masyarakat tentang sektor informal adalah solusi terhadap minimnya lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan. Berbagai jenis pekerjaan yang termasuk dalam usaha sektor informal antara lain pedagang kaki lima, penjual koran, penyemir sepatu, penjaga kios, dan lain-lain. Di antara sejumlah jenis pekerjaan, ternyata pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu pekerjaan yang penting dan nyata di sejumlah negara berkembang dan mampu memecahkan tingkat kemiskinan di perkotaan.

Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan PKL, keberadaan PKL kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti pengusuran dan relokasi. Namun berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang kembali beroperasi di jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi. Hal ini menekankan bahwa fenomena ekonomi informal, khususnya PKL di area perkotaan sulit diselesaikan secara parsial – terbatas pada kebijakan kota – tapi juga menyangkut persoalan struktural (Setia; 2008). Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.

Menurut pendapat Bromley (dikutip Mulyanto; 2007), PKL merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pandangan Bromley, pekerjaan PKL merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan. Meskipun PKL banyak menyerap tenaga kerja dan mampu membantu pengurangan

pengangguran dengan peluang berbagai jenis lapangan pekerjaan, namun disisi lain PKL tersebut sering menghadapi berbagai resiko usaha, ketidakmenentukan usaha, permasalahan keamanan, dianggap bertentangan dengan penataan kota, dan menghadapi persaingan tidak sehat dari usaha lain. Menghadapi permasalahan tersebut, PKL dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif agar mampu mengembangkan dan mempertahankan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat.

Fenomena dinamika sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, dapat dijelaskan dengan menggunakan *Konsep Keterlekatan*. Konsep keterlekatan menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan sosial, yaitu tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Tindakan tersebut tidak terbatas terhadap tindakan aktor individual sendiri tetapi juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih luas, dan kesemuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan adalah terlekat karena diekspresikan dalam interaksi antara orang yang satu dengan orang lain (Granovetter dikutip oleh Damsar; 1997). Sedangkan yang dimaksud dengan jaringan hubungan sosial adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok.

Hasil penelitian Granovetter pada tahun 1974 (dikutip Damsar; 1997), menjelaskan bahwa kuatnya suatu ikatan jaringan memudahkan seseorang untuk mengetahui ketersediaan pekerjaan. Dalam hal ini, jaringan sosial juga memainkan peranan penting dalam berimigrasi dan kewiraswastaan imigran. Jaringan tersebut merupakan ikatan antar pribadi yang mengikat para migran melalui kekerabatan, persahabatan, komunitas asal yang sama. Selain itu, kebanyakan kewiraswastaan yang terjadi pada komunitas migran dimudahkan oleh jaringan dari ikatan dalam saling tolong menolong, sirkulasi modal, bantuan dalam hubungan dengan birokrasi.

Pemahaman konsep keterlekatan ini akan membantu untuk mengkaji dan mendiskripsikan nilai-nilai yang dibangun dalam kelompok usaha sehingga mereka memiliki keunggulan kompetitif dan mereka mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya di Kota Ponorogo. Keunggulan kompetitif mempunyai makna yang berbeda dengan keunggulan komperatif. Keunggulan kompetitif lebih mengarah pada kemampuan kelompok usaha untuk menyusun dan menerapkan strategi kelompok sehingga mereka mampu bersaing dan

memperoleh keuntungan. Sedangkan keunggulan komperatif lebih mengarah pada perbedaan keunggulan yang dimiliki suatu kelompok usaha dibandingkan dengan kelompok usaha lain sehingga mereka mencapai tujuan kelompok. Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa keunggulan kompetitif bersifat kompetisi dan bersifat persaingan, sedangkan keunggulan komparatif diartikan bersifat perbandingan atau menyatakan perbandingan (Badudu dan Zain; 1994).

## Metode

Penelitian ini berlokasi di wilayah Kecamatan Kota Ponorogo karena pedagang sektor informal pendatang banyak menyebar di setiap trotoar jalan di wilayah tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pedagang sektor informal pendatang adalah kelompok pedagang Angkringan yang berhasil mengembangkan usahanya di Kota Ponorogo.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk berbagai informasi yang berbentuk deskripsi, termasuk didalamnya makna yang berada dibalik deskripsi data tersebut, sehingga penelitian ini lebih sesuai dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Adapun jenis penelitian lebih mengarah pada penelitian *Studi Kasus*, yaitu mengungkap dan mengkaji secara mendalam aktivitas usaha kelompok pedagang Angkringan di Ponorogo. Menurut Creswell (2010) studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya penelitian menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Yin (2012), studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis.

Terkait dengan informasi atau data yang dibutuhkan diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan

(Mukhtar; 2013). Sedangkan observasi atau pengamatan secara langsung adalah melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.

Teknik analisis data menggunakan Model Interaktif dari Miles dan Hubermas (Mukhtar; 2013), yaitu berlangsung atau mengalir melalui empat aktivitas, yaitu tahap pengumpulan data; reduksi data, display data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk memenuhi keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data). Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil dan metode pengumpulan data dari wawancara mendalam dengan observasi secara langsung di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

Bagi masyarakat yang sudah biasa *ngankring* atau minum kopi di warung pinggir jalan pada malam hari menjadi tidak merasa asing dengan keberadaan warung Angkringan, namun bagi masyarakat yang belum atau tidak pernah ke Angkringan akan sedikit kesulitan untuk membedakannya antara warung Angkringan dengan warung kopi lesehan, yang sampai saat ini sama-sama sudah menyebar di wilayah Kota Ponorogo.

Usaha Angkringan mempunyai ciri khas, yaitu dalam menjalankan usaha menggunakan sebuah gerobak dari kayu dan pada malam hari menggunakan lampu *teplok* untuk penerangan. Pedagang Angkringan biasanya membuka usaha mulai selepas sore (sekitar jam lima sore) sampai menjelang dini hari (sekitar jam satu sampai dengan jam dua malam). Mereka memarkir gerobaknya di trotoar jalan dan gerobak tersebut di bagian depan ditutupi dengan terpal mulai dari atap gerobak sampai ke tanah, mirip sebuah tenda. Sedangkan di dalam tenda dan di setiap sisi gerobak disediakan bangku untuk tempat tempat duduk pembeli dan disekitarnya (biasanya trotoar jalan atau halaman depan sebuah toko) disediakan tikar plastik bagi pembeli yang suka duduk santai dengan model lesehan.

Pada bagian kanan gerobak Angkringan terdapat kompor arang untuk memanaskan air dan di atasnya terdapat tiga teko besar. Tiga teko besar tersebut, sebagai ciri khas dari Angkringan, satu berisi air putih yang dididihkan, satu berisi air yang sudah diracik sebagai wedang jahe, dan satunya lagi berisi air racikan wedang teh. Pada gerobak Angkringan bagian

sebelah kiri ketiga teko besar tersebut, disediakan berbagai makanan atau jajanan, mulai bungkusan nasi, lauk gorengan seperti *ceker* (kaki ayam), tempe dan tahu bacem serta beberapa jenis sate, seperti sate usus, sate telur puyuh, dan sate jamur. Nasi bungkus yang disediakan biasanya disebut *sego kucing*, karena memang isinya relatif lebih sedikit berupa nasi dengan sambal teri atau nasi dengan racikan tempe goreng.

Pada bagian belakang gerobak Angkringan (dekat dengan pedagang) biasanya digunakan untuk tempat sendok, berbagai rokok eceran, tempat gula dan kopi. Sedangkan untuk cadangan gula dan kopi, cadangan rokok, dan bahan minum lainnya biasanya disimpan di dalam laci bagian atas gerobak, dan untuk menyimpan uang ditempatkan pada laci kecil di bawah tumpukan makanan. Gerobak Angkringan bagian belakang dari tempat duduk pedagang disediakan dua atau lebih ember berisi air yang digunakan untuk persediaan air bersih yang akan dimasak dan untuk mencuci gelas yang kotor, namun kadang kadang juga diletakkan disebelah kanan gerobak.

Dalam menjalankan dan mengembangkan usaha Angkringan di Kota Ponorogo, para pedagang Angkringan tidak dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri namun mereka membentuk kelompok usaha. Biasanya dalam satu kelompok pedagang Angkringan diketua oleh seorang ketua dan mempunyai anggota kelompok antara dua sampai dengan enam orang. Sedangkan berdasarkan kepemilikan gerobak Angkringan dan penyediaan jajanan dan makanan, kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Santoso; 2006, 2007; Santoso dan Jusuf; 2014) , yaitu: 1) Pedagang Angkringan Golongan Mandiri. Seorang pedagang Angkringan yang termasuk dalam golongan mandiri adalah jika mereka memiliki gerobak sendiri dan sekaligus membuat jajanan dan makanan sendiri, tetapi tetap bersedia menerima makanan titipan; 2) Pedagang Angkringan Golongan Semi Mandiri. Pedagang Angkringan yang termasuk dalam golongan semi mandiri adalah jika mereka memiliki gerobak sendiri tetapi makanan dan jajanan mengambil dari pedagang Angkringan golongan mandiri; dan 3) Pedagang Angkringan Golongan Non Mandiri. Pedagang Angkringan yang termasuk dalam golongan non mandiri adalah jika mereka menyewa gerobak dan mengambil makanan dan minuman dari pedagang Angkringan golongan mandiri.

Pedagang Angkringan golongan mandiri secara otomatis menjadi ketua kelompok, sedangkan pedagang Angkringan golongan semi mandiri dan non mandiri menjadi anggota

kelompok. Seorang ketua kelompok biasanya mengontrak sebuah rumah atau mempunyai rumah sendiri di Kota Ponorogo dan ditempati bersama istri dan anaknya. Di rumah tersebut, istri ketua kelompok mempunyai usaha membuat jajanan dan makanan yang akan dijual oleh suaminya (ketua kelompok) maupun yang akan dijual para anggota kelompoknya. Selain ketua kelompok bersama keluarganya, di rumah tersebut biasanya juga tinggal beberapa anggota kelompoknya yang masih belum mampu menyewa rumah atau kost sendiri.

### **Landasan Keunggulan Kompetitif**

Kepercayaan (*trust*) yang merupakan faktor penting dari kehidupan yang sangat menentukan dalam menuju keberhasilan kegiatan ekonomi. Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama.

Dalam sebuah kelompok pedagang Angkringan, nilai kepercayaan dan rasa saling percaya mulai dibangun sejak seorang ketua kelompok, yang sudah mempunyai banyak pengalaman, berupaya untuk menambah anggotanya dengan jalan memberikan informasi, baik kepada pelanggan, teman, maupun kerabat dari daerah asalnya. Informasi yang disampaikan terkait perkembangan usaha Angkringan dan sekaligus mengajak mereka untuk membuka usaha Angkringan di Kota Ponorogo.

Pada saat sebuah kelompok pedagang Angkringan telah terbentuk, ketua kelompok mempunyai wewenang untuk membuat jajanan dan makanan yang akan disajikan di Angkringan. Jajanan dan makanan tersebut selain dijual oleh ketua kelompok sendiri juga akan diambil oleh para anggota kelompoknya dan mereka berhak mengambil keuntungan dari hasil penjualan jajanan dan makanan tersebut. Jajanan dan makanan yang tidak laku dijual akan dikembalikan kepada ketua kelompok dan tidak wajib dibayar. Selain itu, jika terdapat anggota kelompok yang tidak mempunyai gerobak Angkringan dan tidak mampu untuk mengadakan sendiri, maka ketua kelompok menyewakan gerobak Angkringan kepada anggota kelompok tersebut.

Disamping nilai kepercayaan, nilai tolong menolong atau usaha saling membantu juga merupakan faktor pendukung untuk mensukseskan kegiatan ekonomi dalam suatu kelompok usaha. Nilai tolong menolong ini seringkali tidak terbatas pada bentuk *financial* atau modal usaha tetapi dapat berupa informasi penting maupun melakukan perijinan untuk membuka usaha.

Usaha kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dibangun dengan nilai tolong menolong atau saling membantu antara ketua kelompok dengan anggotanya. Informasi penting tentang peluang usaha disampaikan oleh ketua kelompok kepada anggotanya dan ditindaklanjuti dengan usaha membantu mencari ijin untuk lokasi membuka usaha anggotanya. Terkait dengan financial maupun modal usaha, ketua kelompok memberikan bantuan kepada anggota kelompok yang belum mampu membuat gerobak sendiri dan memberikan tempat tinggal bagi anggota yang belum mampu untuk mencari tempat tinggal sendiri. Disamping itu, ketua kelompok menyiapkan jajanan untuk dipasarkan oleh anggotanya dengan model pembayaran hanya yang terjual saja.

### **Pola Keunggulan Kompetitif**

Sebagai salah satu usaha sektor informal, pedagang Angkringan berusaha untuk tetap mampu bertahan dan mampu mengembangkan usaha mereka. Berlatar belakang sebagai pedagang pendatang di Kota Ponorogo, mereka banyak menghadapi persaingan usaha, khususnya dengan pedagang warung kopi yang sudah menjamur di Kota Ponorogo. Strategi usaha dan membangun jaringan usaha mutlak mereka butuhkan agar mampu bersaing dan mengembangkan usaha mereka.

Membentuk usaha secara kelompok menjadi salah satu strategi yang dikembangkan oleh para pedagang Angkringan di Kota Ponorogo. Namun demikian, usaha kelompok tidak akan mampu bertahan lama jika tidak dilandasi dengan nilai kepercayaan dan nilai tolong menolong atau saling membantu dalam kelompok tersebut. Keberhasilan usaha kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dapat dilihat dari semakin menjamurnya pedagang Angkringan tersebut dan mampu menyebar di setiap trotoar jalan di wilayah perkotaan Ponorogo. Selain ini, untuk di daerah pinggiran kota juga sudah mulai banyak dimasuki oleh pedagang Angkringan tersebut. Hampir setiap malam, usaha Angkringan di Kota Ponorogo tidak pernah sepi dari pengunjung, bahkan terdapat pelanggan tetap yang setiap malam berada di Angkringan tersebut. Keterkaitan antara nilai kepercayaan dan nilai tolong menolong yang ada dalam kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo dengan keunggulan kompetitif yang menjadikan mereka mampu mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka di Kota Ponorogo, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Pola Keunggulan Kompetitif  
 Kelompok Pedagang Angkringan di Kota Ponorogo

**Kesimpulan**

Simpulan hasil penelitian adalah: 1) Kelompok pedagang Angkringan yang ada di Kota Ponorogo, meskipun mereka adalah pedagang pendatang dari luar Ponorogo, terbukti mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya, yaitu ditunjukkan dengan semakin banyaknya usaha Angkringan yang menyebar disetiap trotoar jalan di Kota Ponorogo; 2) Kemampuan mempertahankan dan mengembangkan usaha Angkringan disebabkan adanya keunggulan kompetitif di dalam usaha kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo; 3) Keunggulan kompetitif tersebut dilandasi dengan nilai kepercayaan atau rasa saling mempercayai dan nilai tolong menolong atau saling membantu yang berkembang di dalam kelompok pedagang Angkringan di Kota Ponorogo; dan 4) Nilai kepercayaan dan nilai tolong menolong tidak terbatas pada permasalahan financial atau modal usaha, tetapi berupa informasi yang penting tentang peluang usaha, membantu tempat tinggal, dan membantu mencarikan ijin untuk menempati sebuah lokasi yang strategis untuk usaha Angkringan di Kota Ponorogo.

### Daftar Pustaka

- Badudu, Zain., 1994, "*Kamus Bahasa Indoensia*", Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Creswell, John W., 2010, "*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*", Cetakan I, Alih bahasa: Achmad Fawaid, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Damsar, 1997, "*Sosiologi Ekonomi*", Cetakan Pertama, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukhtar, 2013, "*Metode Praktis Penelitian Deskriptis Kualitatif*", Penerbit Referensi (GP Press Group), Jakarta.
- Mulyanto, 2007, "*Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata Di Kota Surakarta)*", dalam Jurnal BENEFIT, Vol. 11, No. 1, Juni 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Santoso, Slamet., 2006, "*Kemampuan Bertahan Pedagang Warung Hik di Kota Ponorogo (The Survival of Hik Vendors in Ponorogo)*", dalam Jurnal Penelitian Humaniora (Terakreditasi), Volume 7, Nomor 2, Agustus 2006, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santoso, Slamet., 2007, "*Peran Modal Sosial terhadap Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Ponorogo*", dalam Jurnal Aspirasi (Terakreditasi), Volume XVII, Nomor 1, Juli 2007, FISIP Universitas Jember.
- Santoso, Slamet dan Harsono, Jusuf., 2014, "*Pola Solidaritas Kelompok Pedagang Warung Angkringan di Kota Ponorogo*", dalam Jurnal Sosiohumaniora Volume 16 Nomor 1 Maret 2014 (ISSN 1411-0911, Terakreditasi) Penerbit LPPM Universitas Padjajaran.
- Setia M. Resmi., 2008, "*Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus tentang Pedagang kaki Lima di Kota Bandung*", dalam <http://www.akatiga.org>, diunduh pada tanggal 1 Maret 2016.
- Soeratno, 2000, "*Analisa Sektor Informal : Studi Kasus Pedagang Angkringan di Gondokusuman Yogyakarta*", Jurnal OPTIMUM, Volume 1 Nomor 1 September 2000, Yogyakarta.
- Wauran, Patrick C., 2012, "*Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado*", dalam Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD), Volume 7, Nomor 3, Edisi Oktober 2012.

Wahyu H., Aji., 2012, "*Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*", Jurnal Economics Developmen Analysis Journal 1 (2) 2012, Universitas Negeri, Semarang.

Yin, Robert K., 2012, "*Studi Kasus: Desain dan Metode*", Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

***Inquisitorial: Menelusuri Titik Terminal Keberangkatan Ilmu Pemerintahan Di Indonesia*****T. Fahrul Gafar, Zamhasari Jamil**

Universitas Abdurrab, Pekanbaru – Riau

[gaffar@univrab.ac.id](mailto:gaffar@univrab.ac.id) / [zamhasari@univrab.ac.id](mailto:zamhasari@univrab.ac.id)**Abstract**

This research is a scientific effort to trace the historical footsteps of the birth, growth, and development of Government Science in Indonesia. The disclosure of the early phenomenon of science would certainly be the gateway in giving a pure understanding of that science. so that, the result of its inquiry can serve as one of the main sources/ references that provide complete and comprehensive information for further study of Government Science. This study used a qualitative approach with descriptive type and with the library research form. In this study, the researcher observed the object of research through literature materials so that the theories underlying the problems in the field under study can be clearly revealed. With the selection of approaches, types, and forms of research, will certainly be able to reveal in depth how the historical roots of Government Science and able to emphasize the locus / position of Government Science among other state sciences.

**Keywords:** *Inquisitorial, Government Science, Indonesia***Abstrak**

Penelitian ini adalah sebuah usaha ilmiah untuk melacak serta mengikuti langkah-langkah sejarah kelahiran, pertumbuhan, dan pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Pengungkapan fenomena awal ilmu dalam memberikan pemahaman yang baik dari ilmu pengetahuan. Sehingga, hasil dari penelitian dapat berfungsi sebagai salah satu sumber utama / referensi yang menyediakan secara lengkap dan komprehensif informasi untuk studi lebih lanjut ilmu pemerintahan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis dan dengan perpustakaan deskriptif penelitian membentuk. Dalam studi ini, kata para peneliti itu diamati objek penelitian melalui bahan sehingga teori sastra yang mendasari masalah di lapangan dalam kajian dapat jelas mengungkapkan. Dengan pemilihan dari pendekatan, jenis, penelitian dan bentuk, akan dapat kedalaman bagaimana untuk mengungkapkan dalam akar sejarah ilmu pemerintahan dan mampu menekankan lokus / posisi ilmu pemerintahan antara lain ilmu admisitrasi Negara.

**Kata Kunci:** *Inkuisisi, Ilmu Pemerintahan, Indonesia*

<i>Submite</i>	: 10 September 2017
<i>Review</i>	: 25 November 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Januari 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: arifzainudin@gmail.com

## Pendahuluan

Sebuah ilmu berangkat dari pengetahuan-pengetahuan yang bergerak bebas tanpa simpul dalam fikir manusia. Kemudian timbullah keinginan manusia yang menyimpan hasrat keingintahuan (*curiosity*) yang begitu besar tersebut kedalam sebuah tertib susunan pengetahuan secara sistematis, metodis, dan koheren. Mengapa demikian? Wasistiono (2003) menjelaskan bahwa ilmu dapat diibaratkan seperti organisme hidup, yang lahir-tumbuh-berkembang dan mungkin juga pada akhirnya akan mati. Panjang atau pendeknya lingkaran hidup sebuah ilmu akan sangat tergantung pada kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsi keilmuannya.

Hal yang demikian juga terjadi pada Ilmu Pemerintahan, walau tak satupun yang menyangkal bahwa pemerintah dan pemerintahan telah dipelajari sejak kira-kira tahun 400 Sebelum Masehi (S.M). Ahli-ahli fikir seperti Plato (429-347 S.M) telah menulis tentang pemerintahan dalam bukunya yang berjudul "*Politeia*". Karya lain dari Plato yang judulnya juga diturunkan dari kata "polis" ialah "*politikos*" yang isinya membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepemimpinan polis (kota). Selain Plato ada juga muridnya yang bernama Aristoteles (384-322 S.M) yang menelurkan buah fikirnya kedalam buku yang berjudul "*Politica*". Judul ini juga mengandung arti "polis" dan membicarakan tentang ke-polis-an (Surianingrat, 1980). Istilah "polis" terus merambah merasuki zaman modern dengan bentuk yang agak berubah, misalnya *politic* (Inggris), *politicus/policia* (Latin), *polizei* (Jerman), *politie* (Belanda), dan *polisi* (Indonesia). Akan tetapi, ilmu tentang pemerintahan polis ini, oleh banyak sarjana dinamakan sebagai ilmu kenegaraan atau ilmu tentang negara, karena "polis" diterjemahkan sebagai "negara".

Di Indonesia, pemahaman tentang pemerintahan baik sebagai sebuah kajian ataupun sebuah ilmu juga memiliki beragam corak dan sudut pandang (mazhab). Dari beberapa hasil penelitian dan proposisi pemikiran dalam berbagai publikasi ilmiah yang dapat penulis sajikan dalam tulisan ini diantaranya adalah Pratikno (2003), yang berusaha memberikan klarifikasi awal tentang apa itu pemerintahan, (*governmental "science"*) "sains" pemerintah, dan studi pemerintah (*governmental studies*). Lebih lanjut ia membuka penilaian dengan menguraikan istilah pemerintahan dan politik melalui pengamatan fungsinya dari berbagai literatur terpilih. Pembahasan topik ini akan didukung oleh review mengenai alasan dibalik jurusan Ilmu Politik (jurusan ilmu politik) dan jurusan ilmu Pemerintahan (jurusan ilmu pengetahuan pemerintah),

dan pembahasannya diakhiri dengan sebuah usulan untuk memprakarsai studi pemerintah, sebagai alternatif dari “ilmu” pemerintahan. Selain itu, Lay dan Masudi (2005), berupaya menjelaskan ruang lingkup kajian politik dan pemerintahan yang berkisar pada dinamika institusi pemerintah dan lembaga pemerintah formal yang berada pada aspek negara, masyarakat dan pasar termasuk hubungan dari aspek-aspek ini, sehingga wacana pemerintahan menjadi dominan dalam ilmu politik khususnya dalam studi pemerintahan. Selanjutnya Ylst (2015) mempertanyakan apakah Ilmu Pemerintahan “eksis” atau tidak? Pertanyaan tersebut dapat terjawab secara “sangat memuaskan” melalui pencaharian terhadap fundamental Ilmu pemerintahan dari jalan “*Philosophy of Science*”, dimana syarat pokok dari keberadaan suatu ilmu pengetahuan menjadi titik awal dari pemaparannya melalui tinjauan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri (*ontologis*), bagaimanakah ruang lingkup dan objeknya (*epistemologis*), dan apakah yang menjadi tujuan utama dari ilmu pengetahuan tersebut (*aksiologis*)?. Terakhir, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, Karniawati (2015) menulis perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu hakikat, objek, dan kaji dari Ilmu Pemerintahan, dimana pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan *ontologi*, landasan *epistemologi*, dan landasan *aksiologi*.

Berdasarkan kejadian kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, sampailah kita pada pertanyaan kritis dan krusial, apakah Ilmu Pemerintahan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri (*stand-alone science*) ataukah hanya merupakan bagian integral dari ilmu-ilmu lain?. Untuk bisa mengatakan dengan tegas ya atau tidak, maka diperlukan sebuah penelitian yang mendalam tentang bagaimana sejarah kebermulaan Ilmu Pemerintahan di Indonesia dan bagaimana pula lokus/ kedudukannya diantara ilmu-ilmu kenegaraan lainnya. Dari jalan tersebut diharapkan akan melahirkan sebuah pemahaman yang luhur dan murni yang merupakan maksud dan tujuan dari penelitian ini.

## Metode dan Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang akan lebih mengarahkan kegiatan penelitian pada penggambaran secara spesifik tentang fenomena tertentu dengan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), dimana peneliti mengamati obyek

penelitian melalui bahan-bahan kepustakaan, sehingga teori-teori yang mendasari masalah pada bidang yang diteliti dapat diungkap dengan jelas. Dengan pemilihan pendekatan, jenis dan bentuk penelitian ini, tentunya akan mampu mengungkap secara mendalam bagaimana akar sejarah Ilmu Pemerintahan di Indonesia.

### **Pengertian Ilmu, Pengetahuan, dan Ilmu Pengetahuan**

Pengertian ilmu dirujuk dari kata *ilm* (Arab), *scio/scire* (Latin/Spanyol) *science* (Inggris), *wetenschap* (Belanda), dan *wissenschaft* (Jerman) (Syafiie, 2000). Namun orang-orang yang pernah mempelajari bahasa Arab mengalami sedikit kebingungan tatkala menemui kata “ilmu”. Dalam bahasa Arab kata *al-ilm* berarti pengetahuan (*knowledge*), sedangkan kata “ilmu” dalam bahasa Indonesia biasanya terjemahan dari kata *science*. Ilmu dalam arti *science* itu hanya sebagian dari *al-ilm* dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam mata kuliah Filsafat Pengetahuan (*Philosophy of Knowledge*) yang didiskusikan bukan hanya pengetahuan sains (*science*) akan tetapi juga mendiskusikan segala sesuatu yang tergolong pengetahuan termasuk pengetahuan yang “aneh-aneh” seperti pelet, santet, kebal, kanuragan, dan lain-lain. Karena itu kata *science* seharusnya diterjemahkan “sains” saja agar orang yang mengerti bahasa Arab tidak sulit membedakan kata *al-ilm* yang berarti *knowledge* (Tafsir, 2004).

Ilmu selalu diartikan sebagai pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat dinamakan sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Harre (1995) mengatakan bahwa ilmu adalah “*a collection of well-attested theories which explain the patterns regularities and irregularities among carefully studied phenomena*”, pernyataan tersebut mengandung makna bahwa ilmu merupakan kumpulan teori-teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan tentang pola-pola yang teratur atau pun tidak teratur diantara fenomena yang dipelajari secara hati-hati. Oleh karenanya, dalam kajian filsafat, ilmu dan pengetahuan dibedakan, pengetahuan bukan berarti ilmu, tetapi ilmu merupakan akumulasi dari pengetahuan sebagaimana berbedanya antara *science* dan *knowledge* dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan pengetahuan? secara sederhana yang disebut dengan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Hal tersebut selaras dengan perkataan Surianingrat (1980) yang menjelaskan bahwa pengetahuan berarti hal mengetahui sesuatu atau segala apa yang diketahui. Jadi, dalam kata pengetahuan tersimpul dua unsur:

*pertama*; yang mengetahui, dan *kedua*; yang diketahui. Sedangkan pengertian yang bulat dan utuh tentang ilmu pengetahuan ditanyakan oleh Gie (1991), bahwa ilmu pengetahuan adalah rangkaian aktifitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau individu untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan.

### **Makna Pemerintah dan Pemerintahan: Pendekatan Linguistic (Kebahasaan)**

Secara etimologis kata Pemerintah dan Pemerintahan ditarik dari kata “titah”. Dari sudut leksikal berarti amanat, amar (*al-‘amr*), sabda, dan firman yang semuanya bermakna “perintah” (Endarmoko, 2006). Kata “titah” dapat dikatakan sejajar dengan kata *gubernaculum/ gubernare* (Latin/Spanyol), *kybern* (Greek/Yunani), dan *govern* (Inggris). Sehingga dikenal menjadi *Governing/ steering* dalam bahasa Inggris dan *gubernare* dalam bahasa latin, sedangkan dalam bahasa Gerika (Greek/Yunani) adalah *kybernan*. *Gubernaculum/ gubernare* kemudian berubah menjadi *gubernantia*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, berasal dari kata *besturen* (mengemudi = Inggris: *steering*) ditambah *kunde* (kepandaian = Inggris: *craft, skill*) (Ndraha, 2003). Peleburan dua kata itulah yang membentuk *katabestuurkunde* yang kemudian berkembang menjadi *bestuurwetenschap*, dan *bestuurwetenschappen* (jamak); *weten* artinya “mengetahui”, sedang *schap* artinya “ilmu”, maka *wetenschap* berarti “ilmu pengetahuan”. Secara utuh, definisi dan makna kata *government* juga termaktub dalam *Black’s Law Dictionary* yang berbunyi: “From the Latin *gubernaculum*. Signifies the instrument, the helm, whereby the ship to which the state was compared, was guided on its course by the “gubernator” or helmsman, and in that view, the government is but an agency of the state, distinguished as it must be in accurate thought from its scheme and machinery of government” (Black’s Law Dictionary, 1979).

### **Makna Pemerintah dan Pemerintahan: Pendekatan Scientific (Keilmuan)**

Makna pemerintah dan pemerintahan terus berkembang dengan lahirnya karya-karya ilmiah yang berusaha merumuskan makna pemerintahan (*defining government and governance*) baik dari luar maupun dalam negeri hingga beberapa dekade belakangan, diantaranya :

1. Herman Finer (1949) dalam bukunya *Theory and Practice of Modern Government* mengatakan dengan jargon yang ramah ditelinga kita yaitu “*government is politics plus administration*”
2. C. F. Strong (1960) dalam buku *Modern Political Constitutional* mengatakan bahwa pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.
3. Samuel Edward Finer (1974) dalam bukunya *Comparative Government* mengatakan bahwa pertama, *the activity or the process of governing*. Kedua, *state of affairs*. Ketiga, *people charged with the duty of government*. Keempat, *the manner, method or system by which a particular society is governed*.
4. S. Pamudji (1983) dalam bukunya yang berjudul *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia* yang mengatakan bahwa Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
5. Bayu Surianingrat (1980) *Mengenal Ilmu Pemerintahan* mengatakan bahwa Pemerintahan adalah orang atau badan atau perangkat yang menyelenggarakan pemerintahan atau yang memerintah.
6. Taliziduhu Ndraha (2003) dalam karya monumentalnya *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* yang berkata bahwa pemerintahan adalah gejala sosial, yang artinya terjadi hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Berdasarkan tinjauan kepustakaan, puncak pemahaman yang hadir dibenak kita adalah, bahwa ilmu pengetahuan yang utuh dan kukuh berasal dari gejala dan fenomena yang tertangkap sebagai titik pangkal dalam kegiatan penelitian dimana pengetahuan yang berhasil ditangkap dari gejala dan fenomena tersebut kemudian diproses dalam sebuah aktifitas penelitian melalui prosedur dan tata langkah tertentu yang pada akhirnya melahirkan produk ilmu pengetahuan yang sistematis, metodis, dan koheren. Ilmu Pemerintahan telah melalui proses dalam *life cycle/* siklus hidup ilmu pengetahuan yang sesuai dengan pembabakan dan tahapan dalam prinsip-prinsip serta hukum-hukum penemuan ilmiah sebagaimana yang dipersyarat tersebut. Sebagai upaya pembuktian, tulisan ini berusaha menegaskan kembali arti dan eksistensi Ilmu

Pemerintahan dengan melacak dan merunutkan jejak kesejarahannya, diperkuat dengan berbagai pendapat dan pandangan dari para pakar atau ilmuwannya perihal lokus atau kedudukan Ilmu Pemerintahan yang tersebar dalam berbagai buku dan literatur terdahulu.

## Hasil dan Pembahasan

### Sejarah Kebermulaan Ilmu Pemerintahan di Indonesia

Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pemerintahan penjajahan Hindia Belanda di Indonesia, pada masa inilah berbagai pengetahuan pemerintahan mulai dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Penjajahan yang terjadi terhadap tanah air kita oleh bangsa Belanda dalam waktu yang begitu panjang, menjadikan banyak aspek dari sistem pemerintahan yang berlaku dinegeri Belanda (yang pada umumnya menganut sistem Perancis/Jerman) juga diterapkan di Indonesia, sehingga menyebabkan sistem tersebut memiliki pengaruh yang besar sekali dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia hingga dewasa ini. Selain itu, pergeseran juga terjadi melalui transmisi budaya ilmu pengetahuan, maka perkembangan Ilmu Pemerintahan dinegeri Belanda semenjak jaman Kameralisme (sistem/model penerapan pemerintahan di Jerman dan Prancis) hingga lahirnya *Bestuurswetenschap* dan *Bestuurswetenschappen* dalam abad ke-20 memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan di Indonesia. Setelah menjadi bangsa yang merdeka, barulah Indonesia menerima pengaruh dari sistem pemerintah Anglo-Amerika, serta menerima pengaruh dari perkembangan Ilmu *Public Administration*. Salah satu aspek dari sistem pemerintahan perancis/jerman yang diterapkan adalah upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan pusat yang kuat, yang dapat mengendalikan otoritas dari pemerintahan-pemerintahan regional dan lokal. Untuk itu diciptakan sebuah asas yang disebut dengan asas dekonsentrasi, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada suatu korps pegawai khusus yaitu *Binnenlandsch Bestuur scorps*, yang kemudian dialih-bahasakan kedalam Bahasa Indonesia menjadi “Pangrehpraja” dan semenjak Indonesia merdeka kemudian berubah menjadi “Pamongpraja”. Setelah proklamasi kemerdekaan, Korps Pamongpraja ikut serta secara aktif dalam usaha mewujudkan sistem pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Secara resmi, kesetiaan dari korps ini

dinyatakan dalam pertemuan mereka di Solo pada permulaan Tahun 1946. Namun dalam perkembangannya berikutnya, yaitu keadaan yang terjadi selama perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda dengan adanya agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II tahun 1948 dan 1949, membuat Pamongpraja RI terpaksa harus menyingkir atau mengungsi dengan cara terus bergerilya bahu-membahu bersama TNI dan rakyat. Dalam fase ini, banyak Pamongpraja Republik Indonesia yang gugur dimedan pertempuran. Dengan kondisi yang seperti itu akhirnya menyebabkan berbagai masalah. Masalah pertama; banyak jabatan Pamongpraja menjadi kosong, baik pada eselon-eselon yang tinggi maupun pada eselon-eselon yang lebih rendah yaitu adalah jabatan-jabatan pada eselon-eselon yang tinggi (yang diduduki oleh *the higher rank officials* dan *the higher-middle rank officials*), yang semula hanya dapat dijabat oleh orang-orang Belanda (dan kemudian oleh orang-orang Jepang). Jabatan-jabatan ini kemudian harus diisi oleh pejabat-pejabat yang diambilkan dari eselon yang lebih rendah yaitu dari *the lower middle rank officials*, bahkan *the lower rank officials*, dengan kualifikasi yang tentunya masih kurang mencukupi. Lowongan-lowongan jabatan yang timbul pada eselon yang lebih rendah ini kemudian harus pula diisi oleh pejabat-pejabat yang diambilkan dari eselon yang lebih rendah lagi, demikianlah seterusnya sehingga terjadi semacam promosi yang dipaksakan pada setiap jenjang eselon tanpa memperhatikan kualifikasi. Masalah kedua; adalah kelanjutan dari masalah pertamayang disebabkan oleh banyaknya lowongan-lowongan yang terjadi karena banyak pejabat yang gugur atau mengungsi, sehingga lowongan-lowongan tersebut harus segera diisi dengan tenaga-tenaga yang mempunyai kualifikasi dan pengetahuan yang seadanya demi kelanjutan perjuangan. Sehingga pada hekekatnya pamongparaja itu merupakan tenaga-tenaga darurat yang diangkat dan ditunjuk langsung oleh atasan, meskipun atasan-atasan ini secara formal juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkatnya. Dengan demikianbanyak tenaga Pamongpraja Republik Indonesia pada waktu itu yang mempunyai kualifikasi darurat. Dalam pada itu pemerintah federal diwilayah-wilayah yang didudukinya juga mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan (masih bernama Pangrehpraja), yang banyak diantaranya juga bersifat darurat. Selanjutnya, semenjak berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), pengangkatan-pengangkatan seperti itu juga masih tetap dilakukan baik oleh pemerintah RIS maupun oleh Negara-Negara Bagian (Djaenuri, 2016).

Tentunya dapat dimengerti jika Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggantikan

Negara Republik Indonesia Serikat pada awal-awal kemerdekaan menghadapi berbagai problema dalam penyelenggaraannya, seperti misalnya bagaimana menyusun suatu aparatur di lapangan pemerintahan yang tidak hanya mampu dan cakap dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tetapi juga dapat diterima khalayak ramai dan inilah problema pokok dan menonjol yang dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu. Pada tahap-tahap permulaan, faktor akseptabilitas memang merupakan syarat utama akan tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, barulah faktor kapabilitaslah yang diutamakan. Untuk memperoleh tenaga-tenaga yang kapabel (berkemampuan) dilapangan pemerintahan maka dirintis dan dikembangkan kembali pendidikan Kepamongprajaan. Pendidikan yang sudah ada sebelum tahun 1949, yaitu SMA Pamongpraja di Solo dan Sekolah Menengah Pamongpraja di Purwokerto yang masing-masing terdiri dari satu angkatan saja, sangat tidak berarti bila untuk mengisi ruang yang disebut sebagai *the lower middle rank officials*, bahkan *the lower rank officials* yang kosong dan harus diisi oleh tenaga dengan pendidikan yang sesuai. Oleh karena itu, kekurangan tenaga yang terdidik, khususnya di Kecamatan dan Kewedanan menjadi sangat besar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Soerjosoedarmo (1985), bahwa pada akhir abad 19 Pemerintah Hindia Belanda sudah pernah mendirikan lembaga pendidikan yang tugasnya mendidik calon Pamongpraja pribumi di beberapa tempat di Indonesia, yang ternyata dalam perkembangannya menarik pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan pendidikan dimaksud pada jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang OSVIA (*Opleiding School Voor Inlands Ambtenaren*), sekolah ini menerima tamatan sekolah dasar. Kemudian pada tahun 50an OSVIA ditingkatkan menjadi MOSVIA (*Middelbaar School van Inheemse Ambtenaren*) yang menerima tamatan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* yang berarti; Pendidikan Dasar Lebih Luas) atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekarang. Tamatan OSVIA yang memiliki kompeten dan berkondite baik dapat melanjutkan studinya ke *Bestuurschool* selama 2 tahun di Jakarta. Sekolah tersebut membekali pegawai untuk dipersiapkan untuk menjadi pejabat Pamongpraja pada tingkatan Patih. Lebih lanjut sekolah dimaksud ditingkatkan menjadi *Bestuur Academie* di Jakarta sebagai bagian dari *Rechtshogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) atas dasar itu corak pendidikannya lebih kebidang hukum yang tujuannya adalah untuk menyiapkan tenaga sebagai pimpinan Pangrehpraja.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai-pegawai pamongpraja tingkat menengah (*the*

*middle rank officials*) pada tanggal 15 Maret tahun 1948, Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Akademi Ilmu Politik (AIP) di Yogyakarta, yang tujuannya untuk mendidik pegawai atau calon pegawai di departemen-departemen khususnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Penerangan yang saat itu sangat diperlukan dalam kerangka melancarkan pelaksanaan tugas-tugas Departementasi dan penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Dalam perkembangannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1949 AIP dibubarkan dan diintegrasikan kedalam Universitas Gajah Mada di Yogyakarta karena Akademi Ilmu Politik dimasukan sebagai bagian dari ilmu sosial dan politik, demikian juga dengan ilmu hukum sehingga menjadi Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (FHSP) secara resmi pada tanggal 1 September 1952. FHSP kemudiandisusul atau ditambahkan dengan bidang ekonomi dan kemudian dibentuk secara bersama-sama menjadi Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik (disingkat FHESP). Bagian Sosial dan Politik fakultas HESP dalam penyelenggaraannya, tenaga pengajarnya banyak didominasi oleh pengajar yang berlatar belakang hukum dalam berbagai mata kuliahnya (Soerjosoedarmo, 1985). Kemudian dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 5379/Kab. Tanggal 15 September 1955, bagian Sosial dan Politik dipisahkan dari fakultas HESP menjadi fakultas tersendiri yaitu Fakultas Sosial dan Politik (FSP). Pada tahun 1957, FSP disusun menjadi 5 (lima) jurusan, antara lain; Jurusan Ilmu Usaha Negara (kemudian menjadi Ilmu Administrasi Negara); Jurusan Ilmu Sosiologi; Jurusan Hubungan Internasional; Jurusan Publisistik; Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (Sosiatri), namun Jurusan (Ilmu) Pemerintahan justru ditiadakan. Hal ini kemudian memberikan kesan bahwa seakan-akan Ilmu Administrasi Negara sangat identik dengan Ilmu Pemerintahan atau dengan kata lain studi mengenai ilmu pemerintahan menjadi terabaikan. Berdasarkan hal tersebut Soerjosoedarmo (1985) menyimpulkan bahwa :

1. Semula pemerintahan Hindia Belanda mendirikan pendidikan-pendidikan dari berbagai tingkat untuk menyiapkan pegawai-pegawai pemerintahan. Mata kuliah yang diberikan sangat diwarnai oleh hukum ditambah dengan pengetahuan praktik. Akan tetapi mata kuliah Ilmu Pemerintahan sendiri belum dikenal pada waktu itu.
2. Setelah Indonesia merdeka dan mendirikan AIP, jurusan Ilmu Pemerintahan kemudian dilanjutkan kembali setelah diintegrasikan dengan Universitas Gajah Mada. Patut untuk

dicatat bahwasanya : (a) Ilmu Pemerintahan mulai diberikan; (b) Mata kuliah tersebut merupakan kurikulum jurusan pemerintahan, terutama mata kuliah dari ilmu hukum; (c) Setelah datang bantuan dari *International Cooperation Administration/ICA-AID* dari Amerika Serikat beserta para ahli dan pakar-pakar Administrasi Publiknya, mata kuliah Administrasi Publik (*Publik Administration*) mulai mewarnai jurusan pemerintahan sehingga dipandang perlu diadakan jurusan ilmu Administrasi Negara, disamping menghidupkan kembali jurusan Ilmu Pemerintahan yang pada saat itu masih bernama jurusan Ilmu Usaha Negara; (d) Setelah dikirim beberapa tenaga pengajar ke Inggris dan Amerika Serikat untuk program doktor dan master, maka pengaruh Ilmu Politik pada kurikulum jurusan Ilmu Pemerintahan mulai meningkat.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu merundingkan dengan pimpinan Universitas Gajah Mada dan pimpinan Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada (FSP-UGM), yang intinya mempelajari kemungkinan apakah Fakultas Sosial Politik yang bersifat umumitu dapat menyusun suatu kurikulum khusus untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Dalam Negeri yaitu menghasilkan Sarjana Muda “*plus*” dan Sarjana “*plus*” dibidang pemerintahan (dalam arti Ilmu) dan Kepamongprajaan (dalam arti seni atau *Art*). Istilah “*plus*” berarti bahwa lulusan-lulusan itu disamping memperoleh bekal ilmu pengetahuan yang cukup mendalam juga menguasai keterampilan-keterampilan teknis sehingga mereka juga merupakan orang-orang yang sewaktu-waktu siap untuk melaksanakan tugas-tugas di Kementerian Dalam Negeri dan instansi-intansi atau kantor-kantor di daerah-daerah. Hasil akhir dari pembahasan itu adalah bahwa pendapat dari pihak Universitas Gajah Mada dalam menanggapi maksud dari Kementerian Dalam Negeri itu hanya dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya apabila kurikulumnya secara akademis beorientasi kepada perkembangan ilmu pengetahuan didunia kampus atau universitas pada umumnya, sedangkan yang bersifat praktis dan berorientasi kepada pelaksanaan serta perkembangan tugas-tugasdi Kementerian Dalam Negeri,diperlukan sebuah Lembaga Pendidikan khusus dan tersendiri. Sebagai pelaksana, maka Sekretaris Jenderal Kementerian Negeri bersama orang-orang lain yang dipandang berpengalamandalam bidang kepomongprajaan menyusun kurikulum pada Lembaga Pendidikan khusus dan tersendiri yang bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Mengenai segi keilmiahn, kurikulum APDN tetap berorientasi kepada Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada, setelah

kurikulum tersebut matang, APDN kemudian diresmikan pembukaannya pada tahun 1956 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno di Malang Provinsi Jawa Timur (Djaenuri, 2016).

APDN mengawali sistem pendidikan secara terpimpin pada tingkat Universitas di Indonesia dan yang pertama kali pula menerapkan sistem semester. Dibandingkan dengan kurikulum dari Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada, maka kurikulum APDN kelihatan jauh lebih padat mengingat sisipan-sisipan dari mata kuliah praktis seperti diuraikan diatas. Namun kurikulum dengan sajian matakuliah yang padat itu dapat diselenggarakan dengan baik berkat pemanfaatan waktu dalam rangka studi terpimpin. Kuliah-kuliah di APDN berlangsung selama 6 semester (3 tahun), dimana lulusannya diberi gelar *Bachelor of Art (BA)*. Isinya adalah sarjana muda “*plus*” seperti yang dicita-citakan, merupakan kualifikasi yang dipandang mencukupi untuk jabatan-jabatan kepamongprajaan yang termasuk *the lower middle rank positions*. Apabila mereka ditugaskan untuk memimpin wilayah maka mereka dipandang mampu untuk menjadi administrator pemerintahan ditingkat kecamatan dengan kata lain mampu untuk menjabat sebagai camat. Untuk menduduki jabatan-jabatan yang diklasifikasikan sebagai *the higher-middle rank positions*, apalagi untuk dapat menduduki jabatan yang diklasifikasikan sebagai *the higher rank position*, maka tamatan APDN itu harus dapat menuntaskan wawasan ilmiahnya tanpa mengabaikan ciri tentang penguasaan bidang-bidang pekerjaan yang lebih bersifat teknis yang memang dimaksudkan sejak semula. Setelah didirikannya APDN kemudian didirikan pula studi lanjutannya, semacam tingkat Doktorandus (Drs) yang perkuliahannya memakan waktu sekitar dua tahun. Lembaga sambungan/ lanjutata dari APDN ini mulanya direncanakan akan berdiri pada tahun 1959. Rencana ini agak mengalami hambatan dalam realisasinya disebabkan kondisi politik yang belum stabil. Namun setelah lahirnya Pemerintah Orde Baru rencana tersebut dapat diwujudkan dengan lahirnya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) pada tanggal 25 Mei 1967 yang pembentukannya dilandaskan pada Keputusan Presiden RI No. 119 Tahun 1967, juncto (jo) Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.8 tahun 1967 (Djaenuri, 2016).

Sementara itu pada berbagai perguruan tinggi/ universitas negeri maupun swasta mulai mengembangkanebuah program kurikulum yang mengarah pada studi Ilmu Pemerintahan baik sebagai sebuah jurusan dari suatu fakultas ataupun sebagai sebuah bagian dari suatu Fakultas.

Sebagai contoh adalah Fakultas Tata praja Makassar (yang kemudian menjadi salah satu unsur penting dari Universitas Hasanuddin Makassar, dimana pada tahun 1957 Mr.Tjia Kok Tjiang telahberusaha mengembangkan Ilmu Pemerintahan dengan kuliah umum yang berjudul: “Arti dan Bidang Ilmu Pemerintahan”.Dengan didirikannya jurusan Ilmu Pemerintahan sejak tahun 1990an diberbagai universitas negeri di provinsi-provinsi, maka Ilmu Pemerintahan telah menjadi salah satu program studi dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang kita kenal hari ini. Diantaranya universitas-universitas tersebut adalah Universitas Hasanuddin Makassar (dulu Ujung Pandang), Padjadjaran di Bandung, Diponogoro di Semarang, Sam Ratulangi di Manado, Universitas Riau di Pekanbaru, Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Mulawarman di Samarinda dan lain-lain. (Alfian dan Mukmin (ed), 1985).

Perkembangan terakhir perjalanan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mandiri, ditempuh melalui jalur akademik maupun jalur profesional. Jalur akademik dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga ilmuwan pada jenjang S1, S2, atau S3 dari berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi. Sedangkan jalur profesional dipersiapkan untuk melahirkan tenaga-tenaga yang terampil sebagai kader-kader pemerintahan yang berasal institusi kedinasan/ akademi yang berasal dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang sejak tahun 2004 dilebur dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)sehingga sekarang bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan berada dibawah naungan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan demikian, fungsi akademik Ilmu Pemerintahansecara pelan tapi pasti akan mampu mengejar ketertinggalannya dari pesatnya pengembangan keilmuan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Berdasarkan rangkaian kesejarahan, Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu pengetahuan mulai diajarkan setelah Indonesia merdeka. Perguruan-perguruan tinggi yang membuka jurusan Ilmu Pemerintahan pada awal mulanya antara lain Universitas Gajah Mada, baru kemudian disusul oleh universitasbesar lainnya seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hassanudin dan lain-lain, kemudianberkembang pesat diseluruh Indonesia beragam hingga hari ini.

**Tabel 1 Perjalanan Sejarah Ilmu Pemerintahan di Indonesia**

NO	PERIODE	INSTITUSI/ LEMBAGA	TAHUN
1	Pra-Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– OSVIA (<i>Opleiding School Voor Inlands Ambtenaren</i>)</li> <li>– MOSVIA (<i>Middelbaar School van Inheemse Ambtenaren</i>)</li> </ul>	1920
2	Awal Kemerdekaan	– Akademi Ilmu Politik (AIP)	1948
		– Fakultas Hukum, Sosial dan Politik (FHSP) + Ekonomi (FHESP)	1952
		– Fakultas Sosial & Politik (FSP) UGM	1955
		– Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)	1956
		– Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)	1967
3	Masa Kini	– Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN)	1988
		– Mulai tumbuh dan berkembang pesat diberbagai Perguruan Tinggi (Universitas/ Sekolah Tinggi) di seluruh Indonesia	Sejak 1990an - Kini
		– Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	Sejak 2004 - Kini

Sumber : Berdasarkan data hasil olahan dari berbagai sumber

Berdasarkan urutan kesejarahan sebagaimana yang dirunut diatas, tentunya juga terdapat perubahan dan pergeseran paradigmatik yang terjadi pada Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan fase-fase sejarah yang telah dilaluinya, dapat disederhanakan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2 Perjalanan Paradigmatik Ilmu Pemerintahan di Indonesia**

NO	PARADIGMA	CORAK/NUANSA
1	I 1920-1940an	Ilmu Pemerintahan berwatak normatif, hukum positif, dan diajarkan sebagai ilmunya pangreh praja kemudian menjadi pamong praja pada zaman Kolonial Belanda
2	II 1948-1955	Adalah ilmu yang akrab dengan ilmu politik yang terwujud dalam Akademi Ilmu Politik (AIP) dan setelah itu tergabung dalam Fakultas Hukum, Sosial, Politik + Ekonomi (FHSP→HESP→FSP) Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta.
3	III 1956-1980an	Ilmu Pemerintahan yang diajarkan pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibuka pada tahun 1956 dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), lebih dekat dengan ilmu Administrasi Negara (dikombinasikan dengan pola pemerintahan Indonesia) daripada ilmu politik.
4	IV 1988-1993	Pada Masa Mendagri Rudini, tetap dengan corak dan nuansa yang sama dengan paradigma sebelumnya, namun karena pembentukan calon tenaga atau kader pemerintahan yang dipusatkan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor melalui sistem Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) 24 jam model militeristik (doktrin-doktrin militer), sehingga memiliki cita rasa tersendiri.
5	V 1993-1996	Prinsip-prinsip Manajemen dalam pemerintahan terlihat jelas melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya di berbagai universitas yakni asas dan sistem pemerintahan; hukum tata pemerintahan; ekologi pemerintahan; filsafat dan etika pemerintahan; praktik penyelenggaraan pemerintahan; kepemimpinan pemerintahan; reformasi pembangunan daerah.
6	VI 1996, 2000, 2013 - Sekarang	Ilmu Pemerintahan dikembangkan melalui program kerjasama Universitas Padjajaran/UNPAD-IIP, yang menyelenggarakan Program Magister Ilmu-ilmu Sosial dengan Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan (1996), dan Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan (2000). Kemudian IPDN menyelenggarakan Program Ilmu Pemerintahan hingga pada derajat akademik tertinggi (S3) atau Doktor Ilmu Pemerintahan (2013). Pada fase ini, Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang berangkat dari manusia kembali kepada manusia.

Sumber : Berdasarkan data hasil olahan dari berbagai sumber

## Lokus/ Kedudukan Ilmu Pemerintahan Diantara Ilmu-Ilmu Kenegaraan Lainnya

Ilmu Pemerintahan sejak awal perkembangannya telah dikemukakan oleh Van Poelje pada tahun 1926 dan kemudian menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Algemene Inleiding tot de Bestuurkunde* pada tahun 1942 dan (cetakan pertama) dan cetakan kedua terbit pada tahun 1953. Buku tersebut kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Drs. B. Mang Reng Say (1978) dengan judul *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan* dimana Van Poelje mengemukakan bahwa “*de bestuurkunde leert, hoe men de openbaare dienst in richt en leidt*” yang artinya Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum (*openbaare dienst*) disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Hoogerwerf (1983) dalam bukunya *Over Heids Beleidyang* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh R.L.L Tobing yang berjudul *Ilmu Pemerintahan* mengemukakan pendapat bahwa ruang lingkup pemerintahan adalah mempelajari bentuk-bentuk pemerintahan dengan berbagai kebijakan yang dibuatnya. Meskipun demikian, perjalanannya eksistensinya tidaklah berjalan mulus. Ada yang memandang Ilmu Pemerintahan itu bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan tetapi hanya merupakan studi/kajian terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya ada yang memandang Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri, yang mempunyai obyek telaah sendiri dan yang dapat dibedakan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, yang dalam perkembangan akhir-akhir ini justru meluas dalam menyoroti obyek telaahnya, yaitu tidak hanya menyoroti hubungan antara pemerintah dan diperintah dalam lingkup Negara, akan tetapi setiap gejala pemerintahan yang menggambarkan adanya hubungan antara yang “memerintah” dengan yang “diperintah” yang berada diluar lingkup Negara pun menjadi obyek studi Ilmu Pemerintahan.

Ada juga yang memandang Ilmu Pemerintahan itu merupakan cabang dari Ilmu Politik atau bagian dari Ilmu Politik. Hal ini dapat dipahami juga mengingat obyek studi Ilmu Pemerintahan itu telah lama menjadi bagian dari obyek studi Ilmu Politik, hal ini nampak jelas apabila dipahami dari sisi lingkup batasan dari konsep politik itu sendiri. Sejarah dalam ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan perkembangan lebih lanjut dari Ilmu Politik dan merupakan bagian dari ilmu sosial/ kemasyarakatan, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari filsafat, khususnya filsafat politik (Mustansyir dkk, 2002). Di sisi yang lain, sarjana Administrasi Publik memandang Ilmu Pemerintahan itu sebenarnya adalah ilmu Administrasi Publik. Dalam perkembangannya muncul berbagai pendapat yang berbeda

satu sama lain sebagai berikut: (1) Ilmu pemerintahan sama dengan Ilmu Administrasi Negara; (2) Ilmu Politik itu sebenarnya adalah Ilmu Pemerintahan; (3) Ilmu Pemerintahan berbeda dengan Ilmu Administrasi Negara, masing-masing berdiri sendiri; (4) Pemerintahan sekedar seni saja; (5) Ilmu Pemerintahan bagian dari Ilmu Politik; (5) Ilmu Administrasi Negara bagian dari Ilmu Pemerintahan (Yossi Adiwisatra dalam Labolo dkk,2008).

Namun demikian, ada sebagian teoritis, praktisi, dan pemerhati pemerintahan yang tertarik terhadap kedudukan Ilmu Pemerintahan, dan pada akhirnya tiba pada satu kesimpulan bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan satu ilmu pengetahuan yang otonom. Ilmu pengetahuan adalah satu nama jenis untuk sejumlah bagian yang berdiri sendiri tentang apa yang dikenal oleh manusia. Setiap ilmu pengetahuan meliputi satu bidang yang luas yang dikaitkan satu sama lain dalam hubungan sistematis tertentu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dapat dipelajari dan dilukiskan serta disampaikan kepada orang lain. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa Ilmu Pemerintahan mampu memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan, sehingga Ilmu Pemerintahan dapat disebut ilmu pengetahuan. Ilmu Pemerintahan terdiri atas sekelompok pengetahuan yang sejenis berkaitan satu sama lain dan tersusun secara rapi, teratur dan sistematis (Bayu Suryaningrat dalam Labolo dkk, 2008).

Ilmu Pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan jika jelas dan tegas landasan ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Ontologi bertanya tentang apa yang ingin diketahui, diamati, diteliti, dipelajari dan dibahas oleh ilmu atau apa yang menjadi bidang telaah dari Ilmu Pemerintahan. Walaupun belum begitu tegas tetapi perbedaannya dapat dipahami jika dibandingkan dengan obyek telaah dari ilmu-ilmu pengetahuan kenegaraan lainnya. Landasan ontologi ilmu merupakan jawaban atas pertanyaan utama yaitu apa yang ingin diketahui ilmu atau apa telaah ilmu. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu mengkaji masalah-masalah yang telah diketahui atau yang ingin diketahui yang tidak terselesaikan dalam pengetahuan sehari-hari. Masalah-masalah tersebut terbatas pada obyek yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan dapat diuji oleh pengalaman manusia (Jujun Suriasumantri dalam Mustanyir dkk, 2002). Jika dikaji dari aspek epistemologi, dimana epistemologi pada hakekatnya membahas secara mendalam berkenaan dengan metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran ilmiah, maka Ilmu Pemerintahan dalam proses mencari kebenaran ilmiah juga menggunakan metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh ilmu

sosial lainnya. Metode-metode yang dibangun berdasarkan pada metode penelitian sosial dan metode penelitian dalam wilayah pemerintahan, yang pada akhirnya diperoleh metodologi Ilmu Pemerintahan. Dari sisi metodologi inilah kekhasan Ilmu Pemerintahan dapat dilihat dan dikembangkan baik dalam kerangka pengembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan dan juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pemerintahan yang terjadi dalam waktu tertentu dan lingkungan tertentu. Pada akhirnya, pertanyaan berikutnya yang perlu diajukan untuk menyoroti Ilmu Pemerintahan dari perspektif filsafat ilmu adalah aspek aksiologis atau apa manfaat Ilmu Pemerintahan terhadap kehidupan manusia pada umumnya dan pemecahan masalah-masalah pemerintahan pada khususnya. Landasan aksiologi ilmu berkaitan dengan masalah arah yang dituju oleh ilmu tersebut. Ilmu dikembangkan manusia pada mulanya sebagai teori yaitu bertujuan untuk mendalami pengertian diri manusia dan alam sekitarnya, sehingga manusia dapat sampai pada inti dirinya. Ilmu dimaksudkan agar manusia mampu menjadi manusia yang sungguh-sungguh menyadari diri dan kedudukannya yang unik dalam jagat raya ini. Kemudian tujuan ilmu mengarah kearah praktis menyangkut masalah keperluan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan keinginan untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan (Melsen dalam Mustansyir dkk, 2002).

Untuk memperluas pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri dengan obyek telaahannya, Yosef Riwo Kaho berpendapat bahwa Ilmu Pemerintahan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang teratur (pendapat ini didasarkan pada kesimpulan bahwa yang disebut dengan ilmu adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai pengetahuan yang teratur; mempunyai obyek sasaran tertentu yang dibahasnya; adanya pusat perhatian tertentu sebagai sudut pandangan dalam membahas obyeknya; menggunakan metode-metode ilmiah tertentu dalam usahanya untuk mencapai kebenaran yang obyektif). Ilmu Pemerintahan juga memiliki obyek/sasaran yang dibahas atau dipelajarinya, yaitu pemerintahan. Pemerintahan disini dipandang sebagai segala usaha atau kegiatan yang terorganisir, bersumber pada kedaulatan, dan berlandaskan pada dasar negara mengenai rakyat/penduduk, serta wilayah Negara demi tercapainya tujuan Negara atau secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem dari berbagai fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan Negara. Suatu tugas atau fungsi hanya dapat dilaksanakan jika disertai kewenangan dan kekuasaan. Oleh karena itu, seringkali pemerintahan juga dapat dikatakan

sebagai kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara menurut A.M Donner terbagi menjadi dua jenis : *taak en doelstelling* (penentuan tugas dan tujuan) dan *uitvoering* (eksekusi atau pelaksanaan terhadap tugas dan tujuan yang telah ditetapkan) (Yosef Riwu Kaho dalam Labolo dkk, 2008). Hal senada juga dikemukakan oleh Herman Finner, bahwa pemerintahan itu meliputi : (1) *The process of politics, and* (2) *The process of administration*. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa obyek studi Ilmu Pemerintahan itu meliputi proses perumusan kebijakan pemerintah (dalam area politis) dan proses pelaksanaan kebijakan (dalam area administrative/teknis), sehingga Herman Finner dalam bukunya *Theory and Practice of Modern Government* mengatakan dengan sebuah jargon yang ramah ditelinga kita yaitu “*government is politics plus administration* (Finner, 1949).

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Mustansyir, dkk (2002) yang antara lain dijelaskan bahwa penelaahan ilmiah tentang pemerintahan dalam proses spesialisasi menjadi sub-spesialisasi Ilmu Politik atau dengan kata lain tinjauan Ilmu Pemerintahan tidak dapat lepas dari Ilmu Politik maupun ilmu masyarakat. Sementara itu pada proses kesadaran akan penyatuan ilmu, penelaahan ilmiah tentang pemerintahan masuk dalam studi atau ranah ilmu yang didalamnya mencakup aspek politik maupun sosial disamping aspek-aspek yang lain. Di dalam studi pemerintahan, pemerintahan sebagai obyek material tidak hanya ditinjau dari aspek politik yang merupakan akar dari Ilmu Pemerintahan (dalam proses spesialisasi) tetapi ditinjau juga dari aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan spesialisasi ilmu-ilmu yang lain. Tinjauan dari segi politik maupun aspek yang lain (misalnya sosial, hukum, filosofi) bukan sebagai tinjauan yang mengatasi persoalan pemerintahan tetapi semua tinjauan tersebut berada dibawah payung paradigma Ilmu Pemerintahan. Berdasarkan pendapat ini dapat dikemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan itu dalam perkembangannya menjadi ilmu yang mandiri banyak dipengaruhi oleh Ilmu Politik dan ilmu sosial lainnya, dan atas dasar itu obyek studi maupun metodenya tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan ilmu-ilmu tersebut.

Sebagai pembanding dapat juga dikemukakan pendapat Sadu Wasistiono, bahwa obyek studi Ilmu Pemerintahan adalah hubungan antara Negara dengan rakyatnya dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik. Lebih jauh ia berpendapat bahwa obyek Ilmu Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua: (1) Obyek materia Ilmu Pemerintahan adalah Negara; (2) Obyek forma Ilmu Pemerintahan adalah hubungan antara Negara dengan rakyatnya dalam konteks

kewenangan dan pelayanan publik (Wasistiono dan Simangunsong, 2009). Sedangkan Ndraha dalam bukunya berpendapat bahwa obyek materia Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Paradigma Baru) adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya, tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Sedangkan obyek formanya didefinisikan sebagai bangunan pengetahuan (*Body of Knowledge*) yang merupakan hasil rekontruksi pemahaman terhadap pendaratan *bestuurkunde*, *bestuurwetenschap*, dan *bestuurwetenschappen* di bumi Indonesia pada sudut pandang kemanusiaan, guna mengimbangi sudut pandang kekuasaan, dan pengaitannya dengan sudut pandang lain yang berbeda (Ndraha, 2003).

Selain itu, Syafiie (2011) juga menjelaskan posisi dan kedudukan Ilmu Pemerintahan diantara ilmu-ilmu kenegaraan lainnya yang berkuat pada pusaran yang dekat dan hampir sama, namun tetap saja *focus of interest* nya dapat dibedakan, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3 Objek Materia dan Objek Forma Ilmu-Ilmu Kenegaraan**

NO	NAMA DISPLIN ILMU PENGETAHUAN	OBJEK MATERIA	OBJEK FORMA
1	Ilmu Negara	Negara	Konstitusi, pertumbuhan- kembangan negara, lahir dan tenggelammnya negara.
2	Ilmu Pemerintahan	Negara	Hubungan pemerintahan, gejala- gejala pemerintahan, peristiwapemerintahan.
3	Ilmu Politik	Negara	Kekuasaan, partai politik, kelompok penekan, kepentingan masyarakat.
4	Ilmu Ilmu Hukum Tata Negara	Negara	Hukum, peraturan perundang- undangan, konstitusi dan konvesi.
5	Ilmu Administrasi Negara	Negara	Pelayanan, organisasi pemeintahan dan manajemen pemerintahan

Sumber : Syafiie (2011)

Bertolak dari beberapa pengertian dan pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa obyek materia dari Ilmu Pemerintahan adalah Negara (pemerintah sebagai salah satu unsur dari Negara), sedangkan obyek formanya adalah kegiatan-kegiatan pemerintahan dan hubungan-hubungan pemerintahan (ada yang bersifat politis dan ada yang bersifat teknis). Berdasarkan pemahaman tersebut tampak bahwa Ilmu Pemerintahan termasuk dalam rumpun ilmu-ilmu pengetahuan yang menjadikan Negara sebagai obyek materianya bersama-sama dengan ilmu-

ilmu kenegaraan lainnya seperti Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara/Publik, Ilmu hukum, dan Ilmu Negara itu sendiri. Dengan demikian, Ilmu Pemerintahan tetap bisa dibedakan dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya terutama dengan Ilmu Politik. Ilmu Politik terfokus pada kajian fenomena kekuasaan, sedangkan Ilmu Pemerintahan memusatkan perhatian pada fenomena kekuasaan dalam berbagai ranah publik (kewenangan/ kekuasaan legal). Pengkajian kekuasaan dalam ranah publik inilah yang membedakan kajian Ilmu Pemerintahan dengan kajian Ilmu Politik yang pada umumnya mendalami fenomena kekuasaan dalam ranah *private* kekuasaan murni. Dari pemahaman posisional itu, maka objek forma atau sasaran utama dari Ilmu Pemerintahan adalah pemerintahan Indonesia dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Namun, proses menuju kematangan, masih terdapat beberapa masalah terkait nomenklatur atau penamaan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, Ilmu Pemerintahan di Indonesia yang telah ditubuhkan dalam sebuah wadah berskala nasional dengan nama Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), kemudian berupaya memberikan masukan kepada Pemerintah tentang nomenklatur atau penamaan Program Studi Ilmu Pemerintahan, dimana dalam *draft* awal yang dirancang oleh Kemenristek Dikti menyebutkan bahwa Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai studi Kepemerintahan dengan gelar kesarjanaan Sarjana Sosial (S.Sos). Keadaan ini menjadi agenda penting yang dibahas dalam Simposium Ilmu Pemerintahan yang digagas oleh Universitas Padjadjaran Bandung pada 23-24 November 2014. Berdasarkan usulan dan tuntutan dari Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan se-Indonesia, sebagai tindak lanjutnya, pengurus KAPSIPI menyampaikan surat Kepada Kemenristek Dikti untuk menyampaikan masukan nama program studi dan gelar kesarjanaannya yaitu :

1. Nama Program Studi : Ilmu Pemerintahan (Government Science)
2. Gelar Kesarjanaan;
  - a. Strata satu (S1) : Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.)
  - b. Strata dua (S2) : Magister Ilmu Pemerintahan (M.I.P)
  - c. Strata tiga (S3) : Doktor Ilmu Pemerintahan (Dr)

Dari usulan tersebut, Menteri kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi yang sudah mengakomodir dan mengakui keberadaan Ilmu

Pemerintah di Indonesia bersamaan dengan ilmu-ilmu lainnya. Peraturan atau Kepmenristek Dikti Nomor 257/M/KPT/2017 yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4 Nomenklatur / Penamaan Program Studi Ilmu-ilmu Kenegaraan Pada Perguruan Tinggi di Indonesia**

No	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS	PROGRAM			Gelar
			S	M	Dr	
1	Ilmu Hukum	<i>Law</i>	√	√	√	H.
2	Ilmu atau Sains Politik	<i>Political Science</i>	√	√	√	Sos.
3	Ilmu Administrasi Negara/ Publik	<i>Public Administration</i>	√	√	√	A.P.
4	Studi (Ilmu) Pemerintahan	<i>Government Studies</i>	√	√	√	I.P.

Sumber : diolah dari Salinan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 5 Tahun 2017

Walaupun Peraturan Menteri tersebut sebagian besar telah mengakomodir usulan dan masukan KAPSIPI, namun sebagai catatan penting yang juga harus diperhatikan, bahwa peraturan tersebut masih terlihat bias dan mengandung sedikit kerancuan atau ketidakseragaman antara nama Program Studi dengan Gelar yang diterima. Sebagai contoh, Ilmu Politik yang bahkan telah diakui sebagai Ilmu atau sains di dunia internasional (*Political Sains*) justru mengalami langkah mundur dan mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) yang sebelumnya bergelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, “Ilmu Pemerintahan” dimulai dengan kata “Studi” terlebih dahulu, kemudian disusul dengan kata “Ilmu” yang berada dalam tanda kurung. Hal ini tentunya membuat para pegiat Ilmu Pemerintahan menjadi bertanya-tanya, apakah kata “studi” itu disamakan dengan kata “ilmu”? kalau hal itu terjadi hanya karena kesalahan redaksional saja masih dapat dimaklumi. Akan tetapi apabila ditetapkan atau dikatakan lagi bahwa kata “studi” itu sama/ sederajat atau disamakan/ disederajatkan dengan kata “ilmu” maka hal ini juga merupakan langkah mundur dan akan berimplikasi negatif bahkan dapat mengancam eksistensi dan harga diri Ilmu Pemerintahan di kemudian hari. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa ada perbedaan definisi

tentang ilmu dan pengetahuan (kajian/studi), didukung dengan teori-teori yang berasal dari berbagaipandangan dan pendapat para ahli. Bila itu yang terjadi, tentunya hal tersebut sangat disayangkan dan harus ada upaya hukum lanjutan agar Ilmu Pemerintahan secara tegas menjadi “baku” atau diakui dan diatur secara legal/formal oleh pemerintah dan bukan hanya sekedar disebut, dipakai, dan dikenal sebagai “ilmu” dalam pengertian ilmu pengetahuan yang telah berdiri sendiri dan memiliki *Body of Knowledge* (BOK), dan telah “duduk” secara mapan baik dari segi *ontologis*, *epistemologis*, *aksiologis* oleh para ilmunya.

Berdasarkan uraian dan pemaparan, serta argumentasi dari banyak pakar dan ahli, disertai dengan berbagai teori dan bukti-bukti hingga hari ini, nampaknya selain upaya secara formal, upaya secara moral juga harus dilakukan dengan cara lebih menggiatkan aktifitas penelitian dan publikasi ilmiah dalam arena Ilmu Pemerintahan, hingga semakin mampu menimbulkan dampak “pembeda” yang tegas dan jelas dengan bidang atau ilmu-ilmu kenegaraan lainnya dalam rangka menjaga eksistensi dan harga diri sebuah ilmu pengetahuan.

## Kesimpulan

Dari rangkaian penelitian melalui penyelidikan (*inquisitorial*) terhadap sumber dan bahan-bahan kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Ilmu Pemerintahan telah mengarungi lintasan perjalanan sejarah yang sangat panjang dan penuh tantangan yang dimulai sejak zaman pra-kemerdekaan (kolonial Belanda) dan telah melalui proses dalam siklus hidup sebuah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan pembabakan dan tahapan dalam prinsip-prinsip serta hukum-hukum penemuan ilmiah. Kendatipun lokus (kedudukan) Ilmu Pemerintahan telah diungkap dan dijelaskan melalui berbagai teori, pendapat, dan pandangan para ahli, namun masih terlihat adanya *symptom* atau gejala yang harus diwaspadai oleh segenap pejabat dan pelaku Ilmu Pemerintahan, mengingat bidang cakupannya yang memang sangat luas, membuat semua pihak yang bertanggung jawab pada ilmu ini harus berupaya untuk merapatkan barisan dan menyamakan pendapat pada hal-hal yang masih belum disepakati sehingga Ilmu Pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar dan dinamis dimasa yang akan datang.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, maka penguatan *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi* Ilmu Pemerintahan harus terus mendapatkan porsi yang cukup agar jati diri Ilmu Pemerintahan yang sesungguhnya tetap berdiri kokoh, sembari melakukan kajian dengan cakupan

wilayah interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner, mengingat ciri dari sebuah ilmu pengetahuan bersifat dinamis, yang bermakna harus ada sebuah upaya dan ikhtiar yang berkesinambungan dari para pelopor/ pakar, pendukung, dan pengguna dari ilmu pengetahuan yang dimaksud agar eksistensi dan harga diri ilmu tersebut tetap terjaga sehingga kebermanfaatannya terhadap peradaban umat manusia kian dirasakan.

### Daftar Pustaka

- Alfian dan Hidayat Mukmin (ed). (1985). *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya Dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Black's Law Dictionary, Fifth Edition, (1979). Henry Campbell Black. St. Paul Minn-Minnesota, USA: St. Paul Minn West Publishing Co.
- Djaenuri, Aries. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Diktat Matakuliah Dasar-Dasar Pemerintahan. Jakarta.
- Endarmoko, Eko. (2006). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Finer, Herman (1949). *Theory and Practice of Modern Government*. New York: Henry Holt and Company.
- Finer, Samuel Edward. (1974). *Comparative Government*. Harmondsworth-Middlesex, England: Penguin Books, Ltd.
- Gie, The Liang. (1991). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Jogjakarta: Liberty.
- Harre, R. (1995). *The Philosophies of Science, an Introductory Survey*. London, UK: The Oxford University Press.
- Hoogerwerf, A (red.). (1983). *Ilmu Pemerintahan*. R.L.L. Tobing, pent. Jakarta: Erlangga.
- Karniawati, Nia. (2015). *Hakekat Ilmu Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan (Cosmogov), Vol.1, No.2, Oktober 2015, 205-215.
- Labolo, Muhadam dkk (ed). (2008). *Beberapa Pandangan Dasar tentang Ilmu Pemerintahan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mustansyir, Rizal dkk (Laporan Penelitian). (2002). *Kedudukan Ilmu Pemerintahan Diantara Disiplin Ilmu Lain : Pendekatan Filasafat Ilmu, Program Penelitian Kerjasama Fakultas Filasafat Universitas Gajah Mada dan Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri*. IIP: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernologi-Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamudji, S. (1983). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pratikno, (2003). *Melacak Ruang Lingkup Kajian Pemerintahan Dalam ilmu Politik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.1, No.1, September 2003, 15-22.

- Lay, Cornelis dan Wawan Masudi. (2005). *Perkembangan Kajian Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.9, No.2, November 2005, 225-240.
- Poelje, G.A. Van. (1953). *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. B. Mang Reng Say, pent. Jakarta: Yayasan Karya Dharma, IIP.
- Soerjosoedarmo, R. Soemendar. (1985). *Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan*- Makalah Disampaikan pada Seminar IPP, Jakarta.
- Strong, C.F. (1975). *Modern Political Constitution an Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form*. London: Sidwick & Jackson Ltd.
- Surianingrat, Bayu. (1980). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2000). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, Inu Kencana. (2011). *Pengantar ilmu politik - Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Tafsir, Ahmad. (2004). *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Wasistiono, Sadu. (2003). *Ilmu Pemerintahan Masa Kini* - Makalah pada Seminar Nasional Ketiga Ilmu Pemerintahan, Intitut Ilmu Pemerintahan, 22 Mei 2003, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Sadu dan Fernandes Simangunsong. (2009). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ylst, Fransiscus Van. (2015). *Eksistensi Ilmu Pemerintahan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan (Cosmogov), Vol.1, No.1, April 2015, 1-11.

**UCAPAN TRIMAKASIH KEPADA PEER – REVIEW PADA TERBITAN  
JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA)  
VOLUME 6 NO 01 JANUARI 2018**

**Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si (IPDN Jatinangor Indonesia)**

**Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)**

**DR. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol Admin, (Universitas Diponegoro Semarang)**

**Dr. Habib Ahmad, S.Sos, M.A (Universitas Muhammadiyah Malang)**

**Drs. Jusuf Harsono, M.Si (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)**

**Andri Putra Kesmawan, S.IP, MIP (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)**

**Dr. Adde Oriza Rio, M.IKom (Universitas Kristen Indonesia)**

**Mochammad Tanzil Multazam, S.H, M.H (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)**

**Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si (Universitas Hasanudin Makassar)**

**Cahyo Seftyono, S.Sos, M.A (Universitas Negeri Semarang)**

**Ari Ganjar Hardiansah, S.IP, M.Pol (Universitas Padjajaran Bandung )**

**Nurudin AB, S.Sos, M.Si (Universitas Muhammadiyah Malang)**

**Rachmat Kriyantono, Ph.D (Universitas Brawijaya Malang)**

**Alamsyah, S.AP, M.AP (Universitas Sriwijaya Palembang)**

**Decky Kuncoro, M.IP (AMIKOM Yogyakarta)**



**AUTHOR GUIDELINES / GAYA SLINGKUNG  
JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA)**

**Masterplan reserves cultural policy development in the Ponorogo district  
Masterplan kebijakan pengembangan cagar budaya di kabupaten Ponorogo**

*(Article Title: Indonesian or English Lenguange, Times New Roman 14 pt, bold, centered / Huruf Besar, Bahasa Indonesia ataupun Inggris, Times New Roman 14 pt, di hitamkan)*

*(The title of the article should be brief and informative and it should not exceed 20 words / Judul artikel harus singkat dan informatif dan tidak melebihi 20 kata).*

Yusuf Adam Hilman, Imam Prasojo, dan Jimly Assidiqi.

*(Author Name / Nama Penulis: First Author, Second Author, and Third Author: Times New Roman 12 pt)*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

*(Affiliations: Times New Roman 12 pt)*

[adamhilman@umpo.ac.id](mailto:adamhilman@umpo.ac.id), [imam@ui.ac.id](mailto:imam@ui.ac.id) & [jimly@mk.ac.id](mailto:jimly@mk.ac.id)

*(Email Author: Times New Roman 12 pt)*

**Abstract & Abstraksi**

*(Article Title: English and Indonesian Lenguange, 200 Times New Roman 11 pt, Single Space Lines, Justify)  
(Keyword / Kata Kunci : 3 – 5 Kata,*

**Keyword**

*Regency of ponorogo having natural resources, as well as the potential typical culture, and a society that can be develop into the tourism. The potential can be then developed, that can bring up the optimal and into factors that supports the construction of tourism in district Ponorogo. In carrying out development of tourism in Ponorogo, there are several constraint or factors barrier, including: 1. Access Of Transportation Facilities And Infrastructure Who Are Still Minimal And Not Optimal. 2). To access the road facilities and cross is still far from expectation, disturbing visitors to access tourism in the Ponorogo.*

**Keyword: The Community Development, Development Of Tourism, The Potential Of The Region.**

**Kata Kunci**

*Kabupaten ponorogo memiliki sumber daya alam, serta potensi budaya yang khas, dan masyarakat yang dapat berkembang menjadi pariwisata. Potensi tersebut dapat kemudian berkembang, yang dapat memunculkan faktor optimal dan menjadi yang mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Ponorogo, ada beberapa kendala atau faktor penghalang, termasuk: 1. Akses atas fasilitas Transportasi Dan Infrastruktur Siapa*



*Masih Minimal Dan Tidak Optimal. 2). Untuk mengakses fasilitas jalan dan lintas masih jauh dari harapan, mengganggu pengunjung untuk mengakses pariwisata di Ponorogo.*

***Kata Kunci: Pengembangan Komunitas, Pengembangan Pariwisata, Potensi Kawasan.***

<i>Submite</i>	: 14 Nov 2016
<i>Review</i>	: 14 Nov 2016
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: <a href="mailto:adamhilman@umpo.ac.id">adamhilman@umpo.ac.id</a>

The organization of the manuscript includes **Introduction, Methods, Results and Discussion, Conclusions and References.**

Organisasi naskah meliputi **Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Referensi.**

**Pendahuluan / Introductions**

**Metode / Methode**

**Hasil dan Pembahasan / Result and Discussion**

**Kesimpulan / Conclusion**

( 12 pt, di hitamkan / 12 pt, bold)

The first letter of headings and subheadings are capitalized and headings are numbered in Arabic numerals. The manuscript is written with Times New Roman font size 10, single-spaced, left and right alligned, on one-sided pages and on A4 paper (210 mm x 297 mm) with the upper margin of 3.5 cm, lower 2.5 cm, left and right each 2 cm. The manuscript including the graphic contents and tables should be no longer than 15 pages, including pictures and tables. The use of subheadings is discouraged. Between paragraphs, the distance is one space.

Huruf pertama dari judul dan subjudul dikapitalisasi dan judul diberi nomor dengan angka Arab, Naskah ditulis dengan ukuran font Times New Roman 12, spasi tunggal, kiri dan kanan alligned, pada satu sisi halaman dan di atas kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin atas 3,5 cm, bawah 2,5 cm, kiri dan kanan masing-masing 2 cm. Naskah termasuk isi grafik dan tabel harus tidak lebih dari 15 halaman, termasuk gambar dan tabel. Penggunaan subpos tidak disarankan. Antara paragraf, jarak adalah satu ruang.



## **Abbreviations/Terms/Notations/Symbols.**

The use of abbreviations is permitted, but the abbreviation must be written in full and complete when it is mentioned for the first time and it should be written between parentheses. Terms/foreign words or regional words should be written in italics. Notations should be brief and clear and written according to the standardized writing style. Symbols/signs should be clear and distinguishable, such as the use of number 1 and letter l (also number 0 and letter O).

Singkatan / Istilah / Notasi / Simbol. Penggunaan singkatan diperbolehkan, tapi singkatan harus ditulis lengkap dan lengkap ketika disebutkan untuk pertama kalinya dan itu harus ditulis dalam tanda kurung. Syarat / kata-kata asing atau kata-kata daerah harus ditulis dalam huruf miring. Notasi harus singkat dan jelas dan tertulis sesuai dengan gaya penulisan standar. Simbol / tanda-tanda harus jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan nomor 1 dan huruf l ( juga angka 0 dan huruf O )

### **Tables** (12 pt, bold)

(one blank single space line, 10 pt)

**Tables** are written with Times New Roman font size 10 and single spaced below the title of the table. The title of the table is written with font size 10 (boldface) above the table as prescribed in the format given below as example. The table is numbered in Arabic numerals. There is one single space line between the table and the paragraph. The table is placed immediately after it is referred to in the text. The frame of the table uses 1 font-size line. If the title in each table column is long and complex, the columns are numbered and the notes are given below the table. (one blank single space line, 10 point font)

### **Tabel** (12 pt, bold)

(Kosong satu spasi, 10 pt)

Tabel ditulis dengan ukuran font Times New Roman 10 dan tunggal spasi di bawah judul tabel. Judul tabel ditulis dengan ukuran font 10 ( huruf tebal) di atas meja seperti yang ditentukan dalam format yang diberikan di bawah ini sebagai contoh. tabel diberi nomor dengan angka Arab. Ada satu spasi tunggal antara meja dan paragraf. meja ditempatkan segera setelah disebut dalam teks. Bingkai meja menggunakan 1 font-size line. Jika judul di setiap kolom tabel panjang dan rumit, kolom diberi nomor dan catatan yang diberikan di bawah meja. (Kosong satu spasi, 10 pt)



**Table 1. Number of Testing of WFF Triple NA=15 or NA=8 (9 pt, bold) (one blank single space line, 6 pt)**

Tabel 1. Jumlah Pengujian WFF Tiga NA = 15 atau NA = 8 (9 pt, bold) (Kosong satu spasi, 6 pt)

NC	NP			
	3	4	8	10
3	1200	2000	2500	3000
5	2000	2200	2700	3400
8	2500	2700	16000	22000
10	3000	3400	22000	28000

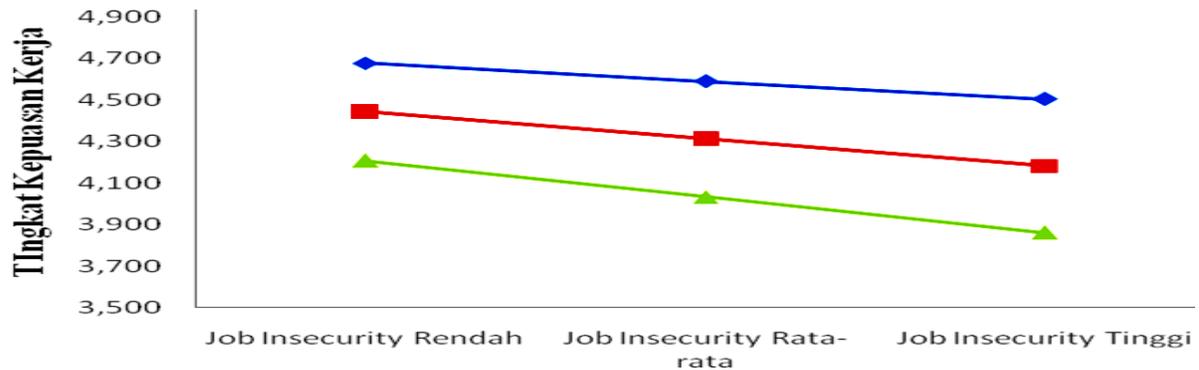
*(two blank single space lines, 10 point font)*  
(Dua kosong satu ruang baris, huruf 10 point)

**Graphic Contents (12 pt, bold)**  
*(one blank single space line, 10 pt)*

**Graphic contents** are placed symmetrically on the page and there is one blank single space line between the graphic content and the paragraphs. A graphic content is placed immediately after it is referred to in the body of the text and is numbered in Arabic numerals. Caption for the graphic content is written below it and there is one blank single space line between it and the graphic content. The caption is written in font size 9, boldface, and placed as in the example. Between the graphic content with the body of the text there are two blank single space lines.

Isi grafis (12 pt, bold)  
(Kosong satu spasi, 10 pt)

Isi grafis ditempatkan secara simetris pada halaman dan ada satu kosong spasi tunggal antara konten grafis dan paragraf. Sebuah konten grafis ditempatkan segera setelah disebut dalam tubuh teks dan nomor dalam angka Arab. Caption untuk konten grafis yang tertulis di bawah itu dan ada satu kosong spasi tunggal dan konten grafis. caption yang ditulis dalam ukuran font 9, tebal, dan ditempatkan seperti pada contoh. Antara konten grafis dengan tubuh teks ada dua spasi tunggal.



*(one single space, 6 point font)*  
*(Satu spasi tunggal, 6 titik font)*

**Figure 1. The Interaction of Job Insecurity and Employability against Work Satisfactory on Outsourced Employees (9 pt, bold) (two single space, 10 pt)**

For any graphic contents which have been published by another author, the corresponding author must obtain a written permission from that other author and his/her publisher. Include one graphic content which is printed in good quality in a full-size page or scanned graphic content in good resolution in the format as follows {name of file}.jpeg, or {name of file}.tiff. If the graphic content is in the form of photograph, include one original photograph. The photograph is printed in black and white unless the photograph will appear in color. The author will be charged an additional fee for color printing of more than 1 page. The font face to be used in the graphic content or graph should be the one generally available in each word processor and operational system such as Symbol, Times New Roman and Arial with the font size not less than 9 point.

Gambar 1. Interaksi Job Insecurity dan Employability melawan Kerja Memuaskan dari outsourcing Karyawan (9 pt, bold) (dua spasi tunggal, 10 pt)

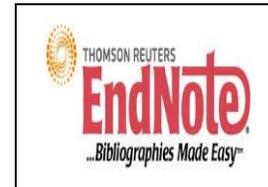
Untuk setiap isi grafis yang telah diterbitkan oleh penulis lain, penulis yang sesuai harus mendapatkan izin tertulis dari yang penulis lain dan / nya penerbitnya. Sertakan satu gambar yang dicetak dengan kualitas yang baik dalam satu halaman penuh atau hasil scan konten grafis resolusi baik dalam format sebagai berikut {nama file} .jpeg, atau {nama file} .tiff. Jika gambar dalam bentuk foto, termasuk satu foto asli. foto itu dicetak dalam warna hitam dan putih kecuali foto itu akan muncul dalam warna. Penulis akan dikenakan biaya tambahan untuk cetak warna lebih dari 1 halaman. Font face yang akan digunakan dalam konten grafis atau grafik harus menjadi salah satu umumnya tersedia di setiap pengolah kata dan sistem operasional seperti Symbol, Times New Roman dan Arial dengan ukuran font tidak kurang dari 9 titik.



### Daftar Pustaka / The reference

The reference writing must be in accordance with APA (American Psychological Association) format. The references should use the primary sources (journals or books). Can use the mendeley, Endnote, and Zotero application.

Penulisan referensi harus sesuai dengan APA (American Psychological Association) format. Referensi harus menggunakan sumber - sumber primer (jurnal atau buku). Dapat menggunakan aplikasi mendeley, Endnote, dan Zotero.



### Examples:

#### Books:

Creswell, J.W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

#### Book chapter:

Markus, H.R., Kitayama, S., & Heiman, R.J. (1996). Culture and basic psychological principles. Dalam E.T. Higgins & A.W. Kruglanski (Eds.), *Social psychology: Handbook of basic principles*. New York: The Guilford Press.

#### Online document:

Van Wagner, K. (2006). Guide to APA format. *About Psychology*. Accessed on November 16, 2006 from <http://psychology.about.com/od/apastyle/guide>.

#### Journal Article:

Wassman, J., & Dasen, P.R. (1998). Balinese spatial orientation. *Journal of Royal Anthropological Institute*, 4, 689-731.

#### Online journal:

Jenet, B.L. (2006). A meta-analysis on online social behavior. *Journal of Internet Psychology*, 4. Accessed on November 16, 2006 from <http://www.Journalofinternetpsychology.com/archives/volume4/3924.html>.



Article from a Database:

Henriques, J.B., & Davidson, R.J. (1991) Left frontal hypoactivation in depression. *Journal of Abnormal Psychology, 100*, 535-545. Diambil 16 November 2006 dari PsychINFO database.

Online Forums, Discussion Lists, or Newsgroups:

Leptkin, J.L. (2006, November 16). Study tips for psychology students [Msg. 11]. Message were rely on <http://groups.psychhelp.com/forums/messages/48382.html>.

Research Report:

Villegas, M., & Tinsley, J. (2003). *Does education play a role in body image dissatisfaction?* Laporan Penelitian, Buena Vista University. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2006). *Survei nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga di Indonesia, 2005*. Depok: Pusat Penelitian UI dan Badan Narkotika Nasional.



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

E-ISSN



9 772527 844009

P-ISSN



9 772338 516003